



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021



Serengkuh Dayung Serentak Ke Tujuan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 15
	1.5 Maksud dan Tujuan	I - 16
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II - 1
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 9
	2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 46
	2.4 Aspek Daya Saing	II-139
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III - 41
	3.3 Kerangka Pendanaan	III - 45
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
	4.1 Permasalahan Pembangunan	IV - 1
	4.2 Isu Strategis	IV - 6



BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
	5.1 Visi Daerah	V - 1
	5.2 Misi Daerah	V - 2
	5.3 Tujuan dan Sasaran	V - 2
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI - 1
	6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI- 2
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
	7.1 Program Prioritas Pembangunan	VII - 1
	7.2 Program Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan	VII - 4
	7.3 Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD	VII - 14
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII - 1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX - 1
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	
	10.1 Pedoman Transisi	X - 2
	10.2 Kaidah Pelaksanaan	X - 2
BAB XI	PENUTUP	11 - 1



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2775);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang -undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk selama periode 20 tahun (2005 – 2025).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk selama periode 5 tahun (2016-2021).
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
12. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
13. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- 1) Program Pembangunan Daerah Periode 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD
- 2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RPJMD
Pasal 3

- 1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI KAIDAH DAN PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

- 2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Berfungsi Sebagai pedoman bagi :

- a. SKPD dalam Menyusun Renstra SKPD;
- b. pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD;
- c. SKPD dalam menyusun Renja SKPD; dan
- d. masyarakat yang ikut serta dalam kebijakan Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SKPD dapat melaksanakan Program dan Kegiatan yang belum tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 dengan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan kepala daerah atau dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan yang diberlakukan setelah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 ini ditetapkan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- 2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 16 Agustus 2016

Bupati Tanjung Jabung Barat,

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN NOMOR...
2016



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 dan dilantik oleh Gubernur Jambi pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.15 – 703 Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.15 – 704 Tahun 2016, Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan lima (5) tahun yang ketiga dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Disamping itu, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 juga merupakan dokumen perencanaan strategis dalam mengimplementasikan visi dan misi daerah seperti yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 khususnya untuk periodisasi tahun ketiga dari 20 tahunan RPJPD tersebut. Materi strategi, kebijakan dan program yang termuat dalam RPJMD ini sangat bermakna untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Materi yang termuat dalam RPJMD harus berkualitas agar diperoleh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan ideal dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah Pancasila serta Landasan Konstitusional UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi perundang-undangan/peraturan yang berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yaitu :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 24. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
 25. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033.
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD merupakan satu kesatuan dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya dalam menjalankan agenda



pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan rencanapembangunan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Selain menjabarkan, dan memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025. dengan visi *Tanjung Jabung Barat Maju, Berdaya Saing, Adil Dan Sejahtera* yang kemudian dijabarkan dalam misi yang berkaitan yaitu :

Misi I, Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berahlak mulia, dengan mengedepankan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, meningkatnya kualitas kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang berbasis iptek dan kearifan lokal

Misi II, Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas, melalui pembangunan transportasi jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, pengairan, listrik, telpon, infrastruktur sosial dan infra struktur ekonomi yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu



Misi 3, Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang berbasis pada agroindustri dan SDA, dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis

Misi 4, Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan menjunjung tinggi supremasi hukum, melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan mebudayakan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dan dengan menjamin keamanan dan ketentraman

Misi 5, Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi;



pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

RPJMD harus memperhatikan dan mempertimbangkan arahan, pola, dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai dasar guna menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 - 2033.

3. RPJMD dan Rencana Strategis SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEMDAL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah

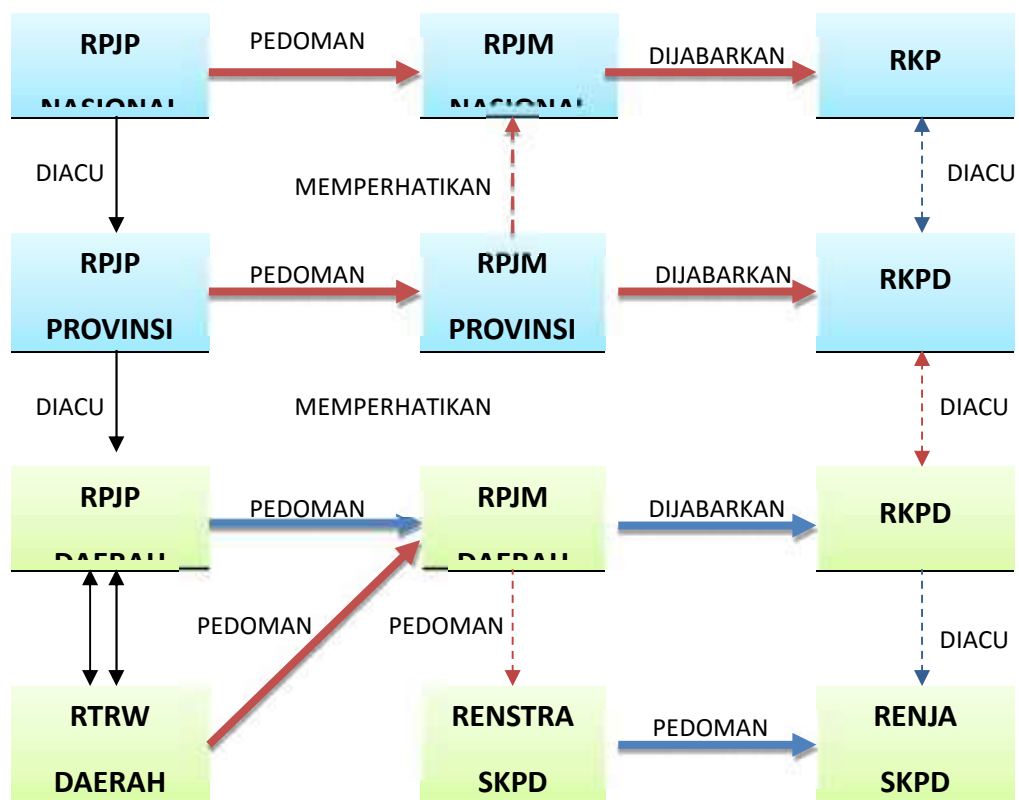


Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan program prioritas dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya akan terlihat dengan rinci bila dituangkan kedalam skematis. Adapun skematis yang dimaksud dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran





5. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJM Nasional

Harmonisasi *Misi* pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 terhadap agenda pokok pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dari sembilan agenda pembangunan nasional keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 khususnya pada delapan agenda pembangunan nasional, yaitu :

(Agenda 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan

(Agenda 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

(Agenda 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

(Agenda 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar,



program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019

(Agenda 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

(Agenda 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

(Agenda 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

(Agenda 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Namun demikian dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka dari delapan keterkaitan agenda pembangunan nasional tersebut di harmonisasikan sesuai dengan tingkat kewenangan daerah.

6. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi Jambi serta RPJMD Daerah Lainnya.

Yang perlu dicermati dalam keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi serta Daerah lainnya antara lain adalah dalam misi pembangunan dengan harapan



agar arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung.

a. *RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Provinsi Jambi*

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap RPJMD Provinsi Jambi terlihat khususnya pada misi Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

b. *RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.*

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kabupaten berbatasan terdekat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat



dalam hal Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi terlihat khususnya pada misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis
 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, Kesetaraan Gender, dan penerapan IPTEK.
 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi di bidang Industri dan Kepariwisataaan.
 5. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif.
- c. *RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan RPJMD Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.*

Kabupaten Batang Hari adalah salah satu Kabupaten yang garis batas wilayah administratifnya berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan apabila di lihat dari uraian misi pembangunan Kabupaten Batanghari tahun 2016 – 2021, maka misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 dapat diselaraskan secara harmonis dengan misi Kabupaten Batanghari sebagai berikut :



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia masyarakat dan aparatur pemerintah.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara paroporsional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeadilan.
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, keagamaan, kebudayaan, adat dan kesenian daerah dalam kerangka memperkuat kebudayaan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN



- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah secara terarah, dan terintegrasi guna mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025, dan memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan acuan dalam penentuan program daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara bertingkat.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 –



2021 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2016 – 2021.

2. Menyiapkan acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
4. Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah tersebut.
6. Menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk terwujudnya kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Kondisi Geografis Daerah

2.1.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak diantara $0^{\circ}53'$ - $01^{\circ}41'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ Bujur Timur di bagian Timur Provinsi Jambi, dengan total luas $5.375,16 \text{ km}^2$ (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033). Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut China Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala, kemudian berturut - turut sebelah Selatan dan Barat masing – masing berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi, Tebo dan Batanghari.

Secara umum untuk satu wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata dibagi dalam 10-11 desa/kelurahan dengan pembagian wilayah terbanyak yaitu di Kecamatan Pengabuan. Hal ini perlu dipahami karena salah satu tujuan untuk menentukan sebaran desa dan kelurahan diupayakan untuk meningkatkan akses pelayanan pada



masyarakat, sehingga secara ideal jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat.

Tabel T.II.C.1. Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan	
				Km ²	(%)
1.	Tungkal Ilir	8	2	222,09	4,13
2.	Seberang Kota	1	7	243,07	4,52
3.	Bram Itam	1	9	312,66	5,82
4.	Tungal Ulu	1	9	345,69	6,43
5.	Tebing Tinggi	1	9	342,89	6,38
6.	Batang Asam	1	10	1.042,37	19,39
7.	Merlung	1	9	311,65	5,80
8.	Renah Mendaluh	1	9	473,72	8,81
9.	Muara Papalik	1	9	336,38	6,26
10	Betara	1	11	570,21	10,61
11	Kuala Betara	1	9	307,67	5,72
12	Pengabuan	1	12	440,13	8,19
13	Senyerang	1	9	426,63	7,94
JUMLAH		20	114	5.375,16	100,00

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 500 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Provinsi Riau, untuk dataran rendah yang berkisar pada ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, maka struktur tanahnya sebagian besar merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang/surutnya air laut.



Tabel T.II.C.2. Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dibedakan Menurut Klasifikasi Ketinggian Tahun 2014

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 25)	213.424	42,8	Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Seberang Kota, Betara dan Kuala Betara.
Dataran sedang (25 – 500)	273.090	54,8	Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Sebagian Batang Asam, Tebing Tinggi, Sebagian Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik.
Dataran Tinggi (>500)	11.910	2,4	Sebagian Batang Asam, Sebagian Renah Mendaluh
Jumlah	500.982	100	

Sumber : RTRW Tanjung Jabung Barat

Kondisi geografi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada dataran rendah yang terpengaruh langsung oleh pasang surutnya air laut sebagian besar terdiri dari lapisan tanah gambut dan lumpur pada permukaan tanahnya sehingga hal ini berpengaruh pada kedalaman air tanah (kedalaman lebih dari 100 meter) dengan kondisi air tanah yang mengandung mineral dan warna yang relatif tinggi sehingga memerlukan biaya produksi yang relatif tinggi untuk diolah menjadi air minum yang memenuhi syarat kesehatan sedangkan pada dataran sedang dan tinggi adalah perbukitan dengan unsur penyusun utama terdiri dari tanah liat sehingga kualitas air tanahnya relatif lebih baik dibandingkan dengan dataran rendah.



Berdasarkan topografi daerah tersebut dapat diketahui bahwa secara umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat berpotensi rawan bencana kekeringan yang dapat memicu peningkatan kasus penyakit potensial wabah seperti diare, kholera, disentri, demam berdarah, dan penyakit potensial wabah lain khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih/minum.

Bencana lain yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kebakaran hutan/lahan maupun pemukiman sedangkan pada Daerah Aliran Sungai terjadi kerawanan bencana banjir karena pendangkalan badan sungai.

2.1.1.2. Klimatologi

Keadaan iklim di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di wilayah Provinsi Jambi pada umumnya. Berdasarkan klasifikasi menurut *Schmidt dan Ferguson*, iklim di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Type Afa, yaitu type iklim hujan tropis. Suhu udara rata-rata sebesar 29,9° C, suhu udara maksimum mencapai 32° C dan suhu udara minimum 21° C. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 2.324 - 2.373 mm per tahun.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk daerah belokan angin atau daerah perputaran arah awan basah sehingga peluang untuk hujan lebih tinggi baik dalam hal frekuensi maupun intensitasnya, dari informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa air hujan adalah salah satu alternatif penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat (khususnya wilayah kecamatan klasifikasi dataran rendah dan sedang) sehingga perlu adanya beberapa usaha nyata untuk menjaga kualitas air hujan agar tidak menurun kualitasnya oleh adanya pencemaran udara.



2.1.1.3. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih didominasi oleh daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau 51,62% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari luas daerah terbangun tersebut masih didominasi oleh lahan tegalan/Ladang dengan total seluas 10,36%, kemudian diikuti lahan sawah (7,45 %), lahan kebun kelapa sawit (7,21 %) dan lahan bangunan dengan luas 7,17%. Sedangkan sisa penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah lahan kawasan hutan dengan total luas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T.II.C.3. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Lahan Existing Tahun 2014

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)	(%)
Kawasan Hutan			
1	Hutan Produksi	179.635	33,4
2	Hutan Produksi Terbatas	35.585	6,62
3	Hutan Lindung Gambut	15.050	2,80
4	Hutan Cagar Alam	126,09	0,03
5	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	11.520	2,14
6	Konservasi Kerang Darah	365,30	0,07
	Jumlah	245.663	49,04
Daerah Terbangun			
1	Permukiman	2.952	0,59
2	Bangunan	65.904	7,17
3	Sawah	47.382	7,45
4	Tegalan/Ladang	51.918	10,36
5	Kebun Campuran	3.269	0,65
6	Semak Belukar	14.567	2,91
7	Kebun Kelapa Sawit	36.100	7,21
8	Kebun Kelapa Dalam	34.009	6,79
9	Kebun Karet	22.755	4,54



10	Kebun Kopi	4.500	0,90
11	Kebun Pinang	8.325	1,66
12	Sungai/Rawa	6.989	1,40
Jumlah		258.830	51,62
Total Luas Penggunaan Lahan : 500.982,00			

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tanjab Barat Tahun 2012

2.1.1.4. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut Ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah : Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.
2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.



3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi dua, yaitu :

- a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
- b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabuan.

Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

2.1.2. Kondisi Demografis

Dalam hal ini akan dibahas tentang penambahan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya untuk merencanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil pembangunan di berbagai bidang dengan jumlah penduduk berdasarkan proyeksi 2014 asumsi tidak terjadi pergerakan penduduk secara signifikan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 bertambah sebanyak 8.114 jiwa dengan seks ratio yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan. Secara umum dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 62 jiwa per km² atau dengan kata lain apabila tidak dikurangi dengan peruntukan lainnya dan dibagi secara merata, maka pada tahun 2014 setiap jiwa berpotensi memiliki lahan seluas 16.129 meter persegi atau 1 - 2 ha/jiwa dan apabila dihitung secara bebas maka setiap kepala keluarga berpotensi memiliki 8 – 10 Ha lahan.



**Tabel T.II.C.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 dan 2014**

No	Kecamatan	2014				
		Laki-Laki	Perempuan	Penduduk	Sex Ratio	jiwa/km ²
1.	Tungkal Ulu	6,912	6,611	13,522	104,6	39
2.	Merlung	8,868	8,075	16,943	109,8	54
3.	Batang Asam	14,198	12,862	27,060	110,4	26
4.	Tebing Tinggi	20,918	18,376	39,294	113,8	115
5.	R.Mendaluh	7,777	7,073	14,850	110,0	31
6.	Ma. Papalik	6,445	5,558	12,002	116,0	36
7.	Pengabuan	12,573	11,919	24,492	105,5	56
8.	Senyerang	12,177	11,249	23,426	108,3	55
9.	Tungkal Ilir	37,494	36,722	74,215	102,1	740
10	Bram Itam	9,167	8,627	17,794	106,3	57
11	Sbg Kota	4,596	4,294	8,891	107,0	73
12	Betara	12,503	11,534	24,038	108,4	42
13	Ka Betara	6,787	6,269	13,056	108,3	70
<i>Jumlah</i>		160,400	149,183	309,583	107	62

Sumber : BPS Tanjung Jabung Barat 2014. (Data Diolah)

Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan jika dikonversikan sebagaimana dasar peruntukan lahan seperti di atas, maka setiap jiwa memiliki \pm 1.400 meter persegi atau setiap kepala keluarga dapat memiliki lahan seluas 5.000 hingga 7.000 meter persegi (tanpa memperhatikan peruntukan lainnya), dan ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Batang Asam dimana setiap Kepala Keluarga masih berkesempatan untuk memiliki lahan \pm 16 hingga 20 hektare.



2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Untuk mengetahui proses kenaikan pendapatan per kapita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka panjang, dan sekaligus untuk mengetahui perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini ternyata juga memberikan dampak pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat, sehingga diperlukan suatu kebijakan dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata, adil dan inklusif (*equitable, just and inclusive growth*), sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

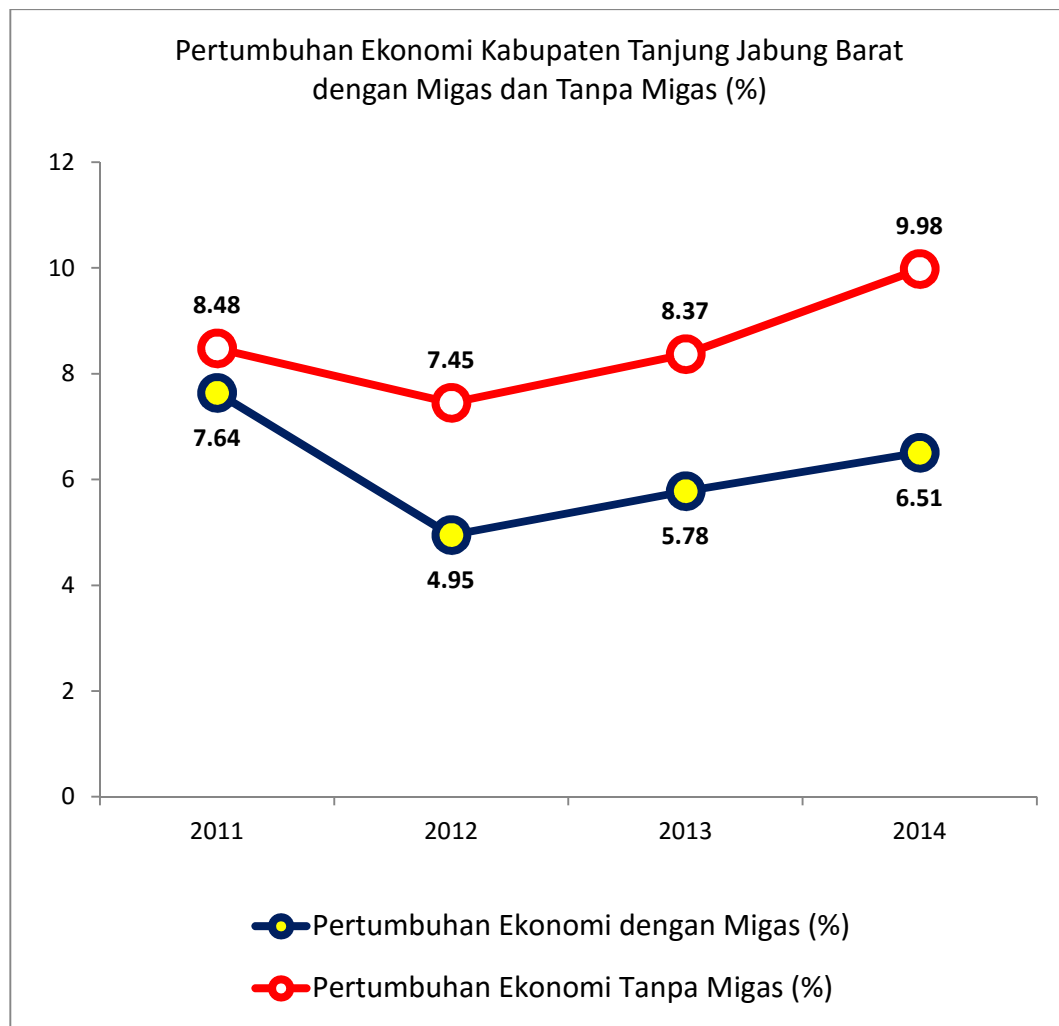
Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi dengan migas pada periode waktu tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 6,22 % per tahun. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi (7,45 % per tahun). Dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke 10, hanya di atas Kabupaten Tanjung Jabung Timur (5,13 % per tahun).

Pada periode tahun 2010-2014, pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dengan kisaran antara 4,95 – 7,64 %. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi dengan migas sebesar 7,64 % turun menjadi 4,95 % pada tahun 2012, namun



pada tahun 2013-2014 kembali naik masing-masing sebesar 5,78 % dan 6,51 %.

Grafik T.II.C.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Migas dan Tanpa Migas (%)



Untuk tanpa migas, pada periode yang sama Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi juga berfluktuasi dengan kisaran antara 7,45 – 9,98 % dengan rata-rata sebesar 8,57 % per tahun.



Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanpa migas sebesar 8,48 % turun menjadi 7,45 % pada tahun 2012, namun pada tahun 2013-2014 kembali naik masing-masing sebesar 8,37 % dan 9,98 %. Secara rata-rata, capaian ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas Provinsi Jambi (8,41 % per tahun) dan menempati posisi ke 4 dari 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi.

Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam suatu periode tertentu, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

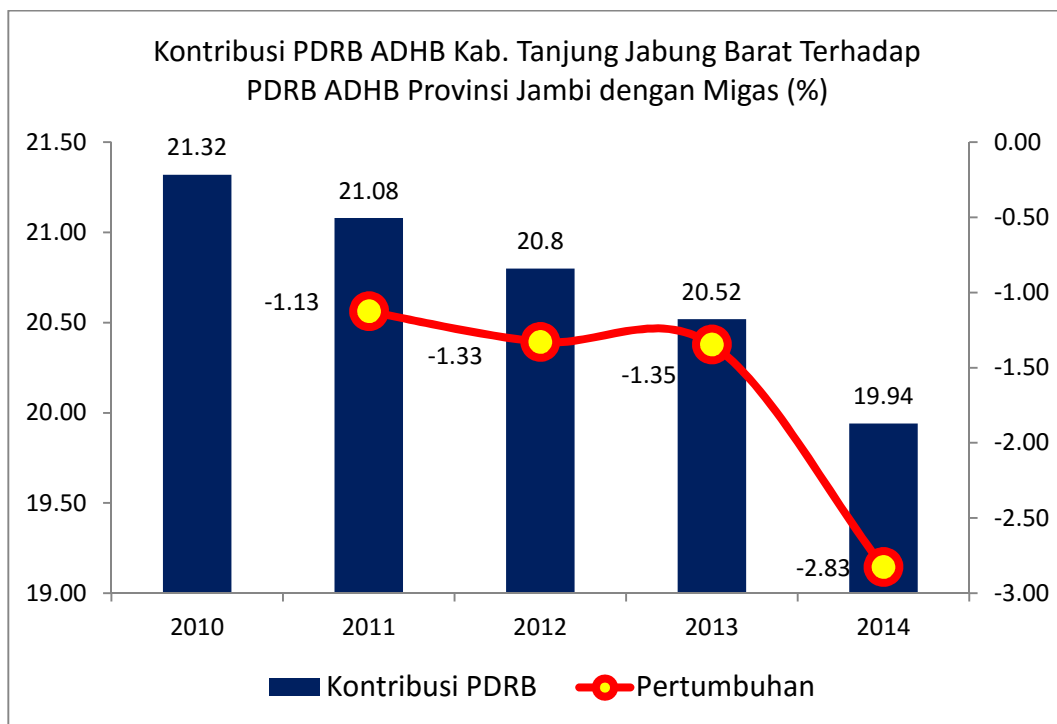
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi dengan Migas pada periode tahun 2010-



2014 cenderung mengalami penurunan yaitu 21,32 % pada tahun 2010 menjadi sebesar 19,94 % pada tahun 2014 atau rata-rata turun sebesar 1,66 % per tahun.

Grafik T.II.C.2. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap PDRB Provinsi Jambi dengan Migas (%)

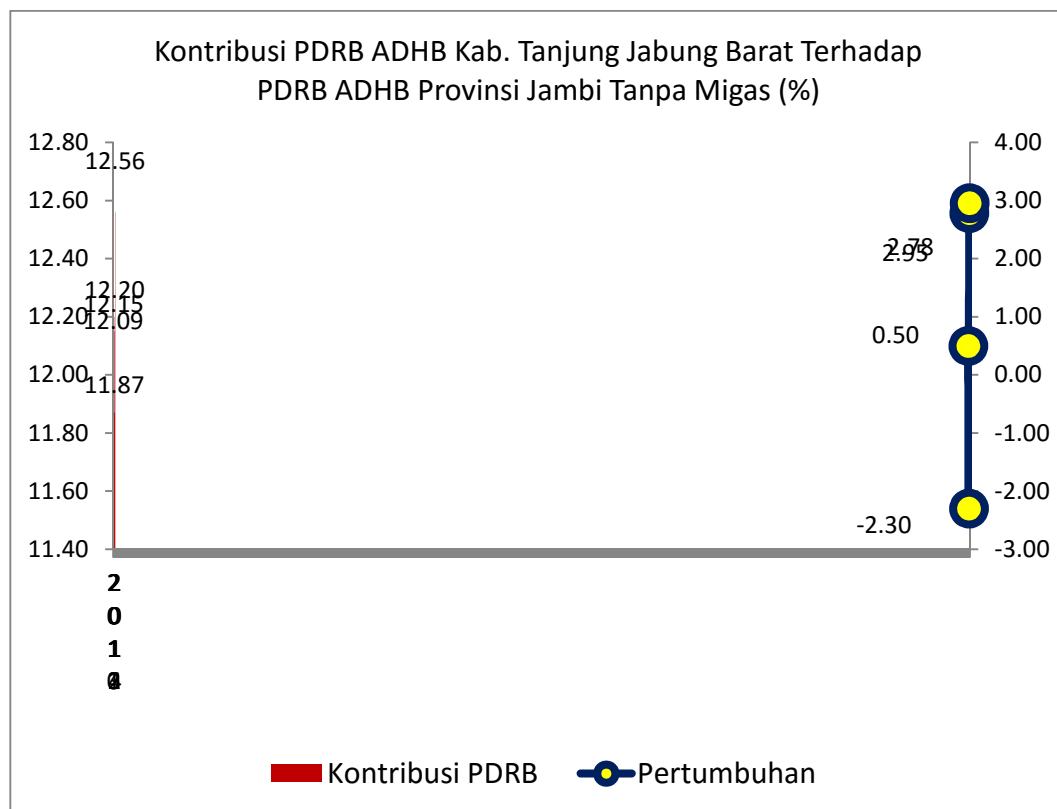


Namun demikian, secara rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi dengan Migas pada periode tahun 2010-2014 sebesar 20,73 % per tahun. Capaian ini paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata kontribusi PDRB ADHB 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yang berarti bahwa PDRB ADHB Provinsi Jambi dengan Migas yang terbesar berasal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Berbeda dengan migas, untuk tanpa migas ternyata kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-2014 sedikit naik yaitu 12,09 % pada tahun 2010 menjadi sebesar 12,56 % pada tahun 2014 atau rata-rata naik sebesar 0,98 % per tahun.

Grafik T.II.C.3. Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi Tanpa Migas Tahun 2010 - 2014 (%)



Secara rata-rata kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap PDRB ADHB Provinsi Jambi Tanpa Migas periode tahun 2010-2014 sebesar 12,17 % per tahun. Besarnya rata-rata kontribusi tersebut termasuk paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata kontribusi



PDRB ADHB Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, kecuali Kota Jambi (15,81 %).

Selanjutnya, untuk melihat posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Provinsi Jambi ditinjau dari aspek PDRB per kapita sekaligus pertumbuhan ekonomi digunakan analisis kuadran. Bidang analisis yang digunakan dibagi atas empat bidang. PDRB per kapita Provinsi Jambi digambarkan sebagai basis dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi merupakan garis ordinat. Maka posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terpetakan dalam ke empat kuadran yang terbentuk.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2010-2014 selalu pada posisi pada kuadran kedua (II). Posisi ini adalah posisi yang bukan paling ideal (kuadran I), dan bukan bukan pula paling tidak diinginkan (kuadran III), melainkan kondisi dimana PDRB per kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dicapai lebih baik dari PDRB per kapita Provinsi Jambi, tetapi pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih di bawah pertumbuhan rata-rata Provinsi Jambi.

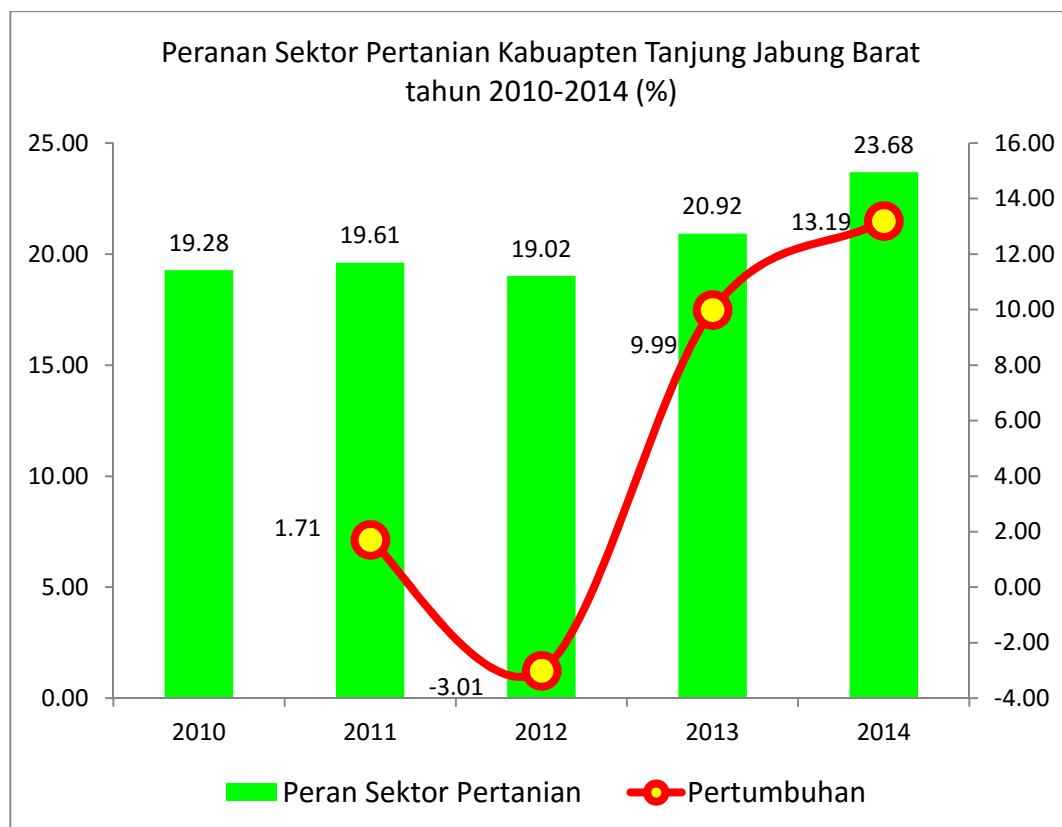
Berbicara tentang kontribusi/peranan/penyumbang suatu sektor terhadap PDRB Kabupaten/Kota, memang tidak terlepas dari dua hal, yaitu produksi dan harga, dari dua hal tersebut akan dihasilkan output dan selanjutnya dapat dihitung nilai tambah bruto. Oleh karena itu naik turunnya peranan suatu sektor sangat tergantung pada produksi dan harga baik komoditi sektor tersebut maupun sektor-sektor yang lain.

Sektor pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan masih memegang peranan terpenting dan merupakan sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peranan sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010



sebesar 19,28 % kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 23,68 % per tahun dengan rata-rata tumbuh sebesar 5,57 % persen per tahun.

Grafik T.II.C.4. Peranan Sektor Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2010-2014



Selama kurun waktu tahun 2010-2014 seluruh Kabupaten/kota kecuali Kota Jambi dan Sungai Penuh, sektor pertanian merupakan penyumbang cukup besar terhadap PDRB. Naik turunnya peran kategori pertanian terjadi karena meningkatnya peranan sektor-sektor lain. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rata-rata peran sektor pertanian (20,50% per tahun) masih lebih kecil dibandingkan Kabupaten Kerinci (53,81 %), Kabupaten Merangin (50,55 %), Kabupaten Tebo (48,81 %),



Kabupaten Batang Hari (40,96 %), Kabupaten Muaro Jambi (40,27 %) dan Kabupaten Sarolangun (29,44 %).

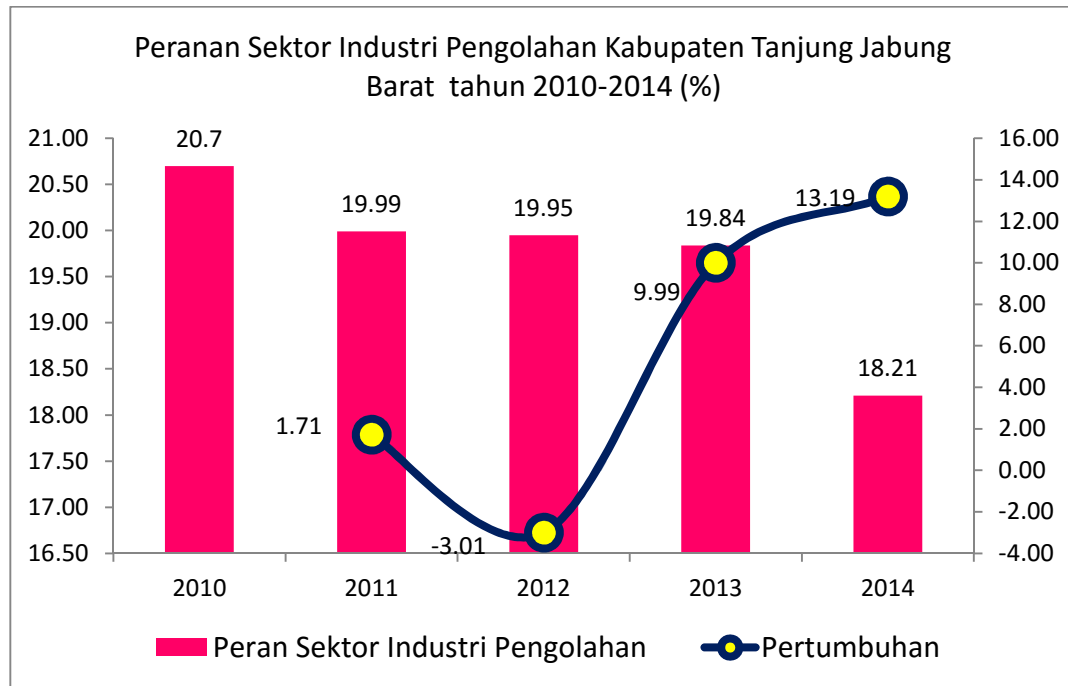
Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain dibangun oleh sektor pertanian, juga berasal dari sektor industri pengolahan yaitu industri manufaktur yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan baik barang organik maupun non organik dari bentuk yang sederhana menjadi produk baru yang lebih tinggi nilainya. Dimana bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian.

Besarnya peranan sektor industri pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggambarkan kemampuan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi agar mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Sedangkan perkembangan peranan sektor industri pengolahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain ditemukan oleh tersedianya bahan baku, mesin industri dan tenaga kerja yang berasal dari daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau daerah lain.

Peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2010, peranan sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 20,70 % selanjutnya hingga pada tahun 2014 menjadi 18,21 %. Berarti, industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif yaitu rata-rata sebesar -3,10 % per tahun.



**Grafik T.II.C.5. Peran Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2010-2014 (%)**

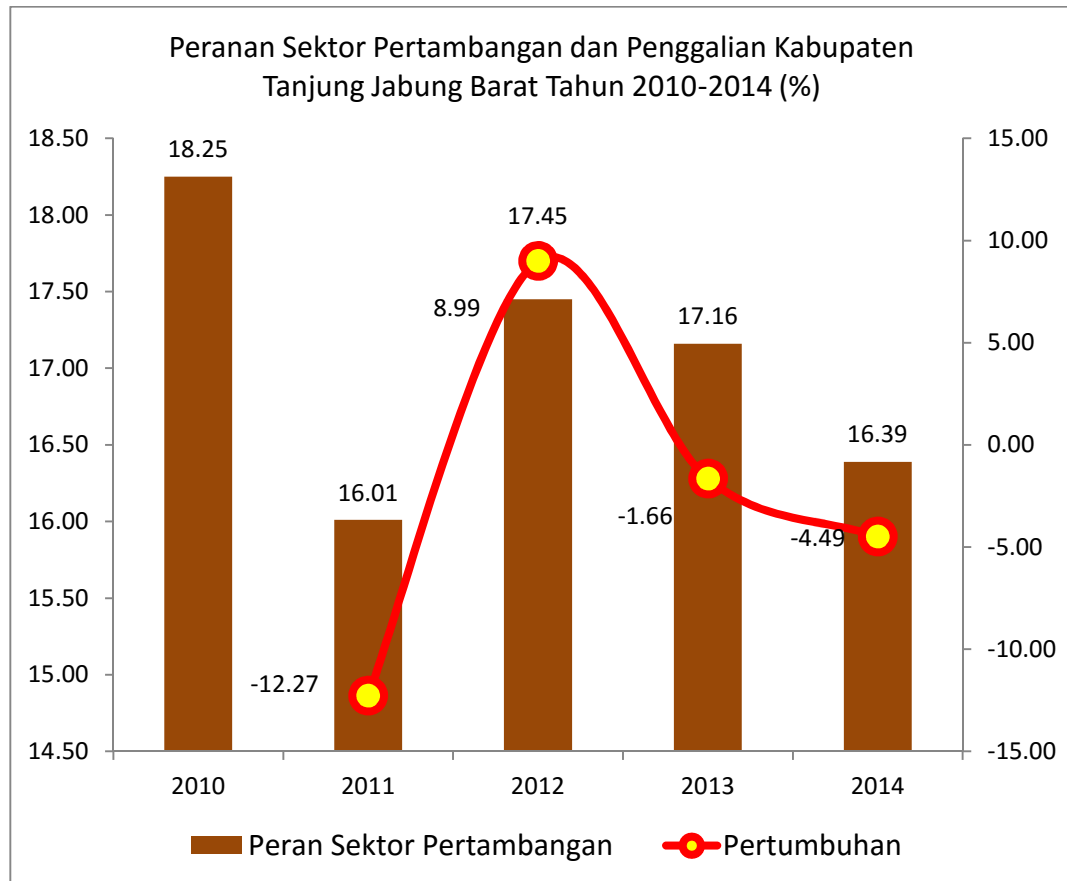


Secara rata-rata pada periode tahun 2010-2014, peran industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 19,74 %. Capaian ini paling besar dibandingkan capaian peran industri pengolahan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.

Perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalan secara signifikan. Terbukti selama periode tahun 2010-2014, sektor pertambangan dan penggalan menyumbang perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata sebesar 17,05 % per tahun.



**Grafik T.II.C.6. Peran Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten
Kanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014 (%)**



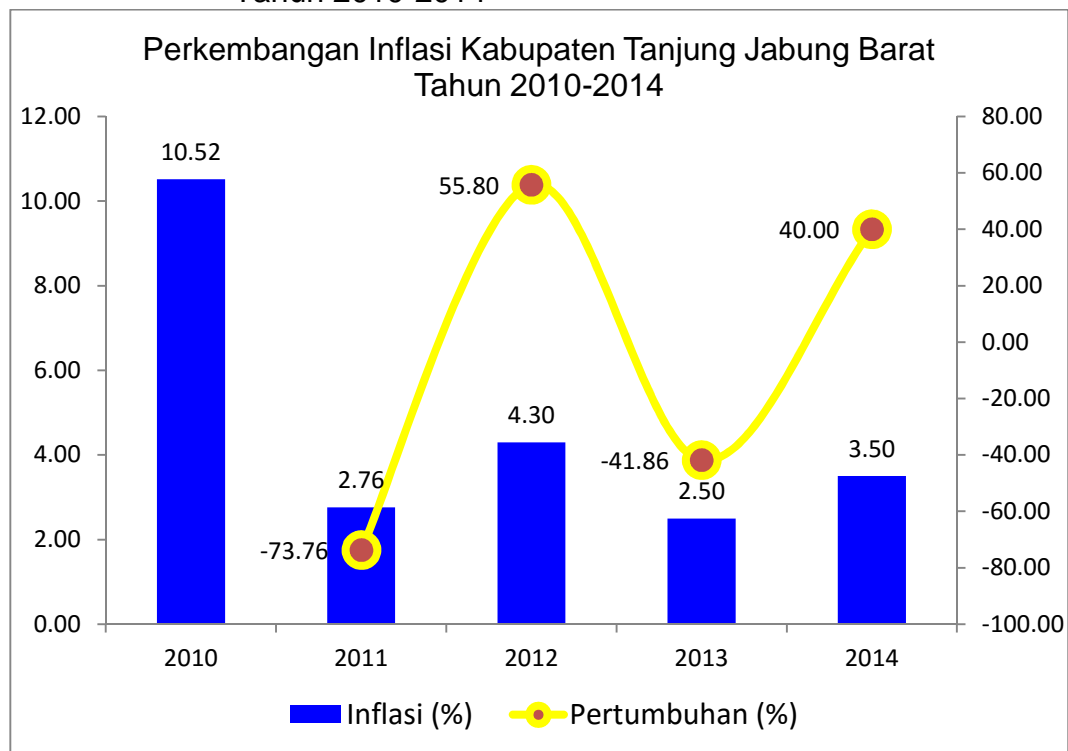
Meskipun demikian, capaian Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lebih tinggi dibandingkan 6 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi dan berada di bawah capaian Provinsi Jambi (19,50 % per tahun) serta 4 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (59,48 % per tahun), Kabupaten Muaro Jambi (24,15 % per tahun), Kabupaten Sarolangun (19,56 % per tahun), dan Kabupaten Bungo (17,31 % per tahun).



2.2.1.2. Laju inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari besaran inflasi. Dimana laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini masih berpegang pada laju inflasi Kota Jambi yang dapat dilihat dari data IHK Kota Jambi sebagaimana ditampilkan pada Grafik di bawah ini.

Grafik T.II.C.7. Perkembangan Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014





Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, inflasi pernah mencapai 2 digit yaitu tahun 2010 sebesar 10,52%, kemudian di tahun-tahun berikutnya inflasi berfluktuasi antara 2,50 sampai dengan 4,30 %. Dalam kurun waktu tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,50% dan pada tahun 2014 inflasi sebesar 3,50 %.

2.2.1.3. PDRB per Kapita ADHK

Untuk mengetahui tingkat perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lingkup makro atau sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa adalah melalui PDRB perkapita. PDRB perkapita ADHK adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita ADHK daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita ADHK suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 5 tahun terakhir (tahun 2010-2014) memiliki PDRB per Kapita selalu lebih dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Jambi maupun PDRB per Kapita kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi. Pada tahun 2010, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.68.954.873,31 meningkat 45,31 % pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp.100.197.514,51.



Tabel T.II.C.5. PDRB PerKapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010-2014

No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		Perubahan (%)
		2010	2014	
1	Kerinci	15.812.461,24	28.812.958,53	82,22
2	Merangin	17.404.470,34	27.959.051,29	60,64
3	Sarolangun	26.225.720,91	41.577.409,44	58,54
4	Batang Hari	28.208.012,45	45.433.096,24	61,06
5	Muaro Jambi	27.089.072,83	41.160.806,56	51,95
6	Tanjab Timur	61.861.686,01	92.091.755,19	48,87
7	Tanjab Barat	68.954.873,31	100.197.514,51	45,31
8	Tebo	19.140.275,93	32.504.660,64	69,82
9	Bungo	23.027.897,24	37.504.660,64	62,87
10	Kota Jambi	20.711.636,32	34.528.290,71	66,71
11	Kota Sungai Penuh	31.384.114,95	52.280.842,90	66,58
	Provinsi Jambi	29.160.162,08	46.004.118,38	57,76

Meskipun secara jumlah PDRB per Kapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat paling besar, namun laju pertumbuhan PDRB per Kapitanya (45,31%) paling kecil dibandingkan laju pertumbuhan PDRB per Kapita Provinsi Jambi (57,76%) maupun laju pertumbuhan PDRB per Kapita kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.

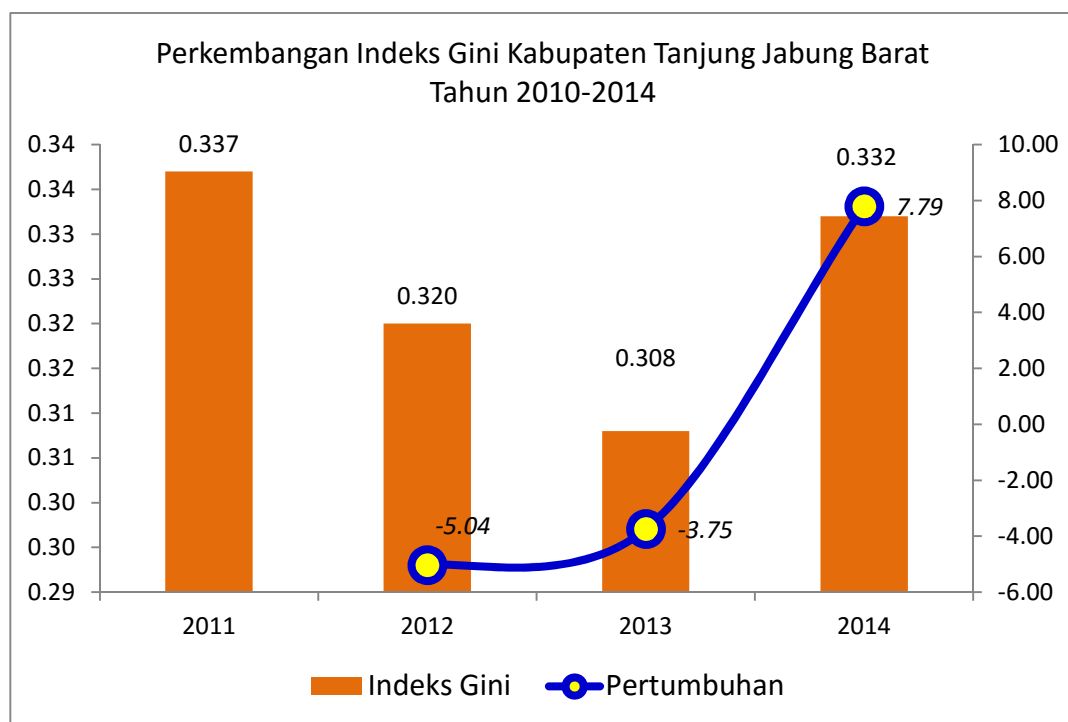
2.2.1.4. Indeks Gini

Indikator utama yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh adalah Indeks Gini. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidak merataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). *Daimon dan Thorbecke* (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi



tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan. Selanjutnya Koefisien Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Grafik T.II.C.8. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014



Jika diamati menurut besarnya koefisien gini tahun 2011 hingga 2014, maka rata-rata ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,324 per tahun adalah masuk kategori sedang. Tingginya kesenjangan di Kabupaten ini bisa disebabkan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu yang tidak dinikmati oleh masyarakat luas. Bisa juga akibat tidak meratanya



perkembangan antar kecamatan, sehingga kesenjangan (*gap*) antar wilayah kecamatan semakin tampak.

2.2.1.5. Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia

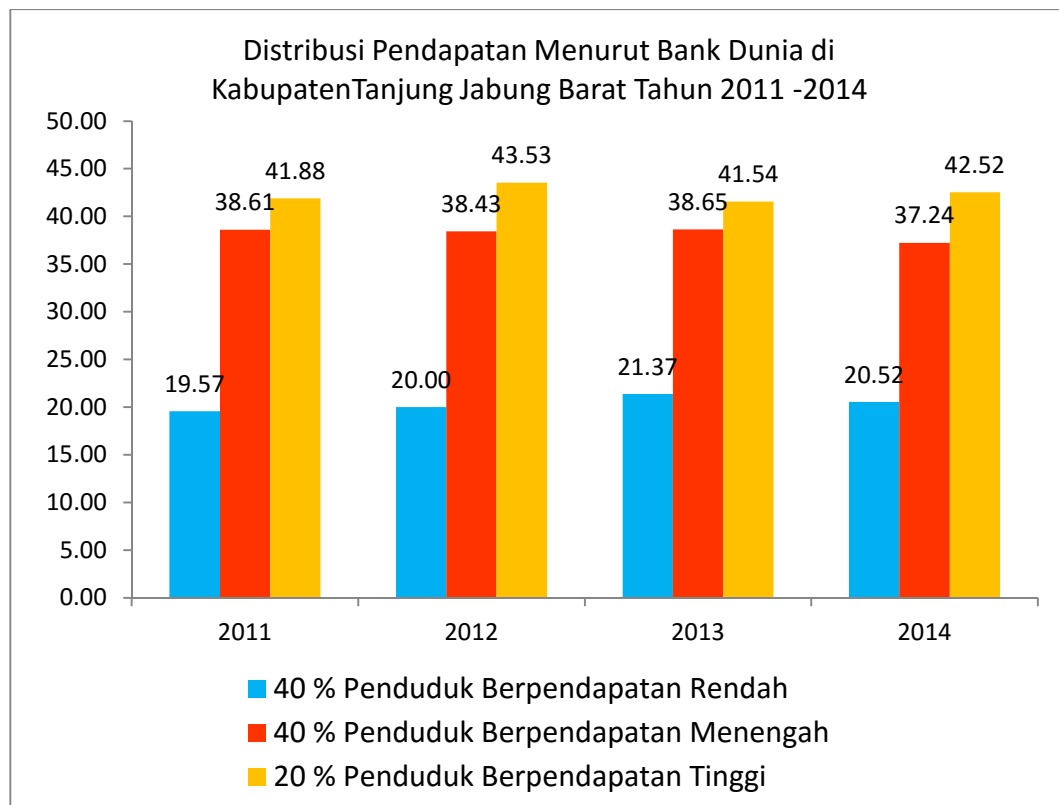
Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum, tetapi belum menjelaskan besarnya porsi yang diterima oleh kelompok berpendapatan rendah/miskin dari keseluruhan pendapatan wilayah. Dengan menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia dan Lembaga Studi Pembangunan *Universitas Sussex*, akan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai masalah ketidakadilan (*inequality*) melalui indikator yang disebut *relative inequality* atau biasa disebut dengan kriteria Bank Dunia. *Relative Inequality* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Bank Dunia dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi.

Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah pada periode tahun 2011-2014 terdapat kecenderungan meningkat, yaitu 19,57% pada tahun 2011 meningkat menjadi 20,52% pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 1,69% per tahun. Secara rata-rata persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah pada periode tahun 2011-2014 sebesar 20,37% per tahun. Artinya kelompok 40% penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan terendah selama



periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 20,52 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Grafik T.II.C.9. Distribusi Pendapatan Menurut Bank Dunia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2014



Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.



- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah antara 12 % - 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 %, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan kriteria ini, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki ketimpangan pendapatan rendah (*low inequality*) selama periode 2011-2014 karena persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan rendah lebih besar dari 17%.

Selanjutnya, untuk persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan menengah pada periode tahun 2011-2014 terdapat kecenderungan menurun, yaitu 38,61% pada tahun 2011 menurun menjadi 37,24% pada tahun 2014 atau menurun sebesar -1,18% per tahun. Hal ini menandakan adanya pergeseran proporsi pengeluaran, harapannya pergeseran ini berpindah pada persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk yang berpendapatan menengah, karena jika ini terjadi berarti kesenjangan dalam masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai berkurang, namun dengan syarat proporsi pada persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi mulai menurun.

Secara rata-rata persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 % penduduk yang berpendapatan menengah pada periode tahun 2011-2014 sebesar 38,23 %. Artinya kelompok 40 % penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpendapatan menengah selama periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 38,23 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Kemudian, persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi pada periode tahun 2011-2014 berfluktuasi dengan kecenderungan stabil, yaitu 41,88 % pada tahun 2011 menjadi 42,52 % pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 0,58 % per tahun. Secara rata-rata persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20 % penduduk yang berpendapatan tinggi pada periode tahun 2011-2014 sebesar 42,37 % per tahun. Artinya kelompok 20 % penduduk yang berpendapatan tinggi selama periode tahun 2011-2014 rata-rata menerima 42,37 % per tahun dari total pendapatan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

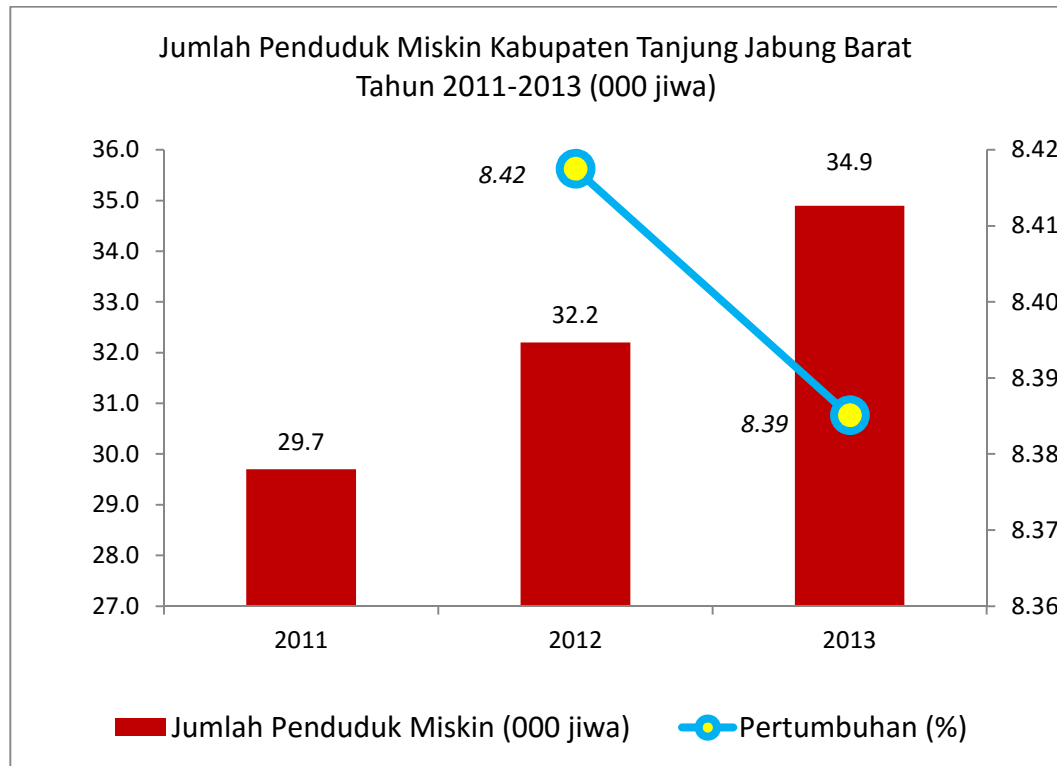
2.2.1.7. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.



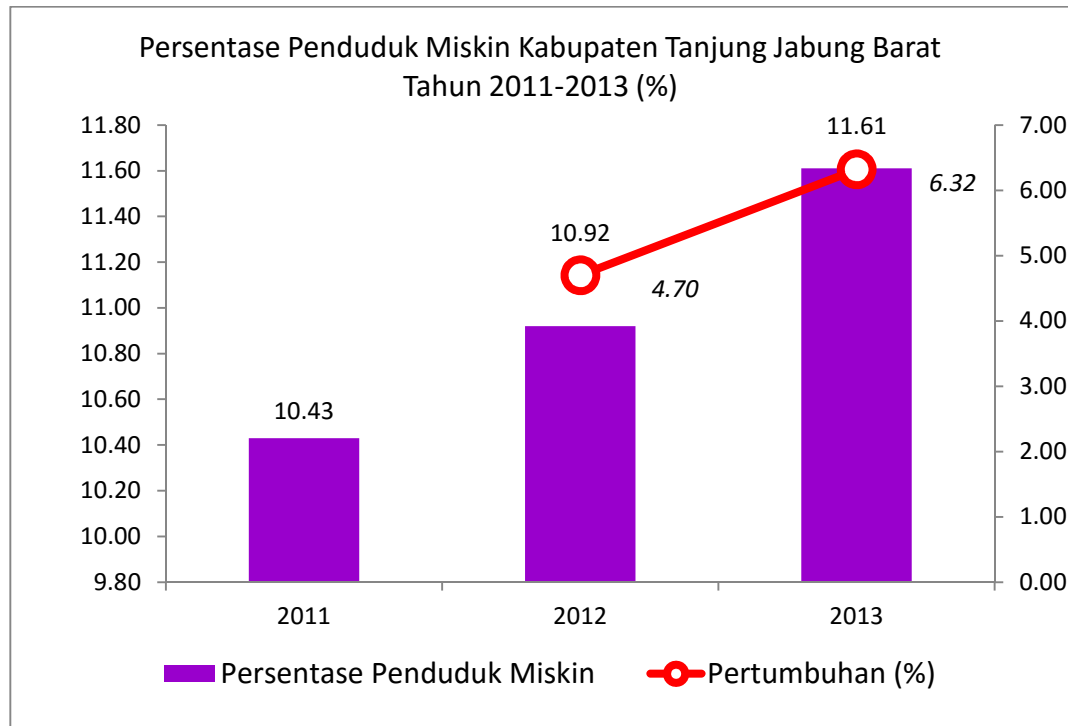
Grafik T.II.C.10. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013



Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama periode tahun 2011-2013. Pada tahun 2011, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 29,7 ribu jiwa meningkat menjadi 34,9 ribu jiwa pada tahun 2013 atau rata-rata meningkat sebesar 8,40 % per tahun.



Grafik T.II.C.11. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013



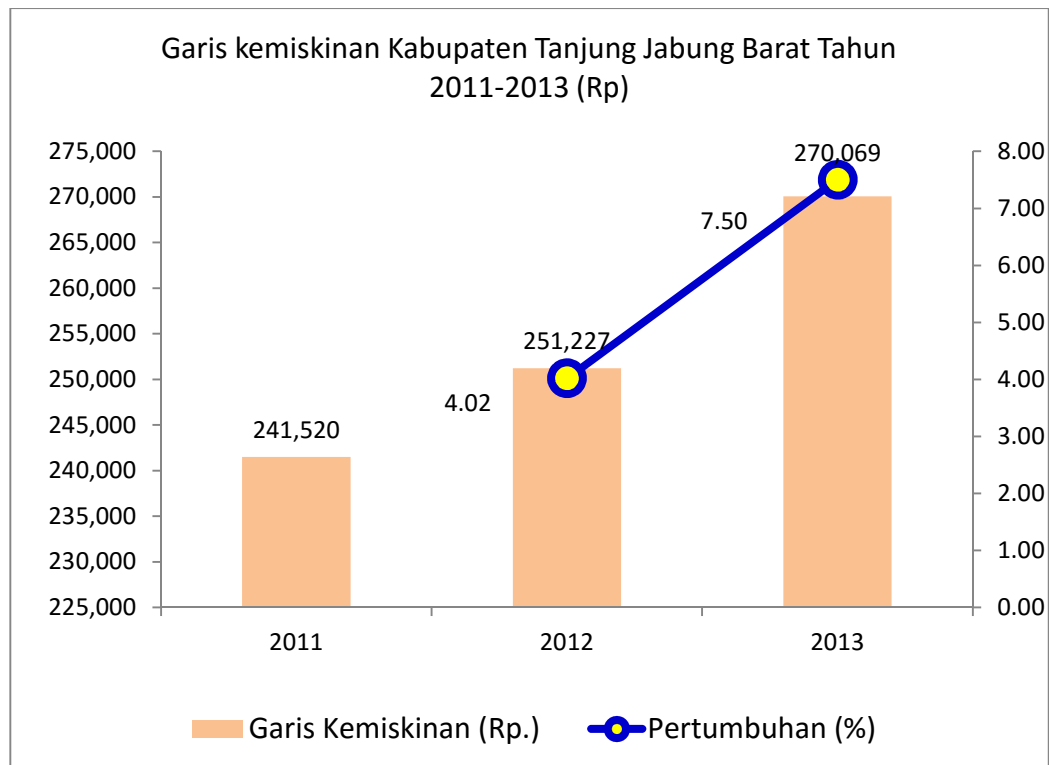
Sejalan dengan jumlah penduduk miskin, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga meningkat setiap tahun selama periode tahun 2011-2013. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sebesar 10,43 % dan pada tahun 2013 menjadi 11,61 % atau rata-rata sebesar 10,99 % per tahun.

Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama periode tahun 2011-2013. Adapun pada tahun 2011, garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah



sebesar Rp. 241.520,- meningkat menjadi sebesar Rp. 270.069,- pada tahun 2013 atau rata-rata meningkat sebesar 5,76 % per tahun.

Grafik T.II.C.12. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 -2013



2.2.1.8. Angka kriminalitas yang tertangani

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan masuk dalam kategori aman dan terkendali, namun demikian persoalan yang sering muncul dalam masa 5 tahun terakhir adalah konflik sengketa lahan, konflik buruh, konflik daerah perbatasan dan terakhir sejumlah kekerasan dalam rumah tangga, imigran gelap dan kriminalitas sedangkan kekerasan mengatasnamakan agama, radikalisme dan terorisme sebagaimana yang terjadi di daerah lain belum kelihatan kepermukaan.



2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

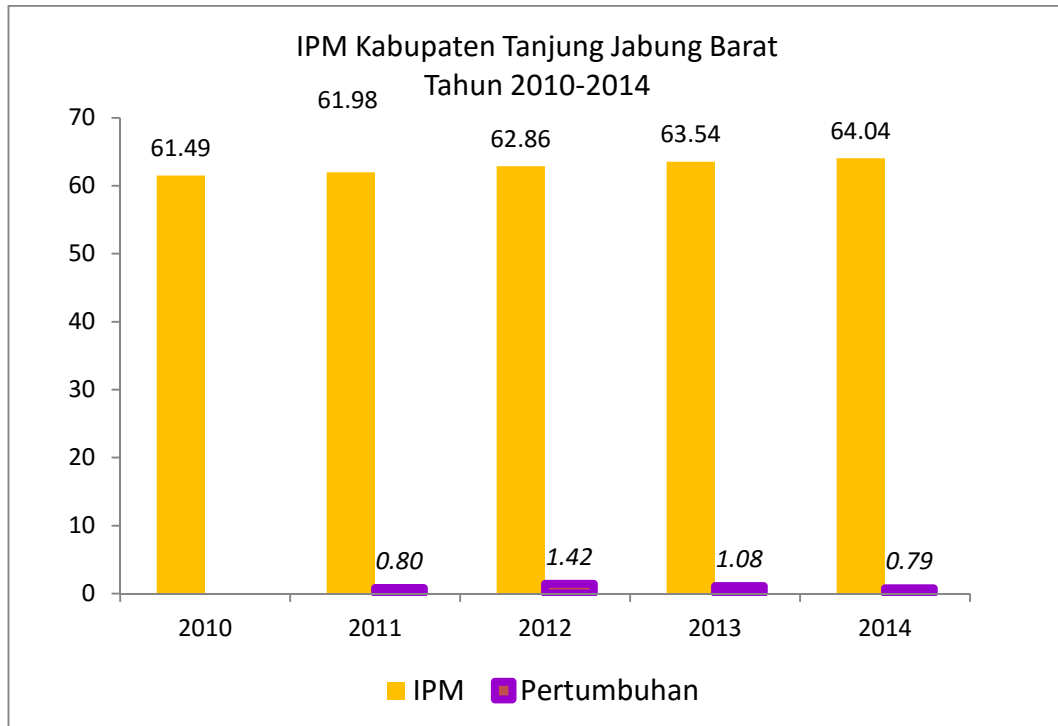
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

UNDP menyempurnakan metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) yaitu : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Grafik T.II.C.13. IPM KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2010 -2014



Selama periode tahun 2010-2014, IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu meningkat setiap tahun, yaitu mulai dari 61,49 tahun 2010 meningkat menjadi 64,04 tahun 2014 atau rata-rata tumbuh sebesar 1,02 % per tahun. Secara rata-rata IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2010-2014 adalah sebesar 62,78 per tahun.

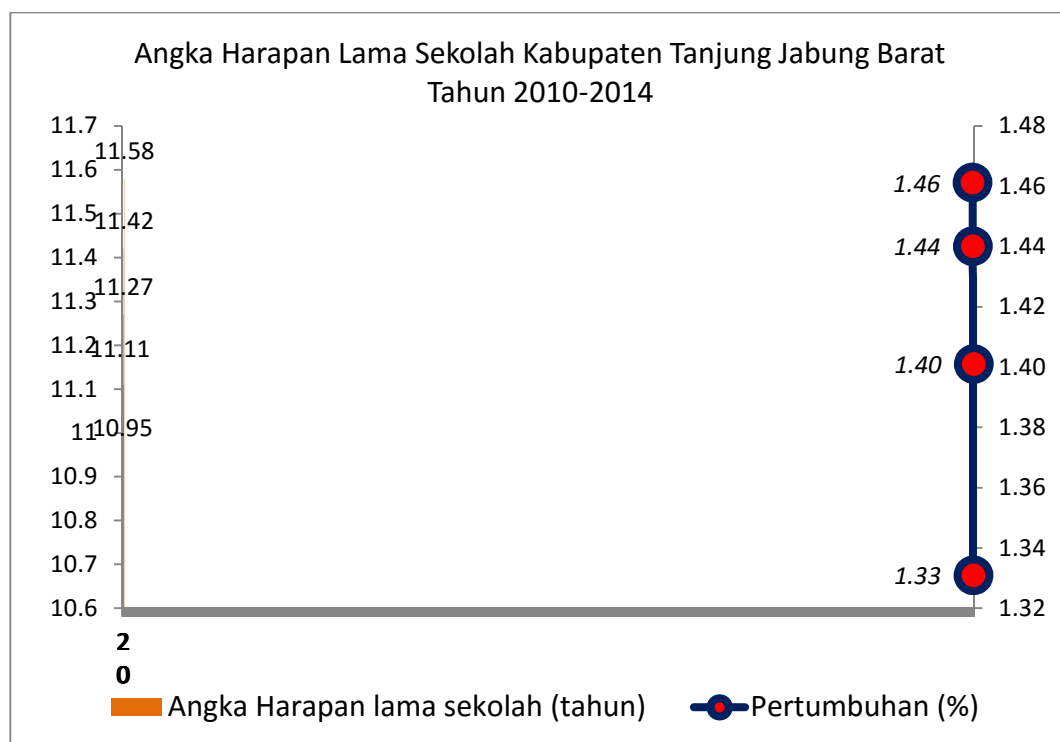
Meskipun IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu naik, tetapi berdasarkan rangking IPM, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2010-2014 selalu menempati posisi rangking ke 10 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pada tahun 2014, IPM KabupatenTanjung Jabung Barat (64,04) ternyata lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi (67,37), dan juga lebih rendah dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Tanjung Jabung Timur (59,88).



2.2.2.1.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Salah satu dimensi IPM adalah Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik T.II.C.14. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014





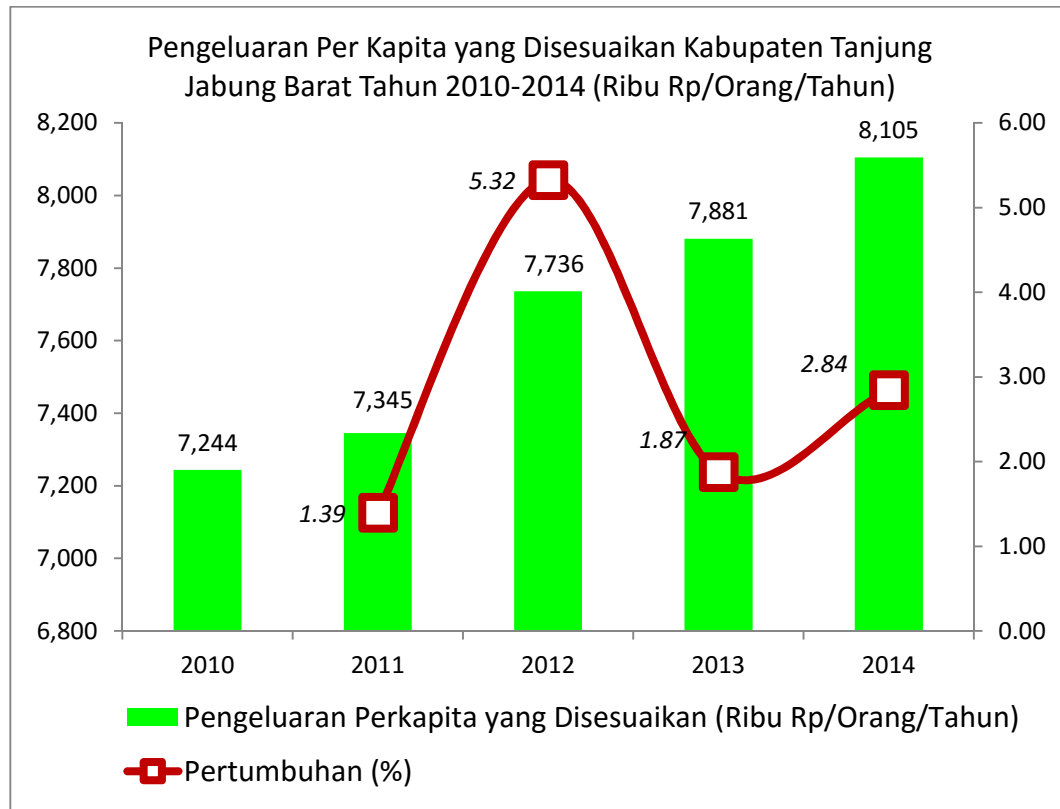
Setiap tahun Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2010-2014 naik yaitu mulai dari 10,59 tahun pada tahun 2010 meningkat pada tahun 2014 menjadi 11,58 tahun atau rata-rata sebesar 11,27 tahun. Capaian ini masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi (11,90 tahun) dan menempati posisi ke 7 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Namun demikian, selama periode tahun 2010-2014, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat rata-rata tumbuh sebesar 1,41% per tahun.

2.2.2.1.2. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dimensi kedua dari IPM adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level Kabupaten/Kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.



**Grafik T.II.C.15. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014**



Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu tahun 2010-2014 memiliki Pengeluaran per kapita yang disesuaikan selalu naik setiap tahun dengan rata-rata meningkat 2,86 % per tahun. Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 7.244 ribu per orang per tahun meningkat menjadi sebesar Rp. 8.105 ribu per orang per tahun atau rata-rata sebesar Rp. 7.662 ribu per orang per tahun. Kondisi ini tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Pengeluaran per kapita yang Disesuaikan Provinsi Jambi (Rp. 8.842 ribu per orang per tahun) dan menempati urutan ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya lebih baik dari Kabupaten Muaro Jambi (Rp. 6.935 ribu per orang per



tahun) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Rp. 7.391 ribu per orang per tahun).

2.2.2.2. Angka Melek Huruf

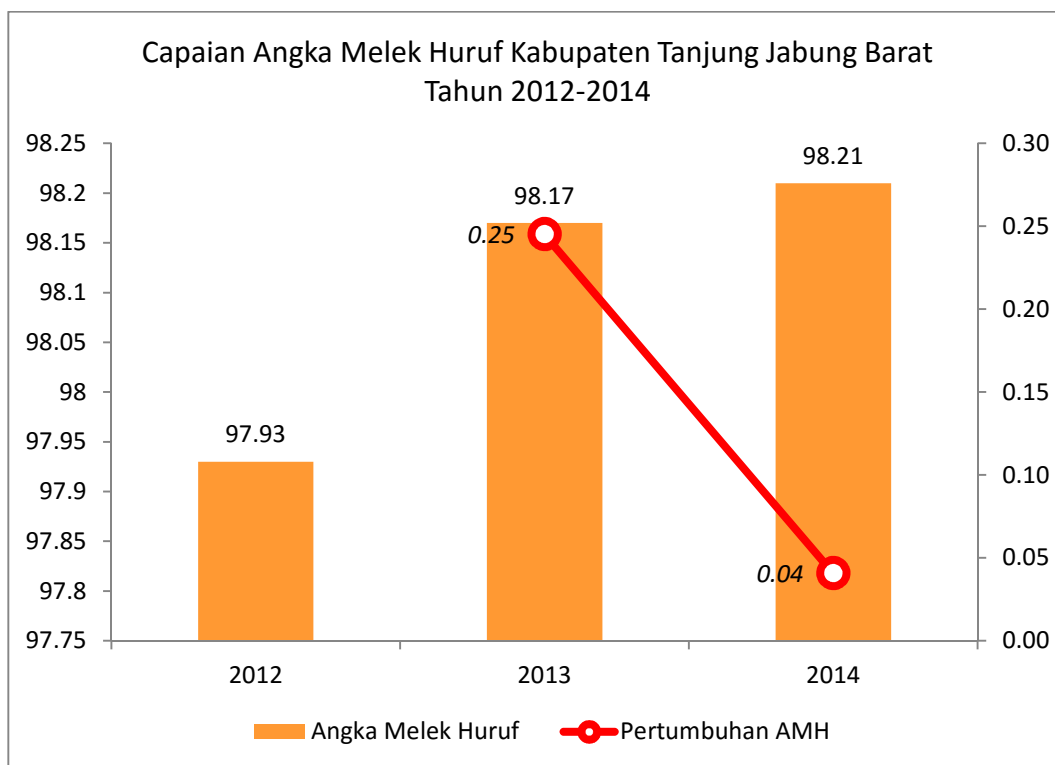
Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut *MDGs* adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumberdaya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam aspek ini, baik perempuan dan laki-laki kelompok umur 15-24 tahun membutuhkan intervensi pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf dan mampu mengakses lapangan pekerjaan. Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif *UNICEF Ann M. Veneman* pada peringatan Hari Penghapusan Kemiskinan Sedunia (17 October 2009), hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa investasi sebesar \$1 untuk pendidikan bagi anak perempuan akan menghasilkan peningkatan 10 kali lipat produktivitas lebih banyak dibandingkan dengan investasi pada anak laki-laki. Dengan demikian, mempercepat kesetaraan laki-laki dan perempuan yang melek huruf akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan produktivitas yang meningkat.

Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2012-2014 berhasil meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 190.885 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 186.934 jiwa sehingga diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 97,93 %.



Grafik T.II.C.16. Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2014



Untuk tahun 2013, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 197.126 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 193.519 jiwa maka diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 98,17 %. Selanjutnya pada tahun 2014, jumlah penduduk usia > 15 tahun sebanyak 202.414 jiwa dengan jumlah penduduk yang bisa baca tulis mencapai 198.786 jiwa sehingga diperoleh Angka Melek Hurufnya sebesar 98,21 %.



**Grafik T.II.C.17. Capaian Angka Melek Huruf Kecamatan di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2014**



Pada tahun 2014, Kecamatan Tungkal Ilir memiliki Angka Melek Huruf tertinggi (99,78 %), diikuti Kecamatan Pangabuan (99,59 %) dan Angka Melek Huruf terendah pada Kecamatan Renah Mendaluh (94,95%). Kondisi ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subyek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan



2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

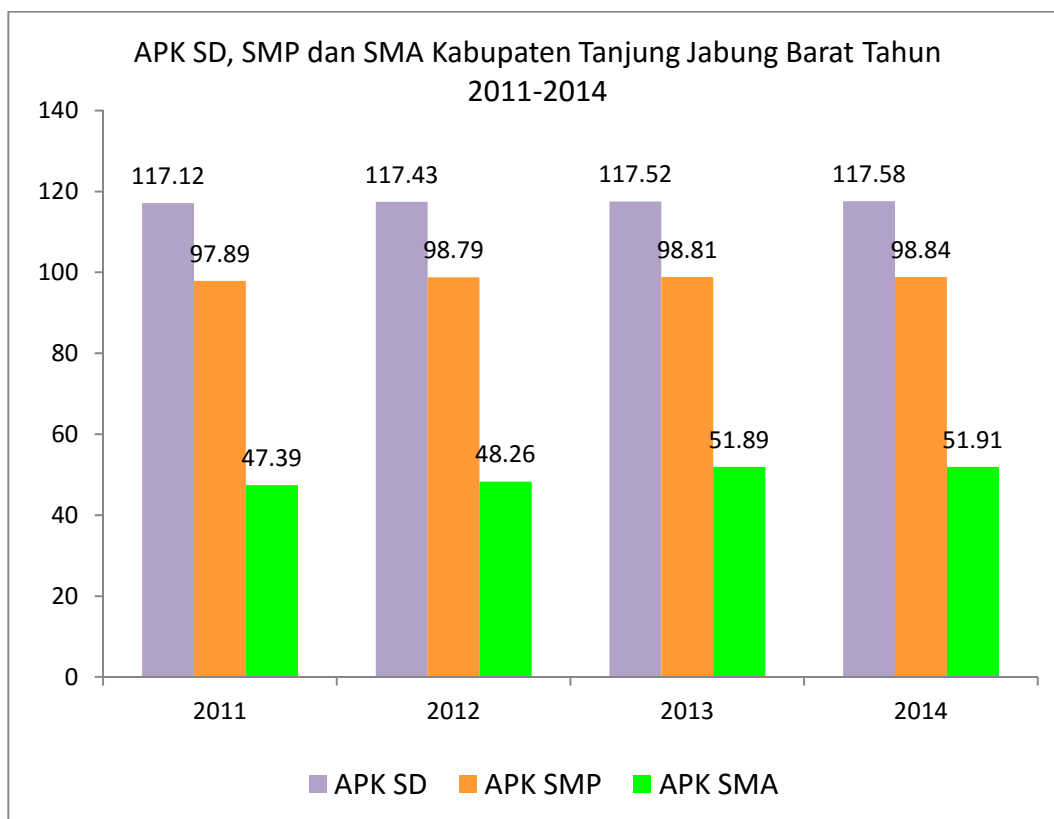
Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dimana APK merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun).

Capaian APK untuk SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 relatif tetap dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,13% per tahun. Secara rata-rata capaian APK untuk SD/MI adalah 117,41 % per tahun berarti capaian di atas 100. Kondisi ini karena populasi siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu anak bersekolah di SD/MI berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.



Grafik T.II.C.18. Capaian APK SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



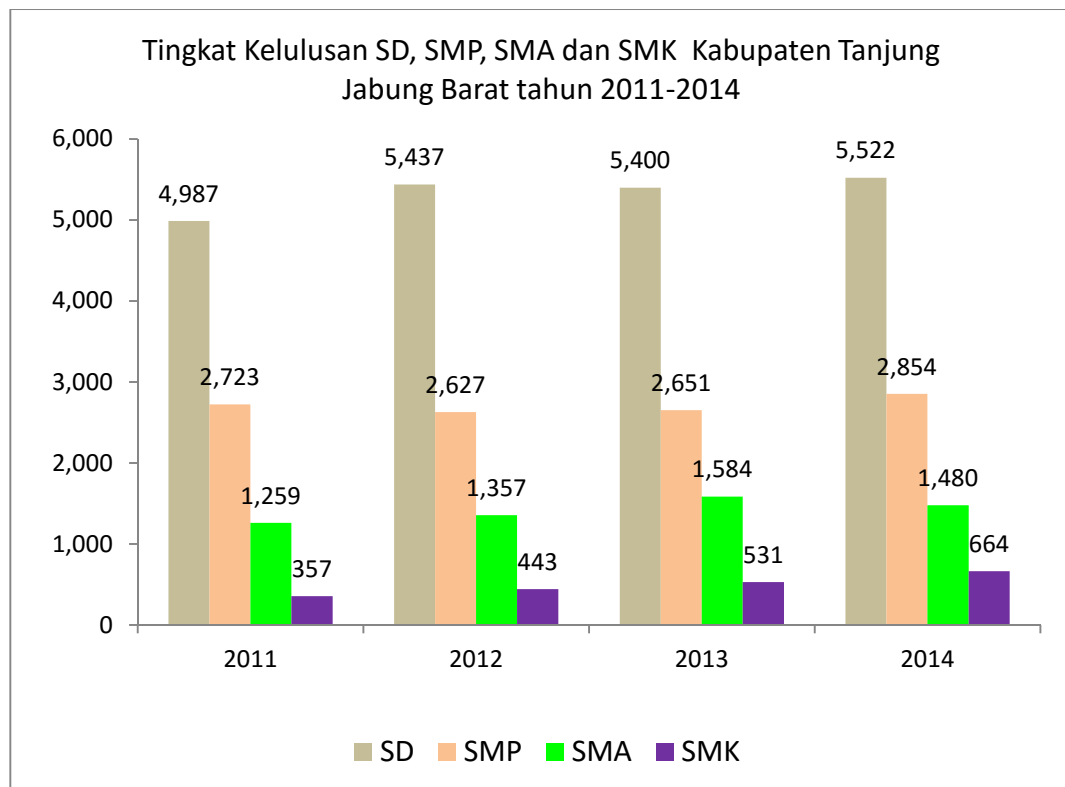
Untuk APK SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode 4 tahun terakhir relatif naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,32% per tahun. Pada tahun 2011, APK SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 97,89 % meningkat menjadi 98,84% pada tahun 2014. Begitu pula untuk APK SMA, selama tahun 2011-2014 APK SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,13 % per tahun. Pada tahun 2011, APK SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 47,39% meningkat menjadi sebesar 51,91% pada tahun 2014.



2.2.2.4. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Pembebasan biaya pendidikan dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu telah memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP maupun SMA/SMK dan yang sederajat.

Grafik T.II.C.19. Tingkat Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa secara umum kecenderungan jumlah murid yang lulus pada tiap jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif meningkat setiap tahunnya, dan peningkatan tersebut relatif linear beraturan sehingga dapat diasumsikan



bahwa kecenderungan sumberdaya manusia terutama untuk kelompok umur sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sampai 2014 meningkat setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

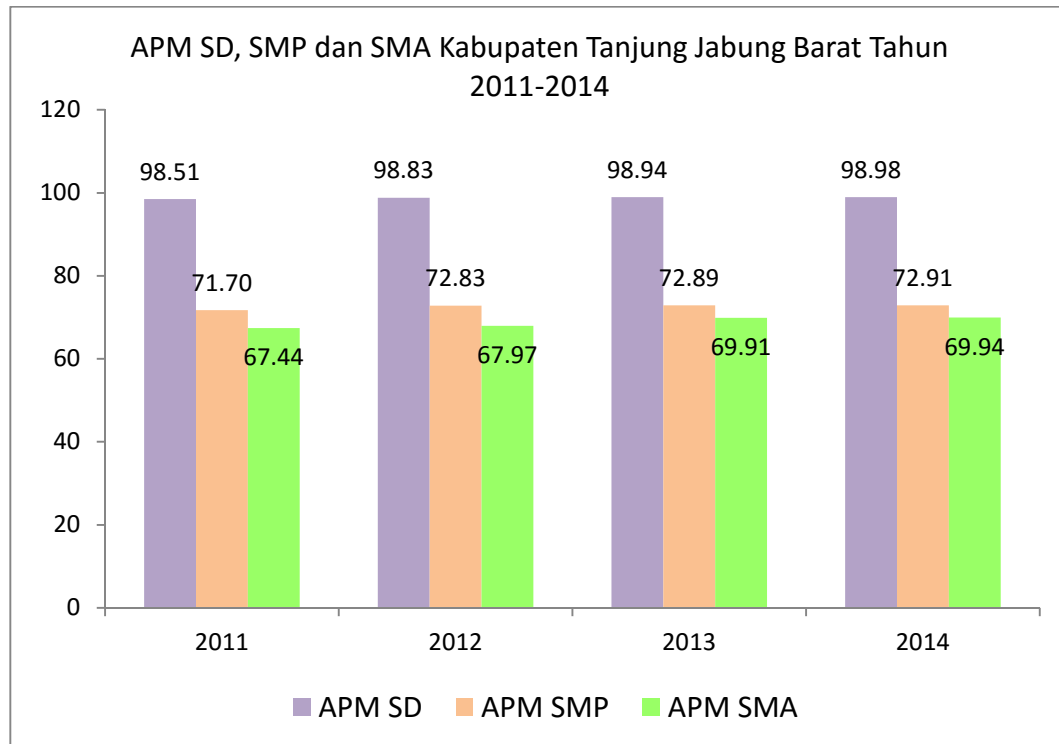
Untuk melihat penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK, karena APK menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Capaian APM untuk SD/MI Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 sedikit naik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,16% per tahun. Secara rata-rata capaian APM untuk SD/MI adalah 98,82% per tahun. Artinya tidak seluruh anak usia SD yang dapat bersekolah di SD/MI tepat waktu.



Grafik T.II.C.20. Capaian APM SD, SMP dan SMA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



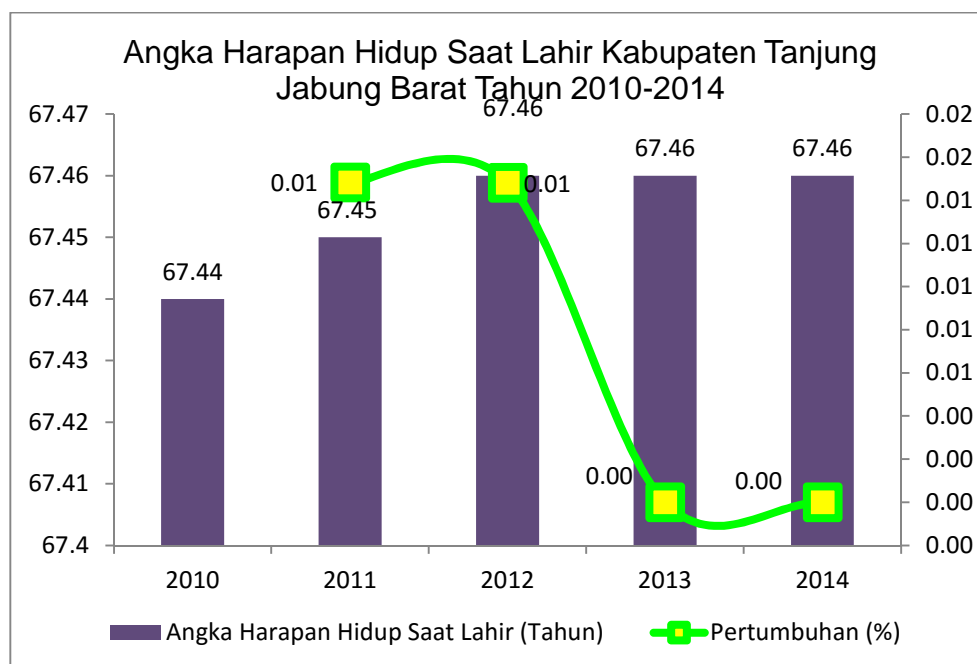
Untuk APM SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2011-2014 tumbuh rata-rata sebesar 0,56 % per tahun. Pada tahun 2011, APM SMP sebesar 71,70% meningkat menjadi 72,97% pada tahun 2014 atau rata-rata sebesar 72,58 %. Begitu pula untuk APK SMA, selama tahun 2011-2014 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,23 % per tahun. Pada tahun 2011, APK SMA sebesar 47,39 % meningkat menjadi 51,91 % pada tahun 2014. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah APM atau semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.



2.2.2.6. Angka Harapan Hidup Saat Lahir

Untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya adalah menggunakan Angka Harapan Hidup Saat Lahir (*Life Expectancy*). Angka Harapan Hidup Saat Lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Grafik T.II.C.21 .Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014



Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun 2010-2014 baru dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup Saat Lahir yaitu 67,44 tahun pada tahun 2010 menjadi 67,46 tahun pada tahun 2014 atau hanya meningkat 0,01% per tahun. Secara rata-rata Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kurun waktu tahun



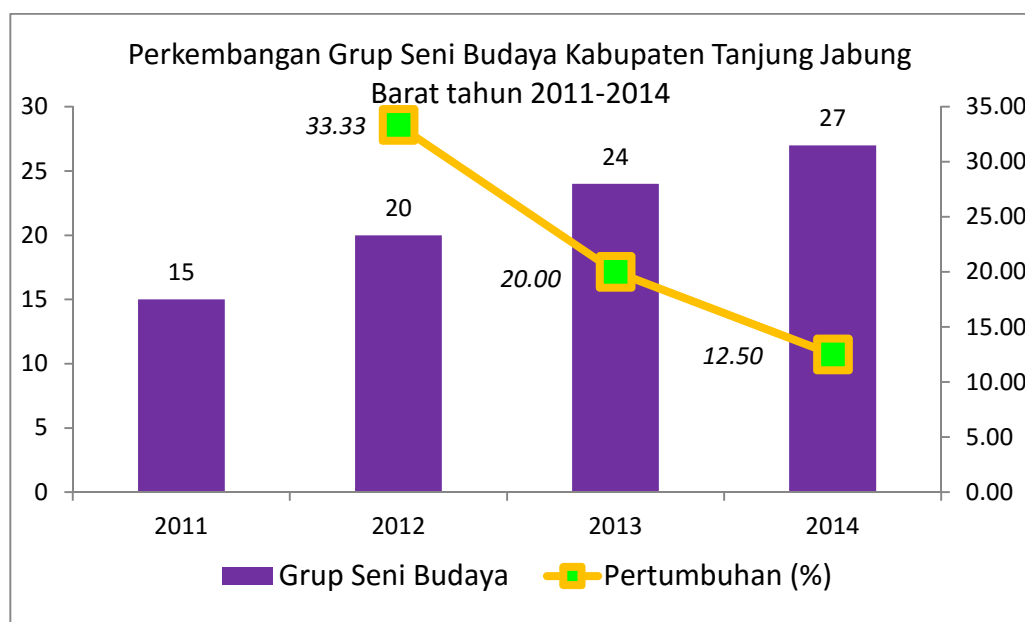
2010-2014 adalah 67,45 tahun. Hasil ini masih lebih kecil dibandingkan rata-rata Angka Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Jambi dan menempati posisi ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya lebih baik dibandingkan Kabupaten Bungo (66,66 tahun) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (65,07 tahun).

2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian

Grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 berhasil berkembang mulai dari 15 grup pada tahun 2011 menjadi 27 grup pada tahun 2014 atau berkembang sebanyak 21,94% per tahun. Perkembangan ini berkat dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

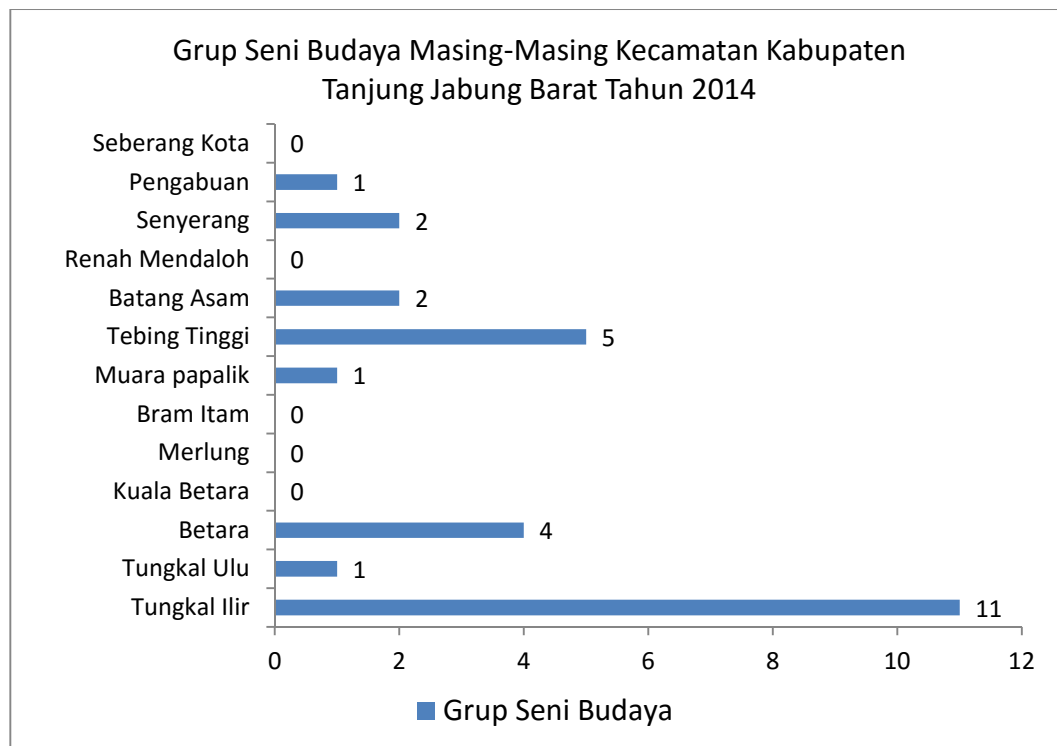
Grafik T.II.C.22. Perkembangan Grup Seni Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Meskipun berhasil berkembang cukup pesat grup seni budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun tidak merata pada masing-masing kecamatan. Kecamatan Tungkal Ilir memiliki hampir separuh jumlah grup seni budaya, dan diikuti kecamatan Tebing Tinggi, seperti tersaji pada Grafik berikut ini.

Grafik T.II.C.23 Grup Seni Budaya pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



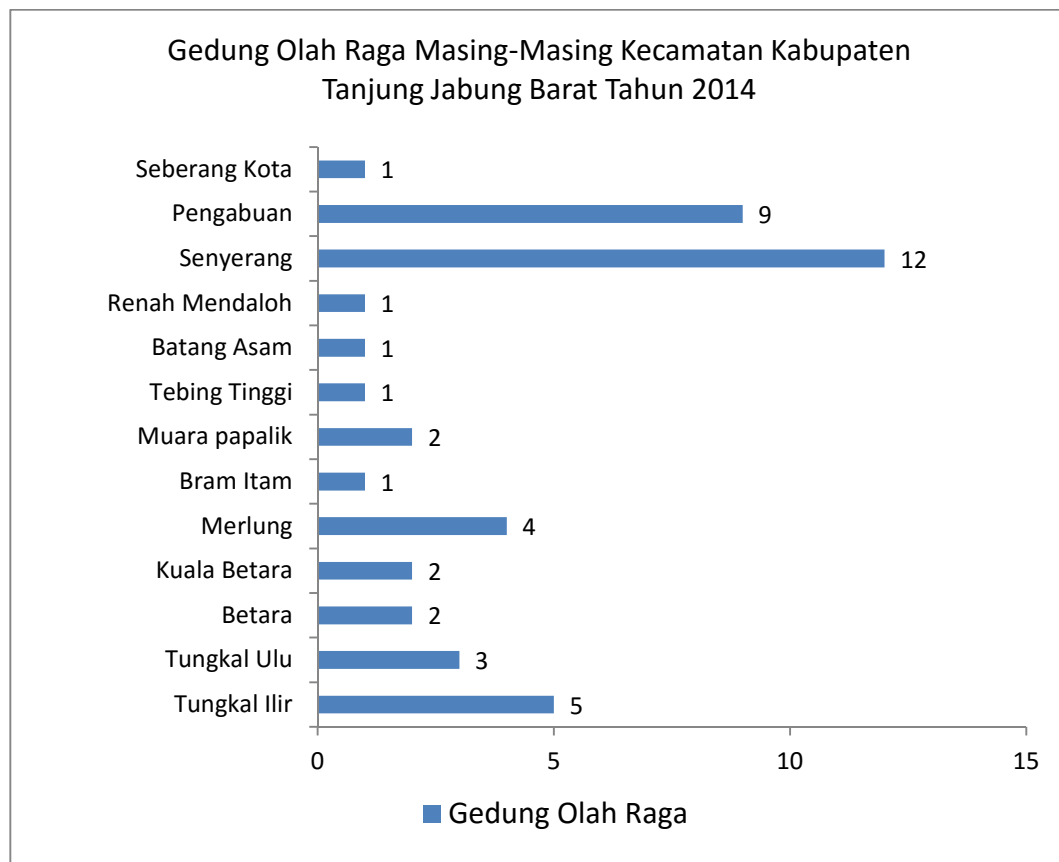
2.2.3.2. Jumlah Gedung Olahraga

Prestasi olahraga sangat berkaitan dengan sarana olahraga terutama gedung olahraga. Pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 agak merata, yang terbanyak di Kecamatan Senyerang sebanyak 12 gedung dan Kecamatan Pengabuan



sebanyak 9 gedung. Selanjutnya untuk kecamatan-kecamatan lain tersaji pada Grafik berikut ini.

Grafik T.II.C.24 Jumlah Gedung Olahraga pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

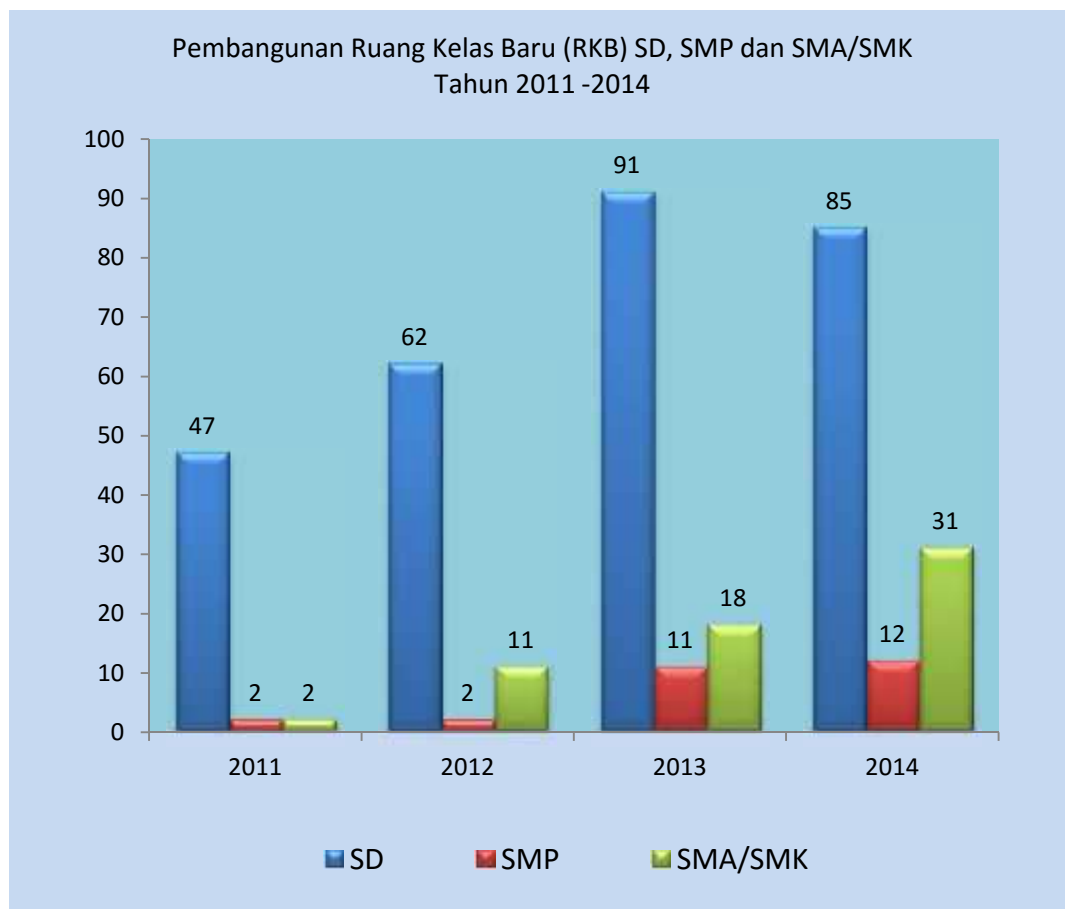
2.3.1.1. Pendidikan

Penyediaan sarana belajar mengajar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2014 meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 dan peningkatan tersebut khususnya pada kegiatan pembangunan ruang kelas serta rehabilitasi



berat ruang kelas SD dan SMP serta pembangunan sarana air bersih sekolah yang memadai.

Grafik T.II.C.25. Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas baru untuk SD, SMP, dan SMA/SMK di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

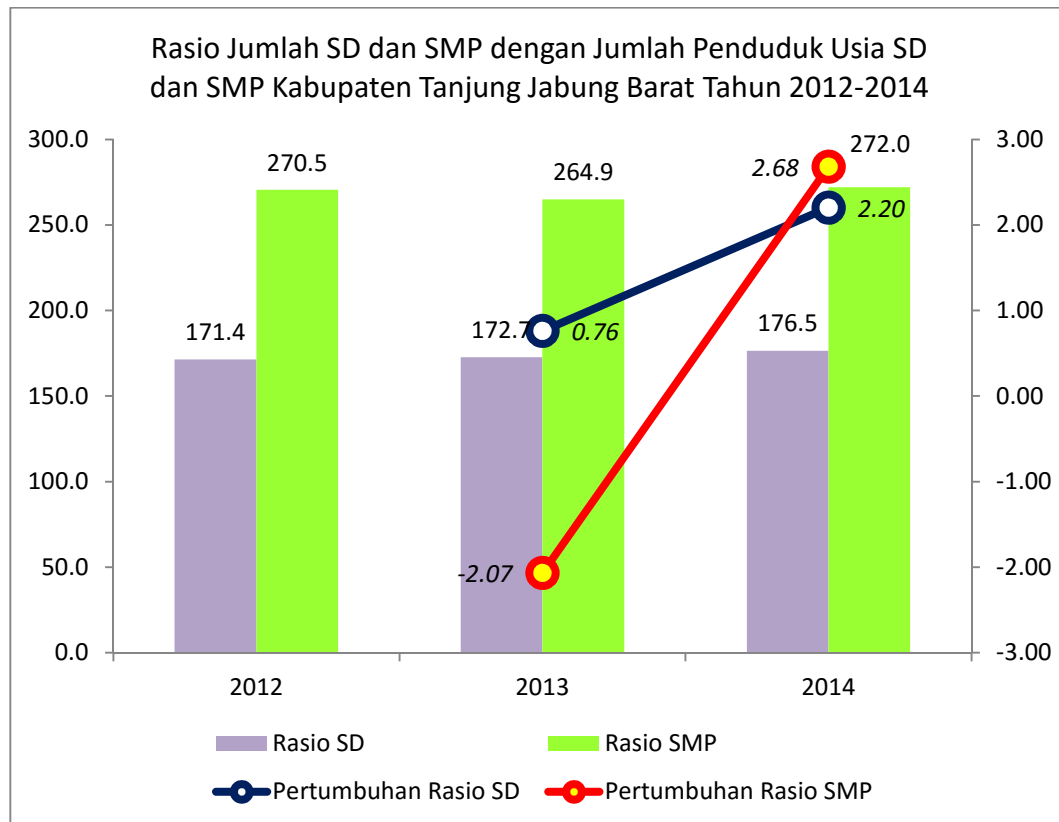


Kemampuan untuk menampung semua penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat usia pendidikan dasar adalah berdasarkan Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD selama tahun 2012-2014 yaitu dari 171,40 pada tahun 2012 menjadi 176,5 pada tahun 2014 atau naik



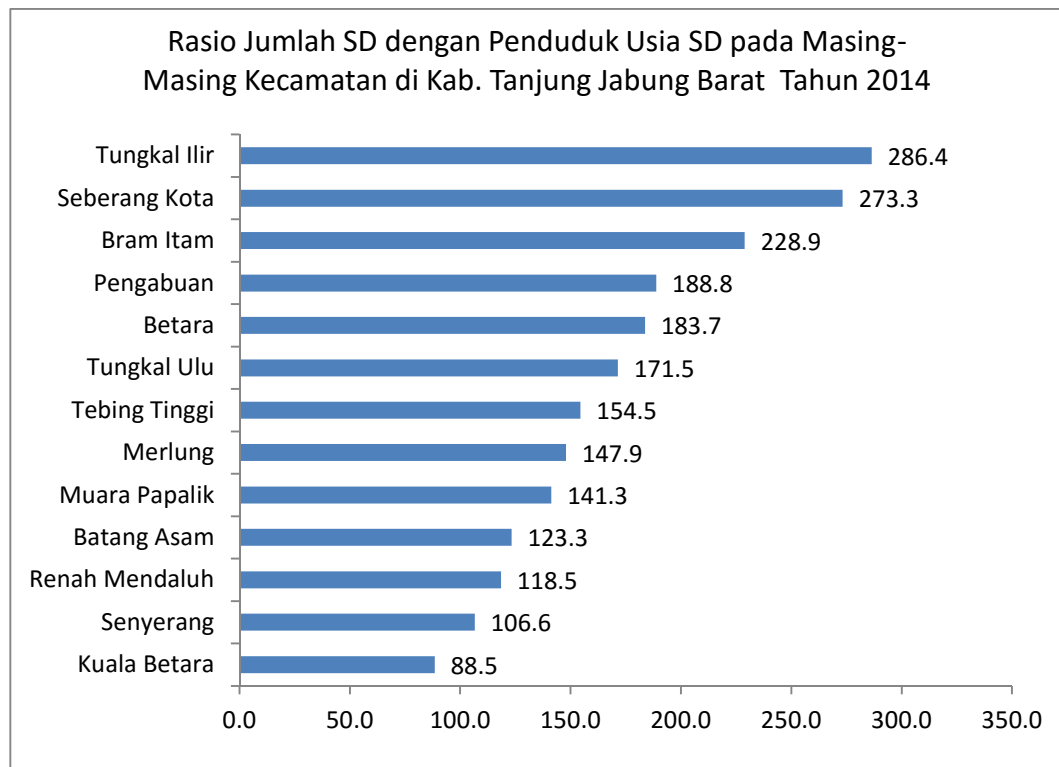
sebesar 1,48% per tahun. Secara rata-rata rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2012-2014 adalah 173,53, yang artinya setiap satu SD dapat menampung 173,53 penduduk usia SD (usia 7-12 tahun).

Grafik T.II.C.26. Rasio Jumlah SD dan SMP dengan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2014





Grafik T.II.C.27. 'Rasio Jumlah SD dengan Jumlah Penduduk Usia SD pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



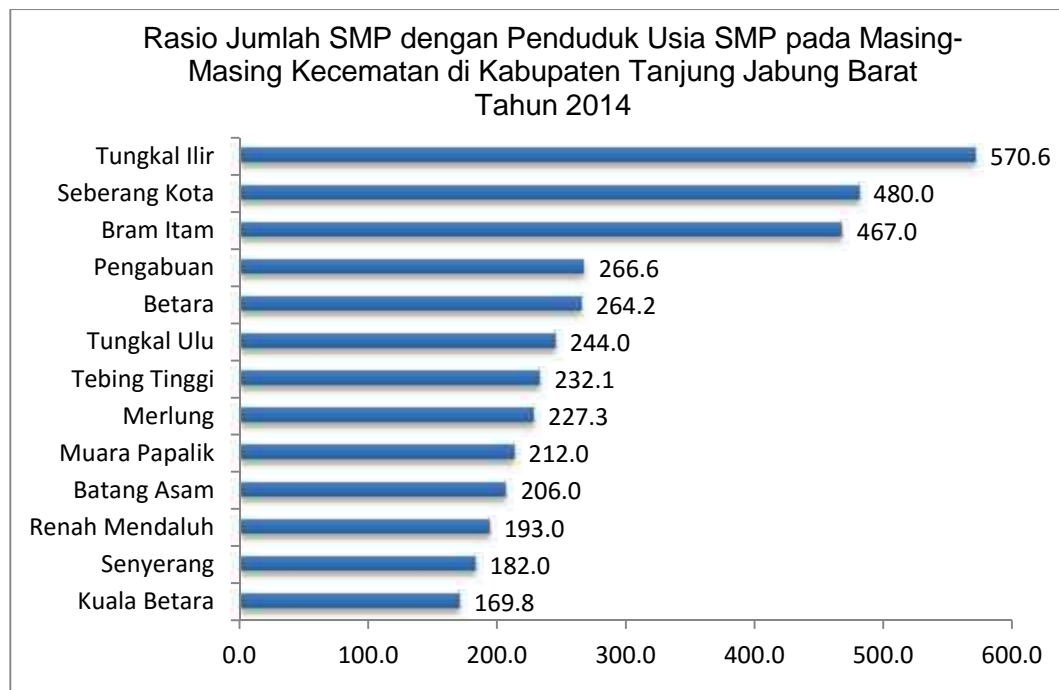
Kecamatan Tungkal Ilir memiliki rasio jumlah SD dengan jumlah penduduk usia SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 yang terbesar yaitu 286,4, sedangkan yang rasio terkecil (88,5) terdapat pada Kecamatan Kuala Betara.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga berhasil meningkatkan rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP selama tahun 2012-2014 yaitu dari 270,5 pada tahun 2012 menjadi 272,0 pada tahun 2014 atau naik sebesar 0,31 % per tahun. Secara rata-rata rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2012-2014 adalah 269,13, yang



artinya setiap satu SMP dapat menampung 269,13 penduduk usia SMP (usia 13 - 15 tahun).

Grafik T.II.C.28. Rasio Jumlah SMP dengan Jumlah Penduduk Usia SMP pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



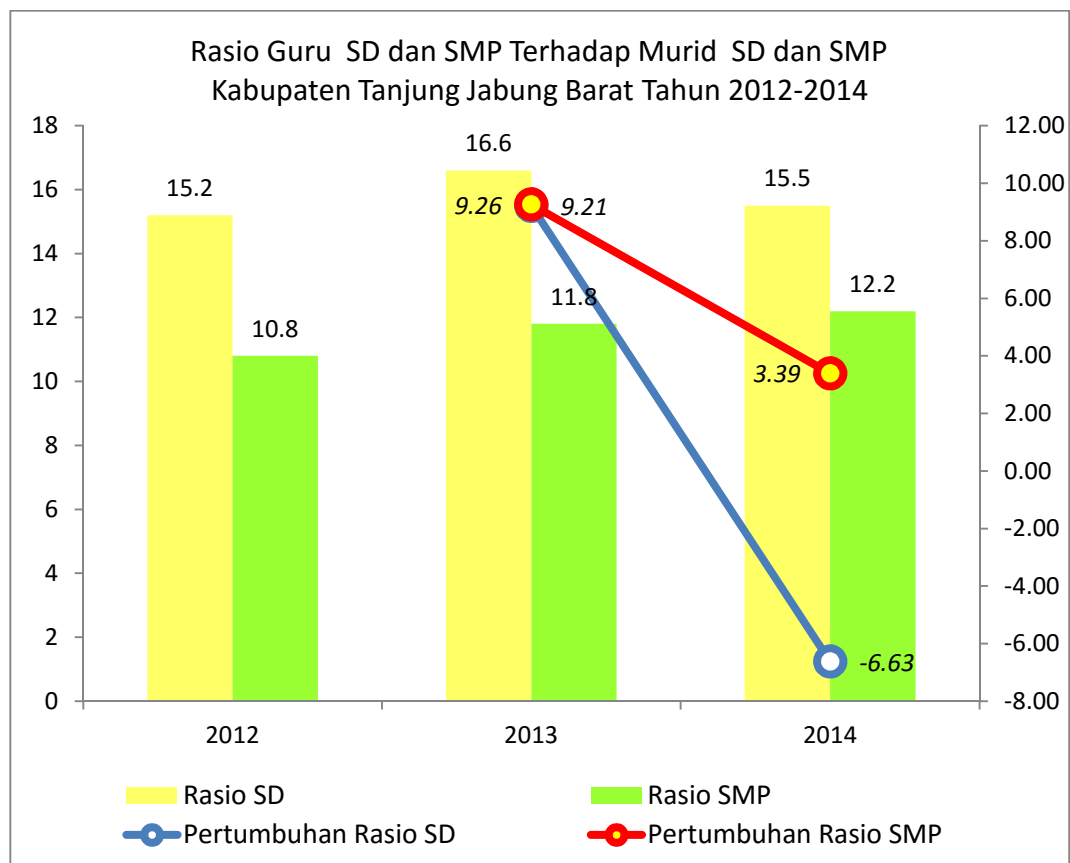
Untuk rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 yang terbesar terdapat pada Kecamatan Tungkal Ilir yaitu 570,6, sedangkan Kecamatan Kuala Betara memiliki rasio jumlah SMP dengan jumlah penduduk usia SMP yang terkecil (169,8).

Jumlah tenaga pengajar yang tersedia pada suatu sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah. Semakin besar angka rasio ini, angka mutu pendidikan diharapkan akan lebih baik, dibanding sekolah yang mempunyai tenaga pengajar yang sedikit. Selama tahun 2012-2014,



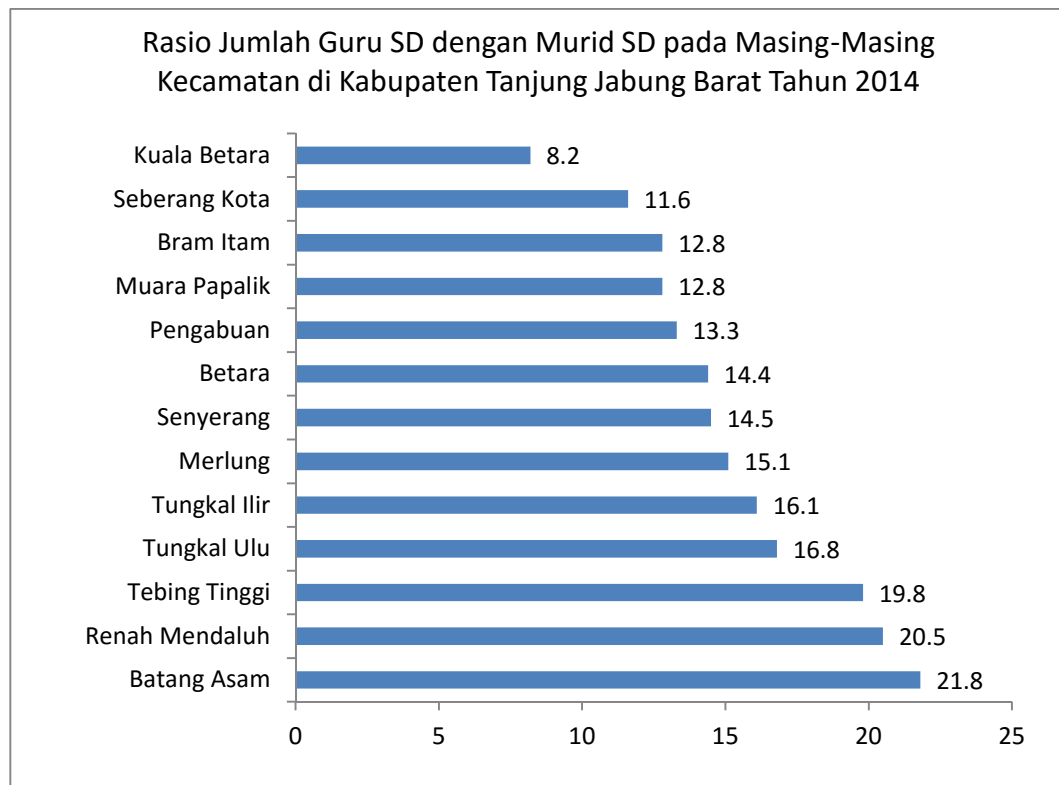
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan rasio guru dengan murid baik untuk SD maupun SMP. Rasio guruSD dengan murid SD berhasil ditingkatkan menjadi 15,30 pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 15,20 atau meningkat sebesar 1,29 % per tahun. Sedangkan untuk rasio guruSMP dengan murid SMP berhasil ditingkatkan menjadi 12,20 pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 10,80 atau meningkat sebesar 6,32 % per tahun.

Grafik T.II.C.29. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2014





Grafik T.II.C.30. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

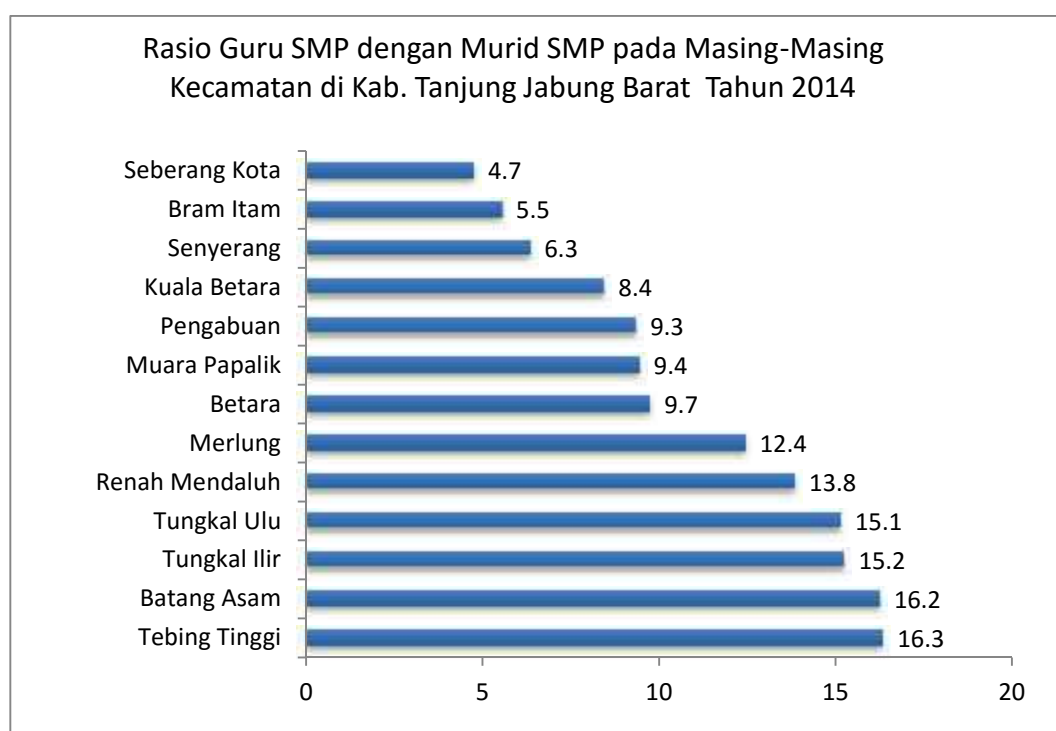


Untuk rasio guru SD dengan murid SD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 yang terbesar terdapat pada Kecamatan Batang Asam yaitu 21,80 dan Kecamatan Renah Mendaluh yaitu 20,50, sedangkan Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota memiliki rasio guru SD dengan murid SD yang terkecil yaitu masing-masing 8,20 dan 11,60.

Selanjutnya untuk rasio guru SMP dengan murid SMP pada tahun 2014 yang terbesar terdapat pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Batang Asam yaitu masing-masing 16,3 dan 16,20, sedangkan rasio terkecil terdapat pada Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Bram Itam yaitu masing-masing 4,70 dan 5,50.



Grafik T.II.C.31. Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan SMP Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

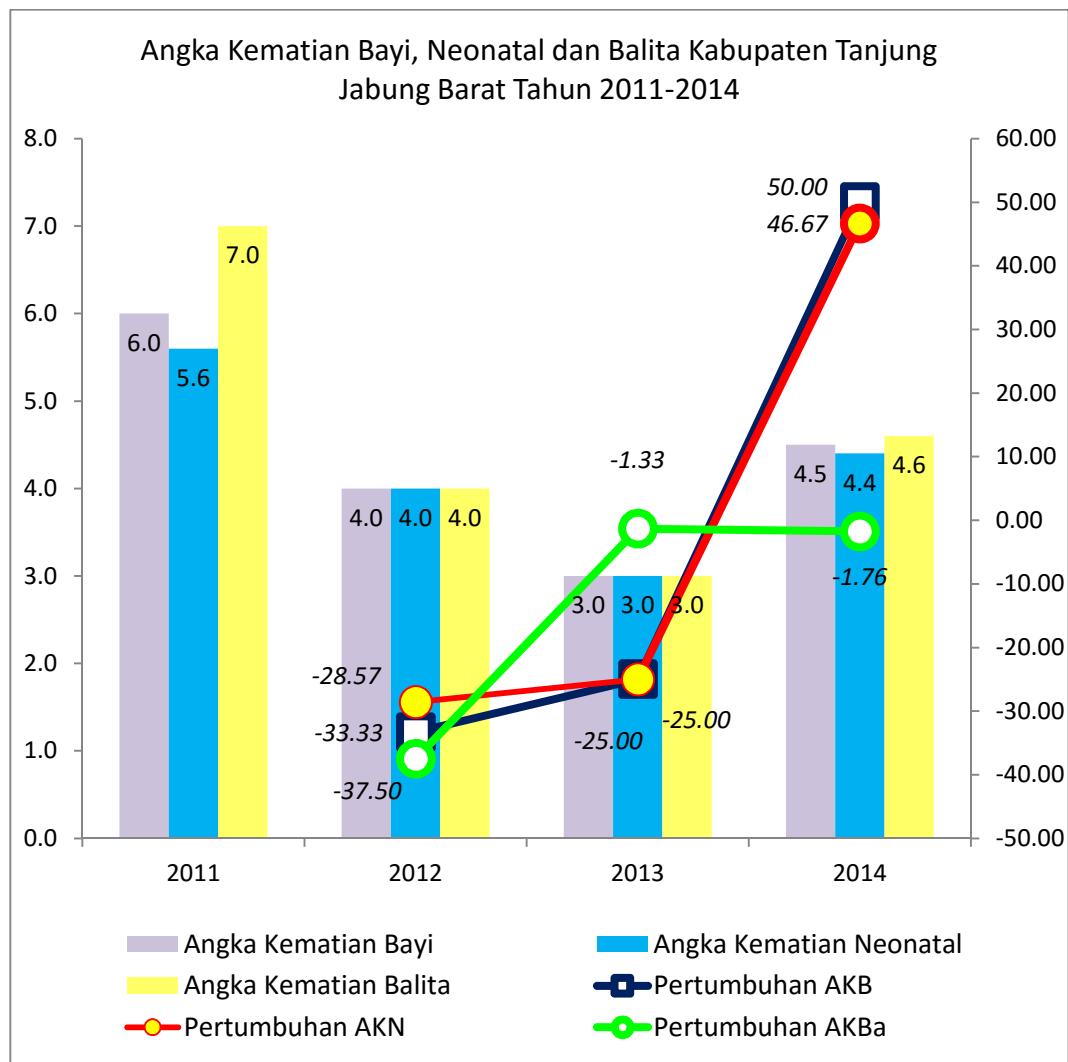


2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.



Grafik T.II.C.31 Angka Kematian Bayi, Neonatal dan Balita Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Terjadi penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun 2011 yaitu 6 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 4.5 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan target MDG's (23 per 1.000 kelahiran hidup) maka masih jauh lebih baik. Kasus kematian bayi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor penyebab langsung dan faktor penyebab tidak langsung. Faktor penyebab langsung yaitu:



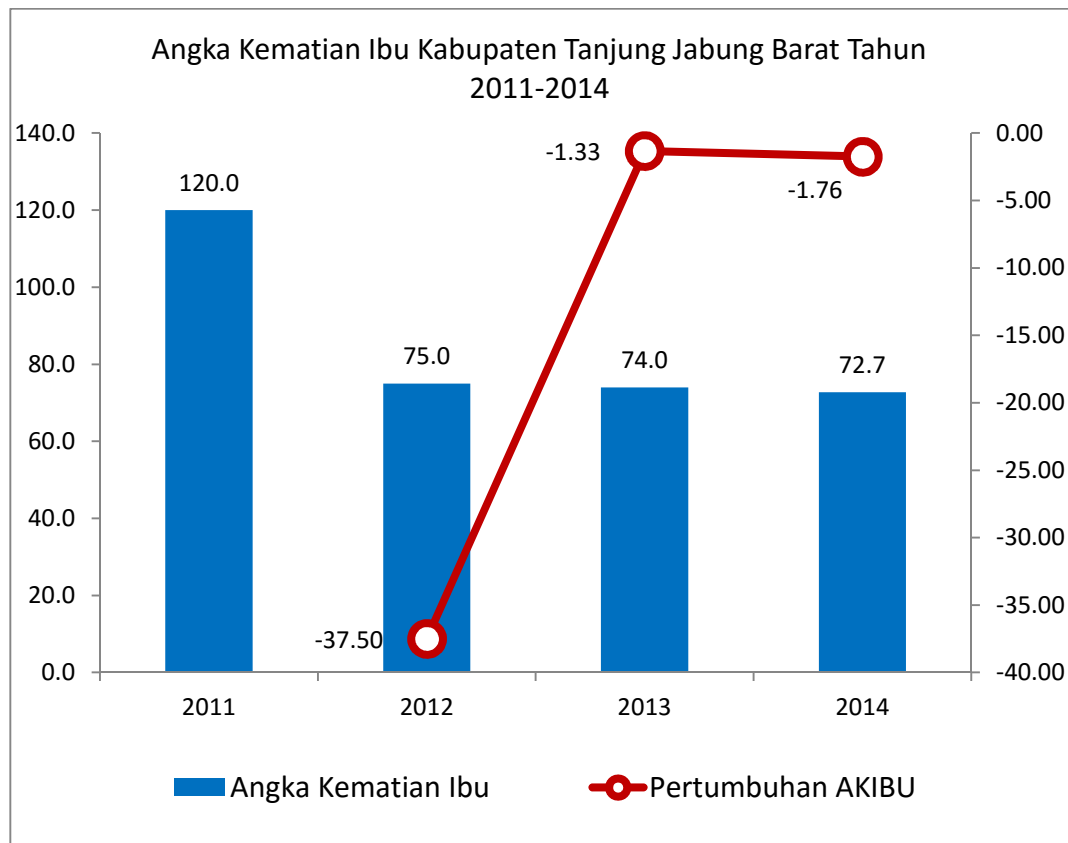
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), Kekurangan oksigen (Asfiksia) dan Infeksi. Adapun faktor penyebab tidak langsung yaitu: Keterlambatan dalam proses rujukan dikarenakan akses yang dipengaruhi oleh faktor geografis (daerah perairan dan pasang surut), Belum terbentuknya Regionalisasi rujukan kasus maternal dan neonatal ditingkat puskesmas, Berkurangnya kelengkapan Tim PONED (Pelayanan Obsetri Neonatal Esensial Dasar) Puskesmas yang sudah dibentuk dan dilatih dikarenakan pindah tempat bertugas sehingga dibutuhkan pelatihan tim yang baru, Masih ada beberapa desa yang belum maksimal menjalin kemitraan bidan dengan dukun bayi sehingga masih ada persalinan yang ditolong oleh dukun bayi yang seharusnya ditolong oleh tenaga kesehatan.

Untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dibutuhkan beberapa solusi yaitu: optimalisasi sistem rujukan dengan proses pembentukan regulasi regionalisasi rujukan tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), Melakukan pelatihan Tim PONED Puskesmas Perawatan dan Memantapkan kembali Kemitraan bidan dan dukun bayi terutama bagi desa yang belum maksimal menjalani kemitraan sehingga mengurangi peran dukun bayi secara langsung dalam menolong persalinan dengan mengalihkan peran dukun tersebut sebagai pendamping bidan dalam menolong persalinan.

Angka kematian ibu (AKI), pada tahun 2011 terjadi 8 kasus kematian ibu dari 6.658 kelahiran hidup atau 120 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 5 kasus kematian dari 6.699 kelahiran hidup atau 75 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2013 terjadi 5 kasus kematian ibu dari 6.707 kelahiran hidup atau 74 per 100.000 kelahiran hidup, serta pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan yaitu 5 kasus dari 6.871 kelahiran hidup atau 72,7 per 100.000 kelahiran hidup. Berarti Angka Kematian Ibu sudah mengalami penurunan dan sudah dapat ditekan kasus kematiannya.



Grafik T.II.C.32. Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



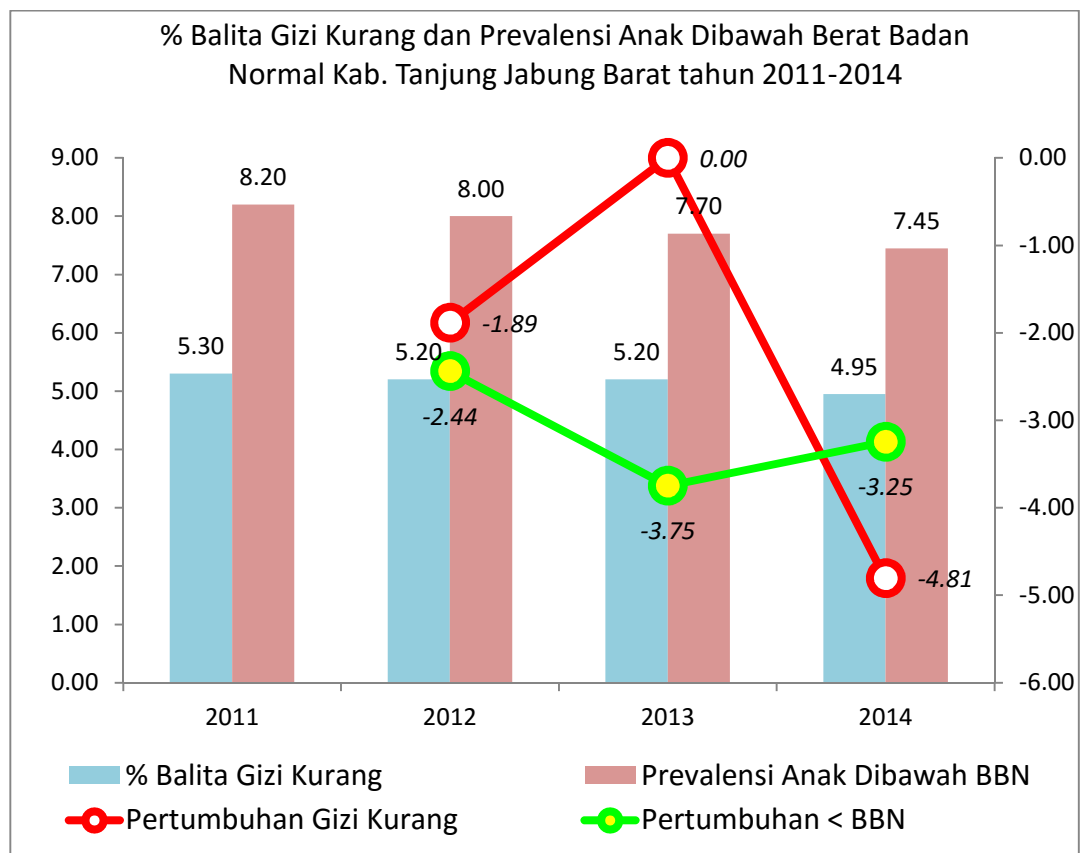
Bila di bandingkan dengan target angka kematian ibu (AKI) menurut MDGs tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini berarti untuk tahun 2014 AKI Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah lebih baik.

Selanjutnya penanganan gangguan gizi buruk juga dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka kematian balita, bayi, serta gangguan kesehatan pada ibu hamil. Indikator penanganan gizi buruk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2011 berjumlah 4 kasus, tahun 2012 berjumlah 1 kasus, pada tahun 2013



mengalami kenaikan menjadi 3 kasus dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 2 kasus. Semua balita gizi buruk yang ditemukan diberi perawatan sesuai dengan standar (100%).

Grafik T.II.C.33. Persentase Balita Gizi Kurang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Gizi buruk disebabkan banyak faktor (kompleks) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung gizi buruk dipengaruhi oleh asupan dan penyakit infeksi, sedangkan secara tidak langsung gizi buruk dipengaruhi pola asuh, pendidikan orang tua, tingkat ekonomi keluarga, faktor lingkungan, hidup berpindah-pindah/tidak menetap, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua serta penghasilan keluarga



tidak menentu, mengakibatkan penurunan daya beli dan keterbatasan persediaan bahan makanan di tingkat rumah tangga berdampak kepada asupan gizi yang kurang, hingga menjadi penyebab utama dan sekaligus penyebab langsung anak menjadi gizi buruk

Gambaran kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KH Daud Arif Tahun 2010-2014 pada Grafik dibawah ini :

1. BOR (*Bed Occupation Rate*)

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Ada kecenderungan penurunan BOR yaitu 50,01 % tahun 2011 menurun menjadi 47,56 % pada tahun 2014 atau menurun -1,46 % per tahun. Sedangkan standar Nasional untuk BOR berkisar antara 75 – 85%. BOR juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah tempat tidur. Pemanfaatan tempat tidur tertinggi terdapat di kelas III sehingga terjadi kecenderungan pemanfaatan tempat tidur yang tidak merata antara kelas III, II, I dan VIP dengan BOR kelas III tahun 2013 sebesar 59,04 % tahun 2014 62,99 %.

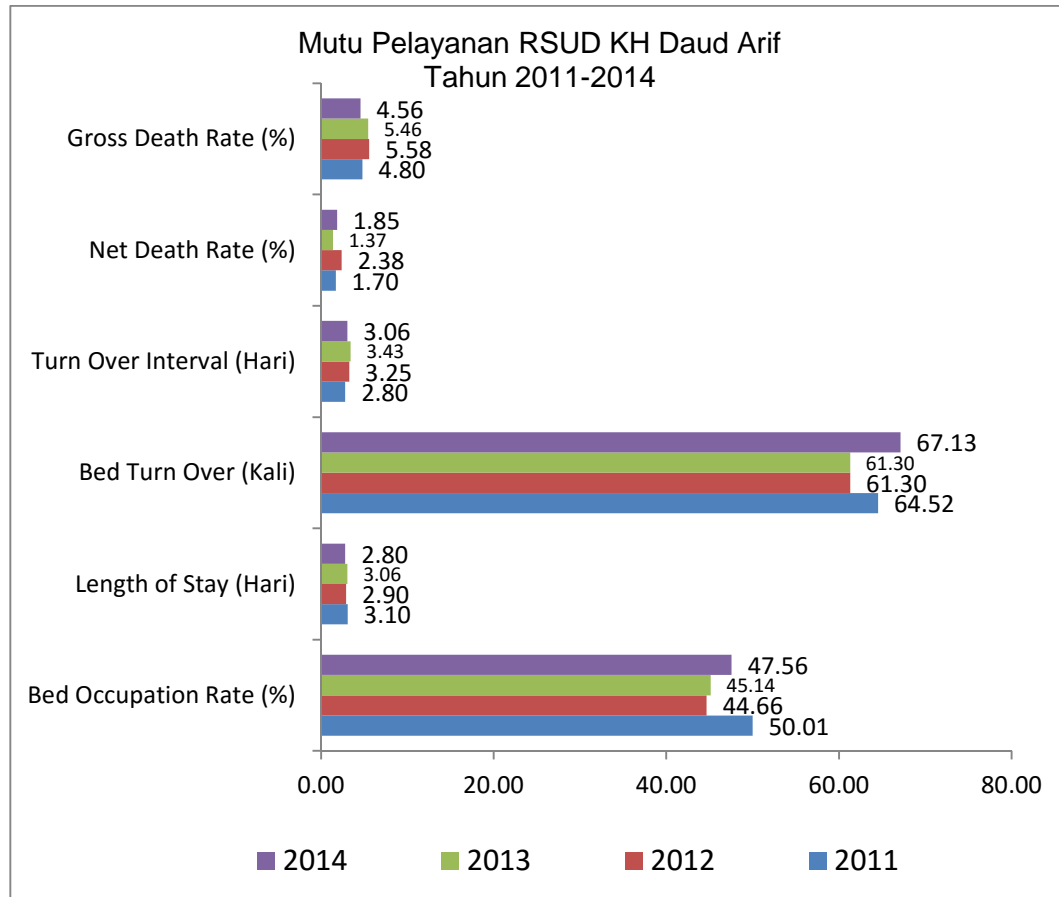
2. LOS (*Length of Stay*) merupakan salah satu indikator mutu pelayanan Rumah Sakit. Terdapat kecenderungan penurunan LOS yaitu 3,10 hari tahun 2011 menjadi 2,80 hari pada tahun 2014 atau menurun -3,14 % per tahun sehingga masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan indikator pelayanan ini baik melalui sarana pelayanan maupun pembinaan karakter petugas.

3. TOI (*Turn Over Interval*)

Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati saat ke saat sampai terisi berikutnya. Pada tahun 2014, TOI sebesar 3,06 hari meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,80 hari, sedangkan standar nasional untuk TOI berkisar 1 – 3 hari.



Grafik T.II.C.34. Mutu Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2011-2014



4. GDR (*Gross Death Rate*) atau Angka Kematian Kasar.

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat. Terdapat penurunan GDR yaitu dari 4,80 % tahun 2011 menjadi 4,56 % tahun 2014, sedangkan standar Nasional untuk GDR yaitu dibawah dari 3%.

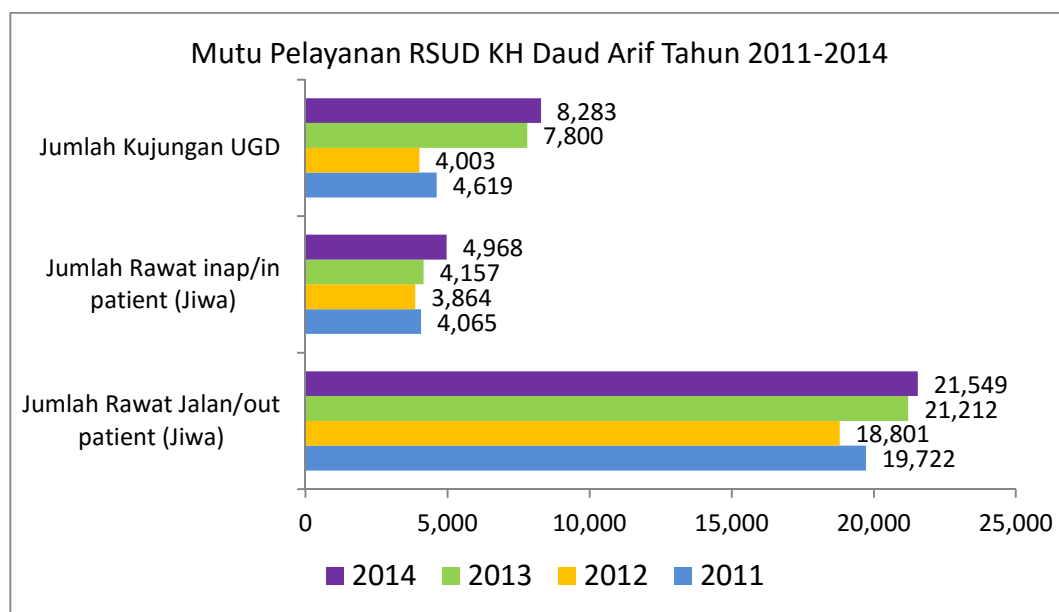
5. NDR (*Net Death Rate*) atau Angka Kematian Bersih

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian diatas 48 jam setelah dirawat. Terdapat kenaikan NDR yaitu dari 1,70 % tahun 2011 menjadi 1,85 % tahun 2014, sedangkan standar nasional untuk NDR yaitu dibawah dari 2,5%.



6. Jumlah kunjungan rawat inap dan jumlah kunjungan rawat jalan serta jumlah kunjungan UGD selama tahun 2011-2014 terus meningkat, masing-masing naik sebesar 7,38 % dan 3,25 % serta 29,24 % per tahun

Grafik T.II.C.35. Mutu Pelayanan RSUD KH Daud Arif Tahun 2011-2014



Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD KH Daud Arif dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan 2) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari tim pelaksana akreditasi (tim penyusun standar pelayanan kesehatan / dokumen-dokumen akreditasi) sehingga belum terlaksana sesuai target.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1) Memberikan pelayanan dokter spesialis semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peralatan kesehatan yang



ada; 2) Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi; 3) Pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman; dan 4) Adanya Komitmen yang kuat dari masing-masing lini sehingga tercapainya akreditasi.

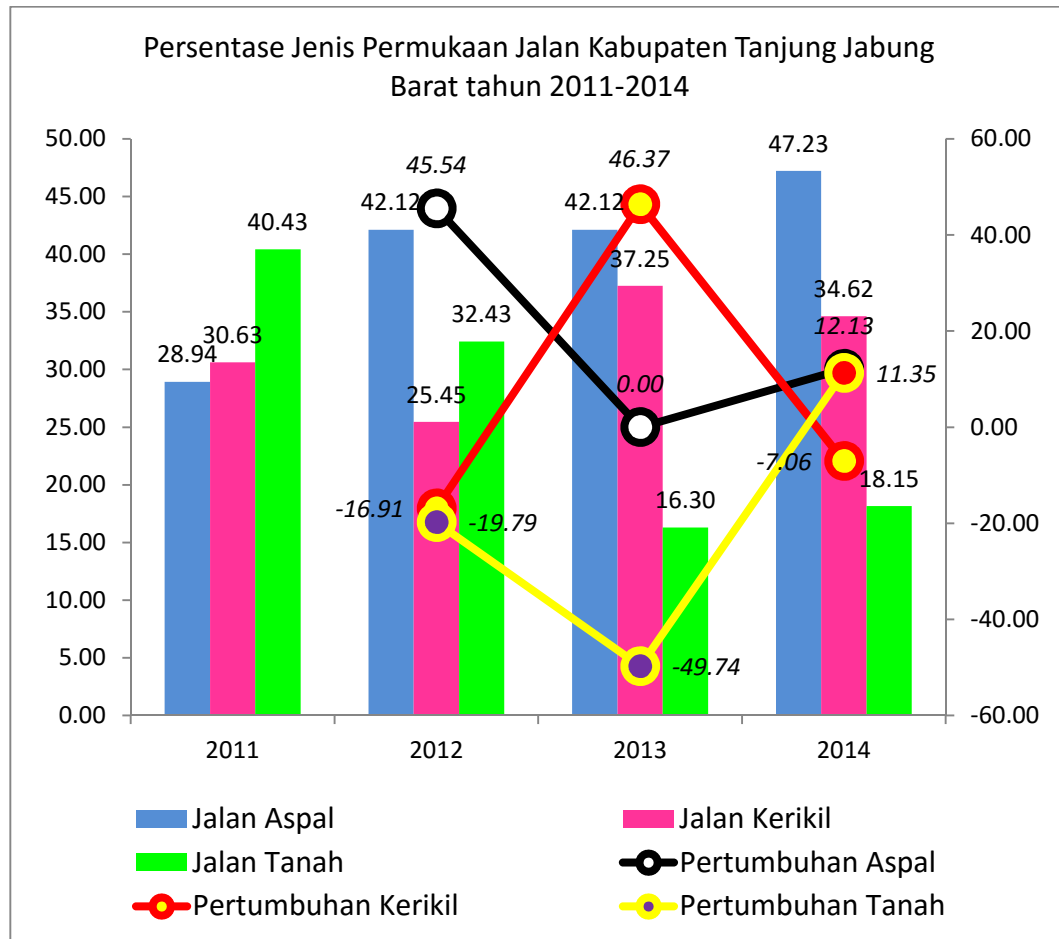
2.3.1.3. Pekerjaan umum

Infrastruktur merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi. Ketersediaan Infrastruktur yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jalan aspal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama tahun 2011-2014 yaitu 627,86 km pada tahun 2011 meningkat pada tahun 2014 menjadi 860,35 km atau rata-rata bertambah 11,27 % per tahun. Untuk jalan kerikil meningkat dari 531,85 km pada tahun 2011 menjadi 630,64 km pada tahun 2014 atau rata-rata naik 9,03 % per tahun. Sedangkan untuk jalan tanah menurun dari 576,68 km pada tahun 2011 menjadi 330,62 km pada tahun 2014 atau rata-rata turun - 12,11 % per tahun.



Grafik T.II.C.35. Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014

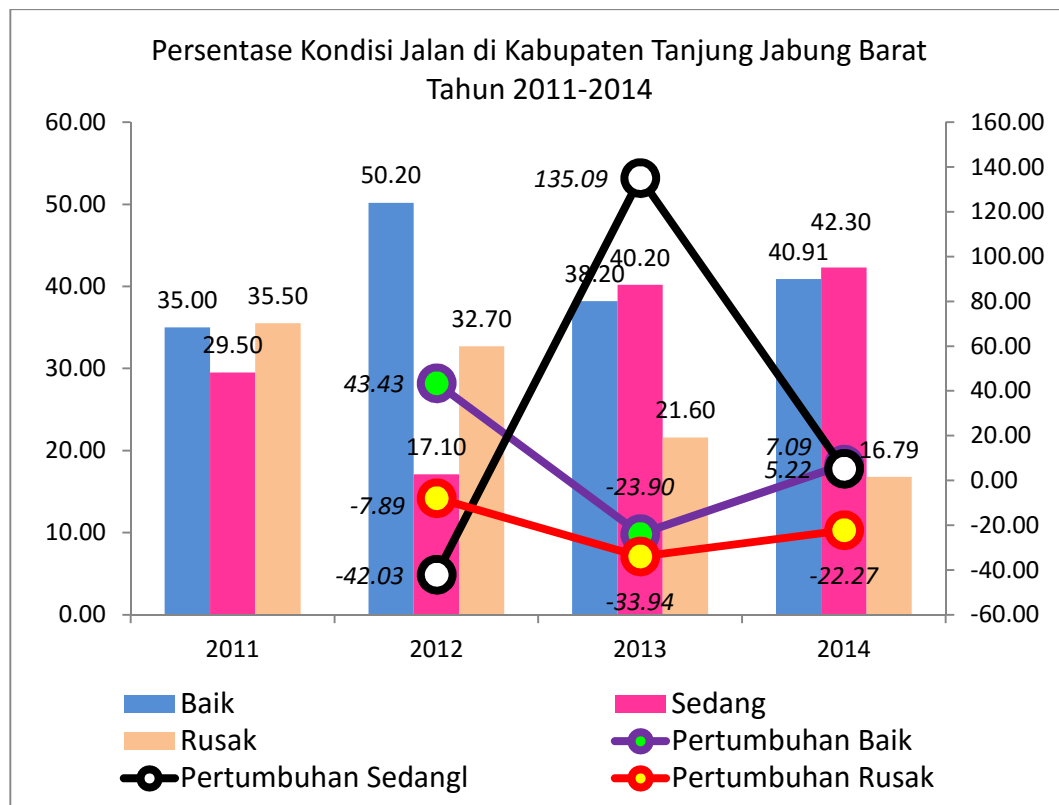


Secara persentase rata-rata jenis permukaan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 yang terbanyak adalah jalan aspal (40,10 %), diikuti jalan kerikil (31,99 %) dan yang paling sedikit adalah jalan tanah (26,83 %). Khusus untuk jalan aspal selain paling besar juga mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata naik sebesar 19,22% per tahun. Untuk jalan kerikil persentasenya agak berfluktuasi namun cenderung naik yaitu rata-rata naik 7,47 % per tahun. Sedangkan untuk jalan tanah selain paling kecil juga mengalami



penurunan setiap tahun dengan rata-rata turun sebesar -19,39 % per tahun.

Grafik T.II.C.35. Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014



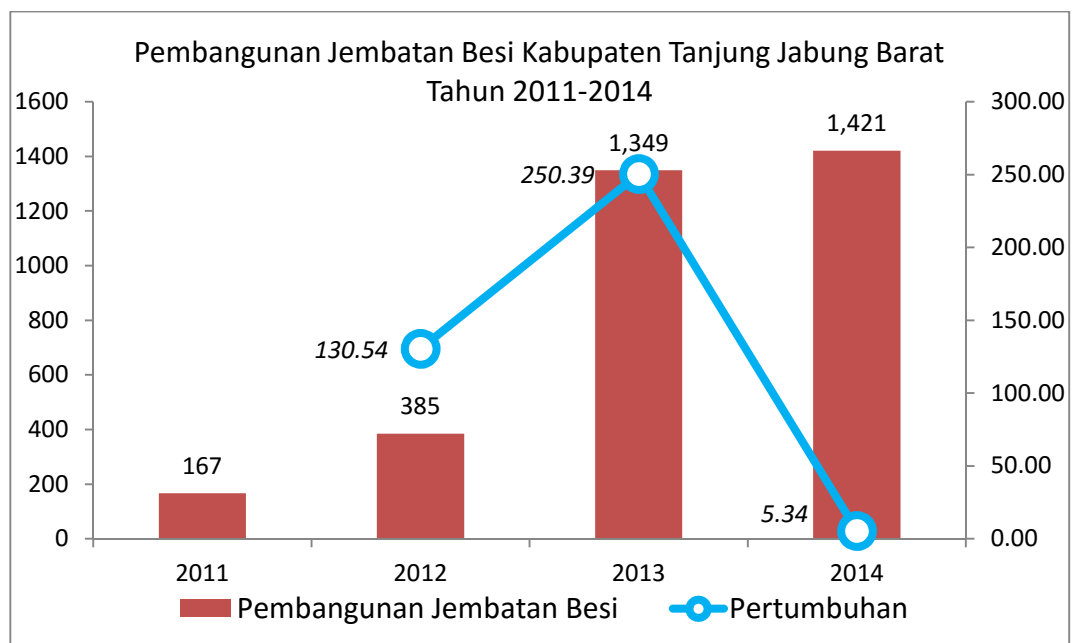
Walaupun persentase jalan dengan kondisi baik relatif menurun kondisi ini berbanding lurus dengan penurunan persentase kondisi jalan rusak, dan berkurangnya persentase kondisi jalan baik tersebut lebih disebabkan pada aktivitas proyek maupun peningkatan kelas jalan yang tahapannya belum dilaksanakan sampai dengan pengaspalan sehingga masih dikategorikan pada kondisi sedang dan dapat dilihat bahwa persentase kondisi jalan kategori sedang setiap tahun persentasenya relatif meningkat.



Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan, Merehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan sarana penampungan air Hujan.

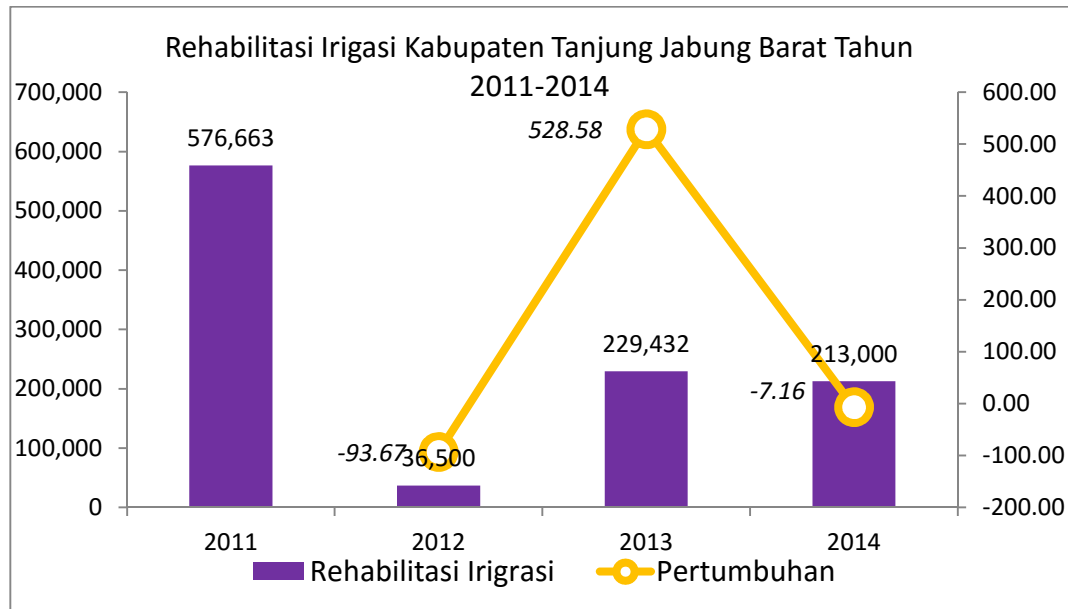
Dari pembangunan jembatan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membangun jembatan dengan bentang total 3.322 meter atau 3,322 Km dan didukung dengan pembangunan jalan baru melalui kerja sama dengan TNI dengan kegiatan TMMD nya serta peningkatan jalan sepanjang 80,97 Km atau rata-rata 20,24 Km untuk setiap tahunnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses transportasi darat masyarakat.

Grafik T.II.C.36. Pembangunan Jembatan Besi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

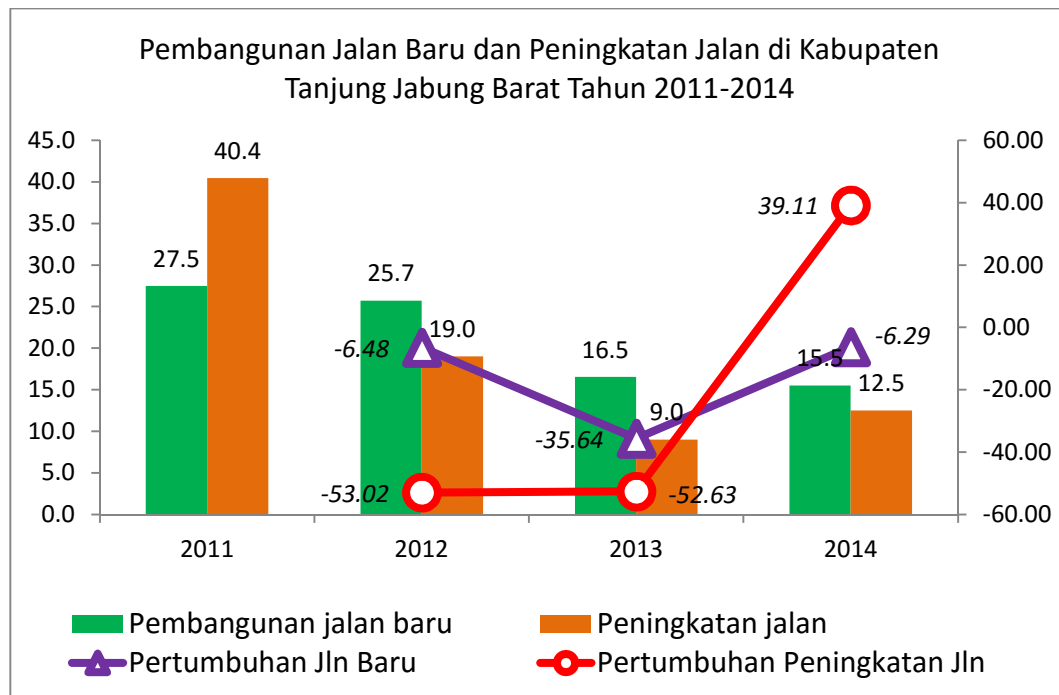




Grafik T.II.C.37. Rehabilitasi Irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



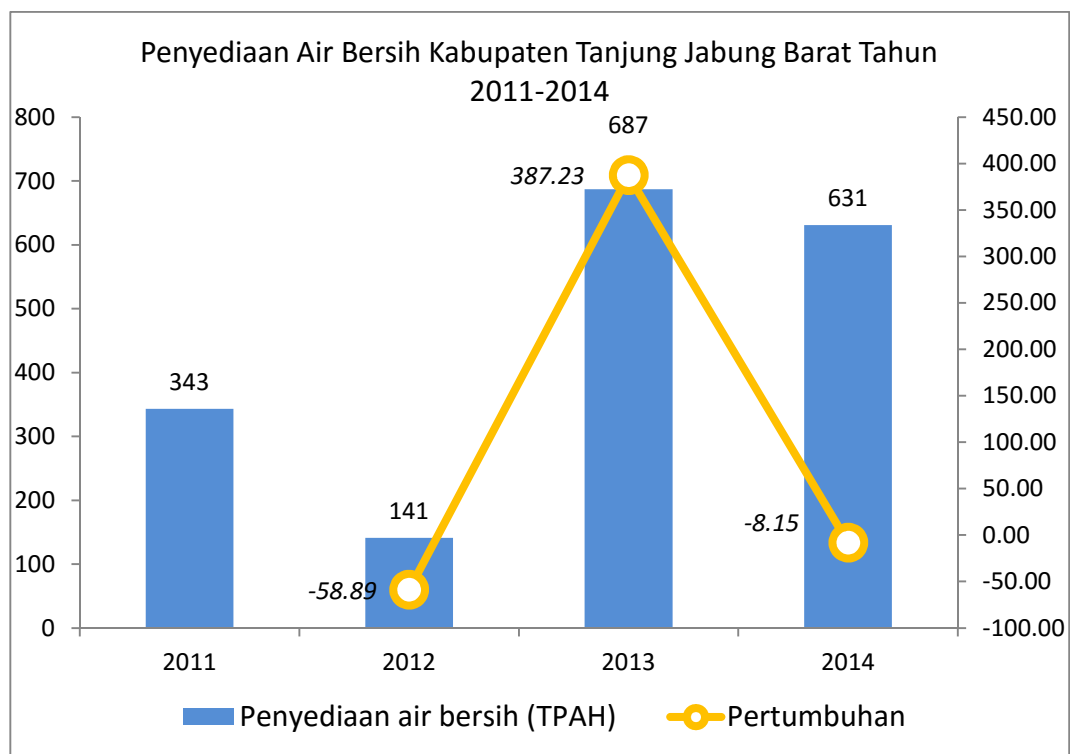
Grafik T.II.C.38. Pembangunan Jalan Baru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Penyediaan Air Bersih dengan pembangunan TPAH dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih/minum masyarakat dan apabila dihitung secara linear bahwa setiap 1 (satu) sarana TPAH dibangun untuk memenuhi kebutuhan 10 – 15 Kepala Keluarga (KK) dengan anggota keluarga sebanyak 4 jiwa setiap KK nya maka untuk tahun 2011 – 2014 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah meningkatkan akses kebutuhan air bersih/minum melalui pembangunan sarana TPAH untuk 72.000 – 109.000 jiwa atau berkisar 23% - 35% dari prediksi jumlah penduduk tahun 2014.

Grafik T.II.C.39. Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatannya antara lain : 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebagian besar wilayahnya



berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah; 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum merata di setiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat; 3) Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya; 4) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek; 5) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan sebagian konstruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang; 6) Kurangnya pembinaan dan pengawasan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang kurang menjaga dan merawat sarana/prasarana umum yang telah dibangun; 6) Sistem drainase yang belum maksimal yang dapat berakibat pada masih adanya di beberapa tempat yang menjadi daerah-daerah genangan air terutama air hujan, hal ini sangat berbahaya sekali karena dapat mengakibatkan banjir pada suatu wilayah serta memperpendek umur konstruksi jalan.

Solusi dari berbagai permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 : 1) Membuat jalur alternatif dalam pembangunan lingkungan perdesaan untuk mengupayakan ketersediaan material pembangunan di lokasi kegiatan; 2) Meningkatkan pembangunan jalan dengan menggunakan *Rigid Pavement* sehingga jalan dapat mendukung



beban/kendaraan yang lewat sesuai dengan kelas/tonnase jalan sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik; 3) Semaksimal mungkin untuk secepatnya membangun sarana prasarana penghubung untuk meminimalkan biaya pengangkutan material perkerasan ke lokasi pembangunan; 4) Mengupayakan pengangkutan material untuk kegiatan dengan volume yang relatif besar dengan penghitungan yang lebih cermat melalui transportasi air; 5) Melaksanakan anggaran untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi beton, sehingga Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya; 6) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan masyarakat untuk menyerahkan lahan agar pengembangan jalan lingkungan dapat dilaksanakan; 7) Meminimalkan titik – titik genangan melalui revitalisasi saluran drainase skunder maupun tersier secara efektif dan efisien; 8) Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan juga kegiatan PKK dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pemeliharaan serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana publik yang telah dibangun oleh pemerintah.

2.3.1.4. Perencanaan pembangunan

Beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang dalam melaksanakan tugas yang diemban khususnya di bidang perencanaan dengan mengantisipasi beberapa masalah antara lain : 1) Relatif menumpuknya kegiatan pembangunan sarana/prasarana sehingga interval waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk dilakukan monitoring evaluasi dalam penilaian progress; 2) Belum tersedianya sistem informasi untuk mendapatkan sebagian dokumen perencanaan secara lebih detil sehingga monitoring/evaluasi untuk jenis-jenis



pekerjaan yang memerlukan uraian lebih lengkap tentang alamat maupun volume pekerjaan dalam mendukung analisa manfaat dan daya ungkit kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Beberapa solusi pemecahan masalah : 1) Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan; 2) Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia; 3) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan; 4) Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas; 5) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat; 6) Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.3.1.5. Perhubungan

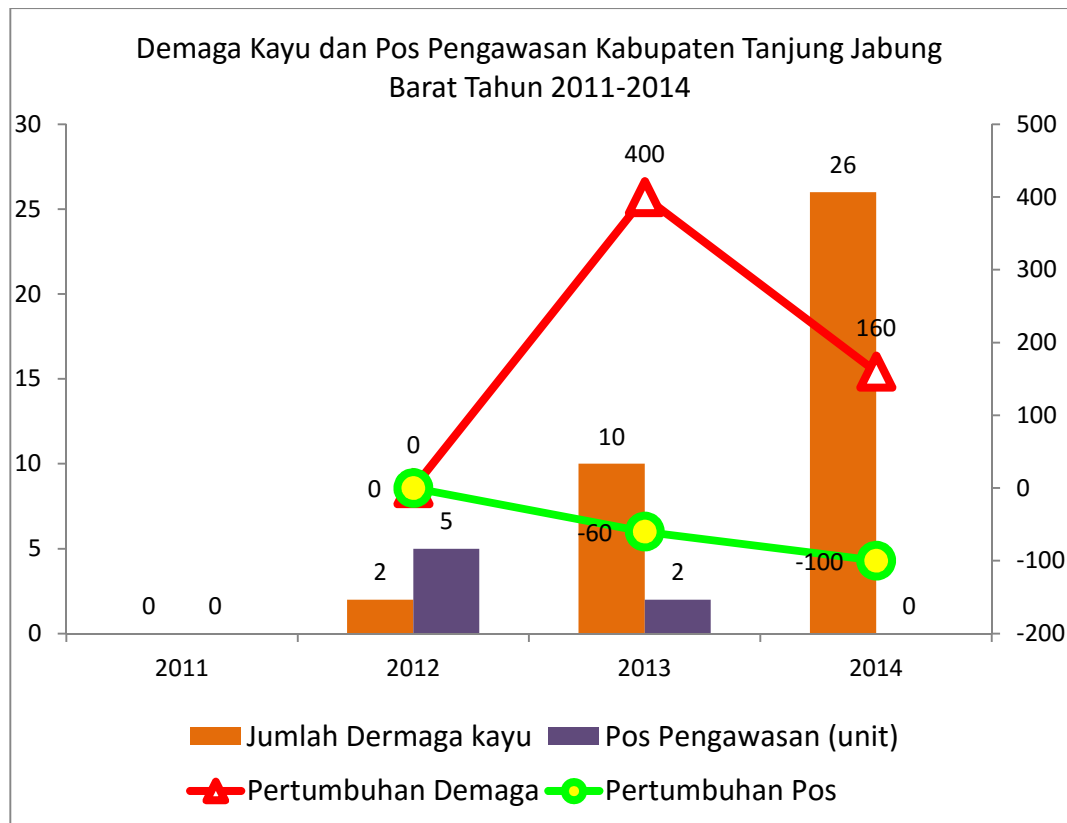
Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki 2 sungai besar dan puluhan anak sungai maka keberadaan dermaga-dermaga baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian.

Pengembangan sektor perhubungan dilaksanakan terkait dengan peningkatan sarana transportasi khususnya untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun daerah lain sekitar perbatasan dengan Kabupaten/Propinsi berdekatan,



hal ini terlihat dari jumlah dermaga yang dibangun sebagian besar adalah dermaga kayu.

Grafik T.II.C.39. Perkembangan Dermaga Kayu dan Pos Pengawasandi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

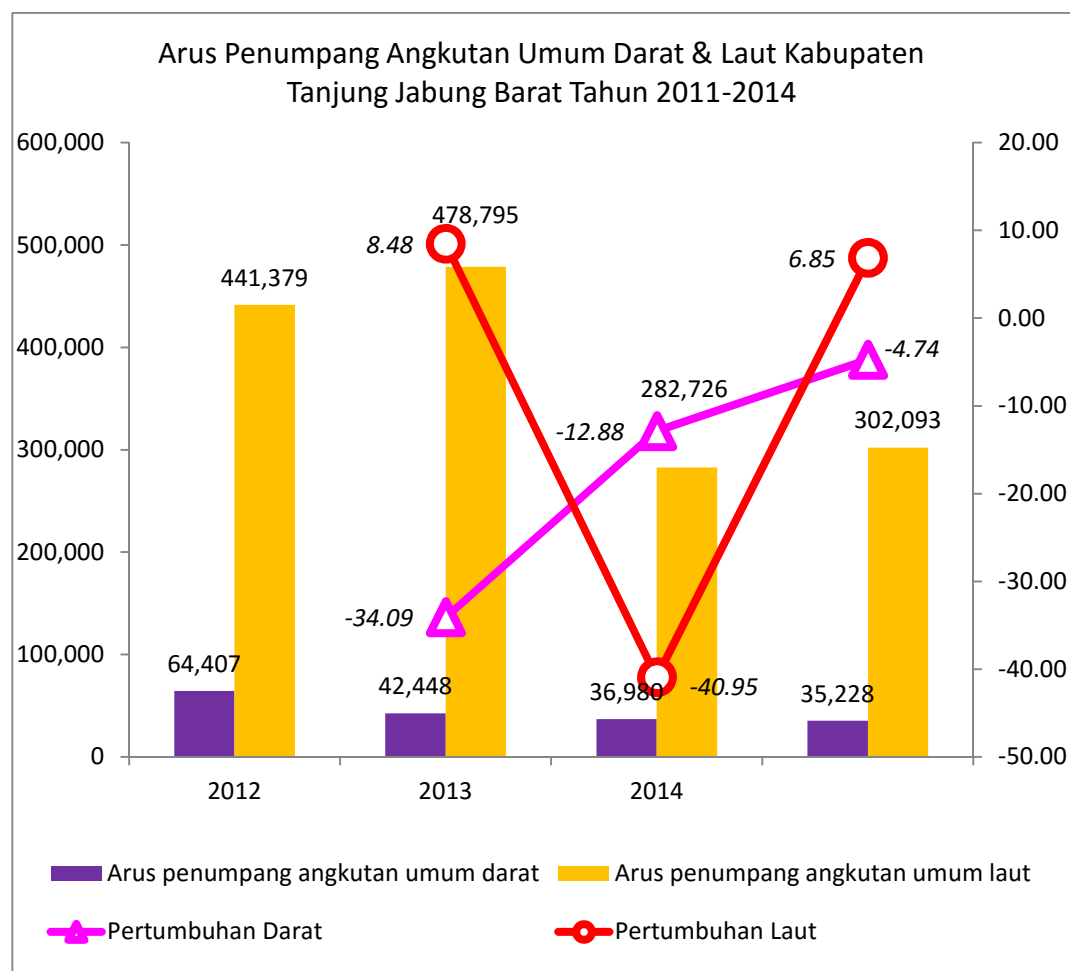


Arus penumpang darat maupun laut (datang dan pergi) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif menurun dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya, hal ini sebagai salah satu indikator bahwa akses transportasi jalan darat semakin terbuka dan sebagian masyarakat mulai menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasinya dan harus mulai diimbangi dengan ketersediaan jalan yang memadai untuk mengantisipasi tingkat kepadatan yang melebihi kapasitas karena *over load*



kendaraan dibanding dengan jalan akan meningkatkan resiko pengguna jalan.

Grafik T.II.C.40. Arus Penumpang Angkutan Umum Darat dan laut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014



Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain sebagai berikut:
1) Terbatasnya anggaran untuk biaya operasional petugas retribusi menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal; 2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang dikantor dinas maupun di pos pengawasan LLASDP



dan LLAJ sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi berdampak terhadap Penerimaan/Pendapatan Daerah; 3) Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis bidang LLAJ, ASDP dan laut; 4) Upaya pemecahan masalah yang dihadapi yaitumengusulkan penambahan anggaran ditahun berikutnya dengan skala prioritas secara proporsional sehingga program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dan menambah jumlah sarana prasarana serta personil yang memiliki kompetensi serta latar belakang pendidikan dibidang perhubungan.

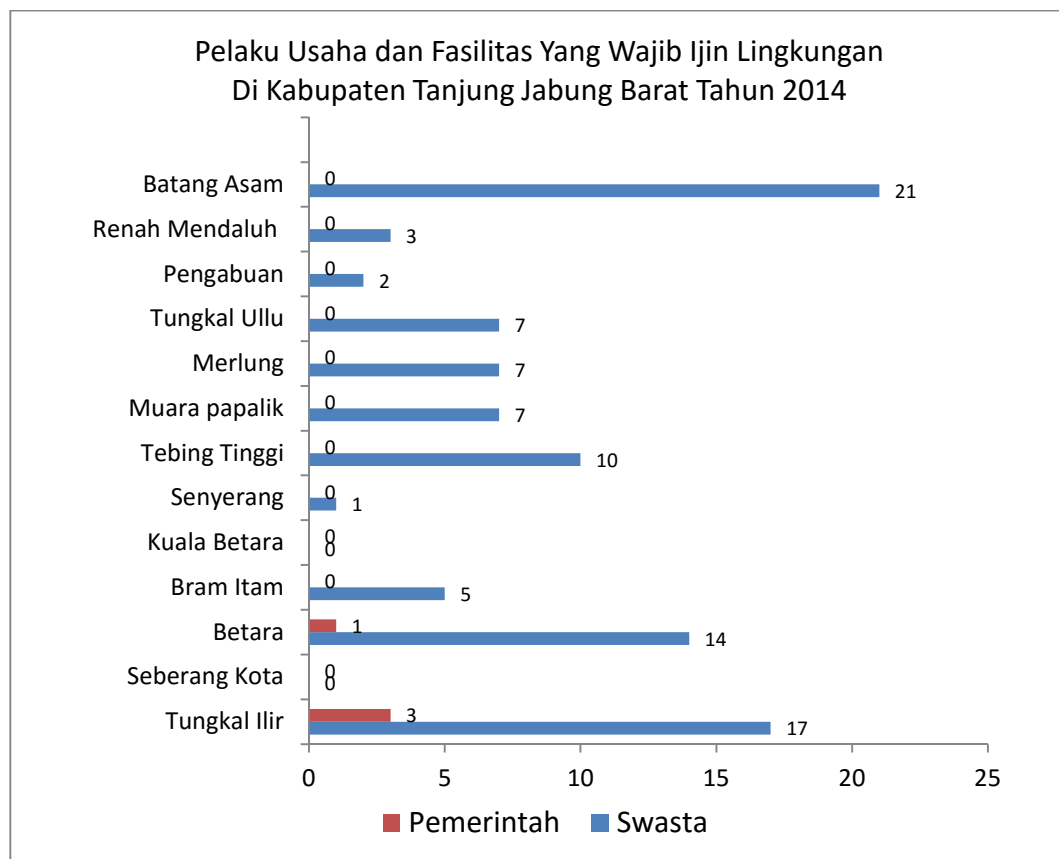
2.3.1.6. Lingkungan hidup

Permasalahan yang dihadapi : 1) Masih adanya sebagian pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang belum memahami Peraturan dan Izin Lingkungan; 2) Masih kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA); 3) Belum adanya laboratorium di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 4) Perlu di bangunya Laboratorium untuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Solusi pemecahan masalah : 1) Meningkatkan dan mengintensifkan sosialisasi tentang peraturan serta izin lingkungan melalui berbagai media dan kesempatan serta sasaran; 2) Sosialisasi kepada pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA); 3) Di Bangunnya laboratorium Badan lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Grafik T.II.C.40. Persentase Pelaku Usaha dan Fasilitas Yang Wajib Ijin Lingkungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Semua pelaku usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melengkapi kegiatan usahanya dengan dokumen lingkungan sesuai skala usaha yang mereka lakukan, untuk menjamin ketaatan terhadap pengendalian lingkungan tersebut maka BLHD melaksanakan beberapa tahapan pengawasan serta pembinaan bekerja sama dengan instansi terkait baik secara horisontal maupun vertikal.

Karena keterbatasan anggaran dan SDM maka beberapa sarana pemerintah meliputi gedung dan fasilitas umum maupun sosial yang (seharusnya) wajib disertai dengan dokumen lingkungan belum dapat direalisasikan dengan maksimal yaitu 21,1% dan data jumlah fasilitas



pemerintah di atas adalah sebatas fasilitas kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas Induk/Perawatan serta LLASDP di Tungkal Ilir, apabila penghitungan denominator dilakukan terhadap semua fasilitas pemerintah maka angka tersebut menjadi relatif sangat kecil.

Dalam upaya mengatasi masalah persampahan, Kantor PPKTB saat ini baru dapat mengelola sampah di dua kecamatan yaitu kecamatan Tungkal Ilir sebagian Kecamatan Bramitam dan Kecamatan Betara dengan kapasitas sampah \pm 15 kubik per hari dimana kapasitas tersebut belum mencapai setengah dari debit sampah setiap harinya sehingga masih ditemukan penumpukan sampah pada beberapa titik, beberapa keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa masalah antara lain : 1) Terbatasnya sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitas sehingga sangat mempengaruhi operasional kinerja pada Kantor PPKTB; 2) Sarana dan Prasarana kantor, operasional kendaraan, maupun peralatan kebersihan yang terbatas.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 1) Perlu penambahan jumlah SDM yang berkualitas di Bidang masing- masing Kegiatan Kantor PPKTB agar kinerja lebih baik di tahun selanjutnya; 2) Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana baik prasarana kantor maupun bidang penataan kota, bidang pertamanan serta bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.

2.3.1.7. Pertanian

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sesuai dengan Iklim yang dimiliki di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka sebagian besar struktur tanah yang terbentuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tanah Padzolik seluas 226.608,7 Ha (45,46%) organosol 113.421,7 Ha (22,75%), Gleisol



95.032,4 Ha (19,07%), Alluvial 59.944,2 Ha (12,03%) dan Andosol 3.418,3 Ha (0,69%).

Program/Kegiatan pro rakyat yang direncanakan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD periode sebelumnya yakni pemberian sertifikat gratis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat direalisasikan karena alasan kekurangan tenaga teknis yang dimiliki oleh pihak BPN untuk melaksanakan kegiatan pengukuran.

2.3.1.8. Kependudukan dan catatan sipil

Pada tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan secara *mobile* jemput bola dilaksanakan sampai ke tingkatan desa yang pada tahun 2014 telah dilaksanakan dengan realisasi sebanyak 3.944 akta-akta catatan sipil dari target realisasi sebesar 3.400 akta-akta catatan sipil atau sebesar 116%. 2) Pelaksanaan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil telah terlaksana penataan ulang dokumen dari tahun 1996 s/d 1998 sebanyak 23.280 akta kelahiran atau 100% dari target. 3) Terhadap perekaman KTP-el hingga tahun 2014 telah dilaksanakan perekaman sebanyak 171.958 orang dari 218.282 wajib KTP-el atau sebanyak 78,78% yang mana hingga saat ini terus dilakukan perekaman baik di kantor Dinas Dukcapil maupun di kecamatan dan secara *mobile* di desa-desa; 4) Pelaksanaan Program Desa Binaan menuju Desa Percontohan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Serdang Jaya Kecamatan Betara. Tujuan Desa Binaan adalah peningkatan pelaksanaan administrasi kependudukan di tingkat desa berjalan tertib dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. *Outcome* terhadap program Desa Binaan di Desa Serdang Jaya pada tahun 2014 adalah penerbitan 737 KK



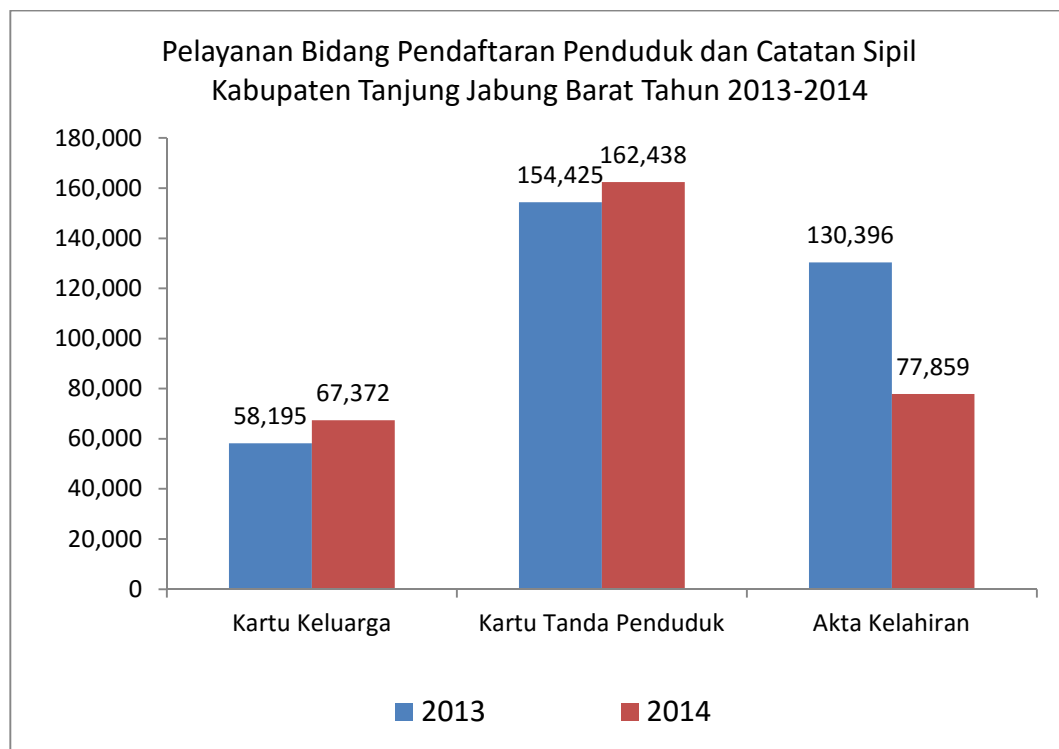
atau 100% dari sasaran keluarga yang belum memiliki KK di Desa Serdang Jaya.

Penyelenggaraan urusan kependudukan tetap masih dihadapkan kepada masalah antara lain ketergantungan penggunaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el terhadap pemerintah pusat sehingga apabila terjadi kerusakan atau gangguan teknis menghambat pelaksanaan perekaman dan pencetakan KTP-el dikarenakan eksklusivitas dan *security* peralatan KTP-el yang membutuhkan keahlian khusus dalam perbaikan baik *hardware* maupun *software*. Selain itu, permasalahan dalam pelayanan di desa-desa adalah masih banyaknya desa yang belum memiliki jaringan listrik sehingga menyulitkan penerbitan dokumen dalam pelayanan di tempat.

Sebagai solusi permasalahan tersebut terhadap kerusakan Peralatan KTP-el adalah dengan memberdayakan petugas yang ada pada Dinas Dukcapil dengan melakukan penanganan peralatan KTP-el secara hati-hati dan teliti sesuai dengan keahlian dan pengetahuan petugas tersebut sebagaimana tetap berpedoman pada standar operasional penggunaan peralatan yang dianjurkan serta perlu dilakukan *upgrading capability* terhadap petugas dengan mengutus untuk mengikuti pelatihan di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depdagri. Untuk pelayanan di desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik adalah dilakukan dengan melakukan strategi jemput bahan dan pencetakan dokumen kependudukan dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Grafik T.II.C.41. Target dan Realisasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2014



Capaian kinerja pada Dinas Dukcapil telah terlaksana dengan baik. Berkenaan dengan penerbitan KTP-el telah mencapai 162.437 orang dari wajib KTP-el sebanyak 218.282 orang atau 74,42 %, dimana sampai dengan tahun 2014 pencetakan KTP-el masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ditugaskan untuk melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. Untuk penerbitan KK sebagaimana tergambar dari tabel telah mencapai 67,372 orang dari sasaran KK sebanyak 86.872 orang atau 77,55 % dan ini akan terus meningkat seiring dengan optimalisasi pelayanan aktif dari Dinas Dukcapil.

Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) yang hingga saat ini



masih terus dilakukan spin-off (pemisahan) dari data awal Tanjung Jabung menjadi Data Tanjung Jabung Barat dan sedang dilakukan *intensive updating* di mana jumlah kepemilikan akte kelahiran real lebih dari data yang dipublish

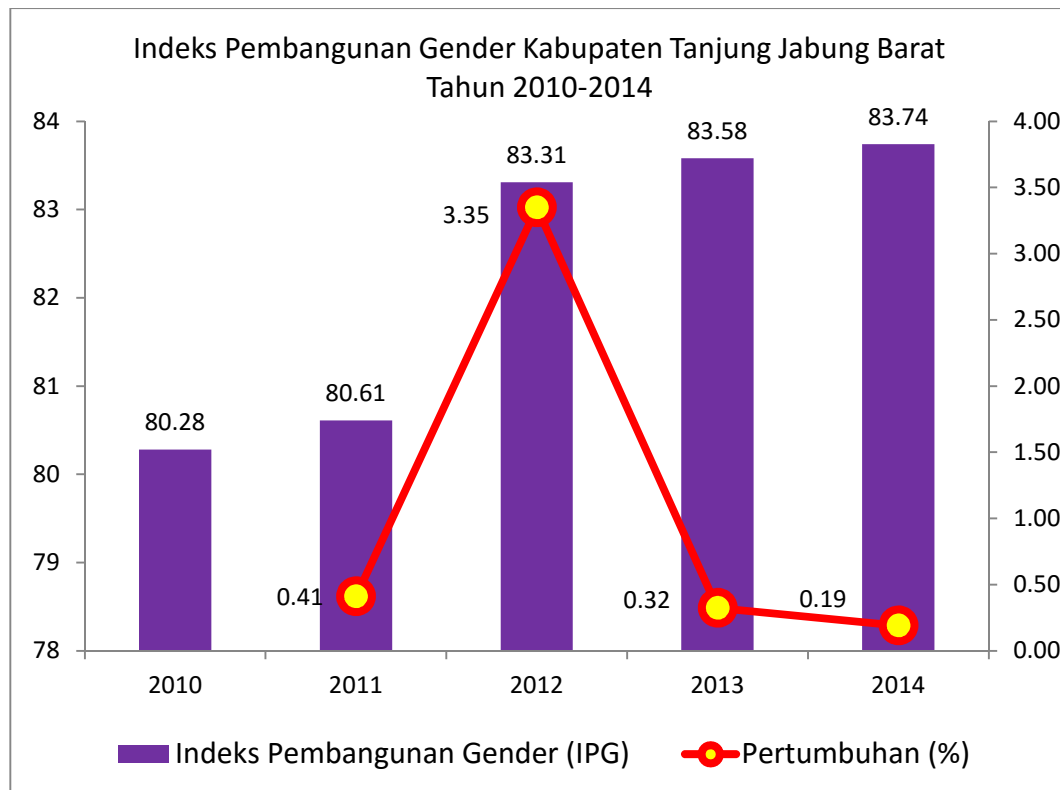
2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-Related Development Index* (GDI). IPG adalah indikator komposit yang diukur melalui angka harapan hidup sejak lahir, angka melek huruf, dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah, tinggi, serta Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*), dan dihitung berdasarkan jenis kelamin. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Gender selama periode tahun 2010-2014 yaitu dari 80,28 tahun 2010 meningkat menjadi 83,74 pada tahun 2014 atau rata-rata naik sebesar 1,07 % per tahun. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara rata-rata selama periode tahun 2010-2014 adalah 82,30. Berdasarkan capaian rata-rata tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dibawah IPG Provinsi Jambi (85,69) dan hanya menempati posisi ke 7 dari 10 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.



Grafik T.II.C.42. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanjung
Jabung Barat Tahun 2010-2014



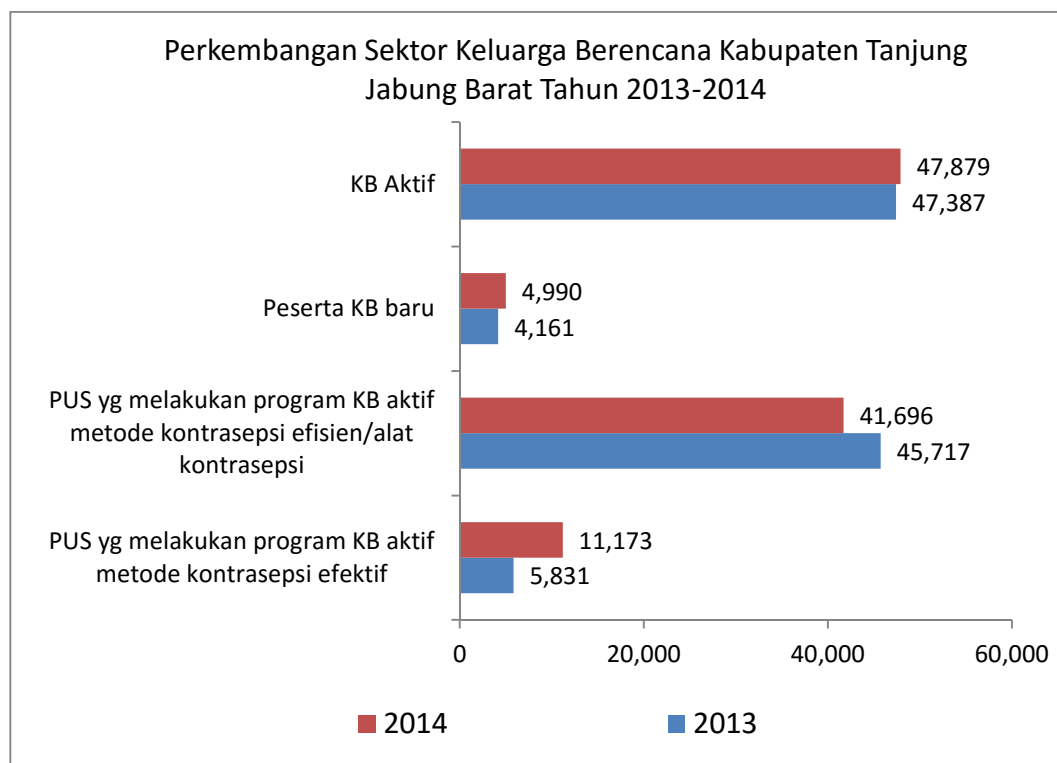
Pelayanan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, sampai saat ini baru sebatas melayani konseling, informasi dan pendampingan korban untuk tahap selanjutnya sampai ke pengadilan. Pelayanan korban belum sampai pada tahap pemberdayaan korban, baik melalui pelatihan maupun pemberian bantuan modal usaha bagi korban yang memerlukan, tetapi pada dasarnya semua korban yang datang melapor dapat dilayani dengan baik dan kasusnya dapat diselesaikan, baik melalui mediasi sampai ke jalur hukum.



2.3.1.10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja Bidang KB meningkatnya capaian indikator dari tahun sebelumnya. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif (MKJP) mengalami peningkatan sebesar 91,61% dan PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi (Non MKJP) mengalami penurunan sebesar (8,79 %). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan program KB lebih baik dimana PUS lebih banyak beralih dari Non MKJP ke MKJP.

Grafik T.II.C.43. Perkembangan Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010-2014





Peserta KB baru mengalami peningkatan sebesar 19,92 % dari tahun 2013 dan KB aktif mengalami peningkatan sebesar 1,04% dari tahun 2013, untuk cakupan kepersertaan PUS di tahun 2014 berjumlah 61.373 PUS, yang melaksanakan program KB sebanyak 52.869 PUS atau sebesar 83,14 %, sedangkan 16,86% adalah PUS yang tidak ber KB (*Unmeet Need*) dengan alasan-alasan hamil, ingin anak segera (IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan kelompok ini kedepan akan di jadikan sebagai sasaran peserta KB baru.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan masih mengalami hambatan/kendala dalam upaya pencapaian kinerja pada tahun 2014 antara lain : 1) Masih minimnya sumberdaya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dari tenaga motivator KB dilapangan; 2) Sulitnya melaksanakan pelayanan KB dan pergerakan masyarakat (Perempuan) di wilayah terpencil; 3) Minimnya instrument dan pemahaman program bagi tenaga ditingkat lapangan khususnya terkait pemberdayaan perempuan.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi beberapa tenaga lapangan baik di kabupaten maupun provinsi; 2) Melaksanakan monev di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan kinerja petugas lapangan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang KB; 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan penyebarluasan informasi melalui brosur, spanduk dan selebaran.

2.3.1.11. Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : a) Kegiatan Santunan Pemulangan Tuna Sosial :kegiatan ini merupakan



kegiatan yang bersifat insidental yaitu apabila ada masyarakat yang memohon bantuan akan diberikan bantuan semaksimal mungkin sesuai aturan yang berlaku; 2) Kegiatan Operasi Terpadu Tuna Sosial :dalam pelaksanaannya perlu koordinasi dengan SKPD terkait, namun kadang kala jadwal yang sudah disusun berbenturan dengan kegiatan SKPD terkait tersebut sehingga hanya dapat melaksanakan Operasi Yustisi ini sebanyak 2 kali.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : a) Kegiatan TKSM adalah kegiatan dengan capaian program pembinaan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM) dalam pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.Kegiatan pembinaan untuk pemberdayaan TKSM sudah dilaksanakan namun pelaksanaan pendataan tentang masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak sempat dilaksanakan dikarenakan masalah administrasi keuangan yang mengakibatkan keterbatasan waktu yang tidak lagi memungkinkan; b) Kegiatan Peningkatan Perananan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang 45. Kegiatan ini adalah kegiatan untuk mendukung dan meningkatkan Peranan dan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang (DHC) 45. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Legiun Veteran dan DHC 45 sehingga segala kebutuhannya dikelola dan diusulkan serta dilaksanakan oleh Legiun Veteran dan DHC 45 dengan koordinasi mengusulkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

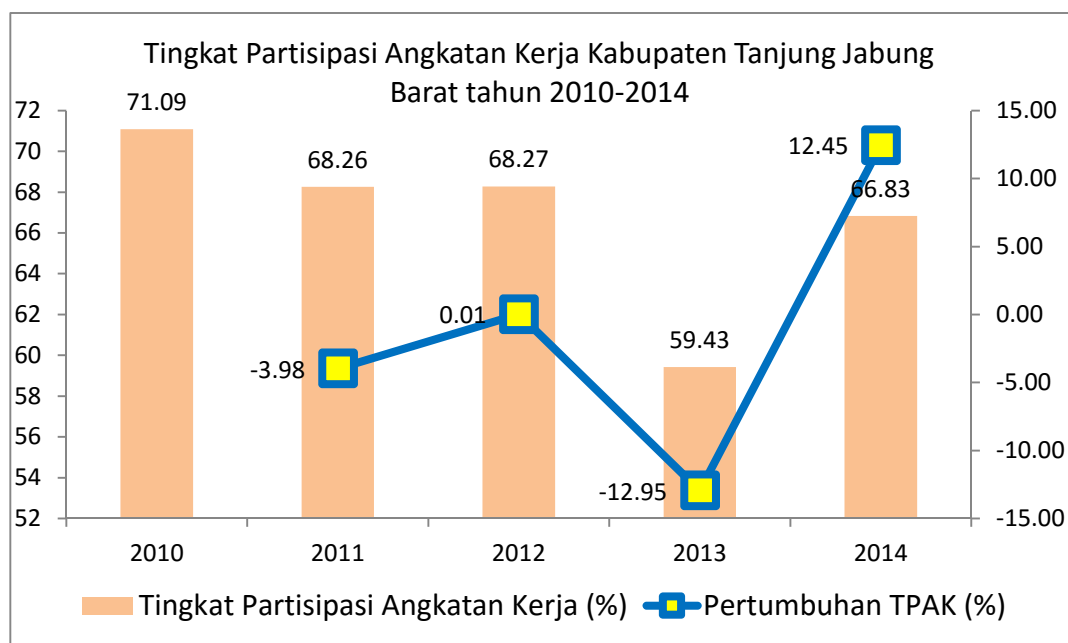
2.3.1.12. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2010-2014 cenderung menurun yaitu dari 71,09 % tahun 2010 menurun menjadi 66,83 % tahun 2014 atau rata-rata turun sebesar - 1,12 % per tahun. Pada periode 5 tahun terakhir ini rata-rata Tingkat



Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru mencapai 66,78 % per tahun. Hasil ini masih lebih baik dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi (65,88 % per tahun) dan menduduki rangking ke 5 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Grafik T.II.C.44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010-2014



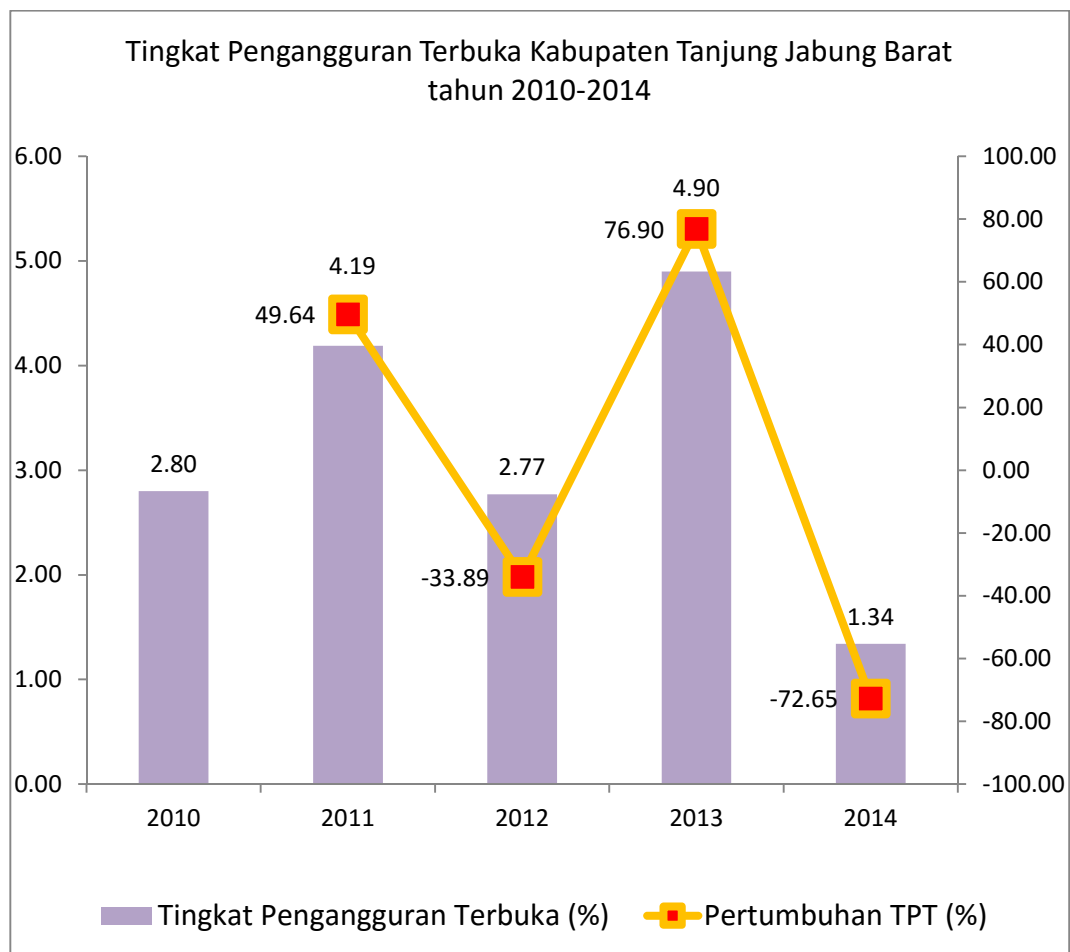
Program Peningkatan Kesempatan Kerja : Kegiatan peningkatan tenaga kerja melalui Mekanisme, AKL, AKAD dan TKWNAP adalah kegiatan dengan keluaran yaitu penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan TKWNAP. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan pihak Akademisi dari Lembaga Penelitian Universitas Jambi.

Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Kegiatan Peran Lembaga Kerja Sama *Tripartite* merupakan Pembentukan Lembaga Kerja Sama *Tripartite* yaitu :



Perusahaan, Pekerja dan Pemerintah. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan iklim yang kondusif sehingga tidak membutuhkan banyak permasalahan yang harus ditindak lanjuti oleh kelembagaan ini namun demikian kelembagaan ini bersifat wajib adanya.

Grafik T.II.C.45. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010-2014





Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari : a) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; b) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; c) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2010-2014 berfluktuasi dengan kecenderungan naik yaitu dari 2,80 % tahun 2010 menurun menjadi 1,34 % tahun 2014 atau rata-rata naik sebesar 5,00 % per tahun. Pada periode 5 tahun terakhir ini rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencapai 3,20 % per tahun. Hasil ini masih lebih baik dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi (4,51 % per tahun) dan menempati posisi ke 9 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2.3.1.13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain: 1) Masih terbatasnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM; 2) Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota; 3) Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM; 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;



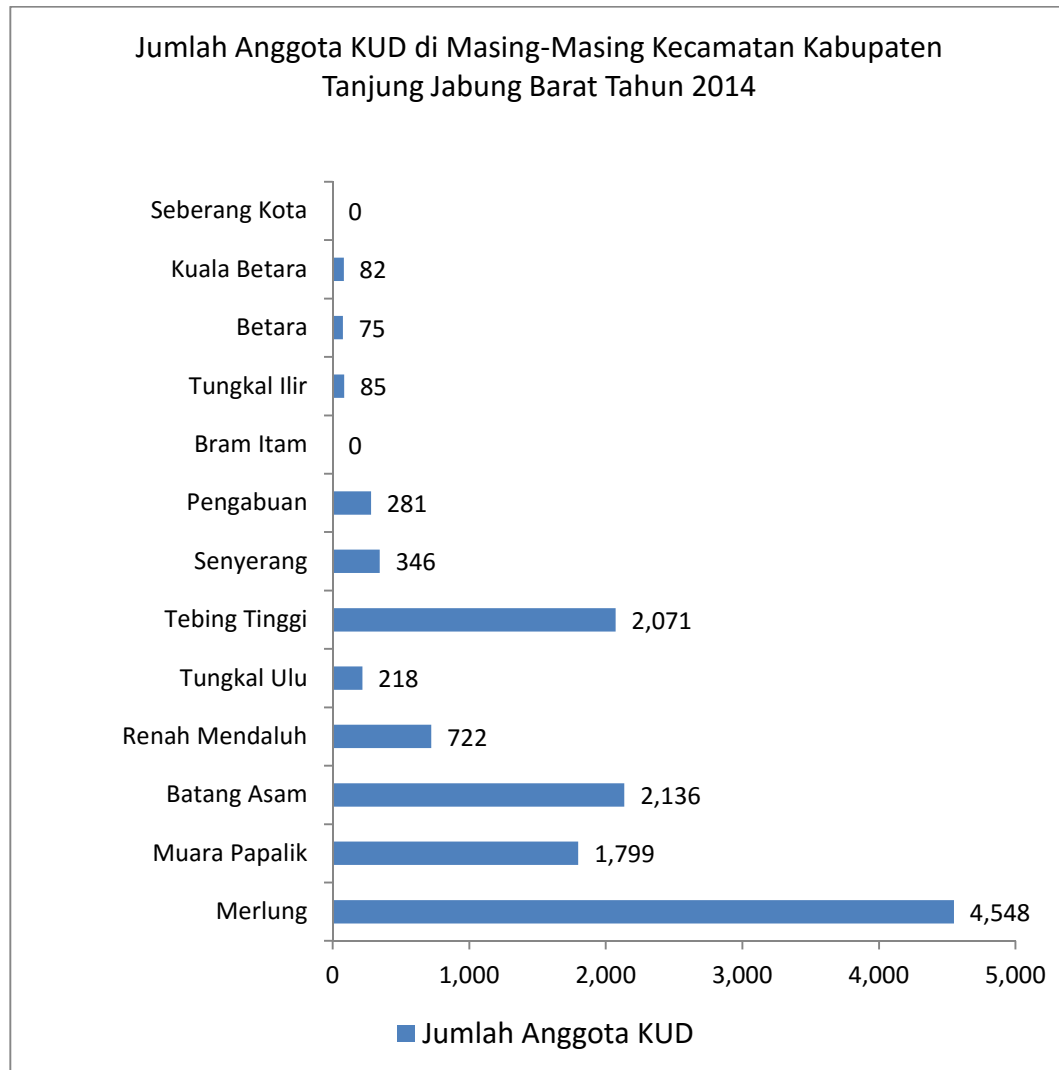
GrafikT.II.C.46. Jumlah KUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah: 1) Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap UKM; 2) Melaksanakan Pelatihan, Bintek dan Penyuluhan terhadap para pengurus dan anggota koperasi; 3) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi dalam rangka pembinaan terhadap UKM dan pelaku usaha.



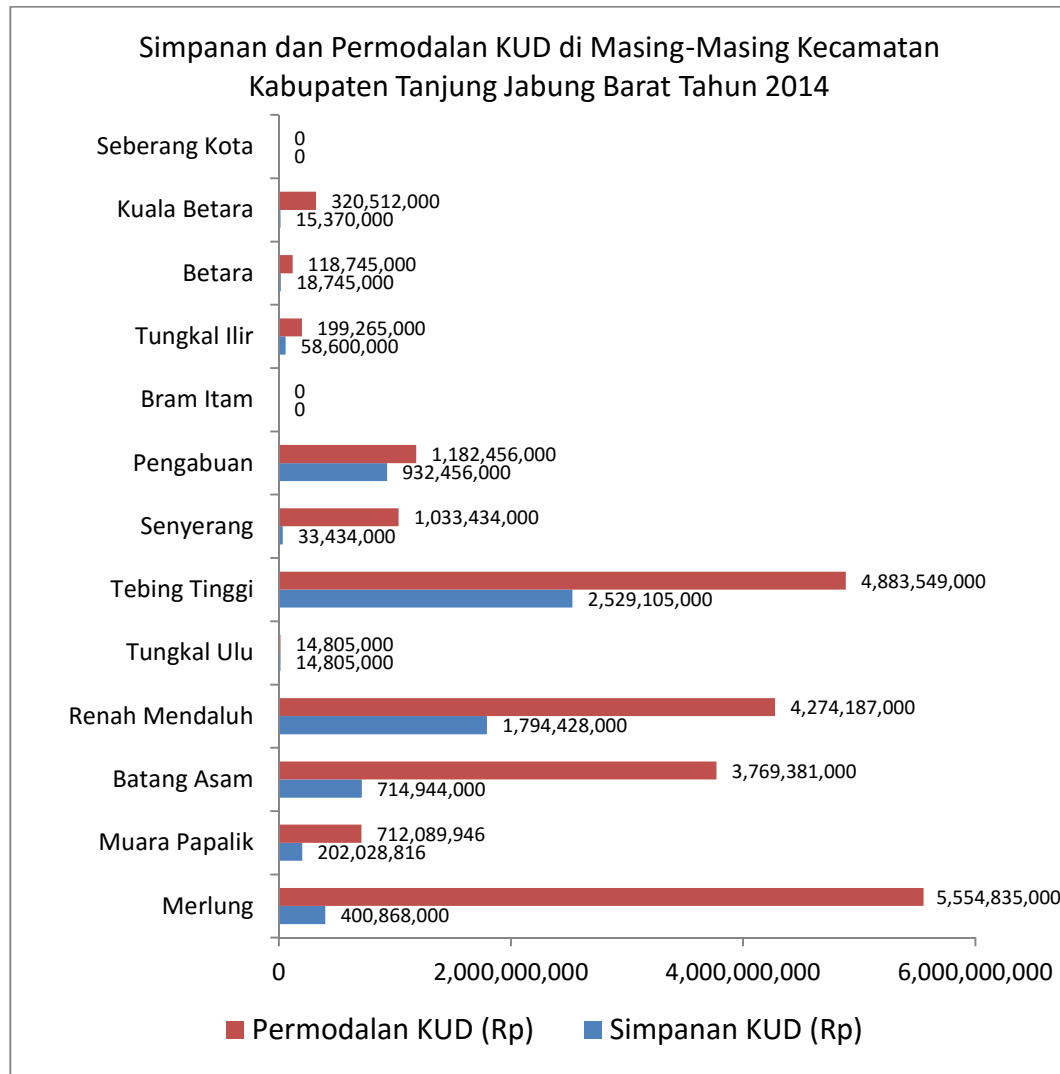
Grafik T.II.C.47. Jumlah Anggota KUD pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Seperti tampak pada Grafik di atas, pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 349 Koperasi yang terdiri dari 33 KUD dan 316 Non KUD. Dari jumlah tersebut hanya 102 koperasi yang aktif. Didalamnya terlibat 34.447 anggota koperasi.



GrafikT.II.C.47. Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Seperti tampak pada tabel diatas, di Kecamatan Bram Itam Tidak terdapat KUD dan di Kecamatan Tungkal Ulu data untuk volume usaha dan SHU tidak ada dikarenakan KUD yang ada di daerah tersebut aktif tetapi tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga tidak terdapat Laporan Perkembangan Usahanya.



Pada tabel diatas terlihat di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Muara Papalik, Bram Itam, Kuala Betara tidak tersedia data tentang volume usaha dan SHU. Hal tersebut dikarenakan ada koperasi tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan koperasi yang aktif tetapi laporan RAT nya belum sempurna sehingga tidak tercantum data volume usaha dan SHU.

Masalah yang dihadapi : 1) Modal usaha yang relatif sedikit dan lemah dalam pengelolaannya; 2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola koperasi yang relatif rendah (kemampuan manajemen yang masih rendah); 3) Khusus untuk koperasi yang mengalami penggantian pengurus, sering terjadi kurangnya terjalin kerjasama yang baik antara pengurus lama dan pengurus baru sehingga sering terjadi kesalahpahaman.

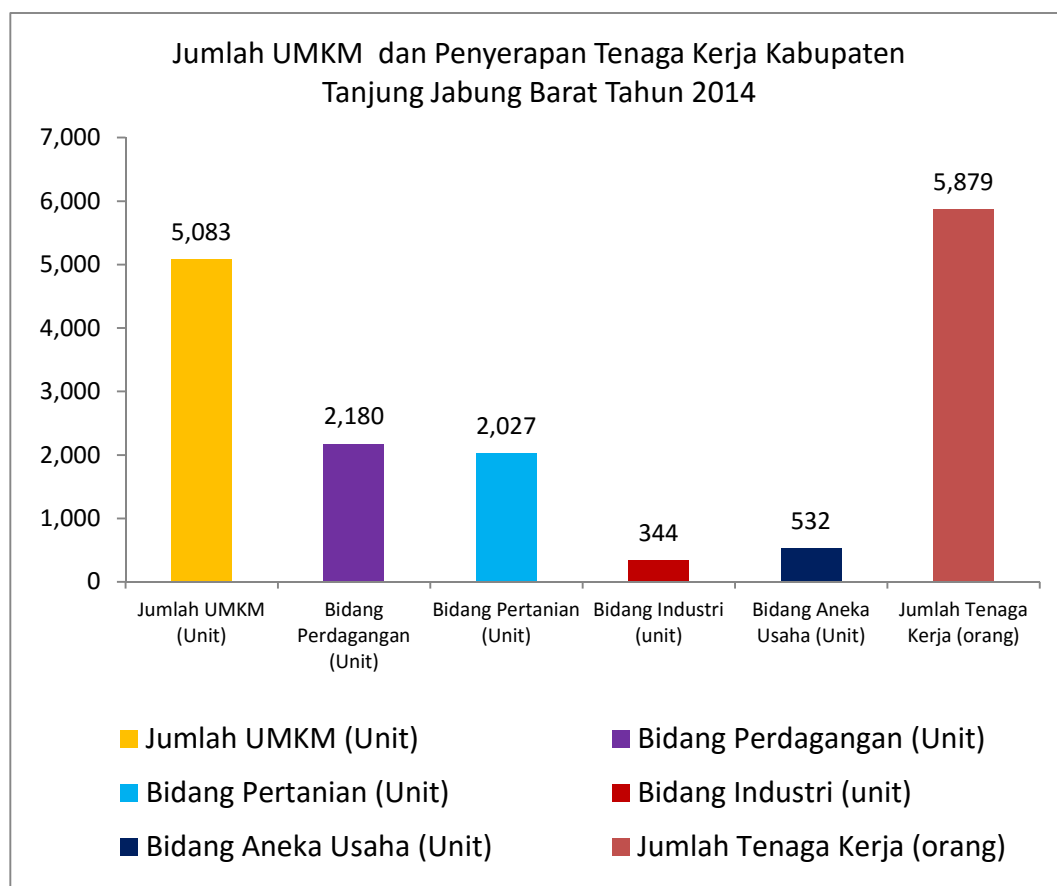
Solusi untuk masalah : 1) Penyediaan penguatan modal melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan kemudahan akses dalam mengurus administrasi dan tingkat suku bunga yang rendah; 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi itu sendiri; 3) Memerintahkan kepada koperasi yang akan melakukan penggantian pengurus agar melakukan serah terima manajemen administrasi dan keuangan.

Jumlah UMKM yang terdata secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar 5083 unit usaha, terdiri dari bidang perdagangan, bidang pertanian, industri dan aneka usaha. Jumlah Tenaga kerja yang terserap sebesar 5879 orang. Masalah yang dihadapi : Pendataan UMKM tersebut belum dilakukan secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 4 ayat 4 bahwa Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pendataan terhadap



pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa di wilayah kerjanya dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 18 pasal 1 bahwa Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporan hasil pemberian IUMK kepada Camat.

GrafikT.II.C.47. Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagian besar belum melakukan pencatatan tentang keuangan usahanya, hal tersebut dikarenakan rendahnya SDM pelaku usaha tersebut dan ketidak tahuan mereka dalam melakukan pencatatan keuangan tersebut sehingga menyulitkan dalam



melakukan pendataan Usaha Mikro dan Kecil tersebut. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagian besar juga masih bersifat sampingan sehingga menyulitkan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan langsung ke pada pelaku usaha tersebut. Begitu juga dengan penggunaan tenaga kerja yang sebagian besar adalah pekerja lepas, yang digunakan apabila diperlukan.

Meningkatkan Intensitas Pembinaan Baik secara langsung melalui kunjungan ke tempat pelaku usaha maupun secara tidak langsung melalui sosialisasi dan pelatihan – pelatihan (teknis maupun manajemen) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan mengusulkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Provinsi Jambi. Dengan keluarnya Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil pada pasal 4 ayat 4 bahwa Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah/Kepala Desa diwilayah kerjanya dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 18 pasal 1 bahwa Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK dan laporam hasil pemberian IUMK kepada Camat.

2.3.1.14. Penanaman modal, kebudayaan

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu daya ungkit daerah dalam pembangunan ekonomi, dan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membentuk sistim pelayanan perizinan satu pintu melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang total telah menerbitkan 10.587 ijin mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 serta menerbitkan 10 (sepuluh) Perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan dengan mengutamakan dan mengembangkan kearifan lokal pembinaan kelompok seni yang tersebar di Kecamatan Tungkal Ilir 11 Grup Seni Budaya, Tungkal Ulu 1 Grup, Betara 4 Grup, Muara Papalik 1 Grup, Tebing Tinggi 5 Grup, Batang Asam 2 Grup, Senyerang 2 Grup dan Kecamatan Pengabuan 1 Grup Seni Budaya, sementara Kecamatan Kuala Betara, Merlung, Bramitam, Ranah Mendaluh dan Kecamatan Seberang Kota belum tercatat adanya kelompok seni yang potensial untuk pembinaan, tradisi yang telah dibangun dan dikembangkan sebagai budaya lokal antara lain adalah pawai ke aneka ragam suku dan budaya pada hari besar nasional, lomba arakan sahur menyambut bulan ramadhan dan doa bersama (khaul) Syekh KH. Abdul Kadir Jaelani.

2.3.1.15. Kepemudaan dan olah raga

Pembinaan kepemudaan khususnya kelompok remaja dapat meraih prestasi yang diraih Bidang Pemuda Selama Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Nama Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih (PASKIBRAKA) Kab. Tanjung Jabung Barat yang Mengharumkan Nama Daerah Tahun 2014 :
 - a. Tingkat Provinsi : Tommydari SMAN 1 Kuala Tungkal, Refki Faris dari SMAN 2 Kuala Tungkal; Ammigita J dari SMAN 1 Kuala Tungkal; Mrtha Yonaldi dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Fadli Carisma dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Nursidah dari SMAN 3 Kuala Tungkal; Ayu Hartanti dari SMKN 1 Kuala Tungkal; Hidayatul Mitri dari MAN 1 Kuala Tungkal.
 - b. Tingkat Nasional : Ayu Hartanti dari SMKN 1 Kuala Tungkal.



Dari hasil pembinaan olah raga, maka putra – putri Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meraih beberapa prestasi Olahraga selama Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Olahraga Sepak Bola

- 1) Juara Pertama Gubernur Cup Provinsi Jambi Bulan Januari 2014 di Jambi.
- 2) Juara Kedua ASSBI usia 15 tahun tingkat provinsi Jambi bulan Juli 2014.
- 3) Juara Ketiga Donone Cup usia 12 tahun tingkat Provinsi Jambi Bulan April 2014.
- 4) Juara Kedua POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juli 2014.

2. Olahraga Sepak Takraw

Juara Kedua POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juli 2014.

3. Olahraga Bulu Tangkis

- 1) Juara Pertama a.n R. Alfath KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 2) Juara Ketiga a.n Afredo KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 3) Juara Ketiga a.n Nur Adha KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 4) Juara Ketiga a.n M. Amin KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 5) Juara Ketiga a.n Agung KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 6) Juara Ketiga a.n Khalid KEJURPROV Bulan April di Muara Jambi.
- 7) Juara Kedua beregu Putri (a.n Ardia Ramadhani, Nuradha, Nadia Lestari, Nuryulia Putri) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.
- 8) Juara Kedua beregu Putra (a.n M. Ridwan Hakim, Apredo, Sukardi, Agung Setiawan) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.

4. Olahraga Bela Diri Pencak Silat



- 1) Juara Pertama beregu Putri (a.n Dian Afrelia, Sabita Mubaraqah, Eti Wahyuni) pada POPDA tingkat provinsi Jambi bulan Juni 2014 di Jambi.
- 2) Juara Kedua a.n Rahmad Iqbal pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
- 3) Juara Kedua a.n Dian Afrelia pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
- 4) Juara Kedua a.n Dina Mariana pada POPDA tingkat Provinsi Jambi Bulan Juni 2014 di Jambi.
5. Bela Diri Karate
Juara Ketiga a.n M. Wisnu Hidayat pada BANDUL OPEN JOGJA 2014.
6. Bela Diri Judo
Juara Pertama a.n Aldo Putra pada KEJURNAS 2014.
7. Angkat Besi
Juara Kedua a.n Mufti pada KEJURNAS Bulan Juni 2014 di Jogjakarta.
8. Bela Diri Tarung Derajat
 - 1) Juara Pertama a.n Sri wahyuni pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 2) Juara Kedua a.n Yeni pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 3) Juara Kedua a.n Makmuruddin pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 4) Juara Kedua a.n Sugeng Hariayadi pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 5) Juara Kedua a.n Ajeng pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
 - 6) Juara Kedua a.n Syukur pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.



- 7) Juara Ketiga a.n Jamal pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 8) Juara Ketiga a.n Sarawati pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.
- 9) Juara Ketiga a.n Mahmudin pada KEJURPROV Bulan September 2014 di Jambi.

2.3.1.16. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain: 1) Pemantauan dan Monitoring kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga asing dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan adanya perubahan kelembagaan struktur badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga menunggu peraturan perundang-undangan kelembagaan diterbitkan; 2) Pada Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanannya terealisasi sebesar 8,01 %, hal ini terjadi karena kondisi daerah kondusif yang Tidak adanya masalah konflik/gesekan antara perusahaan dengan masyarakat atau tenaga kerja, masyarakat dengan masyarakat; 3) Kegiatan kursus pelatihan Bintek Kominda belum teralisasi dikarenakan masih menunggu Petunjuk Teknis (juknis) dari pemerintah pusat (Kemendagri) kedaerah, sehingga tidak ada permintaan peserta untuk Bintek Kominda; 4) Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan belum maksimal dikarenakan masih terdapat 6 kecamatan yang belum membentuk kepengurusan FPK di tingkat kecamatan yaitu kecamatan Betara, Bram Itam, Tebing Tinggi, Seberang Kota, Batang Asam dan Renah Mendaluh; 5) Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan



Agama (PAKEM) dipending pelaksanaannya karena masih menunggu Petunjuk Teknis dari Kementerian Dalam Negeri; 6) Pada Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat Kabupaten hanya terealisasi sebesar 64,04 %, hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan kelembagaan struktur Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pelaksanaan yang direncanakan pertriwulan, hanya dapat dilaksanakan satu kali kegiatan.

Tabel T.II.C.5. Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014

NO	KECAMATAN	ORMAS		LSM		OKP	
		Daftar	Tak Daftar	Daftar	Tak Daftar	Daftar	Tak Daftar
1	Tungkal Ilir	6	-	38	-	6	-
2	Tungkal Ulu	-	-	2	-	-	-
3	Tebing Tinggi	-	-	2	1	-	-
4	Betara	-	-	1	-	-	-
5	Batang Asam	-	-	1	-	-	-
6	Merlung	-	-	-	-	-	-
7	Muara Papalik	1	-	-	-	-	-
8	Renah Mendaluh	-	-	-	-	-	-
9	Pengabuan	-	-	-	-	-	-
10	Seberang Kota	-	-	-	-	-	-
11	Senyerang	-	-	-	-	-	-
12	Bram Itam	-	-	-	-	-	-
13	Kuala Betara	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7	-	44	1	6	-

Permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain: 1) Dengan adanya Perubahan peraturan nantinya dapat meningkatkan Pemantauan dan



Monitoring kegiatan orang asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga asing dalam wilayah Kabupaten. Tanjung Jabung Barat; 2) Meningkatkan stabilitasi pengamanan, dan koordinasi Tim Terpadu (TIMDU) penanganan gangguan keamanan dan Penanganan konflik, di tingkat kecamatan dan Kabupaten; 3) Mengikuti Bintek Kominda berdasarkan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri; 4) Melaksanakan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan membentuk Forum FPK di 6 kecamatan yang belum membentuk kepengurusan FPK; 5) Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis dari kementerian Dalam Negeri tentang Aliran Kepercayaan (PAKEM) maka kegiatan ini dapat dilaksanakan; 6) Setelah adanya Perubahan Struktur Kelembagaan maka pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan pertriwulan.

2.3.1.17. Otonomi Daerah

Tabel T.II.C.6. Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2014

NO	PERATURAN DAERAH		TENTANG
	NOMOR	TAHUN	
1	1	2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014
2	2	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3	3	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4	4	2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
5	5	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
6	6	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
7	7	2014	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014



8	8	2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015
9	9	2014	Izin Usaha Warung Internet
10	10	2014	Dokumen Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan

2.3.1.18. Pemerintahan Umum

Salah satu pokok bahasan untuk pemerintahan umum adalah penegasan batas wilayah yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Tanjung Jabung yang pada Tahun 2013 telah dilaksanakan penegasan batas Kecamatan Tungkal Ulu dengan Kecamatan Batang Asam pada Segmen Desa Pematang Kecamatan Tungkal Ulu, dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Sasam, dan pada Tahun 2014 telah dilaksanakan penegasan batas Kecamatan Pengabuan dengan Desa Kayu Aro Kecamatan Senyerang.

Sedangkan untuk penegasan batas antar desa, pada tahun 2014 telah dilaksanakan Penegasan batas desa antara lain Desa Mekar Jati, Desa Pasar Senin, dan Desa Sungai Jering Kecamatan Pengabuan, yang ditandai dengan Berita Acara Kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Selanjutnya Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 33, Tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Kemudian Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi jambi, telah ditetapkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 62 Tahun 2014, tentang Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Sedangkan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, telah memasuki tahap pembahasan Draf Peraturan Menteri Dalam Negeri oleh Kedua Pemerintah Kabupaten yang berbatasan beserta Dirjen Pemerintah Umum



Kementrian Dalam Negeri, dan diharapkan pada tahun ini segera diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.

Selanjutnya antar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan penetapan batas, dimana pada Tahun 2014 telah dibangun Tugu Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Muaro Jambi pada segmen Desa Dusun Mudo Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Khusus pada segmen Desa Terjun gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, masih tersisa 2,5 Km segmen batas yang belum disepakati, hal ini disebabkan pada segmen tersebut terkait dengan titik simpul, kemudian terkait dengan batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masih berada pada tahap fasilitasi dan mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi Merlalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi.

2.3.1.19. Administrasi keuangan daerah

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan SKPD antara lain : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, tingkat pencapaian 83% dikarenakan 11 kegiatan yang telah dilaksanakan realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan real yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, secara kumulatif tingkat pencapaiannya 71% karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara efektif yakni :



- a. Kegiatan sosial zona integrasi wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dengan capaian realisasi anggaran 12 % karena terjadi perubahan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yaitu dari Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 menjadi Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, yang menitik beratkan pada tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZIWBK) dan wilayah Birokrasi bersih melayani (BUBBM).
- b. Kegiatan Penangan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda dengan capaian realisasi keuangan 24 % hal ini terjadi karena jumlah pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti berdasarkan disposisi Bapak Bupati tidak dapat ditentukan secara pasti hanya perkiraan jumlah pengaduan sesuai pengalaman tahun sebelumnya.
- c. Kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dengan tingkat capaian realisasi keuangan 67 % hal ini disebabkan belum adanya sanksi yang tegas terhadap obyek pemeriksaan (obrik) yang tidak ada/belum tuntas melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Ekstern Pemerintah (BPK-RI), pemahaman terhadap rekomendasi kurang/sulit menindak lanjuti temuan berkaitan dengan pihak ketiga.

Tabel T.II.C.6. Pemeriksaan Internal dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2011-2014

No	Kegiatan	2011			2012			2013			2014		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
A	Pengawasan Internal secara berkala												
1	Pemeriksaan Kasus Pengaduan	20	26	130	30	17	57	30	21	70	30	7	23
2	Reguler	162	162	100	160	160	100	191	189	98	206	206	100
3	Sidak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4	Dana BOS	13	13	100	13	13	100	13	13	100	13	13	100
B	Review Monitoring & Evaluasi												
1	Review Laporan Keuangan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	LAKIP	25	25	100	25	25	100	25	25	100	25	25	100
3	Monitoring Bansos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Monitoring Penutupan Kas	-	-	-	-	-	-	34	13	38	25	58	230
5	Pre-audit Monitoring Khusus /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- a. Tingkat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Kas opname dan stock opname merupakan persyaratan untuk membuat laporan keuangan oleh SKPD (Pegguna Anggaran) maupun UPTD (Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk berita acara pemeriksaan kas/barang).

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut: 1) Pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga auditor lebih ditingkatkan; 2) Koordinasi lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); 3) Pemutakhiran data yang berkaitan dengan temuan dan hasil pengawasan akan lebih diintensifkan; 4) Pendekatan dengan objek pemeriksaan (SKPD) lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.



2.3.1.20. Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Untuk Menunjang Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan beberapa Kegiatan diantaranya Perencanaan pegawai secara nasional serta pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja telah dilaksanakannya penyusunan formasi yang dilaksanakan oleh masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan prinsip alokasi formasi penerimaan CPNS Formasi Umum Tahun 2014 dan telah dilaksanakannya pendaftaran secara online serta pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS secara transparan melalui Sistem Computer Assited Test (CAT) dimana seluruh peserta dapat mengetahui secara langsung nilai ujian dan langsung ditayangkan serta diumumkan pada hari yang sama saat pelaksanaan ujian, pelaksanaan Sistem Computer Assited Test (CAT) difasilitasi oleh Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang dengan penyediaan sarana dan prasarana dari STIKOM Dinamika Bangsa di Jambi.

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dimana proses usul pengadaan, usul mutasi dan usul pensiun serta peremajaan data Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan sistem online yang databasenya terintegritasi dengan Badan Kepegawaian Negara. Hal ini sangat membantu dalam validasi dan verifikasi serta proses pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah menjadi lebih baik.

Kartu Pegawai Elektronik yang telah diterima oleh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi multi fungsi dimana sebelumnya hanya sebagai kartu identitas pegawai tetapi saat ini dapat dipergunakan untuk Pembayaran Gaji melalui Rekening dan PNS dapat menggunakannya sebagai ATM (Anjungan Tunai Mandiri).



Dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme yang berbasis kompetensi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan pengembangan PNS melalui pendidikan formal berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS.

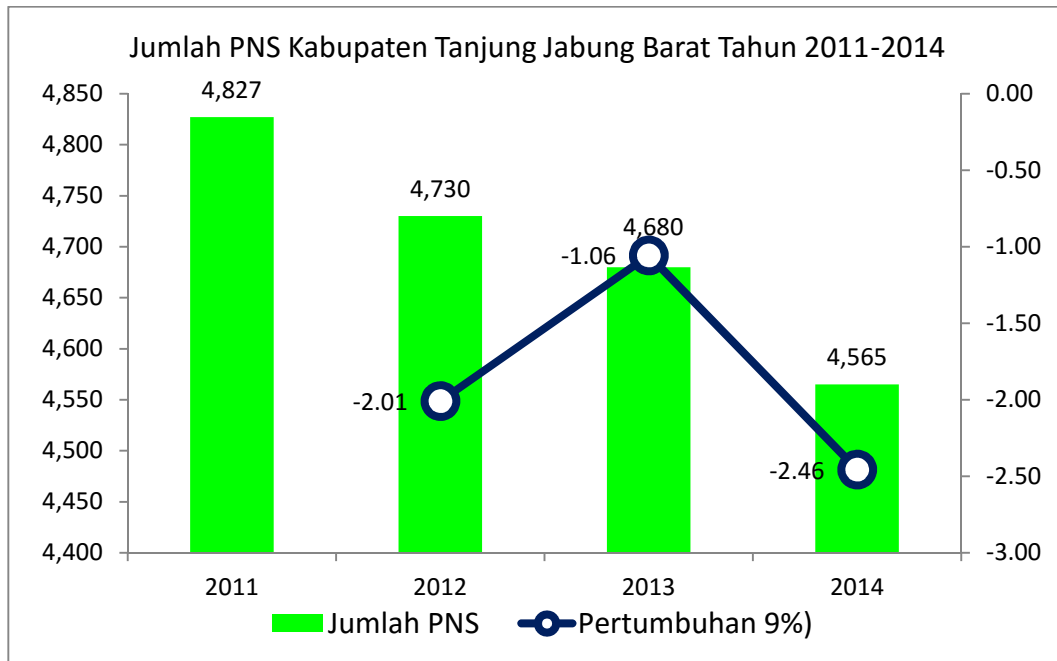
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai pengganti DP3 Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sosialisasi ke Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar setiap Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mampu melakukan Penyusunan Sasaran Kinerja pada awal tahun yang dinilai pada akhir tahun setiap capaian dari target – target kinerja masing – masing Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, professional dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan system prestasi kerja. Pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.



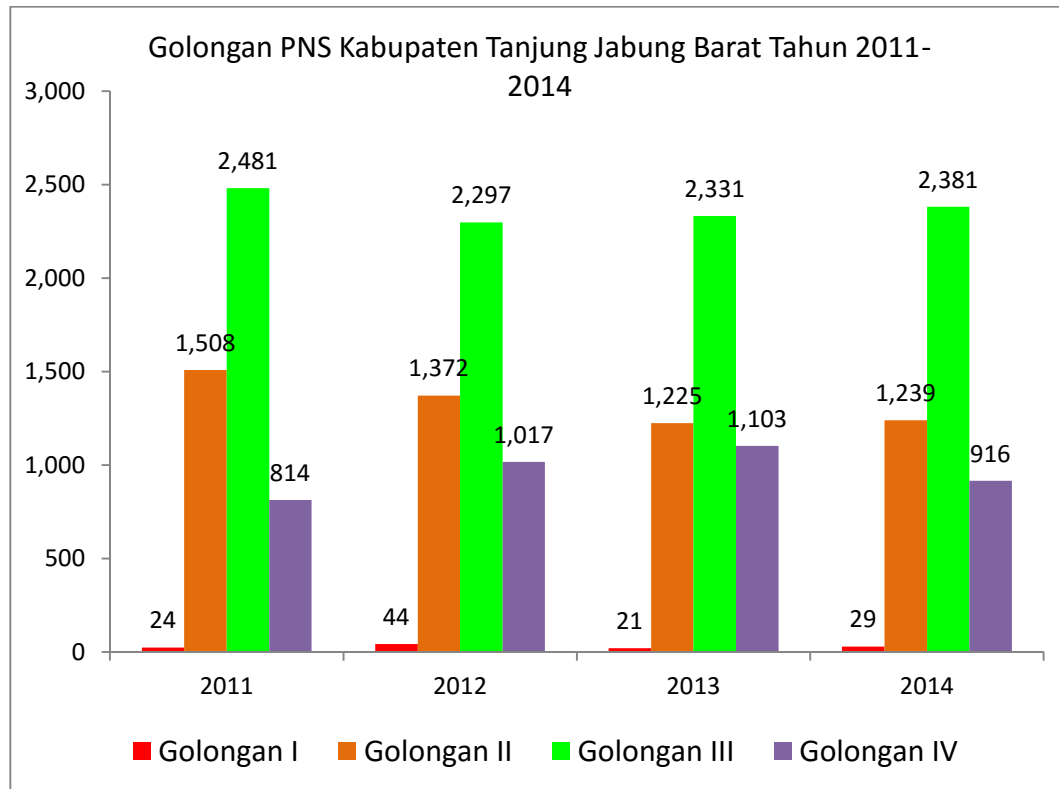
GrafikT.II.C.48. Jumlah PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Untuk menyikapi permasalahan yang terjadi mengingat pentingnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada 13 (tiga belas) Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan indisipliner serta Pelanggaran tindak Pidana maka dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*).



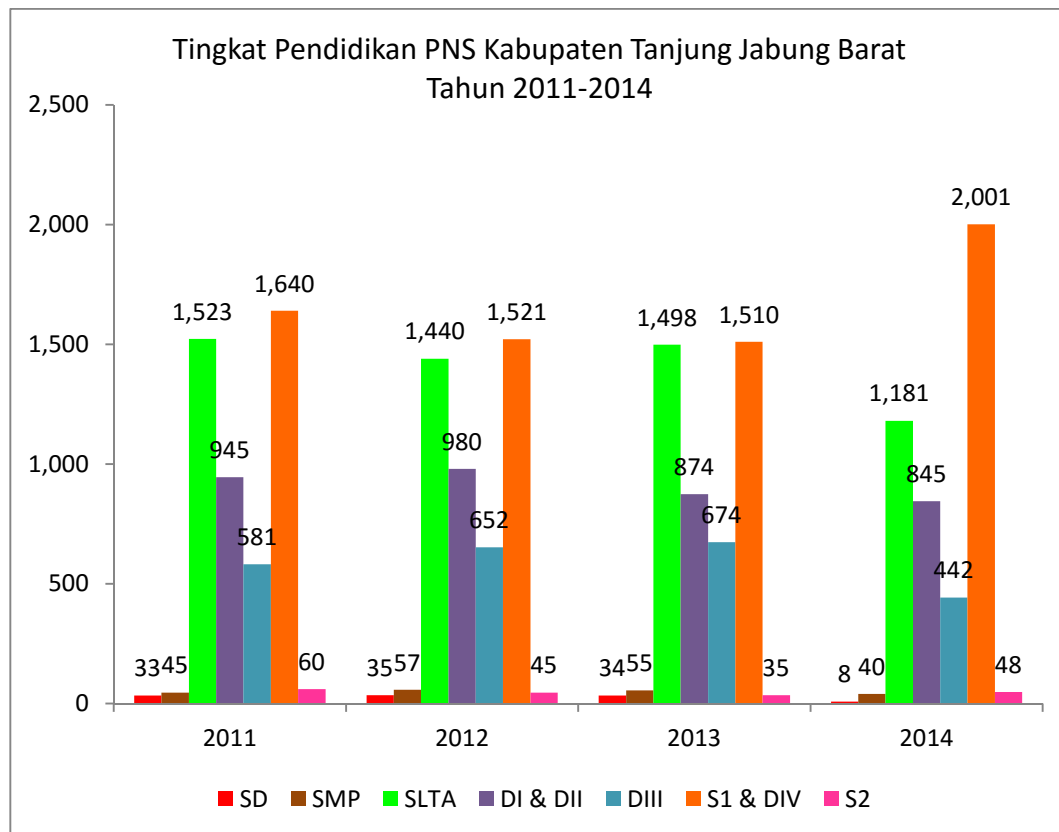
Grafik T.II.C.49. Golongan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dituangkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pendidikan dan Pelatihan merupakan hal yang sangat penting dan bersifat strategis. Aspek pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud adalah Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Selanjutnya Disebut Diklat Adalah Proses Penyelenggaraan Belajar Dan Mengajar Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Pegawai Negeri Sipil, baik pendidikan dan pelatihan Struktural, Teknis maupun fungsional.



GrafikT.II.C.50. Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil bertujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara Profesional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientas pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat; menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.



2.3.1.23. Ketahanan pangan

2.3.1.23.1 Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Konsumsi Energi baru mencapai 1,828 (Kkal/Kap/Hari) atau 83,08 % AKE (Angka Kecukupan Energi). Sedangkan Konsumsi Protein sebesar 72,55 (Gram/Kap/Hari) atau 127,28 % AKP (Angka Kecukupan Protein).

Tabel T.II.C.7. Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2014

No.	Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Per Kapita Per Hari			
		Energi		Protein	
		Kkal	%	Gram	%
1.	Padi-padian	1.133	51,50	27,78	48,74
2.	Makanan Berpati	34	1,55	0,25	0,44
3.	Gula	3	0,14	0,01	0,02
4.	Buah Biji berminyak	135	6,14	2,04	3,58
5.	Buah-buahan	60	2,73	0,7	1,23
6.	Sayur-sayuran	12	0,55	1,28	2,25
7.	Daging	61	2,77	4,14	7,26
8.	Telur	6	0,27	0,41	0,72
9.	Susu	5	0,23	0,27	0,47
10.	Ikan	189	8,59	35,45	62,19
11.	Minyak dan Lemak	190	8,64	0,22	0,39
Total		1.828	83,09	72,55	127,28

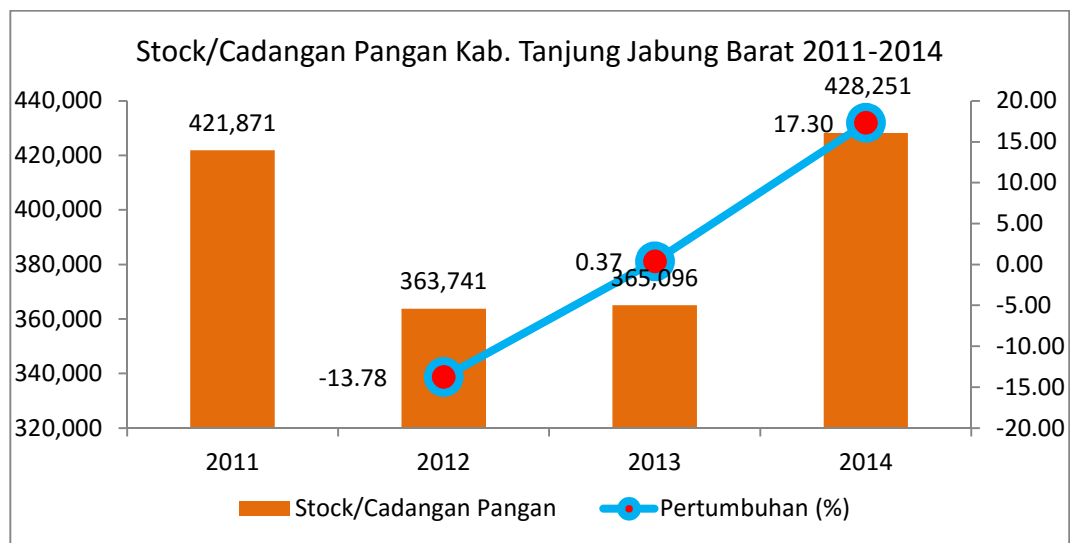
Penguatan Cadangan Pangan, Indikator ini menggambarkan bahwa dengan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan untuk mengantisipasi masa panen/masa paceklik, penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Selain itu memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk



menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah. Stok cadangan pangan pemerintah yang dikelola Perum Bulog Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap bulan 400.920 Kg.

Grafik T.II.C.50. Stock/Cadangan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014



Sementara itu stok cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 sebanyak 51 ton beras yang dititipkan pada gudang Perum Bulog. Stok Sampai dengan tahun 2014 telah diberdayakan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebanyak 6 Gapoktan yang berada pada 4



(empat) kecamatan. Stok yang ada di gapoktan sampai dengan Desember 2014 sebanyak 36.813 Kg.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan. Sampai saat ini jumlah kelompok lumbung pangan yang ada sebanyak 2 kelompok. Dan yang aktif melaksanakan kegiatan penyimpanan serta penjualan baik sarana produksi maupun bahan pangan sebanyak 2 kelompok lumbung pangan.

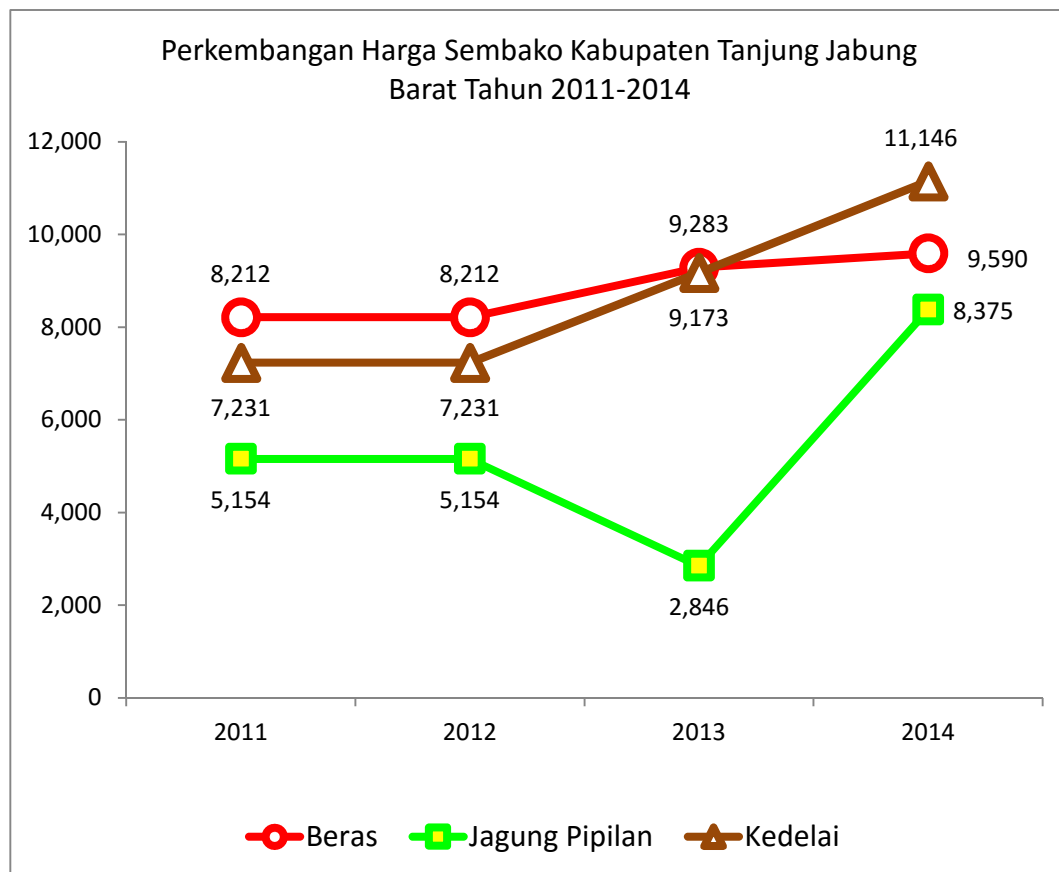
Pengembangan Lumbung Pangan dimaksudkan agar masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan melalui penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Kemandirian kelembagaan yang dimaksud, memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan masyarakat yang dapat digunakan pada saat paceklik atau harga mahal, dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok tani dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya pada saat harga rendah untuk dijual kembali pada saat harga lebih tinggi. Kegiatan pengembangan kelembagaan lumbung pangan tidak hanya dilaksanakan dengan pembangunan fisik, namun juga disertai pembinaan terhadap kelembagaan lumbung pangan yang ada melalui penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok.



2.3.1.23.2 Distribusi dan Akses Pangan

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 9 komoditi pertanian di 13 kecamatan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian.

GrafikT.II.C.51. Perkembangan Harga Beras, Jagung, Kedelai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

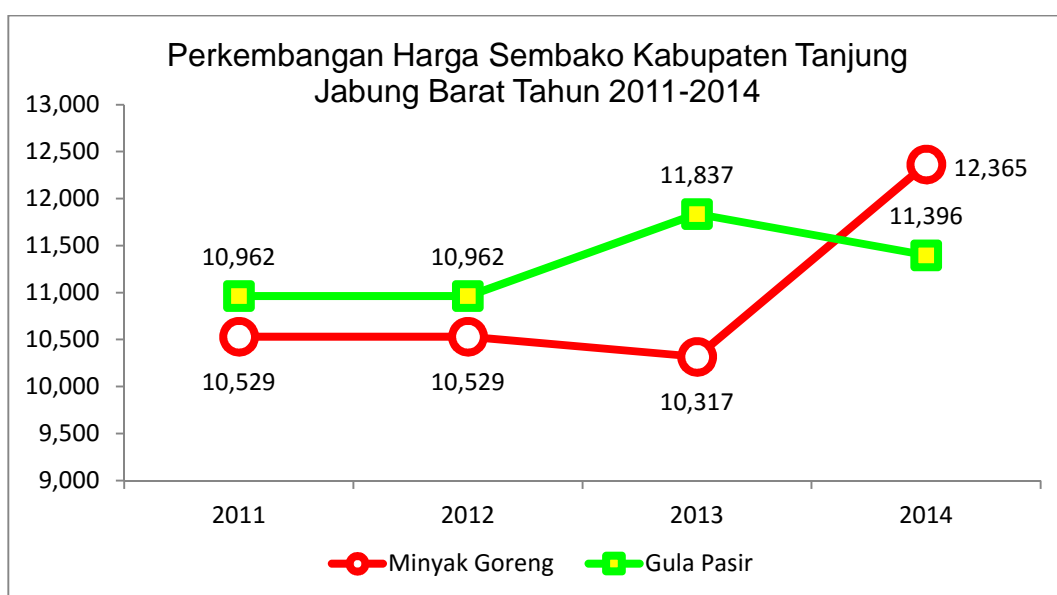




GrafikT.II.C.52. Perkembangan Harga Daging Sapi dan Ayam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

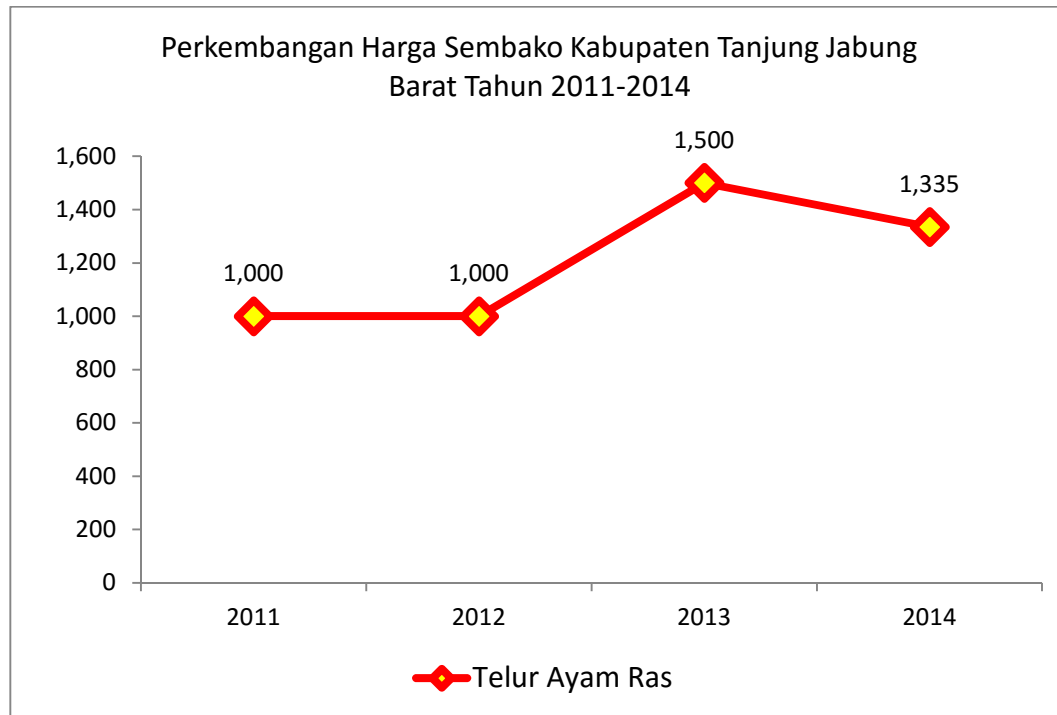


GrafikT.II.C.53. Perkembangan Harga Minyak Goreng dan Gula Pasir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





GrafikT.II.C.54. Perkembangan Harga Telur Ayam Ras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Dalam pelaksana pencapaian indikator stabilisasi harga dan pasokan pangandi daerah/wilayah telah di bentuk Tim Khusus yang bertugas memantau dan intervensi pasar bila terjadi gejolak harga beranggotakan Dinas / instainsi terkait seperti Bulog, Disperindag, BKP3, Dinas Pertanian dan sebagainya sehingga bila terjadi fluktuasi harga dan pasokan pangan tidak stabil segera melakukan pemantauan dan melakukan intervensi secara cepat.

2.3.1.23.3 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 menghasilkan skor PPH 74,85 %, lebih tinggi daripada



skor PPH tahun 2013 yang baru mencapai 71,25 %.. Namun prosentase capaian pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bila dibandingkan dengan target idial yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2010 mengenai target sasaran skor PPH pada tahun 2012 sebesar 89,80%, baru mencapai 69,6 % meskipun ada kenaikan dari target yang ingin dicapai pada tahun 2012 sebesar 66,1 terealisasi sebesar 69,6 %. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola makan masyarakat menuju ke arah lebih bergizi, seimbang, beragam, dan aman.

2.3.1.24. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunan desa. Maka dari itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) Mewujudkan Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan khususnya di desa-desa yang telah berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat-pusat pertumbuhan terdekat.



Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan yang disingkat dengan GEMMA Desa/Kelurahan dimana pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Membangun Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/ Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Bupati No. 32 tahun 2014.

Program GEMMA Desa/Kelurahan adalah program pemberdayaan dan percepatan pembangunan perdesaan/kelurahan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelembagaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa/Kelurahan serta mendorong pengelolaan pembangunan perdesaan yang otonom, efektif dan dinamis, di tahun 2014 ini diberikan bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- atau sejumlah Rp. 40,2 Milyar.

Capaian program ini antara lain pembangunan Kantor Desa/Kelurahan sebanyak 100 unit, rehab Kantor Desa sebanyak 4 unit, pembangunan Aula sebanyak 15 unit, pengerasan jalan sepanjang 10.350 m, pembangunan Rabat Beton 4.120 m, pembangunan Jembatan Kayu 7 unit, *Boxculvert* 2 unit, Jerambah Beton 19,3 m dan penimbunan halaman kantor desa seluas 340 m² dan yang cukup menggembirakan, melalui program ini telah berhasil menambah pemberdayaan, kemandirian, partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan karena memang program ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawabannya dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan, ini dibuktikan program ini mampu menyerap Tenaga kerja lokal sebanyak ± 1.321 orang dan berhasil menghimpun Swadaya masyarakat berupa hibah lahan, bahan-bahan dan berupa sumbangan tenaga ± Rp. 2.367.570.000,-.



2.3.1.25. Statistik

Pengelolaan statistik dilakukan sebagai salah satu bagian dari program perencanaan daerah dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk beberapa produk statistik yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penghitungan/Sensus Ekonomi Nasional, Penghitungan PDRB, dan Penghitungan Indeks Kemahalan Harga Konstruksi yang diharapkan produk statistik tersebut dapat meningkatkan kualitas perencanaan maupun evaluasi terhadap hasil pembangunan.

2.3.1.26. Kearsipan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan, maka Kantor PDEPKD mengalami peningkatan seiring dengan prestasi yang diraihnya dalam “Lomba Pengelola Arsip Terbaik se Provinsi Jambi” dari Juara Harapan II pada tahun 2013 menjadi Juara I pada tahun 2014.

2.3.1.27. Komunikasi dan informatika

Peningkatan kapasitas Bandwith dari 5 Mbps pada Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.248.483.564,- dengan pihak ketiga PT. Telekomunikasi Indonesia.Tbk ada peningkatan yang sangat baik pada Tahun Anggaran 2014 menjadi 17 Mbps Rp. 152.000.000,- dengan pihak ketiga PT. Pegascom yang juga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara dengan tujuan operasional website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (www.tanjabbarkab.go.id), Free Wifi Pujasera dan Free Wifi Ancol Beach.

Pada umumnya semua Program Kegiatan tidak mengalami kendala yang begitu berarti, hal ini dapat dilihat dari 8 (delapan) Program Kegiatan yang dilaksanakan terdapat satu Program Kegiatan yang rendah target



realisasinya pada tahun anggaran 2014 yaitu pada Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Adapun kendalanya: 1) Tidak teranggarkannya biaya penginapan untuk juri, guru pembimbing dan peserta lomba yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan; 2) Penyerapan realisasi yang terlihat hanya pada pengiriman peserta lomba bercerita tingkat SD dan SLTA yang diselenggarakan pihak Provinsi; 2) Dikarenakan untuk peserta lomba bercerita tingkat SD dan SLTA pada tingkat nasional tidak dapat dilaksanakan (yang dikirim hanya juara 1).

2.3.1.28. Perpustakaan

Perkembangan jumlah buku dan bahan bacaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak ada peningkatan jumlah exemplar dan judul secara signifikan, dikarenakan pada Tahun Anggaran 2014 difokuskan untuk membangun infrastruktur gedung agar ada peningkatan layanan dan kenyamanan para pemustaka.

Tabel T.II.C.8. Perkembangan Koleksi Buku Kantor Pendataan Elektronik, Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun Anggaran 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah buku di kabupaten	12.651	13.117	158.117	13.262
2	Judul buku di kabupaten	25.319	26.643	235.643	26.852
3	Jumlah buku di desa	60.000	60.000	60.000	60.000
4	Judul buku di desa	13.500	13.500	13.500	13.500
5	Jumlah Perpustakaan di Desa / Kelurahan	70	70	70	70



2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1. Pertanian

Dari tujuh komoditi tanaman pangan, hanya tiga komoditi yang mengalami peningkatan produksi pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu: Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu. Jagung mengalami peningkatan produksi yang terbesar mencapai 154,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2014 produksi Jagung sebesar 3.056 ton pipilan kering meningkat sebesar 1.989 ton dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1.289 ton. Peningkatan produksi didukung oleh peningkatan luas panen dan produktivitas. Luas panen tahun 2014 seluas 761 Ha, meningkat sebanyak 318 Ha atau 71,78% dibandingkan luas panen tahun 2013 yang hanya 443 Ha.

Tabel T.II.C.8. Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2014 (Ton)

No	Kecamatan	Hasil Produksi Komoditi (Ton)						
		Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Tungkal Ilir	554	158	0	0	7	151	0
2	Bramitam	9.708	1.482	0	0	0	261	0
3	Sebrang Kota	190	128	0	0	0	453	0
4	Betara	1.069	30	0	0	0	261	0
5	Kuala Betara	370	34	0	0	0	41	0
6	Pengabuan	8.794	211	0	0	0	42	31
7	Senyerang	5.714	800	48	0	0	56	0
8	Tungkal Ulu	220	4	0	0	1	0	0
9	Batang Asam	8.590	164	229	6	1	272	63
10	Tebing Tinggi	1.523	0	40	4	0	270	39
11	Merlung	0	8	0	1	1	213	31



12	Muara Papalik	0	33	0	6	1	199	47
13	Renah Mendaluh	6.575	4	0	3	8	57	8
JUMLAH		43.307	3.056	317	20	20	2.277	219
Sumber Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								

Peningkatan luas panen juga didukung oleh pertanaman jagung yang merupakan kegiatan Pengembangan Komoditas Jagung dana APBD Kab. Tanjung Jabung Barat. Produktivitas Jagung tahun 2014 mencapai 43,07 Ku/Ha meningkat sebesar 13,97 Ku/Ha atau 40,02% dibandingkan produktivitas tahun 2013 yang mencapai 29,10 Ku/Ha. Peningkatan produktivitas Jagung yang cukup signifikan merupakan hasil peningkatan penggunaan benih Jagung Hibrida dengan estimasi produksi mencapai 6-7 ton pipilan kering per hektar.

Secara umum, produksi komoditi tanaman pangan pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Iklim dan cuaca yang tidak mendukung serta bencana kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap, ditengarai sebagai faktor utama penyebab terjadinya penurunan produksi selain faktor teknis dan non teknis lainnya.

Selama periode tahun 2011-2014 perkembangan keberhasilan GERTAKPADUKA sebagai suatu gerakan moral mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya berkehidupan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun 2011 sebagai tahun awal peng gagasan GERTAKPADUKA, pemerintah Kabupaten menargetkan seluas 2.200 Ha lahan sawah di daerah pasang surut akan berhasil ditingkatkan Indeks Pertanamannya (IP) dari IP 100 menjadi IP 200. Realisasi peningkatan IP selama tahun 2011 tercatat mencapai luas 3.263 Ha atau 148,32 %. Keberhasilan pencapaian ini didukung faktor-faktor antara lain: cuaca dan iklim yang mendukung



dimana musim penghujan dan musim kemarau berlangsung dalam periode yang normal dengan intensitas yang relatif mencukupi dalam mendukung pertanaman padi, ketersediaan benih unggul yang sesuai baik dalam aspek kuantitas dan kualitas maupun aspek ketepatan waktu penyediaan benih sehingga pertanaman dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan.

Perkembangan selanjutnya GERTAKPADUKA tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada musim tanam pertama (MT I) tahun 2012 dapat dipenuhi lebih dari 4.400 Ha luas tanam, namun pada musim tanam kedua (MT II) lahan sawah yang mengalami peningkatan IP hanya terealisasi seluas 945 Ha atau 21,47 % dari target yang ditetapkan seluas 4.400 Ha. Tidak tercapainya realisasi peningkatan IP tahun 2012 disebabkan oleh faktor-faktor antara lain : cuaca dan iklim yang tidak mendukung dimana musim penghujan berlangsung relatif singkat sedangkan musim kemarau terjadi dalam rentang waktu yang relatif lama sampai dengan bulan Nopember 2012. Pada musim tanam kedua (MT II), penyediaan benih masih bergantung pada BLBU yang berasal dari kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dimana pengadaan benih melibatkan PT. Hidayah Nur Wahana (HNW) sebagai pemenang tender. Proses pengadaan hingga penyaluran benih BLBU ke tingkat lapangan mengalami berbagai macam hambatan sehingga sebagian besar realisasi pertanaman SL-PTT Padi tahun 2012 terpaksa bergeser hingga ke awal tahun 2013.

Pada tahun 2013, realisasi peningkatan IP kembali meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian seluas 6.200 Ha atau 93,94% dari target 6.600 Ha. Keberhasilan pencapaian peningkatan IP tahun 2013 selain didukung oleh iklim dan cuaca yang kondusif, juga disokong oleh terealisasinya kegiatan SL-PTT



Padi Kawasan Pertumbuhan seluas 5.000 Ha, SL-PTT Kawasan Pengembangan 1.000 Ha serta swadaya petani 200 Ha.

Kombinasi ketiga faktor yang meliputi faktor alam (iklim dan cuaca), sosial budaya, serta teknis memberikan pukulan telak terhadap realisasi pertanaman Padi tahun 2014. Secara agregat total realisasi tanam Padi tahun 2014 hanya mencapai 9.351 Ha terdiri dari Padi Sawah 7.068 Ha dan Padi Ladang 2.283 Ha. Dari 7.068 Ha realisasi tanam Padi Sawah selama tahun 2014, hanya 210 Ha yang merupakan IP 200 atau 2,39 % dari target 8.800 Ha.

Tabel T.II.C.9. Luas Lahan dan Produktifitas Komoditi Pertanian Tahun 2014

KECAMATAN	PADI		JAGUNG		KEDELAI	
	Lahan (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Lahan (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Lahan (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)
Tungkal Ilir	1.045	39,88	38	41,58	0	0
Bramitam	1.321	39,64	320	41,09	0	0
Sebrang Kota	314	40,34	71	41,47	0	0
Betara	360	38,88	18	42,05	0	0
Kuala Betara	721	39,76	3	42,32	0	0
Pengabuan	3.049	40,06	103	40,58	0	0
Senyerang	3.933	40,5	215	40,82	36	13,31
Tungkal Ulu	63	39,28	4	41,58	0	0
Batang Asam	2.094	38,73	23	41,2	172	13,31
Tebing Tinggi	500	39,45	10	0	30	13,31
Merlung	0	0	11	41,1	0	0
Muara Papalik	0	0	14	36,25	0	0
Renah Mendaluh	1.432	32,69	4	41,58	0	0
Jumlah	14.832	38,39	834	40,97	238	13,31

Ket: Untuk padi luas lahan merupakan luas lahan sawah yang ditanami padi + luas lahan padi ladang tahun laporan

Untuk palawija luas lahan merupakan luas pertanaman tahun laporan



2.3.2.2. Peternakan

Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan peningkatan populasi, hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah ternak yang dipotong, dan banyaknya jumlah ternak yang dijual keluar daerah . Selain itu untuk perhitungan populasi sapi tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak, pemasukan ternak dan kematian ternak.

Tabel T.II.C.9.Perkembangan ternak menurut jenis, 2011 – 2013 (Ekor)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik
2011	6.510	444	36.745	1.029	556.689	58.500
2012	7.121	510	43.575	1.115	699.228	67.267
2013	6.488	530	46.603	1.244	763.475	95.136

Namun dalam hal pelaksanaan program kegiatan masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya : 1) Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dan sumber daya peternak; 2) Masih rendahnya kualitas bibit ternak; 2) Masih rendahnya mutu produk hasil peternakan; 3) Belum memadainya sarana dan prasarana pasar ternak; 3) Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha peternakan; 4) Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular; 5) Sulitnya mencari sumber bibit ternak; 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana petugas lapangan; 7) Masih Kurangnya tenaga medis dan paramedis

Sedangkan beberapa tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1) Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur dan sumberdaya peternak; 2) Mengoptimalkan kegiatan inseminasi buatan (IB); 3) Manfaatkan dan optimalkan teknologi



tepat guna; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pasar ternak; 4) Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan; 5) Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan; 6) Penetapan Rekanan yang benar-benar berpengalaman dalam hal pengadaan ternak; 7) Perlu pengadaan kendaraan roda 2 (dua) untuk petugas lapangan; 8) Perlunya penambahan formasi untuk tenaga medis dan paramedis.

2.3.2.3. Perkebunan

Komoditi perkebunan yang mengalami trend kenaikan secara linier baik produksinya maupun luasannya semenjak tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah komoditi Kelapa Sawit, namun apabila kita lihat secara keseluruhan semua komoditi yang ada juga mengalami kenaikan, walaupun terjadi secara fluktuatif baik dalam skala luasan maupun produksi.



Tabel T.II.C.10.Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2011-2014

Komoditi	2011			2012			2013			2014*		
	Luas (Ha)	Prod (ton)	Petani (KK)	Luas (Ha)	Prod (ton)	Petani (KK)	Luas (Ha)	Prod (ton)	Petani (KK)	Luas (Ha)	Prod (ton)	Petani (KK)
Karet	16.019	7.793	5.764	16.176	7.009	5.913	16.115	7.639	5.960	16.631	7.243	6.395
Kelapa Sawit	104.718	285.289	17.199	106.025	287.435	17.874	107.101	312.675	18.351	110.962	317.675	20.259
Kelapa Dalam	53.206	59.499	19.657	53.601	56.249	19.992	53.724	53.382	20.349	54.324	54.766	20.873
Pinang	8.508	10.030	6.501	8.619	9.762	6.561	8.712	9.843	6.718	8.902	10.237	6.929
Kopi LTC	2.540	1.114	2.247	2.766	1.609	2.347	2.710	1.230	2.351	2.952	1.535	2.455



Dinas Perkebunan pada sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 telah merealisasikan bantuan bibit tanaman sebanyak 5 komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T.II.C.11.Realisasi Bantuan Bibit Tanaman Tahun 2012-2014

No	Komoditi	2012		2013		2014	
		Realisasi		Realisasi		Realisasi	
		Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)	Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)	Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)
1	Karet	35.000	70	85.000	150	125.000	250
2	Kelapa sawit subsidi	12.880	103	27.625	221	22.315	175,5
3	Kakao	-	-	7.000	20	17.500	50
4	Kelapa Dalam	52.000	400	78.000	600	65.000	500
5	Kopi	200.000	250	24.000	30	24.000	30

Namun dalam pelaksanaan kegiatan, masih ditemui beberapa permasalahan antara lain : 1) Tidak semua pemilik kebun memiliki izin usaha dan memberi laporan produksi sehingga berdampak pada penilaian usaha; 2) Belum adanya pabrik kelapa sawit dikawasan ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 3) Petani masih banyak menggunakan bibit tidak unggul atau bibit asalan sehingga kualitas TBS rendah; 4) Gangguan kebun kelapa dalam dari insterusi air laut; 5) Belum ada industri pengolahan kepala dalam secara terpadu dalam skala industri; 6) Gangguan hama babi dan monyet terutama untuk komoditi kelapa dalam.



Dari beberapa masalah yang ditemui tersebut, dilaksanakan beberapa alternatif pemecahan masalah antara lain : 1) Inventarisasi kepala sawit; 2) Sosialisasi Permentan No 98 Tahun 2013 dan mewajibkan pemilik melaporkan perkembangan usahanya; 3) Menarik investor pabrik pengolahan kelapa sawit; 4) Pengadaan kecambah kepala sawit unggul dan pengawasan peredaran kecambah; 5) Menarik investor pabrik pengelolaan kelapa dalam; 6) Pembuatan kanal/parit untuk akses sekaligus sebagai tata air mikro kebun kelapa dalam.

2.3.2.4. Kehutanan

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada setiap musim kemarau di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mampu dikendalikan sejak tahun 2012 setelah Dinas Kehutanan meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (SATGAS DALKARLAHUT) dari satu regu menjadi dua regu serta pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

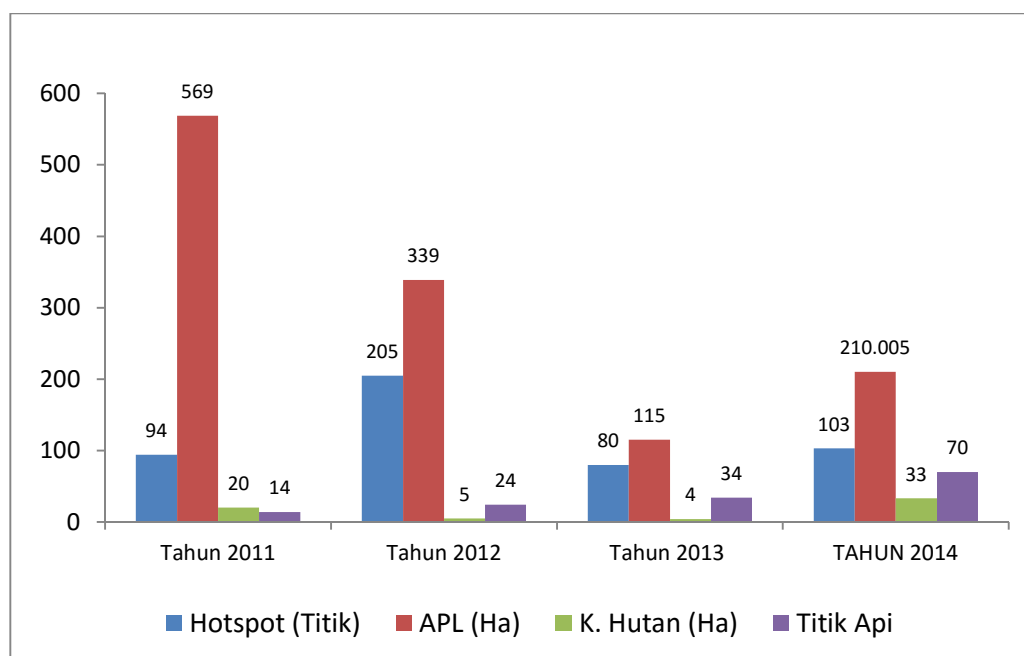
Selain upaya pemadaman juga dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di desa dan kegiatan pembinaan kader konservasi di sekolah secara berkelanjutan setiap tahunnya serta pemasangan papan larangan pada daerah-daerah rawan kebakaran. Berikut disajikan tabel kegiatan sosialisasi dan pembinaan kader konservasi tahun 2011-2014 dan tabel rekapitulasi data hotspot, titik api dan luas kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014.



Tabel T.II.C.13. Rekapitulasi Data Hostpot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kab. Tanjung Jabung Barat 2011-2014

No.	Uraian	Tahun							
		2011		2012		2013		2014	
		Kawasan	Apl	Kawasan	Apl	Kawasan	Apl	Kawasan	Apl
1.	Jumlah Titik Panas (Hot Spot)	42	52	140	89	61	20	63	40
2.	Luas Kebakaran (Ha)	20	569	74,5	339	4	117	33	210,005
3.	Jumlah Titik Api (Pemadaman)	1	13	11	13	1	33	15	55

Grafik T.II.C.55. Hotspot, Titik Api dan Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Masih adanya gangguan keamanan hutan berupa *illegal logging* dan perambahan, maka Dinas Kehutanan telah melakukan kegiatan pengamanan hutan yang difokuskan pada areal yang tidak dibebani izin dalam bentuk patroli rutin dan patroli gabungan. Dari hasil kegiatan patroli tersebut, Dinas Kehutanan telah berhasil mengamankan barang bukti berupa *chain saw* sebanyak 14 (empat belas) unit, gergaji piring 1 (satu) unit, buldozer 1 (satu) unit, dan kayu olahan sebanyak 97 keping = 1,8848 M³.

Luasan kawasan hutan yang tidak berimbang dengan tenaga Polisi Kehutanan (Polhut) menyebabkan terjadinya gangguan keamanan hutan sehingga diperlukan adanya penambahan tenaga polhut dan PPNS.

Minat masyarakat yang masih rendah terhadap komoditi kehutanan, lebih dikarenakan oleh jangka waktu mulai dari penanaman sampai dengan menghasilkan cukup lama, persoalan ini disikapi dengan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberian bibit tanaman kehutanan dan *Multi Purpose Trees Species* (MPTS), serta melakukan penanaman turus jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Jumlah bibit yang telah disalurkan ke masyarakat sejak tahun 2012 – 2014 meliputi hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 343.500 batang dengan jenis, yaitu Jelutung, Jabon, Mahoni, Gaharu, Angsana, Pulai, Glodokan, Bintaro, Roda-Roda, Trembesi, Flamboyan, Pidada, Bakau, Menyirih, Biola Cantik, Kedondong Hutan, Sawo Kecil, Dadap Merah dan Jenis MPTS, yaitu bibit Mangga, Durian, Manggis, Duku dan Sirsak.

Selain upaya tersebut di atas, Dinas Kehutanan telah melaksanakan rehabilitasi hutan lindung gambut (HLG) dengan menanam tanaman jelutung rawa (*Dyera lowii*) di sela-sela tanaman kelapa sawit. Adapun luas kawasan yang telah direhabilitasi dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel T.II.C.14. Realisasi Rehabilitasi Hutan Lindung Gambut Dengan Tanaman Jelutung

No.	Tahun Rehabilitasi	Luas (Ha)	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
1.	2009	500	Desa Bram Itam Kanan	DBH-DR Kabupaten	Proses Pembentukan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
2.	2010	425	Desa Mekar jaya	DBH-DR Kabupaten	
3.	2011	415	Desa Bram Itam Raya	BPDAS Batanghari Jambi	
		52	Desa Sri Menanti	PetroChina Int.Jabung Ltd	

Upaya rehabilitasi pada kawasan hutan lindung gambut dengan menanam tanaman jelutung di sela-sela tanaman kelapa sawit saat ini terhenti kelanjutannya dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan. Peraturan tersebut dianggap kurang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya agar permenhut tersebut dapat direvisi melalui surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 522/1518/Dishut/2014 tanggal 19 Juni 2014.

Sejak tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerjasama dengan lembaga penelitian ICRAF (*International Centre for Research in Agroforestry*) yang juga melibatkan Litbang Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya-upaya agar kelompok masyarakat yang berada di hutan lindung gambut dapat memperoleh legalitas pengelolaan hutan melalui pola hutan kemasyarakatan (HKm). Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu study banding pengelolaan HKm di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, pembentukan kelompok tani hutan, pendataan



masyarakat yang telah mengelola HLG, inventarisasi tanaman dan pemetaan partisipatif.

Belum adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan, sehingga pada tahun 2009 telah dicadangkan areal seluas 2.280 Ha untuk kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesuai SK Menhut Nomor: SK. 70/Menhut-II/2009. BP2HP Wilayah IV Jambi telah memberikan rekomendasi untuk diterbitkan izin HTR kepada KTH Wana Tirta Lestari seluas 68,24 Ha dan Koperasi Produsen Mandiri Maju Bersama seluas 403,70 Ha, namun sampai saat ini belum dapat diterbitkan IUPHHK-HTR oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dikarenakan masa berlaku izin areal pencadangan HTR dari Kementerian Kehutanan telah berakhir. Untuk itu, telah diajukan permohonan perpanjangan pencadangan areal HTR kepada Menteri Kehutanan melalui surat Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 522/110/Dishut/2014 tanggal 21 Januari 2014.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan produksi hasil hutan serta bahan baku industri, Dinas Kehutanan memiliki 8 (delapan) orang petugas pengawas tenaga teknis (Wasganis) yang tugas dan fungsi pokoknya adalah melakukan pengawasan, pengukuran dan pengujian produksi hasil hutan. Dari laporan produksi hasil hutan tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Data produksi hasil hutan dan penerimaan PSDH dan DR kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel T.II.C.15. Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

No.	Penerimaan	2011	2012	2013	2014
1.	DR (USD)	30.223,74	23.033,86	6.945,56	9.814,31
2.	PSDH (Rp)	2.035.974.507	8.623.746.063	4.029.101.993,56	4.695.626.785,50

2.3.2.5. Energi dan sumberdaya mineral

Potensi Pertambangan di Tanjung Jabung Barat demikian dominan, ini dapat dilihat perannya sebagai kontributor utama dalam PDRB sampai pada Tahun 2012. Dalam kaitan ini dapat dilihat ada beberapa perusahaan yaitu PETROCHINA, RANHILL, PAN ORIENT ENERGY, MONTD'OR OIL dan PT. HEXINDO GEMILANG JAYA yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki cadangan minyak bumi \pm 250 juta Barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 Milyard Feed Qubic Gas sebagai potensi sumber daya non hayati. Untuk periode Desember 2011 sampai dengan November 2013 lifting minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. mencapai 1.653.570 barrel atau rata-rata per hari \pm 4.593 barrel. Sedangkan lifting gas bumi Petrochina Jabung Ltd. tahun 2013 mencapai 26.370.100 MMBTU.

Sebagai upaya pencapaian rasio 75/100 electricity pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pencapaian pembangunan millenium (*Millenium Development Goal's*). Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas EDSM sampai dengan tahun 2013 telah berhasil mencapai *Rasioelectricity* untuk kecamatan sebesar 69,23 %, untuk desa / kelurahan 75 %, sedangkan untuk rumah tangga 73 %.



Tabel T.II.C.16. Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	CAPAIAN			
		2011	2012	2013	2014
I	BIDANG SUMBER DAYA MINERAL				
1	Lifting minyak bumi	495.875.94	362.301.88	408.274.56	
2	Lifting Gas Bumi	869.105.72	698.374.08	841.791.75	
3	Air Bersih (Sumur Bor)	126	91	191	128

2.3.2.6. Kelautan dan perikanan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki Wilayah Pesisir dan Laut, dimana secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada daerah yang sangat strategi, yaitu berhadapan langsung dengan kawasan SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Oleh karena itu pengembangan Bidang Perikanan dan Kelautan sangat penting sekali, dimana potensi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup besar untuk dikembangkan, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahannya.

Tabel T.II.C.17. Capaian Kinerja Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ribuan Ton)				
	- Perikanan Tangkap (Laut dan Umum)	21,889.30	24,078.23	24,456.85	24.798,5
	- Perikanan Budidaya	2,605.80	2,852.60	2,416.30	2.761,60
2	Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat Kabupaten Tanjung jabung Barat	30.00	31.87	31.88	32,73



3	Berkurangnya Pelanggaran Penangkapan Ikan	70.30	77.00	82.00	86,00
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut	7.40	8.50	9.00	10,23
5	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	5.00	5.90	6.10	6,75
6	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelatihan Pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan	500	835	1,45	1.430
7	Meningkatnya Jumlah Produksi Benih Ikan di BBI	107,452	167,395	133,05	423.720

Target-target yang tidak tercapai pada jumlah produksi perikanan tangkap (Laut dan Perairan umum) ini dikarenakan peralatan yang digunakan oleh nelayan masih bersifat tradisional, selain itu jangkauan penangkapan ikan masih dalam jalur 1 (laut kabupaten) dan faktor kondisi alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga nelayan tidak bisa melaut, sedangkan target selanjutnya yang tidak tercapai adalah peningkatan jumlah produksi benih ikan di BBI, hal ini dikarenakan tidak semua jenis ikan yang dapat dipijahkan di BBI, hanya ikan-ikan tertentu yang memiliki kemampuan beradaptasi pada kondisi lingkungan perairan yang fluktuatif, selain itu juga jumlah tenaga teknis pembenihan yang ada saat ini masih sangat terbatas, sehingga peningkatan jumlah produksi benih ikan sangatlah kecil.

Berbagai sarana dan prasana dalam mendukung peningkatan Produksi perikanan telah diadakan dan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar. Untuk diketahui pada tahun 2013 pengadaan pompong di bawah 3 GT di perairan pantai sudah tidak lagi dianggarkan, akan tetapi program tersebut diganti dengan pengadaan kapal lebih dari 5 GT, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang himbauan penghentian bantuan kapal



dibawah 3 GT. Akan tetapai walau demikian secara keseluruhan capaian program tersebut memenuhi target.

Tabel T.II.C.18. Perkembangan Produksi Ikan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

No	SUB SEKTOR	SATUAN	2011	2012	2013	2014
1	Perairan Laut	Ton	21.107,2	23.217,92	23.648	23.986,83
2	Perairan Umum	Ton	782,1	860,31	808,85	811,67
3	Kolam	Ton	1.024,80	1.512,60	2.035,70	2.108,30
4	Tambak	Ton	1.501,70	1.017,30	266	473,7
5	Kerambah Apung (KJA) Jaring	Ton	73,1	297	94,40	110,7
6	Benih Ikan	Ekor	107.452	167.395	133.050	423.720
J U M L A H			24.596,35	27.229,52	26.986,00	27.914,92

Beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang perikanan dan kelautan adalah : 1) Masih sering terjadinya pelanggaran jalur penangkapan; 2) Minimnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis baik nelayan umum petani ikan dalam budidaya usaha perikanan; 3) Kurangya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional; 4) Seringnya masyarakat yang menggunakan bahan penangkap ikan yang merusak lingkungan



(*destruktif*); 5) Penanganan masalah pelanggaran hukum seperti perizinan, peraturan daerah, dan peraturan lainnya.

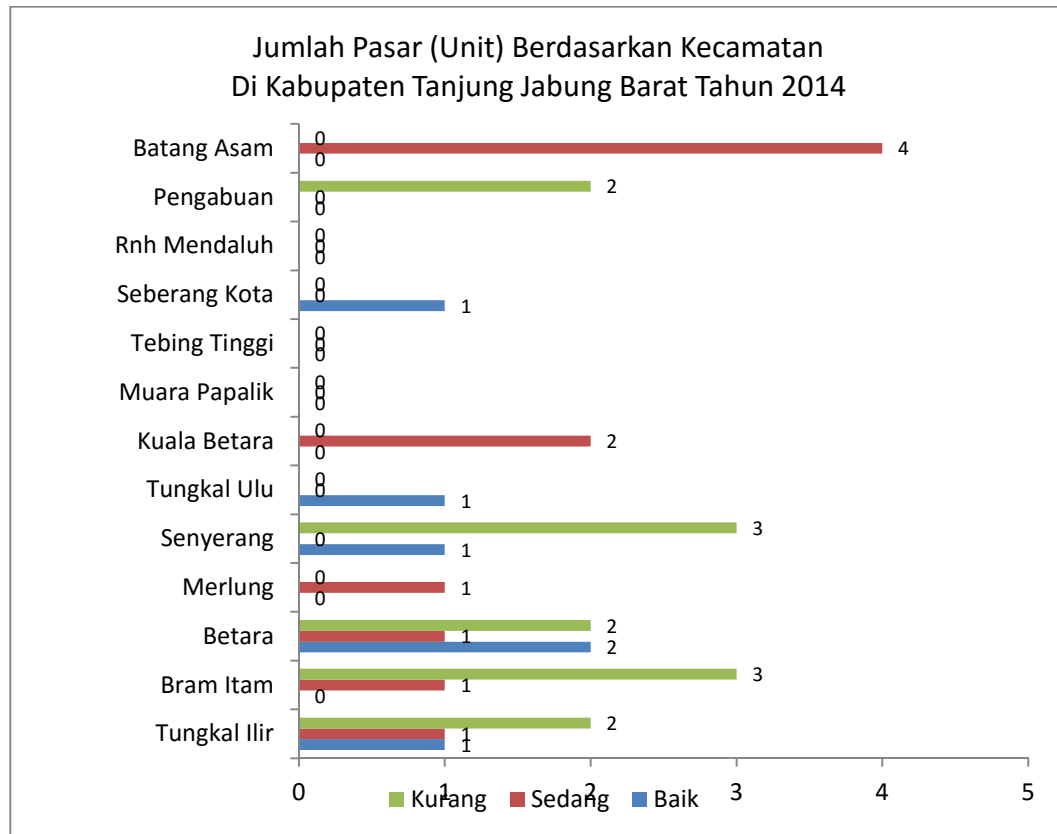
Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah-masalah di bidang perikanan dan kelautan, perlu mempertimbangkan agar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Pengadaan kapal yang mempunyai kemampuan melaut pada jalur 2 (laut Provinsi); 2) Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perikanan; 3) Memberikan bantuan secara berkala; 4) Pengawasan secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya perikanan; 5) Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang masalah perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan.

2.3.2.7. Perdagangan

Jumlah pasar (tradisional) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbanyak adalah di Kecamatan Betara, sedangkan untuk 3 (tiga) Kecamatan tanpa pasar (tradisional) di atas maka transaksi jual beli barang, jasa dan informasi di lakukan pada kawasan tertentu dan menyatu dengan pemukiman penduduk dan dari 28 (dua puluh delapan) kepemilikan pasar yang ada, maka sebagian besar (71%) adalah pasar desa dan hanya sebagian kecil (7,1%) merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten sehingga berpengaruh pada pengalokasian anggaran pemeliharaan pasar tersebut.



Tabel T.II.C.19. Jumlah Pasar (Unit) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014



2.3.2.8. Industri

Dapat dilihat bahwa IKM potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tumbuh 3,5% dari 1.144 pada tahun 2011 menjadi 1.184 pada tahun 2014 dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja IKM Potensial 1,4% dan diiringi dengan peningkatan nilai produksi serta investasi yang tentu saja akan berpengaruh positif terhadap transaksi jual/beli yang menguntungkan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tabel T.II.C.19. Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 sampai dengan 2014

No	Jenis Industri	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja	2014		
				Nilai Investasi (Rp 000)	Nilai Produksi (Rp 000)	Nilai Bahan Baku (Rp 000)
1	IKM potensial	1.184	2.969	3.285.613	169.512.187	9.735.476
2	Industri Menengah Besar	3	180	2.180.000	165.776.509	10.520.927
JUMLAH		1.187	3.149	5.465.613	335.288.696	20.256.403
				2013		
1	IKM potensial	1.164	2.909	3.055.620	166.188.419	9.248.702
2	Industri Menengah Besar	3	163	2.180.000	138.147.091	9.994.881
JUMLAH		1.167	3.072	5.235.620	304.335.510	19.243.583
				2012		
1	IKM potensial	1.184	2.766	2.750.058	163.140.480	8.786.267
2	Industri Menengah Besar	3	122	2.176.425	132.115.048	9.595.085
JUMLAH		1.187	2.888	4.926.483	295.255.528	18.381.352
				2011		
1	IKM potensial	1.144	2.925	2.695.057	73.833.742	8.346.954
2	Industri Menengah Besar	3	91	2.133.750	134.152.716	9.307.233
JUMLAH		1.147	3.016	4.828.807	207.986.458	17.654.187

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan yaitu 1) Minimnya kegiatan sosialisasi sehingga Kemampuan/daya pikir masyarakat dan pelaku tentang hak mereka serta tata niaga yang berlaku di Pasar masih sangat lemah; 2) Belum maksimalnya penerapan sistem perlindungan Konsumen.

Solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas, antara lain : 1) Peningkatan kapasitas sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran; 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan



konsumen; 3) Meningkatkan kemampuan Aparatur Negara; 4) Meningkatkan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak dalam penegakan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.3.2.9. Ketransmigrasian

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk dari daerah lain. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, kebijakan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk satu kesatuan sistem



pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan motor penggerak pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang merupakan salah satu instrumen pembangunan desa dan kawasan pedesaan diharapkan mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya. Satuan Permukiman (SP) atau desa dari Program Transmigrasi Baru dibangun pada lokasi yang dekat dengan desa yang sudah berkembang sebelumnya untuk membentuk Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi atau kawasan pedesaan. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi wilayah, desa-desa tersebut berfungsi sebagai pusat produksi primer dan industri pengolahan ringan yang terbagi menjadi 2 jenis desa yaitu desa pendukung sebagai pusat produksi primer dan desa utama sebagai pusat industri pengolahan ringan dan pusat pelayanan kawasan pedesaan.

Pada suatu kawasan transmigrasi yang terdiri dari beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) transmigrasi, dapat diarahkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sebagai pusat kegiatan lokal dan embrio kota kecil yang mempunyai karakteristik perkotaan, seperti berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Dalam upaya meningkatkan hulu dan hilir, KPB tersebut akan memasarkan hasil-hasil produksi di wilayahnya di kota kecil/ kota menengah di sekitarnya.

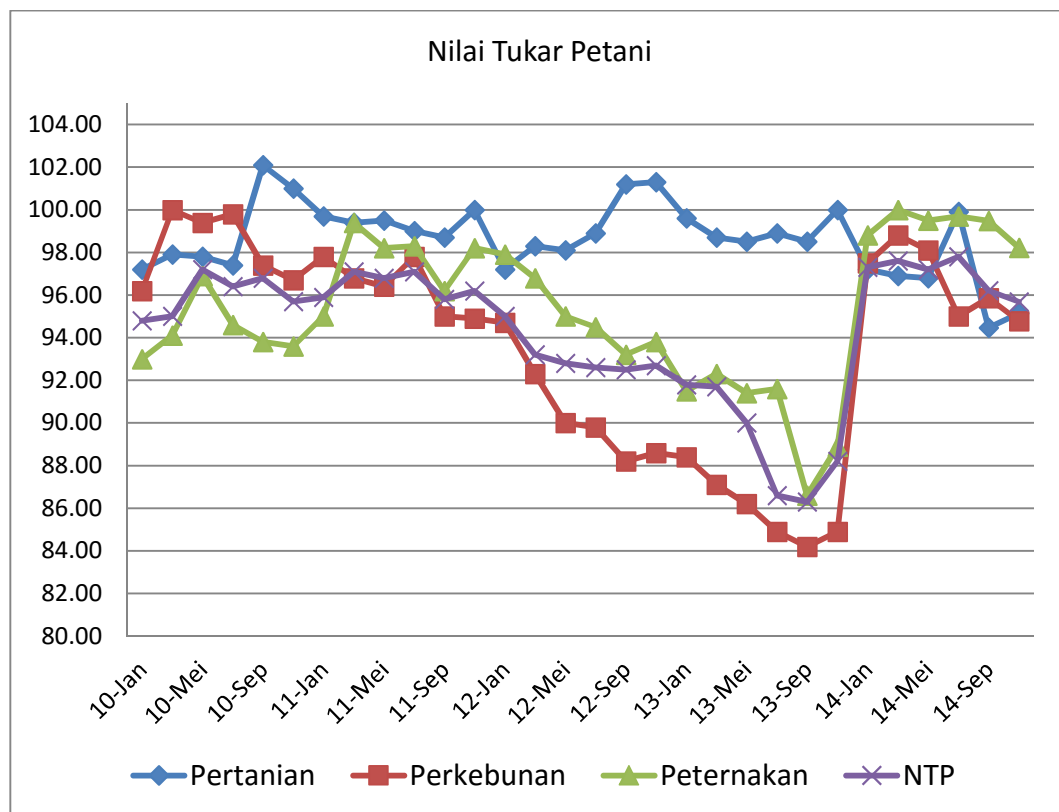


2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salahsatu indikator yang biasa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan kondisi pada tahun dasar. Nilai tukar petani adalah persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). Nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani



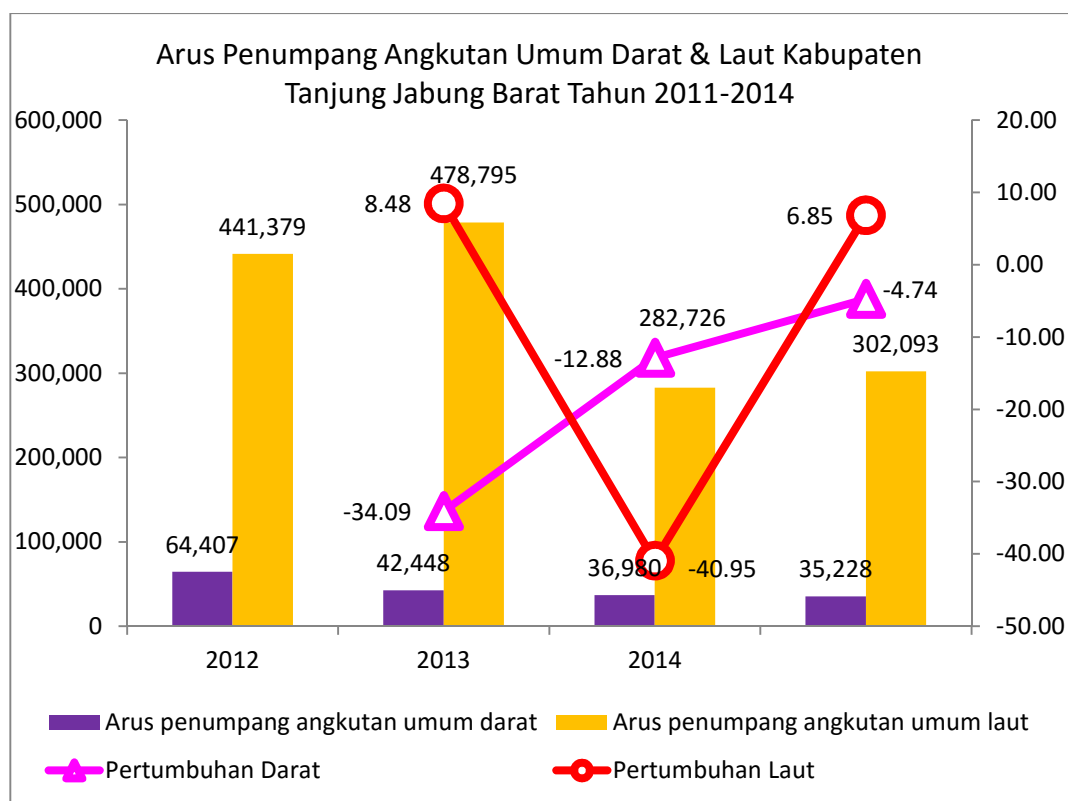


2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

2.4.2.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan,

NO	URAIAN / KONDISI JALAN	2011	2012	2013	2014
		Km	Km	Km	Km
I	JENIS PERMUKAAN				
A	Diaspal	627,86	753,77	826,18	860,35
B	Kerikil	531,85	455,44	672,78	630,64
C	Tanah	576,68	580,36	294,39	330,62
	JUMLAH I	1.736,40	1.789,58	1.806,11	1.821,61

2.4.2.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum,





2.4.2.3. Luas wilayah produktif,

Dalam kaitan dengan wilayah produktif, maka dinyatakan sebagaimana pada dokumen RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah hutan produksi seluas 215.220 Hektare yang membentang di 10 Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada atau dengan kata lain wilayah kecamatan tanpa hutan produksi adalah Kecamatan Tungkal Ilir, Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.

2.4.2.4. Luas wilayah industri,

Pada dokumen RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk wilayah industri dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Industri Besar (Pengolahan Produksi Hasil Pertanian dan Kehutanan) di 6 Kecamatan masing – masing Kecamatan Tunggal Ulu, Tebing Tinggi, Merlung, Renah Mendaluh, Muara Papalik dan Batang Asam, Industri Menengah (Pengolahan pakan ikan/ternak, pengolahan kelapa dalam dan turunannya, kopi, kelapa sawit dan turunannya) dialokasikan di semua kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kecil/Mikro (Pengolahan makanan berupa pengolahan pisang, pengolahan ikan atau udang berupa kerupuk, gula kelapa, kerajinan batik dan anyaman) di alokasikan di Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Betara, Bramitam, Pengabuan, Betara, Renah Mendaluh dan Muara Papalik.

2.4.2.5. Luas wilayah banjir,

Luas wilayah banjir dikonotasikan sebagai wilayah rawan banjir, dan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, daerah ini tersebar di Kecamatan Kuala Betara, Batang Asam, Tungkal Ulu dan Muara Papalik.



2.4.2.6. Luas wilayah perkotaan,

Luas wilayah perkotaan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Perkotaan Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir ; Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Perkotaan Serdang Jaya Kecamatan Betara, Perkotaan Merlung Kecamatan Merlung dan Perkotaan Tebing Kecamatan Tening Tinggi dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Perkotaan Dusun Kebun Kecamatan Batang Asam, Perkotaan Bramitam Kiri Kecamatan Bramitam, Perkotaan Pelabuhan Dagang di Kecamatan Tungkal Ulu dan Perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan.

2.4.2.7. Jenis dan jumlah bank dan cabang,

Layanan perbankan merupakan salah satu asumsi yang dapat digunakan sebagai indikator pergerakan ekonomi di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir tahun 2015 telah dilayani oleh beberapa bank negara maupun bank swasta yaitu BANK NEGARA INDONESIA (BNI) 46 ; BANK RAKYAT INDONESIA ; BANK JAMBI ; BANK SYARIAH MANDIRI ; BANK MANDIRI ; BANK DANAMON ; BANK CENTRAL ASIA (BCA) ; MALAY BANK, BPR TANGGO RAJO dan PANIN BANK.

2.4.2.8. Jenis, kelas, dan jumlah restoran,

Berdasarkan jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum menunjukkan kelas restoran dengan layanan menengah ke atas sebagaimana di kota – kota maju lainnya, dan dari hasil pemantauan maka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 11 Rumah makan yang dapat dikategorikan sebagai restoran yang memadai.

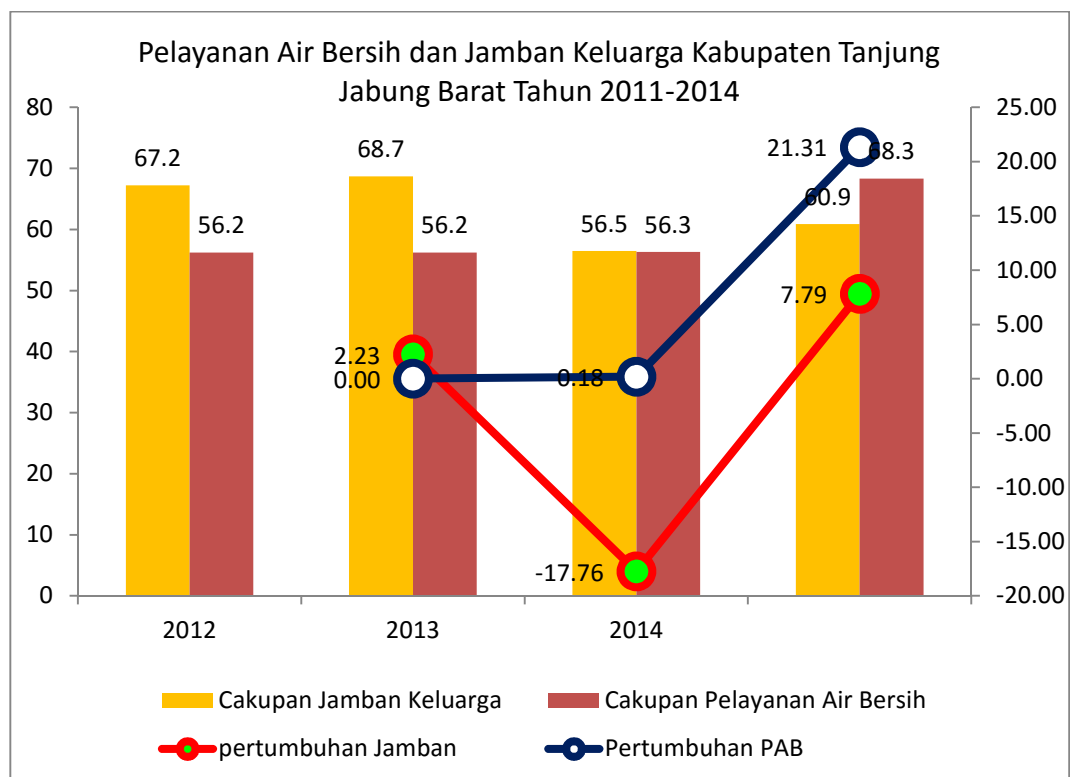


2.4.2.9. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel,

Sebagian besar penginapan/hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah hotel kelas melati yang apabila dilihat berdasarkan skala jumlahnya terkonsentrasi di Kota Kuala Tungkal sebagai Ibukota Kabupaten dan data terakhir tahun 2015 maka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 15 Hotel/Penginapan.

2.4.2.10. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih

Cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan pada tahun 2014 dari tahun 2013 sebesar 68.3% disebabkan karena pesatnya pembangunan fisik sarana air bersih baik yang didanai oleh APBN maupun APBD serta adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hidup bersih dan sehat.





Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimis dapat mencapai target MDG's (tujuan pembangunan millenium) pada tahun 2015, karena program yang dilaksanakan selama ini sudah dalam jalur yang tepat, dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

2.4.2.11.Rasio ketersediaan daya listrik

Panjang Jaringan Listrik Di Kecamatan 2011-2014

No.	Pekerjaan	Lokasi (kecamatan)	Volume (Km)				Total
			2011	2012	2013	2014	
1	Pemasangan	Tebing Tinggi	1,5	-	-	-	-
		Tungkal Ilir	3,145	0,2	5	3,492	-
		Bram Itam	1,3	-	2,4	-	-
		Betara	-	1,5	6,05	0,390	-
		Muara Papalik	-	-	1	-	-
		Merlung	-	-	2	-	-
		Senyerang	-	-	3,1	8,900	-
		Batang Asam	-	-	1,55	3,700	-
		Pengabuan	-	-	-	5,500	-
		Renah Mendaluh	-	-	-	11,500	-
Jumlah			5,945	1,7	21,1	33,482	62,227

Panjang Jaringan Listrik Di Kecamatan 2011-2014

No.	Pekerjaan	Lokasi (kecamatan)	Volume (Km)				Total
			2011	2012	2013	2014	
1	Pemasangan SUTR	Tebing Tinggi	5,5	-	8	-	-
		Tungkal Ilir	1,05	1,5	-	1,050	-
		Kuala Betara	2	-	0,28	-	-
		Merlung	-	12	-	3,800	-
		Tungkal Ulu-	-	8	-	-	-
		Purwodadi	-	17	-	-	-
		Senyerang	-	-	21	4,000	-
		Renah Mendaluh	-	-	-	12,800	-
		Batang Asam	-	-	-	-	-
		Jumlah			8,55	38,5	29,28



2.4.2.12. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015*
1	Ratio Electricity Kecamatan	69,23	69,23	69,23	76,92	92,3
2	Ratio Electricity Desa/Kelurahan	-	51,57	51,57	56,72	65,67
3	Ratio Electricity Rumah Tangga	30,97	37,88	43,19	44,58	50,96
4	PLTS	-	-	93	12	-

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Permasalahan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan masuk dalam kategori aman dan terkendali, namun demikian persoalan yang sering muncul dalam masa 5 tahun terakhir adalah konflik sengketa lahan, konflik buruh, konflik daerah perbatasan dan terakhir sejumlah kekerasan dalam rumah tangga, Imigran gelap dan kriminalitas sedangkan kekerasan mengatasnamakan agama, radikalisme dan terorisme sebagaimana yang terjadi di daerah lain belum kelihatan kepermukaan

2.4.3.2. Jumlah Demo

Kondisi umum kemajemukan masyarakat Jambi yang sebagian kecil masih memiliki tingkat kerawanan konflik, dampak implementasi otonomi daerah masih ada yang belum tuntas, kebijakan publik secara keseluruhan belum menyentuh kepentingan publik, masih terjadi kesenjangan sosial ekonomi secara signifikan, masih rendahnya kondisi



hukum dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum, pelanggaran HAM, dampak negatif dari keterbukaan ditandai dengan unjuk rasa yang berakibat anarkhisme di sebagian daerah, merosotnya etika dan moral, menguatnya fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berdampak terhambatnya perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) disamping permasalahan diatas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan makin rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya kelestarian lingkungan, tingginya angka kriminalitas, illegal logging dan sebagainya yang semuanya ini memberikan gambaran tentang semakin beratnya tugas petayanan yang akan diemban aparatur Pemerintah Daerah khususnya aparatur Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.4.3.3. Lama proses perijinan

Ada penurunan jumlah perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan oleh KPPT, hal ini dimungkinkan karena rendah dan kurangnya pengertian masyarakat akan pentingnya legalitas perijinan dan Non Perijinan yang mereka miliki dan masih minimnya kami melakukan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.

NO	JENIS IZIN	2011	2012	2013	2014	TOTAL
	I. PERIJINAN					
1	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);	486	934	305	306	2.031
2	Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;	47	193	23	25	288
3	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);	225	254	44	96	619
4	Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;	31	59	13	24	127
5	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);	314	680	282	346	1.622
6	Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic (HO);	502	529	283	320	1.634

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



7	Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ;	1	4	3	1	9
8	Ijin Pemanfaatan Air Limbah (Land Application) ;	1	2	0	0	3
9	Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;	17	38	58	52	165
10	Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ;	374	524	238	212	1.348
11	Ijin Usaha Industri (IUI) ;	0	5	1	0	6
12	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;	372	588	247	219	1.426
13	Tanda Daftar Gudang (TDG) ;	10	20	0	1	31
14	Tanda Daftar Industri (TDI) ;	2	2	1	1	6
15	Ijin Prakter Dokter;	9	18	0	0	27
16	Ijin Praktek Dokter Gigi;	0	3	0	0	3
17	Ijin Kerja Perawat;	59	67	0	0	126
18	Ijin Perawat Gigi;	0	6	0	0	6
19	Ijin Praktek Bidan;	44	70	0	0	114
20	Ijin Praktek ahli Gizi;	0	0	0	0	0
21	Ijin Pengobatan Tradisional Menetap;	1	7	0	0	8
22	Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;	1	2	0	0	3
23	Ijin Kerja Asisten Apoteker;	4	7	0	0	11
24	Ijin Kerja Apoteker;	3	4	0	0	7
25	Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;	0	0	0	0	0
26	Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;	118	172	117	104	511
27	Ijin Usaha Ketenaga Listrikian untuk kepentingan sendiri;	2	4	1	0	7
28	Ijin Usaha Ketenaga Listrikian untuk kepentingan umum;	2	2	0	0	4
29	Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;	1	2	2	8	13
30	Ijin Pengambilan Air Permukaan;	0	2	2	0	4
31	Ijin Mendirikan Bangunan Menara;	0	21	5	5	31
32	Ijin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan;	0	19	18	41	78
35	Ijin Praktek Perawat;	14	6	0	0	20
36	Ijin Optical;	0	0	1	1	2
38	Ijin Toko Obat;	0	0	1	1	2
39	Ijin Apotek;	1	1	0	6	8
40	Ijin Klinik Bersalin;	0	1	3	7	11
43	Ijin Kerja Bidan;	20	30	0	0	50
49	Ijin Usaha Dunia Fantasi;	2	3	1	0	6
56	Ijin Hotel Bintang dan Melati;	1	0	1	0	2
57	Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;	0	2	0	0	2
59	Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;	0	0	2	0	2
83	Ijin Reklame;	7	12	9	6	34



84	Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);	0	48	56	46	150
85	Ijin Lokasi	0	0	0	24	24
	b. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi	0	0	0	4	4
	JUMLAH	2.671	4.343	1.717	1.856	10.587

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Barat

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selama tahun 2014, diantaranya : 1) Masih terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan proses pelayanan perizinan; 2) Kelembagaan yang masih berstatus kantor sehingga koordinasi dengan SKPD teknis berkaitan dengan perizinan masih belum optimal; 3) Aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan yang masih lemah; 4) Kurang optimalnya peran tim teknis dalam proses pelayanan perizinan; 5) Kondisi Geografis yang masih sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk mengurus perizinan menjadi kendala; 6) Letak bangunan KPPT yang kurang strategis. KPPT merupakan salah satu instansi pelayanan publik di bidang perizinan yang idealnya secara administratif mudah dipahami, jelas, transparan, pasti dan secara tata letak kantor juga mudah dilihat publik, dengan sarana parkir yang lebih luas.

2.4.3.4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,

Jumlah dan macam Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014

No.	Jenis Penerimaan Pajak Daerah	2011	2012	2013	2014
1	Pajak Hotel	94.942.000	158.963.800	193.616.100	204.790.000
2	Pajak Restoran	616.814.210	1.014.616.117	1.014.292.600	1.866.235.915
3	Pajak Hiburan	11.952.500	3.603.000	81.477.000	13.295.000
4	Pajak Reklame	201.499.205	287.203.100	253.773.362	272.278.740
5	Pajak Penerangan Jalan	1.962.729.161	3.187.076.674	8.794.917.972	8.504.007.974



6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.510.716.118	2.149.796.874	1.373.925.094	800.997.937,95
7	Pajak Air Bawah Tanah	5.465.959	7.922.275	18.814.400	17.113.525
8	Pajak Sarang Walet	323.096.000	237.520.000	133.960.000	98.250.000
9	PBB P2				4.372.359.029
10	Pajak BPHTB	3.727.334.328	939.855.623	240.821.650	4.556.278.620
Jumlah Pajak Daerah		8.454.549.481	7.986.557.463	12.105.598.178	20.705.606.741

Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

No	Jenis Penerimaan Retribusi Daerah	2011	2012	2013	2014
1	Retribusi Jasa Umum	4.588.969.005	6.843.010.126	7.377.806.677	16.395.275.679
2	Retribusi Jasa Usaha	227.039.350	213.939.233	303.000.940	234.599.900
3	Retribusi Perizinan Tertentu	515.756.798	1.508.110.331	1.122.508.263	1.247.556.436
Jumlah Retribusi Daerah :		5.331.765.153	8.565.059.690	8.803.315.881	17.877.432.015

2.4.3.5. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha,

NO	PERATURAN DAERAH		TENTANG
	NOMOR	TAHUN	
1	1	2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014
2	2	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3	3	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4	4	2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
5	5	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
6	6	2014	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
7	7	2014	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014



8	8	2014	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2015
9	9	2014	Izin Usaha Warung Internet
10	10	2014	Dokumen Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan



BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto



Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



Tabel T.III.C.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
1	Pajak Daerah				
	Target	6.322.850.000	5.079.700.000	10.268.342.413	17.708.200.000
	Realisasi	8.454.549.481	7.986.557.463	12.105.598.178	20.705.606.741
	Persentase (%)	133,71	157,22	117,89	116,93
2	Retribusi Daerah				
	Target	4.002.000.000	7.880.740.600	8.517.600.000	13.720.371.780
	Realisasi	5.331.765.153	8.565.059.690	8.803.315.881	17.877.432.015
	Persentase (%)	133,23	108,68	103,35	130,30
3	Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan				
	Target	2.000.000.000	3.396.000.000	3.396.000.000	7.000.000.000
	Realisasi	3.096.606.734	3.456.463.122	3.885.492.330	7.600.111.256
	Persentase (%)	154,83	101,78	114,41	108,57

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

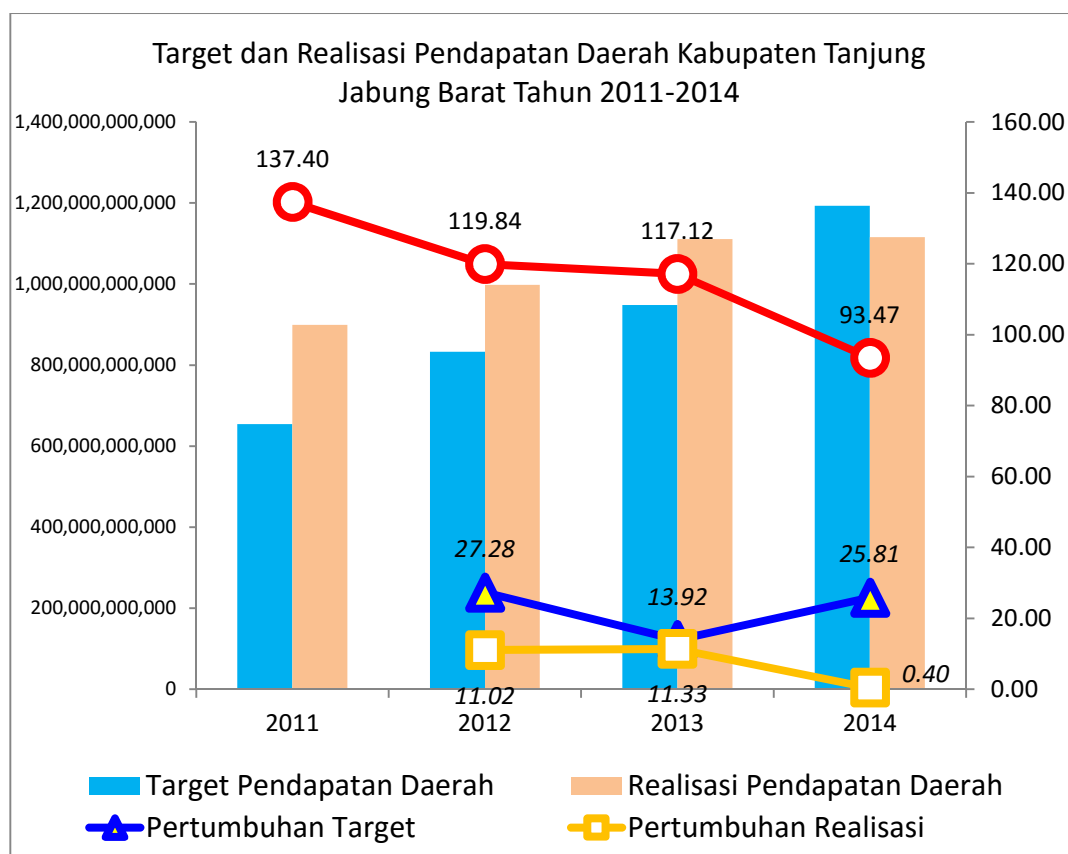


4 Lain-lain pendapatan asli daerah				
Target	11.936.700.000	16.796.100.000	24.595.514.982	32.700.579.491
Realisasi	27.128.968.732	32.768.169.639	38.750.848.587	44.765.725.381
Persentase (%)	227,27	195,09	157,55	136,90
B Dana Perimbangan				
Target	564.552.286.686	732.233.501.127	806.255.556.734	1.010.825.059.481
Realisasi	779.209.669.564	874.142.479.305	959.691.444.356	908.800.115.384
Persentase (%)	138,02	119,38	119,03	89,91
C Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Target	65.423.811.804	67.317.447.852	95.551.097.667	111.466.128.451
Realisasi	75.682.871.711	71.022.806.975	87.789.365.779	115.683.019.772
Persentase (%)	115,68	105,50	91,88	103,78
JUMLAH				
Target	654.237.648.490	832.703.489.579	948.584.111.796	1.193.420.339.203
Realisasi	898.904.431.375	997.941.536.194	1.111.026.065.111	1.115.432.010.550
Persentase (%)	137,40	119,84	117,12	93,47



Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan target Pendapatan meningkat rata-rata sebesar 22,34 % setiap tahun selama kurun waktu tahun 2011- 2014. Secara lebih rinci yaitu, pada tahun 2011, ditetapkan target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp. 654.237.648.490,-, kemudian pada tahun 2012 meningkat sebesar 27,28 % menjadi Rp. 832.703.489.579,-. Selanjutnya pada tahun 2013, terjadi peningkatan target Pendapatan Daerah sebesar 13,92 %menjadi Rp. 948.584.111.796,-, dan pada tahun 2014 meningkat 25,81 %menjadi Rp. 1.193.420.339.203,-.

Grafik T.III.C.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Pada periode yang sama, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat yaitu rata-rata 7,58 % per tahun. Untuk lebih rinci penjelasannya yaitu : Pada tahun 2011 realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah Rp. 898.904.431.375-, kemudian tahun 2012 terjadi peningkatan 11,02 % menjadi Rp. 997.941.536.194,-.Selanjutnya pada tahun 2013 naik sebesar 11,33 % menjadi Rp. 1.111.026.065.111,- dan menjadi Rp. 1.115.432.010.50,- pada tahun 2014 atau meningkat 0,40 %.

Perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan disebut efektifitas (Halim, 2007). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi, 1996 dalam Lalu Karyawan, 2002) :

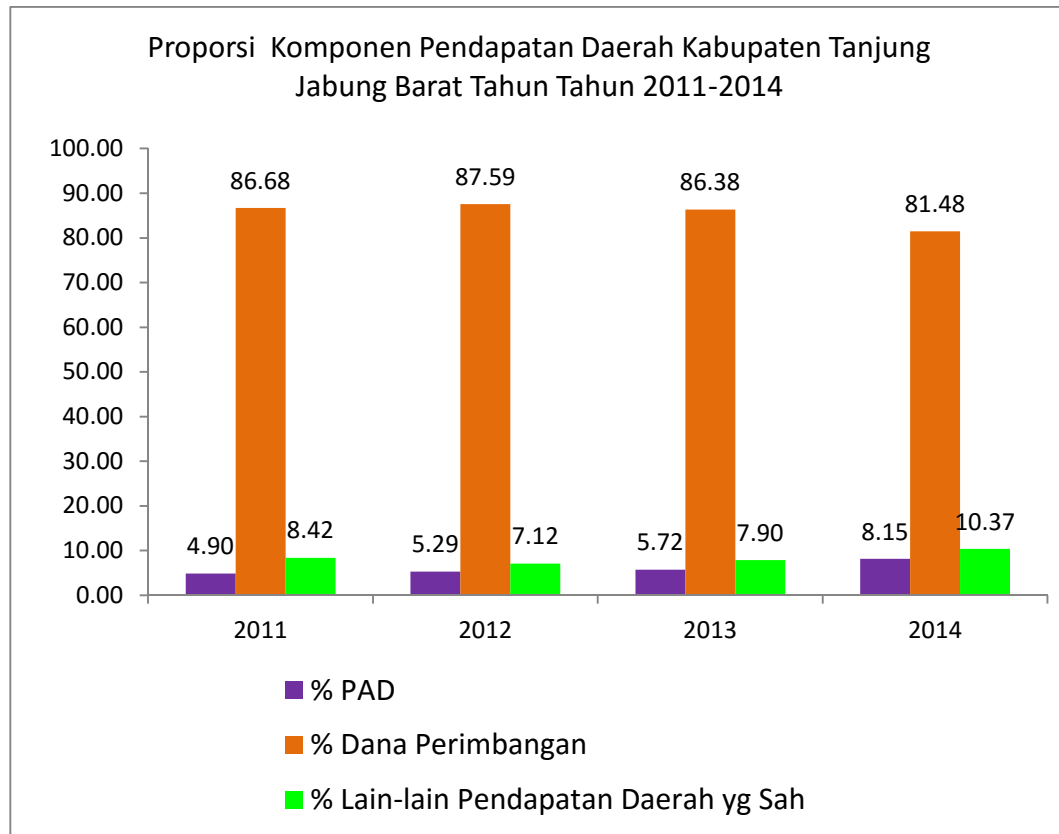
- a. Koefisien efektifitas bernilai di atas 100% berarti sangat efektif
- b. Koefisien efektifitas bernilai antara 90 - 100 % berarti efektif
- c. Koefisien efektifitas bernilai antara 80 - 90 % berarti cukup efektif
- d. Koefisien efektifitas bernilai antara 60 - 80 % berarti kurang efektif
- e. Koefisien efektifitas bernilai di bawah 60% berarti tidak efektif

Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 memiliki tingkat efektifitas yang sangat efektif kecuali pada tahun 2014 tingkat efektifitas Pendapatan Daerah adalah efektif (93,47 %).

Pendapatan Daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2014 selalu didominasi oleh Dana Perimbangan yaitu rata-rata sebesar 85,53 % per tahun. Meskipun demikian, proporsi Dana Perimbangan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014 terus mengecil yaitu dari 86,68 % tahun 2011 menjadi 81,48 % tahun 2014.



**Grafik T.III.C.2. Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014**



Komponen penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedua sepanjang tahun 2011-2014 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu rata-rata sebesar 8,45 % per tahun. Selama tahun 2011-2014, proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dengan kecenderungan naik yaitu tahun 2011 sebesar 8,42 % menjadi 7,12 % tahun 2012 dan 7,90 % tahun 2013 serta menjadi 10,37 % tahun 2014.



Selanjutnya, komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2014 yang terkecil adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rata-rata hanya sebesar 6,01 % per tahun. Namun demikian, proporsi PAD dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014 meningkat setiap tahun yaitu mulai dari 4,90 % tahun 2011 menjadi 8,15 % tahun 2014.

A. Pendapatan Asli Daerah

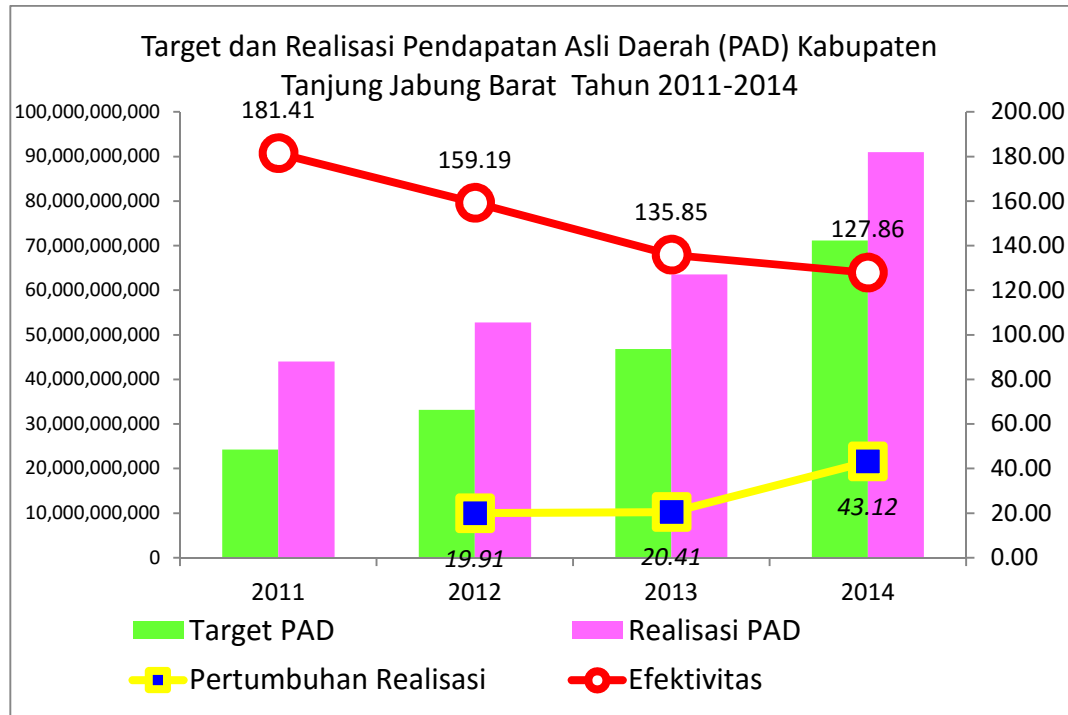
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah yang sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

Setiap tahun selama tahun 2011-2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan penerimaan PAD selalu meningkat, yaitu rata-rata sebesar 43,27 % per tahun, seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Grafik T.III.C.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

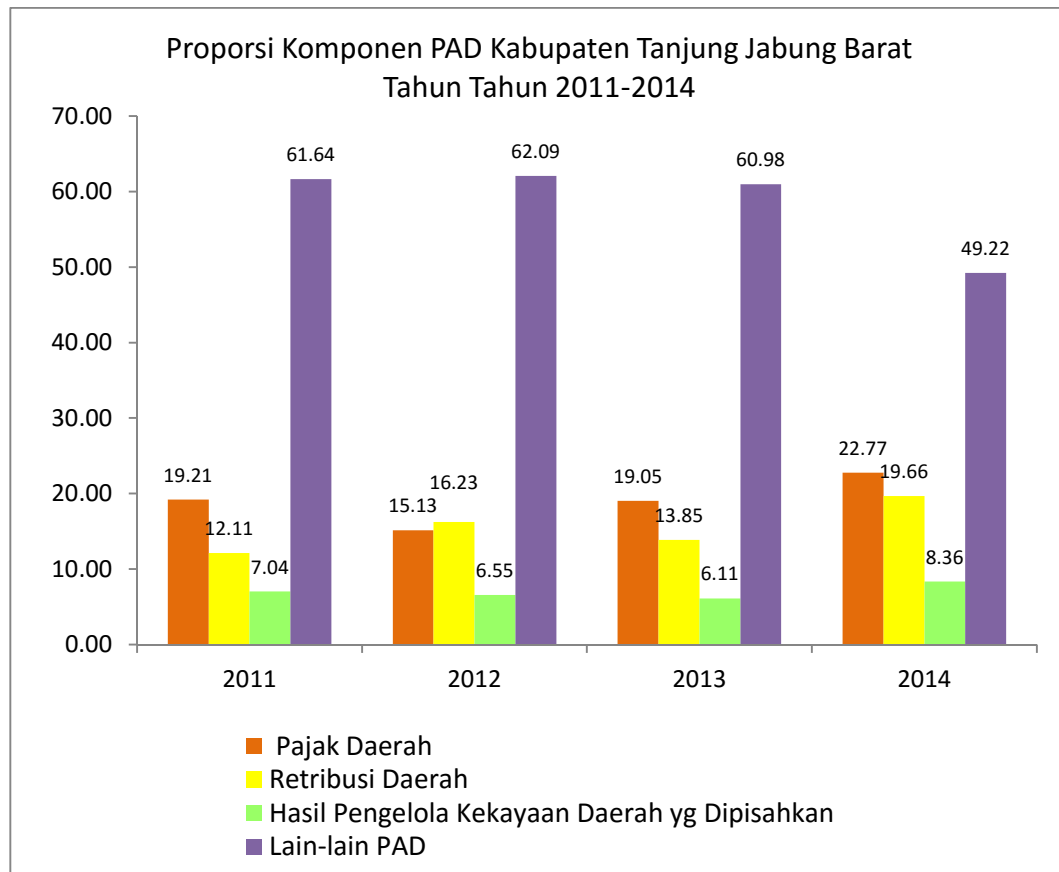


Begitu pula dengan realisasi PAD, setiap tahun selama tahun 2011-2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil merealisasikan penerimaan PAD yang selalu meningkat, yaitu dari Rp. 44.011.890.100,- tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 90.948.875.394,- tahun 2014 atau rata-rata naik sebesar 43,27 % per tahun. Selain itu, realisasi PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalui melebihi target yang ditetapkan yaitu rata-rata sebesar 151,08 % atau kategori sangat efektif.

Komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2014 selalu didominasi oleh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata sebesar 58,48 % per tahun. Meskipun demikian, proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014 mengecil yaitu 61,64 % tahun 2011 menjadi 49,22% tahun 2014.



Grafik III. 4. Proporsi Komponen PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Pajak Daerah menempati posisi kedua sebagai komponen penyumbang PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2011-2014, yaitu rata-rata sebesar 19,04 % per tahun. Meskipun sedikit berfluktuasi, namun kecendrungan naik yaitu 19,21 % tahun 2011 meningkat menjadi 22,77 % tahun 2014.

Kemudian sebagai komponen penyumbangan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya adalah Retribusi Daerah dengan rata-rata 15,46 % per tahun. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun tersebut berfluktuasi dengan kecendrungan meningkat yaitu pada tahun 2011 sebesar 12,11 % meningkat pada tahun 2014 menjadi 19,66 %. Selanjutnya komponen penyumbangan PAD



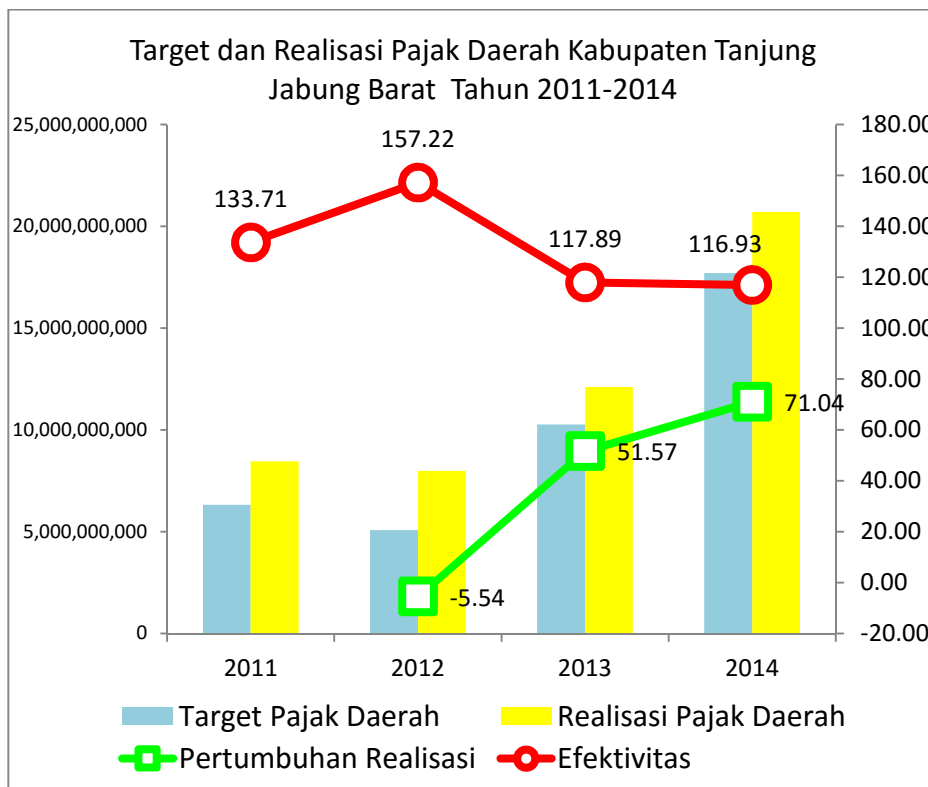
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkecil adalah Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yg Dipisahkan dengan rata-rata sebesar 7,01 %

A.1. Pajak Daerah

Dalam menentukan targetnya ini, Pemerintah Daerah menempuh berbagai cara dalam menetapkan target pendapatan Pajak Daerah. Adapun cara-cara tersebut antara lain adalah:

1. Melihat potensi wajib Pajak Daerah yang ada di wilayah tersebut.
2. Pertumbuhan perolehan Pajak Daerah dari tahun ke tahun.
3. Rata-rata penerimaan Pajak Daerah pada periode-periode sebelumnya.
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan Pajak Daerah.

Grafik T.III.C.4. Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





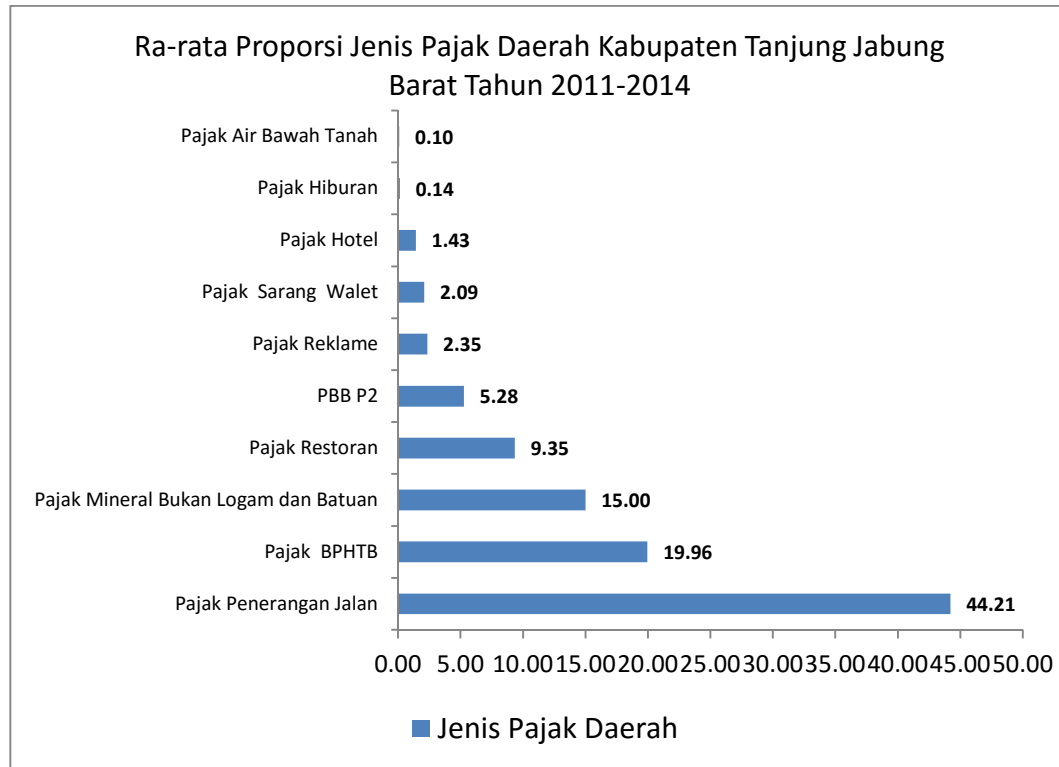
Target yang ditetapkan untuk Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun meningkat selama tahun 2011-2014 kecuali tahun 2012 dimana targetnya malah menurun. Adapun target Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sebesar Rp. 6.322.850.000,- meningkat menjadi Rp. 17.708.200.000,- pada tahun 2014 atau meningkat signifikan rata-rata sebesar 51,65 % per tahun.

Begipula dengan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun meningkat selama tahun 2011-2014 kecuali tahun 2012 realisasinya menurun. Pada tahun 211, realisasi Pajak Daerah sebesar Rp. 8.454.549.481,- meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp. 20.705.606.741,- atau meningkat rata-rata sebesar 39,03% per tahun. Selain itu, realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu melebihi target yang ditetapkan, berarti setiap tahun pemungutan Pajak Daerah sangat efektif.

Pajak daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah, seperti tersaji pada Grafik berikut.



Grafik T.III.C.5. Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Dari beragam jenis Pajak Daerah tersebut, selama periode tahun 2011-2014 ternyata Pajak Penerangan Jalan memberi kontribusi sangat dominan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata-rata 44,21% per tahun. Selanjutnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah memberi kontribusi terbesar kedua terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata-rata 19,96 % per tahun, dan selanjutnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar rata-rata 15,00 % per tahun.

A.2. Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan cara-cara antara lain adalah :

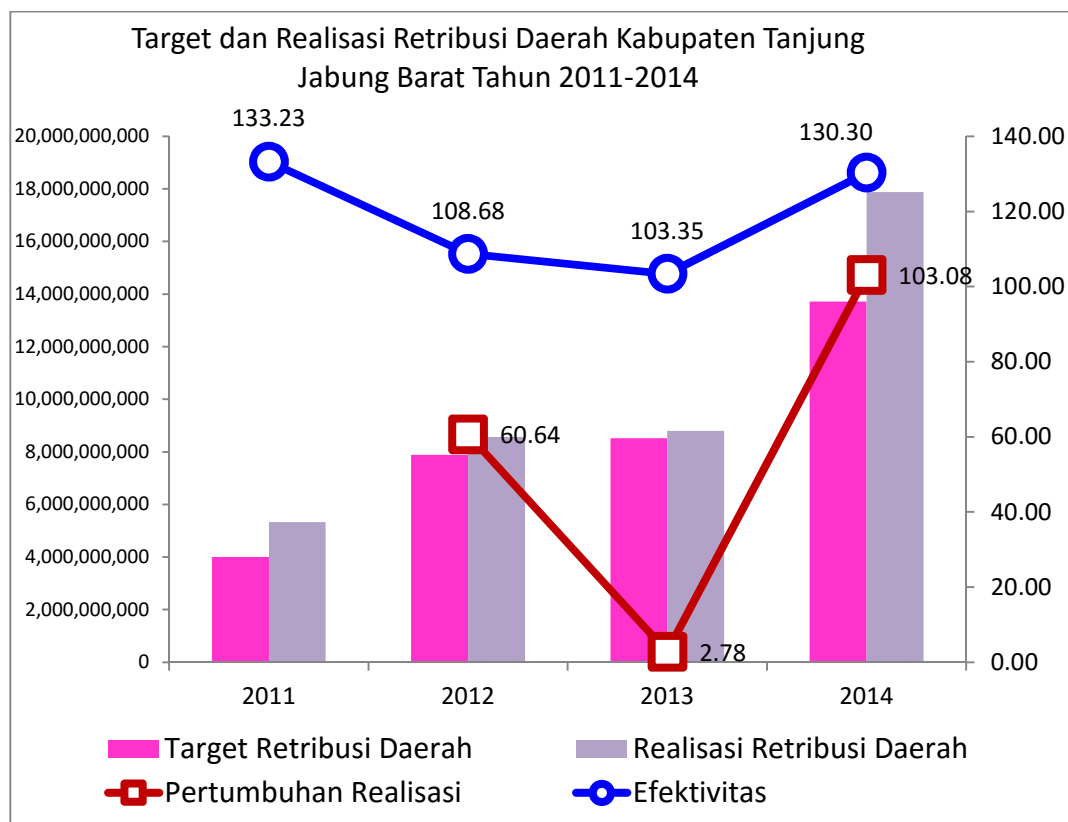
1. Melihat potensi wajib Retribusi Daerah yang ada di wilayah tersebut



2. Pertumbuhan perolehan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun
3. Rata-rata penerimaan Retribusi Daerah pada periode-periode sebelumnya
4. Prediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan Retribusi Daerah

Setiap tahun target Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan meningkat signifikan selama tahun 2011-2014 dengan rata-rata sebesar 55,36 % per tahun. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 4.002.000.000,- sedangkan pada tahun 2014 menjadi Rp. 13.720.371.780,-

Grafik T.III.C.6. Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Selanjutnya, untuk capaian realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu meningkat signifikan yaitu rata-rata sebesar 55,50 % per tahun. Capaian realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar Rp. 5.331.765.153,- sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 17.877.432.015,-. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu lebih tinggi dari target yang ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Retribusi Daerah adalah sangat efektif.

Pada tahun 2011-2014, Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari beragam jenis Retribusi Daerah tersebut, ternyata Retribusi Jasa Umum kontribusinya sangat dominan terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata-rata 85,37 % per tahun. Selanjutnya Retribusi Perizinan Tertentu memberi kontribusi terbesar kedua terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu rata-rata 11,75 % per tahun, dan terakhir adalah Retribusi Jasa Usaha memberi kontribusi rata-rata 2,88 % per tahun.

A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

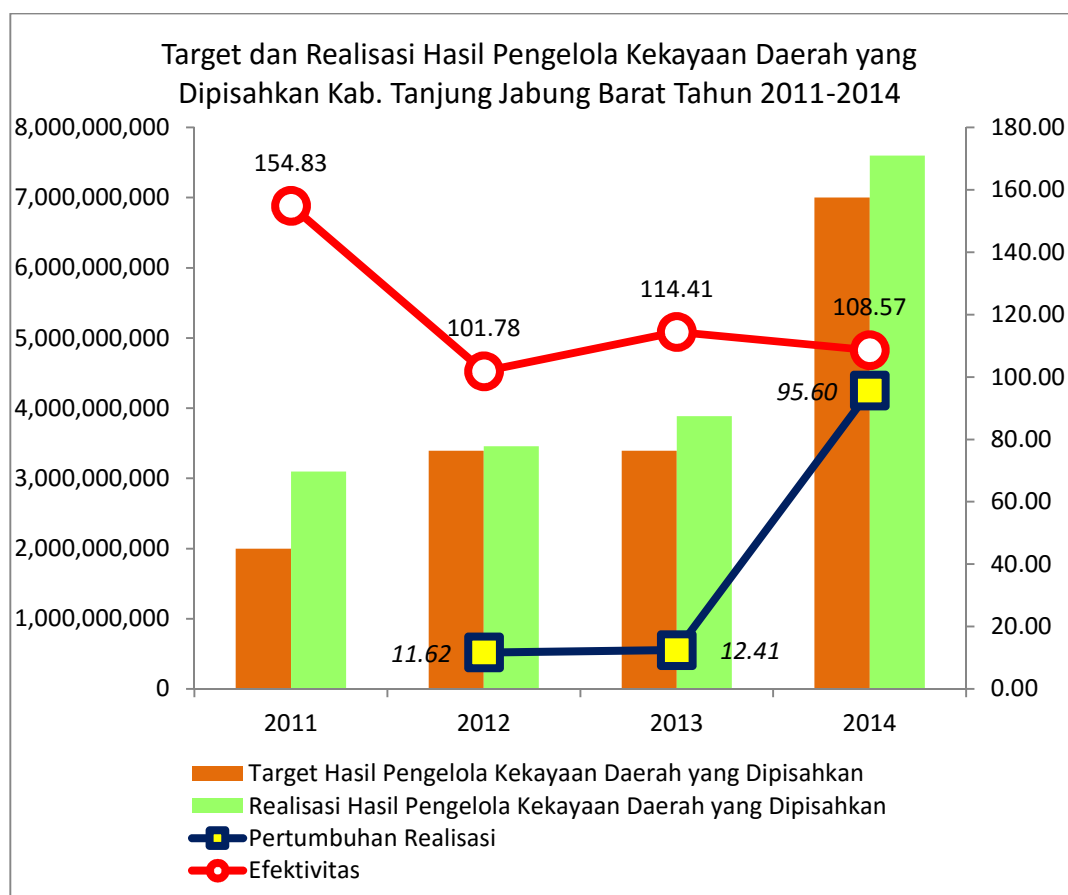
Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun ditargetkan meningkat signifikan selama tahun 2011-2014 dengan rata-rata sebesar 58,64% per tahun. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 ditargetkan Rp. 2.000.000.000,- sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 7.000.000.000,-

Selama tahun 2011-2014, setiap tahun capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu meningkat yaitu rata-rata 39,88% per tahun. Capaian



realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 sebesar Rp. 7.600.111.256,- lebih besar dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 3.096.606.734,-. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu melampaui dari target yang ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sangat efektif.

Grafik T.III.C.7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

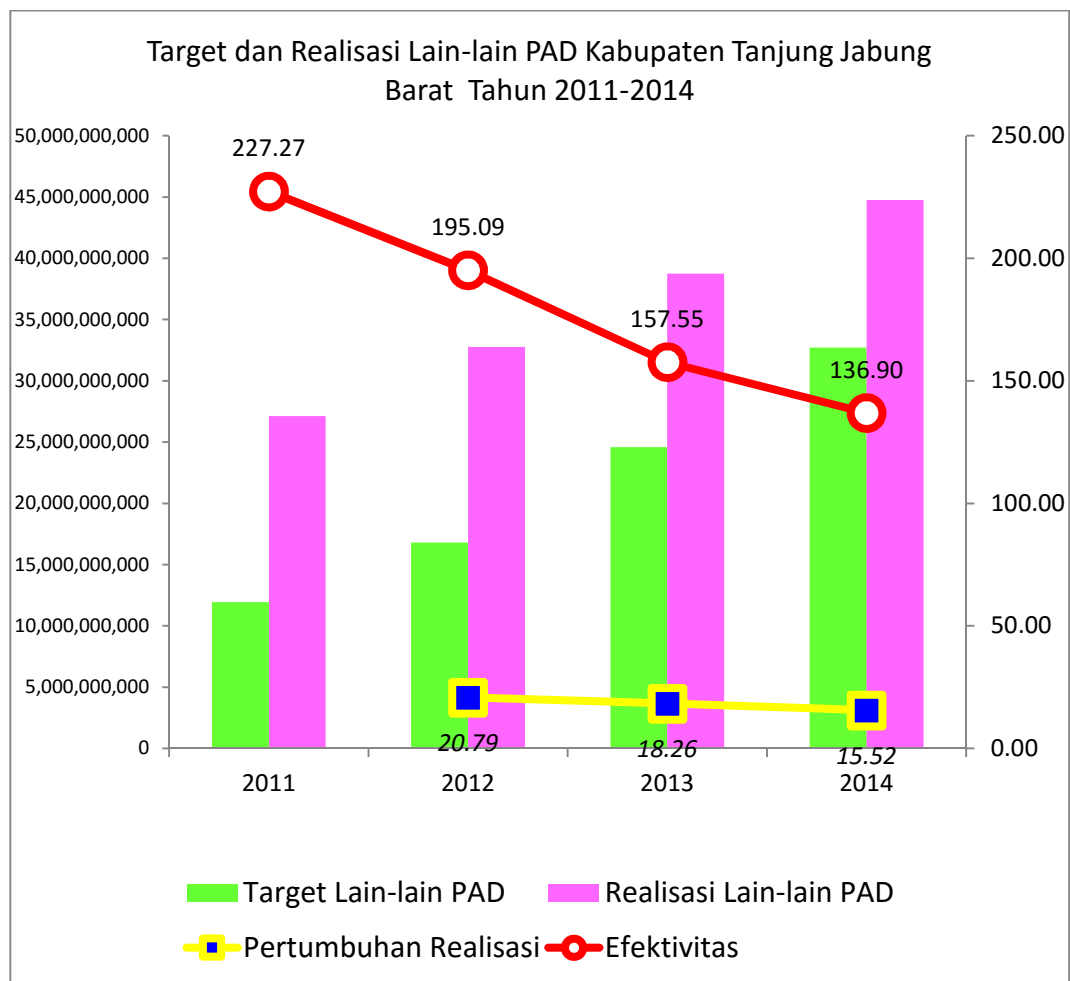




A.4. Lain-lain PAD

Salah satu sumber utama PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lain-Lain PAD. Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Lain-Lain PAD setiap tahun ditargetkan meningkat selama tahun 2011-2014 dengan rata-rata sebesar 40,03% per tahun. Target Lain-Lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar Rp. 11.936.700.000,- sedangkan pada tahun 2014 bertambah menjadi sebesar Rp. 32.700.579.491,-

Grafik T.III.C.8. Lain-Lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





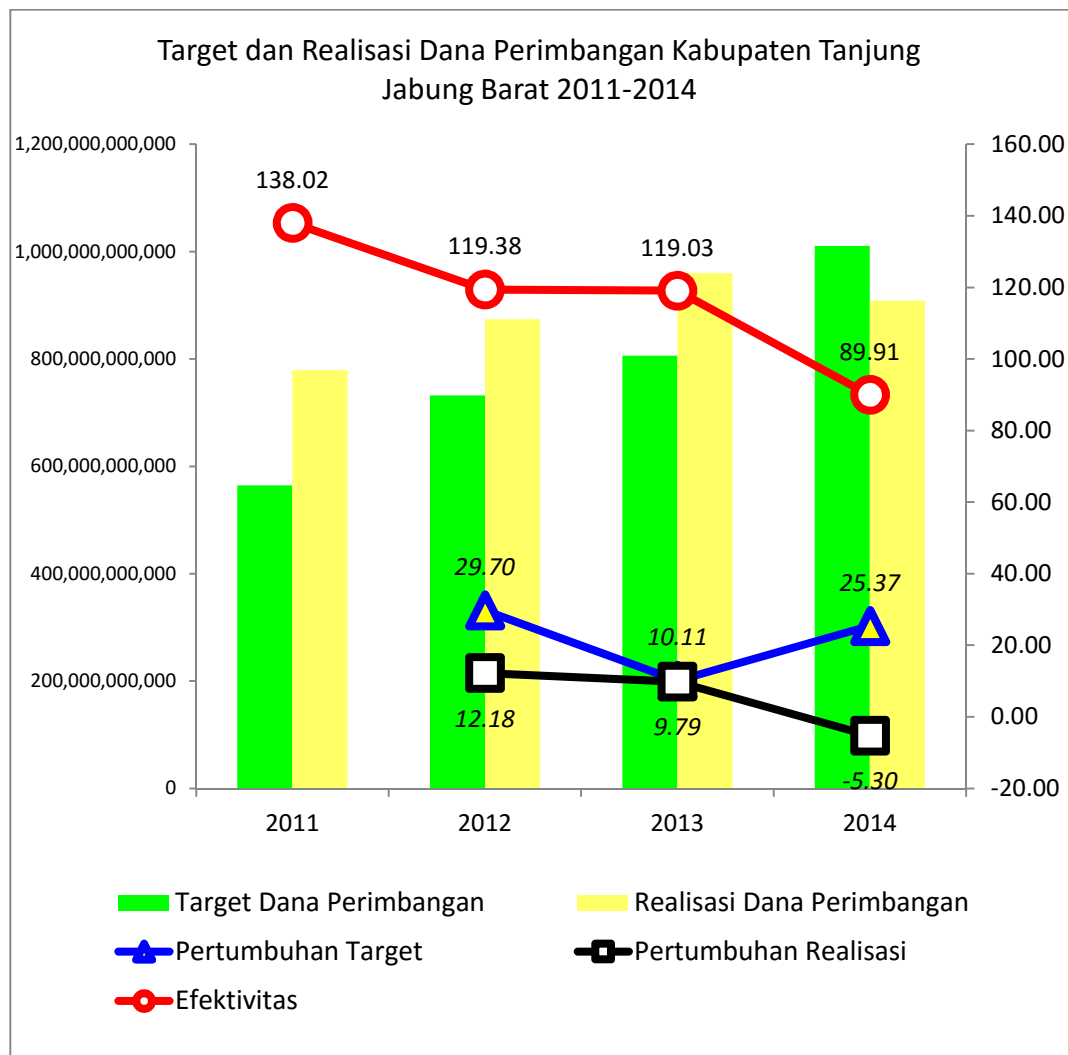
Kemudian untuk realisasi Lain-Lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu naik setiap tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 18,19% per tahun. Pada tahun 2011, realisasi Lain-Lain PAD sebesar Rp. 27.128.968.732,- naik pada tahun 2014 menjadi Rp. 44.765.725.381,-. Sepanjang tahun 2011-2014, realisasi Lain-Lain PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu di atas target yang ditetapkan, yang berarti tingkat efektivitas Lain-Lain PAD adalah sangat efektif.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan selalu sebagai sumber utama Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode waktu tahun 2011-2014. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan Dana Perimbangan setiap tahun selalu naik. Target Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.010.825.059.481,- jauh meningkat dibandingkan target Dana Perimbangan tahun 2011 yang sebesar Rp. 564.552.286.686,-, yang berarti rata-rata meningkat 21,73 % per tahun.



Grafik T.III.C.9. Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014



Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berhasil meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Realisasi Dana Perimbangan untuk tahun 2014 berhasil mencapai Rp. 908.800.115.384,- meningkat dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan tahun 2011 (Rp. 779.209.669.564,-) atau secara rata-rata bertambah 5,56 % per tahun. Jika dibandingkan antara



target dan realisasi, maka tingkat efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 adalah sangat efektif, kecuali pada tahun 2014 dimana realisasi Dana Perimbangan di bawah target yang ditetapkan dengan kategori cukup efektif (89,91 %).

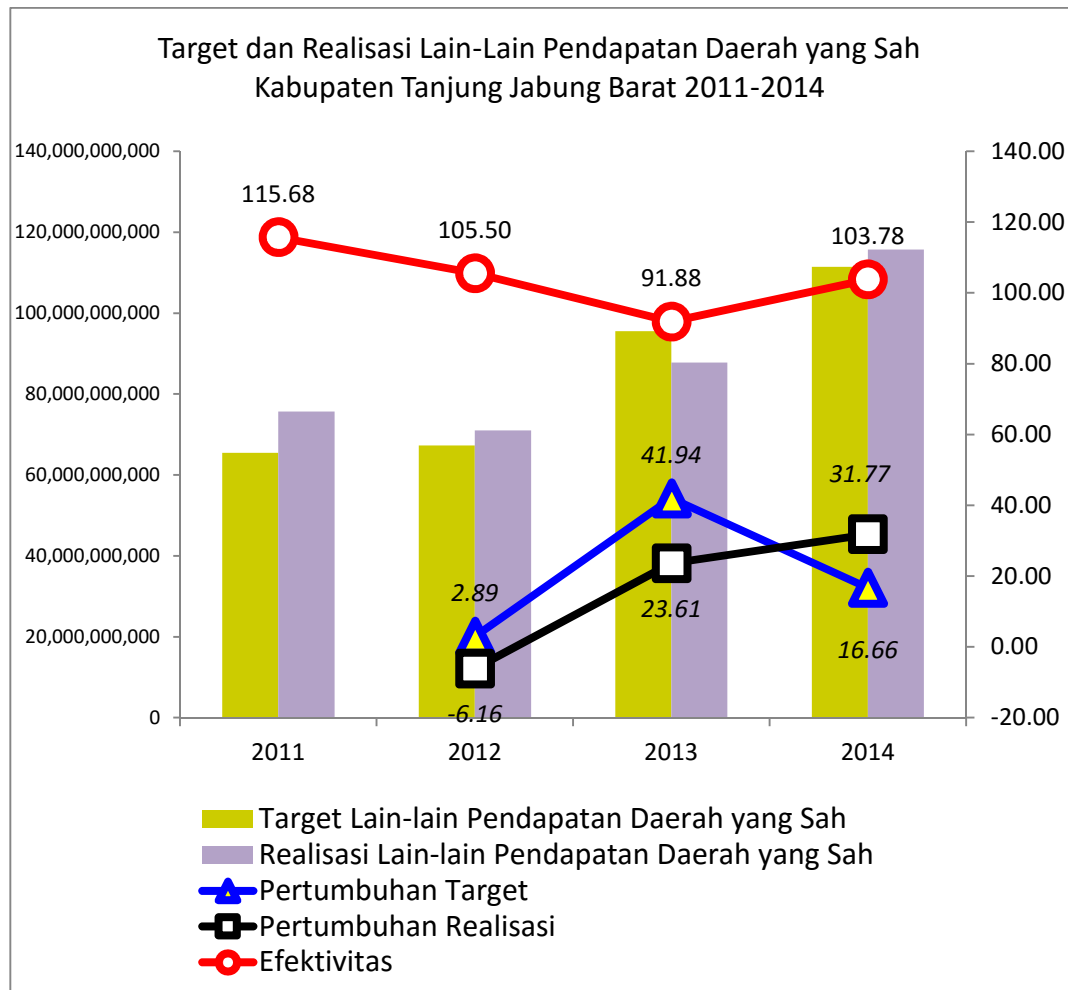
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan setiap tahun untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu naik. Dimana target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 sebesar Rp. 111.466.128.451,- sangat besar dibandingkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2011 yaitu Rp.65.423.811.804,-. Secara rata-rata Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat sebesar 20,50% per tahun selama periode tahun 2011-2014.

Untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga naik setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Adapun realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2014 mencapai Rp. 115.683.019.772,- meningkat tajam dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2011 yang hanya sebesar Rp.75.682.871.711,- atau secara rata-rata meningkat 16,41% per tahun.



**Grafik T.III.C.10. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014**



Jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka tingkat efektivitas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 adalah sangat efektif, kecuali pada tahun 2013 dimana realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di bawah target yang ditetapkan dengan kategori efektif (91,88%).



3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



Tabel T.III.C.2. Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	Target	379.379.915.593	399.160.187.386	432.870.990.074	511.229.512.498
	Realisasi	316.426.545.957	336.135.647.638	359.514.201.838	425.883.251.940
	Persentase (%)	83,41	84,21	83,05	83,31
	Proporsi (%)	43,08	38,96	29,52	32,14
1	Belanja Pegawai				
	Target	332.043.004.644	360.021.220.111	391.879.219.157	436.694.845.098
	Realisasi	273.417.638.557	303.003.112.663	324.203.857.438	356.475.009.247
	Persentase (%)	82,34	84,16	82,73	81,63
2	Belanja Subsidi				
	Target	3.084.792.000	2.955.648.000	3.004.000.000	2.803.000.000
	Realisasi	2.124.240.000	2.253.000.000	2.802.233.700	2.803.000.000
	Persentase (%)	68,86	76,23	93,28	100,00
3	Belanja Hibah				
	Target	16.976.251.000	1.275.000.000	10.654.400.000	
	Realisasi	16.303.369.500	1.060.000.000	8.923.500.000	
	Persentase (%)	96,04	83,14	83,75	#DIV/0!
4	Belanja Bantuan Sosial				
	Target	12.860.065.849	14.651.640.300	3.194.396.942	4.291.000.000
	Realisasi	10.605.428.100	10.615.340.000	2.128.750.000	3.464.750.000

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Uraian	2011	2012	2013	2014
	Persentase (%)	82,47	72,45	66,64	80,74
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa				
	Target	270.751.900	571.584.600	571.584.600	571.590.000
	Realisasi	270.750.600	571.584.600	571.584.600	571.584.600
	Persentase (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan pada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa & Partai Politik				
	Target	13.500.000.000	17.727.389.375	20.667.389.375	62.712.882.400
	Realisasi	13.499.998.800	17.727.389.375	20.543.776.100	62.032.908.093
	Persentase (%)	100,00	100,00	99,40	98,92
7	Belanja Tidak Terduga				
	Target	645.050.200	1.957.705.000	2.900.000.000	4.156.195.000
	Realisasi	205.120.400	905.221.000	340.500.000	536.000.000
	Persentase (%)	31,80	46,24	11,74	12,90
B	BELANJA LANGSUNG				
	Target	471.482.652.215	583.938.836.866	970.140.343.483	1.008.073.433.380
	Realisasi	418.008.718.466	526.742.907.229	858.394.105.850	899.101.006.831
	Persentase (%)	88,66	90,21	88,48	89,19
	Proporsi (%)	56,92	61,04	70,48	67,86

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

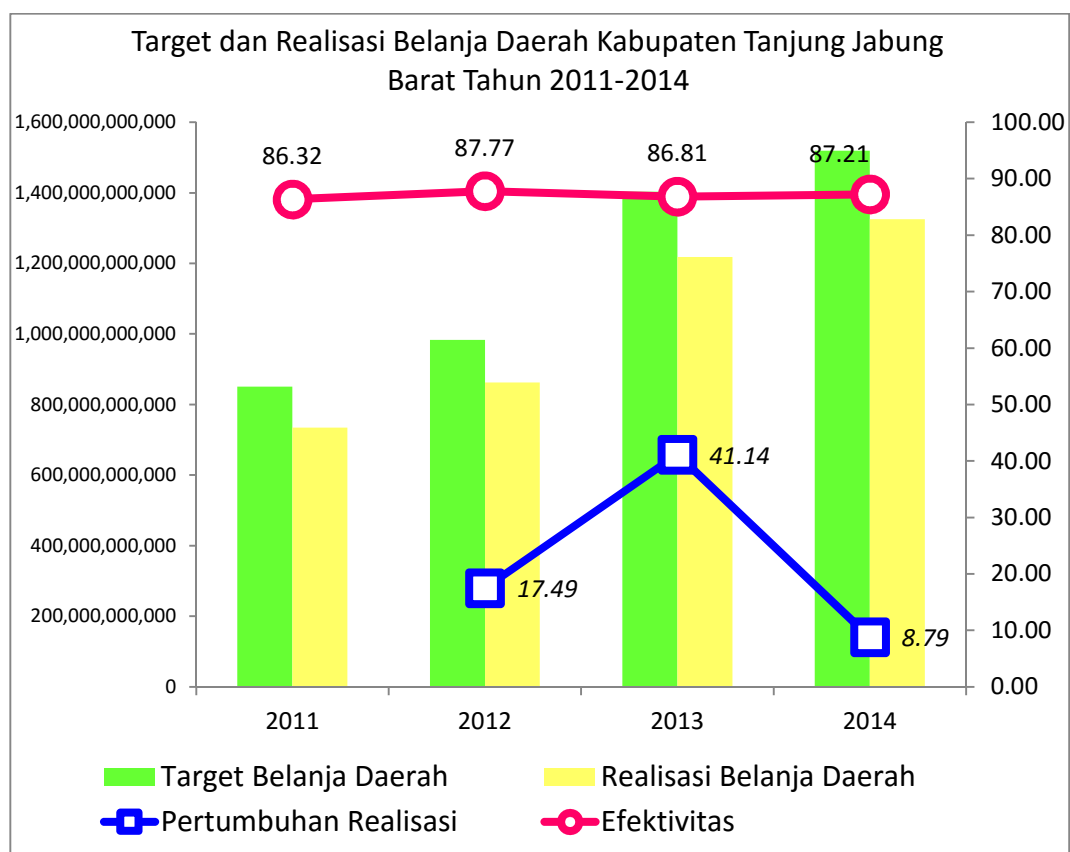


No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Belanja Pegawai				
	Target	38.001.507.890	44.611.748.500	71.293.516.500	86.983.961.000
	Realisasi	36.345.371.641	41.728.237.650	66.048.365.000	81.588.937.498
	Persentase (%)	95,64	93,54	92,64	93,80
2	Belanja Barang dan Jasa				
	Target	158.757.874.605	239.866.833.190	285.278.859.363	278.452.680.725
	Realisasi	149.688.993.894	212.884.239.061	236.391.227.654	219.708.693.594
	Persentase (%)	94,29	88,75	82,86	78,90
3	Belanja Modal				
	Target	274.723.269.720	299.460.255.176	613.567.967.620	642.636.791.655
	Realisasi	231.974.352.931	272.130.430.518	555.954.513.196	597.803.375.739
	Persentase (%)	84,44	90,87	90,61	93,02
C	BELANJA DAERAH				
	Target	850.862.567.808	983.099.024.252	1.403.011.333.557	1.519.302.945.878
	Realisasi	734.435.264.423	862.878.554.867	1.217.908.307.688	1.324.984.258.771
	Persentase (%)	86,32	87,77	86,81	87,21



Pada periode waktu tahun 2011-2014, Belanja Daerah untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditargetkan tiap tahunnya selalu bertambah. Target Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 sebesar Rp. 1.519.302.945.878,- jauh lebih besar dibandingkan target Belanja Daerah tahun 2011 yang hanya Rp.850.862.567.808,-. Secara rata-rata Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat sebesar 22,18% per tahun selama periode tahun 2011-2014.

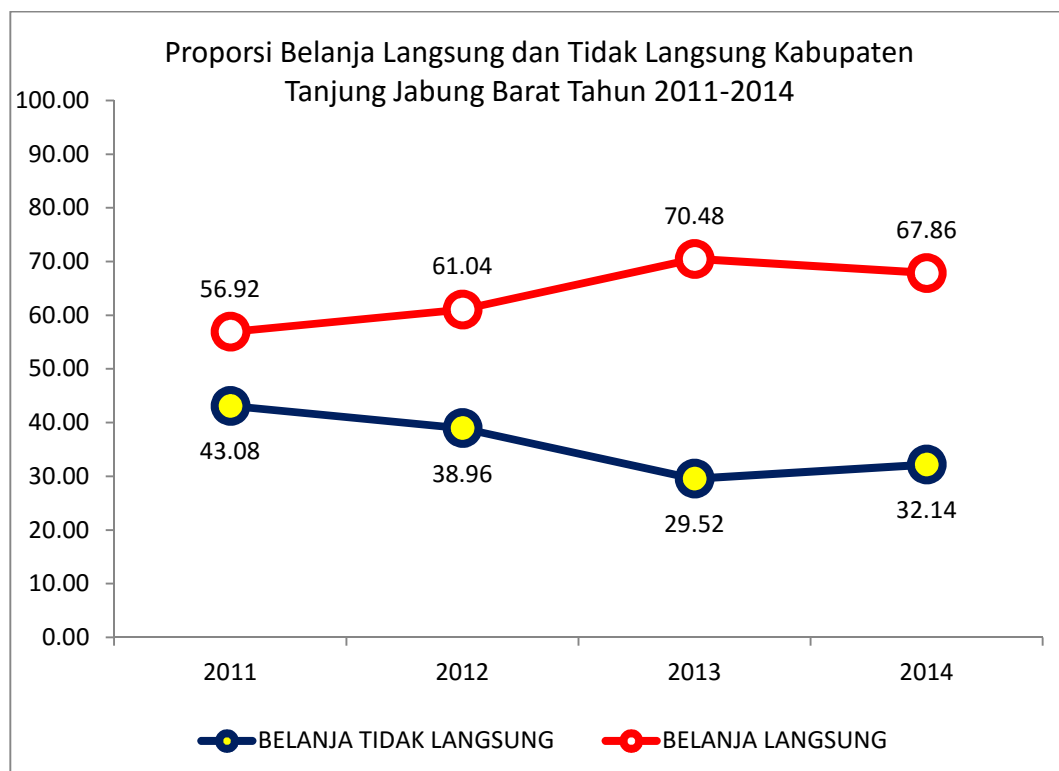
Grafik T.III.C.11. Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Untuk realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga selalu naik setiap tahunnya mulai tahun 2011-2014. Adapun realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2014 mencapai Rp. 1.324.984.258.771,- meningkat tajam dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2011 yang sebesar Rp.734.435.264.423,- atau secara rata-rata meningkat 22,48% per tahun. Namun demikian, jika dibandingkan antara target dan realisasi, maka realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011- 2014 selalu dibawah target. Berdasarkan kondisi ini, maka tingkat efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 adalah cukup efektif.

Grafik T.III.C.12. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 selalu lebih besar setiap tahunnya dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 terdapat kecenderungan naik, yaitu tahun 2011 sebesar 56,92 % meningkat menjadi 67,86 % tahun 2014. Sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung kecenderungan menurun, yaitu 43,08 % tahun 2011 menurun menjadi 32,14 % tahun 2014. Secara rata-rata Belanja Langsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 adalah 64,07 % per tahun sedangkan Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 35,93 % per tahun.

A. Belanja Tidak Langsung

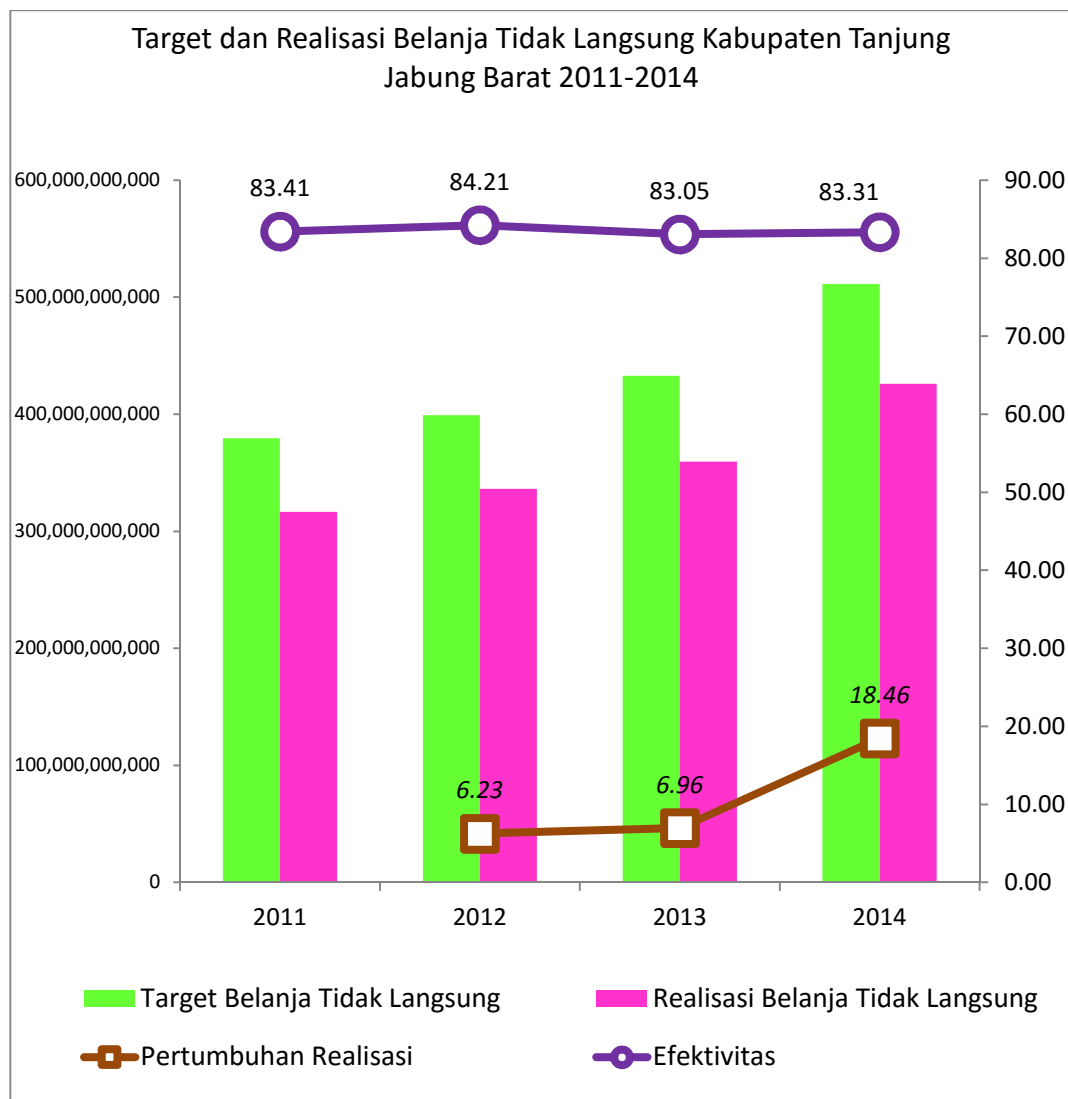
Perkembangan target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, target Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp. 379.379.915.593,- kemudian target tersebut bertambah menjadi Rp. 511.229.512.498,- pada tahun 2014, atau rata-rata target Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 10,59 %.

Selanjutnya, perkembangan realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada waktu yang sama juga menunjukkan peningkatan. Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 adalah sebesar Rp. 425.883.251.940,- lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yaitu Rp. 316.426.545.957,- atau secara rata-rata realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 10,55%.



Namun jika dibandingkan target dengan realisasi, maka terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2014 selalu tidak pernah mencapai target. Berarti tingkat efektivitas Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tersebut rata-rata adalah 83,49 % yaitu masuk kategori cukup efektif.

Grafik T.III.C.13. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





**Grafik T.III.C.14. Proporsi Jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014**



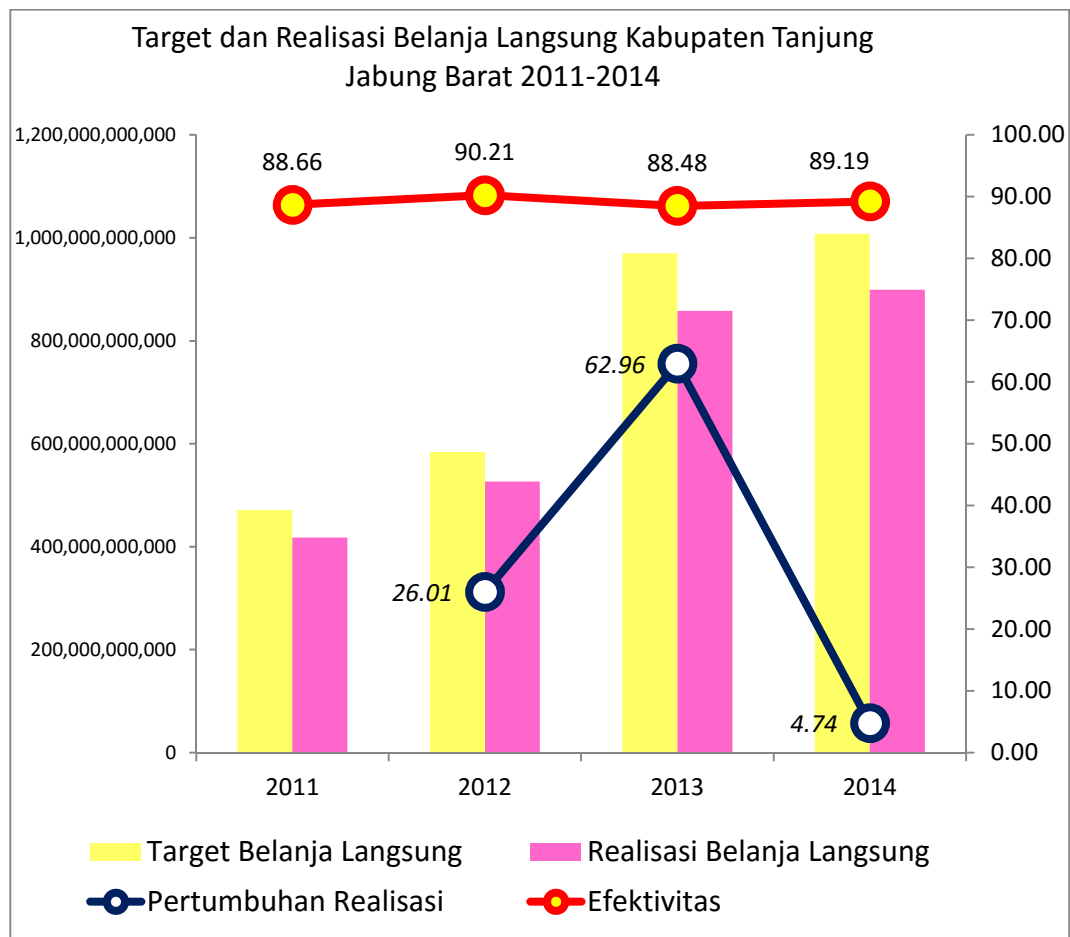
Selama tahun 2011-2014, jenis Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbesar adalah Belanja Pegawai yaitu rata-rata sebesar 87,61 % per tahun, sedangkan sisanya untuk Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah, Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga



B. Belanja Langsung

Perkembangan target Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, target Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Rp. 471.482.652.215,- kemudian bertambah signifikan menjadi Rp. 1.008.073.433.380,- pada tahun 2014, atau rata-rata target Belanja Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 31,30%.

Grafik T.III.C.15. Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

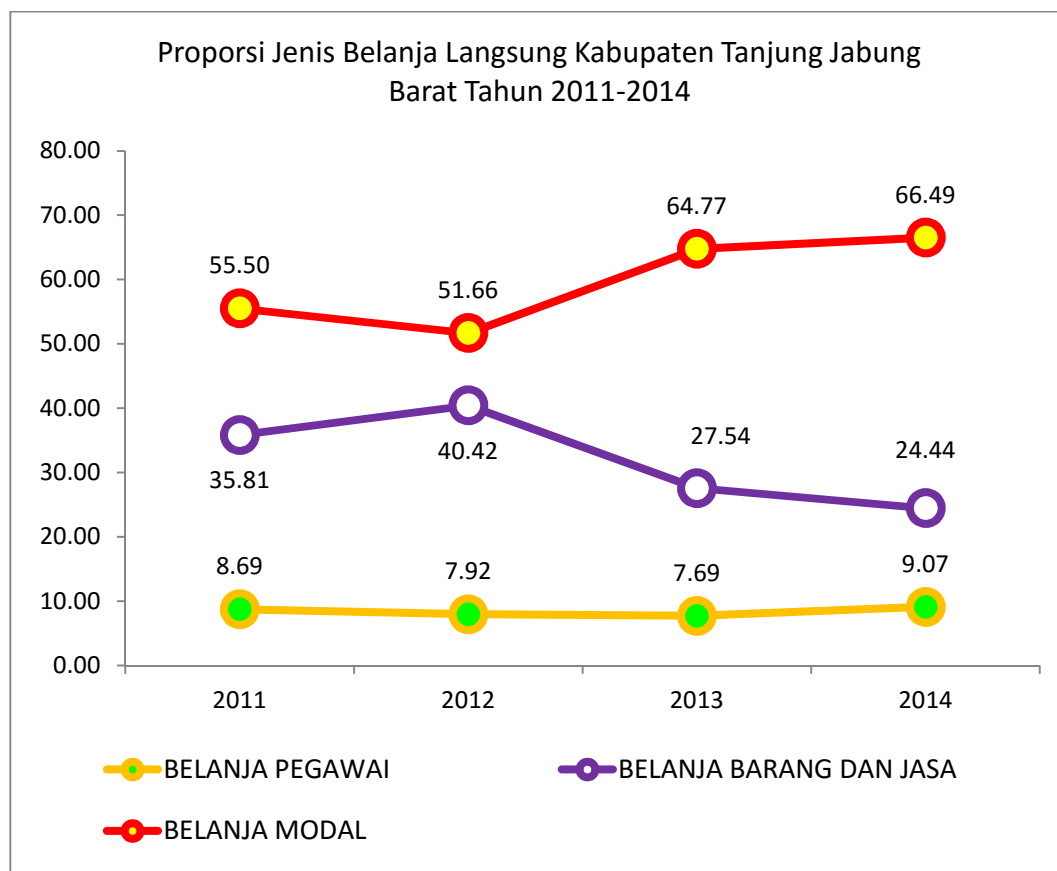




Selanjutnya, perkembangan realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 adalah Rp. 899.101.006.831,- lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yaitu Rp. 418.008.718.466,- atau secara rata-rata realisasi Belanja Langsung setiap tahunnya bertambah sebesar 31,24%.

Jika dibandingkan target dengan realisasi, maka terlihat bahwa realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2011-2014 selalu di bawah target. Berarti tingkat efektivitas Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode tersebut rata-rata adalah 89,13 % yaitu masuk kategori cukup efektif.

Grafik T.III.C.16. Proporsi Jenis Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014





Selama tahun 2011-2014, jenis Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbesar adalah Belanja Modal yaitu rata-rata sebesar 59,60% per tahun, sedangkan sisanya untuk Belanja Barang dan Jasa rata-rata sebesar 32,05% per tahun, dan Belanja Pegawai rata-rata 8,35 32,05% per tahun.

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Analisis Neraca

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.



Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.



TabelT.III.C.3. Neraca Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	A S E T				
2	ASET LANCAR				
3	Kas di Kas Daerah	359.810.294.042,74	481.788.969.896,97	453.669.196.816,39	113.838.423.227,73
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	705.909.949,00	608.584.288,00	1.323.959.605,00	461.141.809,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Keuangan	0,00	0,00	11.544.679,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	376.052.679,00	157.207.098,00	4.956.000,00
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak	54.484.094,00	4.757.134.510,00	3.654.802.034,00	12.520.157.910,00
9	Piutang Retribusi	1.495.184.940,00	843.924.194,00	1.785.841.314,00	1.408.698.671,00
10	Piutang Tranfer	7.940.088.597,00	8.972.238.498,00	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	62.649.750,00
11	Piutang Lainnya	120.502.800,00	74.509.750,00	5.486.934.986,00	11.261.200.976,00
12	Persediaan	2.655.948.569,00	6.748.965.944,60	11.525.417.359,50	9.794.009.986,60
13	Jumlah Aset Lancar	372.782.412.991,74	504.170.379.760,57	477.614.903.891,89	149.351.238.330,33
14	INVESTASI JANGKA PANJANG				
15	Investasi Non Permanen	2.819.786.100,00	2.819.786.100,00	3.233.480.000,00	3.660.780.000,00
16	Investasi Permanen	50.578.896.500,00	58.167.378.814,00	80.868.109.049,87	91.918.859.377,57
17	Jumlah Investasi Jangka Panjang	53.398.682.600,00	60.987.164.914,00	84.101.589.049,87	95.579.639.377,57
18	ASET TETAP				

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
19	Tanah	508.720.169.040,00	513.272.972.890,00	129.528.283.102,50	131.857.389.102,50
20	Peralatan dan Mesin	162.098.417.822,00	225.576.118.517,00	270.123.411.693,00	311.404.769.328,00
21	Gedung dan Bangunan	358.181.739.151,41	436.599.938.971,92	561.781.256.473,92	668.532.029.092,06
22	Jalan, Irigasi dan Jaringan	998.634.673.976,73	1.135.685.691.120,74	1.508.059.749.766,54	1.944.650.034.487,76
23	Aset Tetap Lainnya	62.251.115.946,00	64.496.279.246,00	65.620.504.046,00	55.700.068.824,00
24	Konstruksi dalam Pengerjaan	275.007.977.241,23	267.661.289.541,23	274.319.896.126,23	296.979.971.326,23
25	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Aset Tetap	2.364.894.093.177,37	2.643.292.290.286,89	2.809.433.101.208,19	3.409.124.262.160,55
27	DANA CADANGAN				
28	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ASET LAINNYA				
31	Aset Tidak Berwujud	49.874.000,00	49.874.000,00	913.374.000,00	913.374.000,00
32	Aset Lain-lain	105.681.750,00	0,00	74.509.750,00	0,00
33	Jumlah Aset Lainnya	155.555.750,00	49.874.000,00	987.883.750,00	913.374.000,00
34	JUMLAH ASET	2.791.230.744.519,11	3.208.499.708.961,46	3.372.137.477.899,95	3.654.968.513.868,45
35	K E W A J I B A N				
36	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
37	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	5.449.778.760,00	15.429.742.425,00	4.531.142.045,00
38	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	102.692.351.732,10	12.138.241.558,80
39	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
40	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	5.449.778.760,00	118.122.094.157,10	16.669.383.603,80
42	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
43	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
45	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	5.449.778.760,00	118.122.094.157,10	16.669.383.603,80
46	EKUITAS DANA				
47	EKUITAS DANA LANCAR				
48	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	360.516.203.991,74	476.947.775.424,97	439.574.958.675,39	109.768.422.991,73
49	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	376.052.679,00	157.207.098,00	4.956.000,00
50	Cadangan Piutang	9.610.260.431,00	14.647.806.952,00	10.927.578.334,00	25.252.707.307,00
51	Cadangan Persediaan	2.655.948.569,00	6.748.965.944,00	11.525.417.359,50	9.794.009.986,60
52	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	-102.692.351.732,10	-12.138.241.558,80
53	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	372.782.412.991,74	498.720.600.999,97	359.492.809.734,79	132.681.854.726,53
54	EKUITAS DANA INVESTASI				
55	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	53.398.682.600,00	60.987.164.914,00	84.101.589.049,87	95.579.639.377,57
56	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.364.894.093.177,37	2.643.292.290.286,89	2.809.433.101.208,19	3.409.124.262.160,55
57	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	155.555.750,00	49.874.000,00	987.883.750,00	913.374.000,00

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
58	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2.418.448.331.527,37	2.704.329.329.200,89	2.894.522.574.008,06	3.505.617.275.538,12
60	EKUITAS DANA CADANGAN				
61	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
66	JUMLAH EKUITAS DANA	2.791.230.744.519,11	3.203.049.930.200,86	3.254.015.383.742,85	3.638.299.130.264,65
67	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.791.230.744.519,11	3.208.499.708.960,86	3.372.137.477.899,95	3.654.968.513.868,45



3.1.2.2 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap neraca Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2014 dilakukan dengan menggunakan 4 rasio keuangan. Keempat rasio keuangan tersebut adalah.

- Rasio Lancar (*Current Ratio*) merupakan rasio asset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.
- Rasio Quick (*Quick Ratio*) merupakan rasio asset lancar dikurangi persediaan terhadap kewajiban jangka pendek.
- Rasio Hutang terhadap Asset merupakan rasio kewajiban terhadap asset.
- Rasio Hutang terhadap Modal merupakan rasio kewajiban terhadap ekuitas dana.

Berdasarkan hasil perhitungan, maka keempat rasio keuangan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel T-III.C.4. Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

No	Uraian	Rasio Keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat			
		2011	2012	2013	2014
1	Rasio Lancar	0,00	92,51	4,04	8,96
2	Rasio Quick	0,00	91,27	3,95	8,37
3	Rasio Hutang terhadap Asset	0,00	0,00	0,04	0,00
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,00	0,00	0,04	0,00



Paparan keempat rasio keuangan diatas dapat pula diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Rasio Lancar

Rasio lancar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun menunjukkan trend yang mengecil dimana tahun 2012 rasio lancar sebesar 92,51 kemudian menurun menjadi 4,04 untuk tahun 2013 dan 8,96 untuk tahun 2014. Akan tetapi rasio lancar tersebut masih diatas normal yaitu diatas 2,0. Artinya kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan asset lancar amat tinggi.

b. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun terakhir juga menunjukkan trend yang sama dengan rasio lancar yaitu cenderung mengecil tetapi masih rendah, yang aman dimana rasio *quick* masih diatas 2,5. Maksudnya adalah kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memenuhi kewajiban jangka pendek minus persediaan dengan jaminan asset lancar masih baik.

c. Rasio Hutang Terhadap Asset

Rasio hutang terhadap asset untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 4 tahun terakhir mendekati nol. Artinya hutang yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat relatif kecil dibandingkan jumlah asset yang dimilikinya.

d. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun sebelumnya juga mendekati nol. Maksudnya adalah jumlah hutang yang dimiliki dibanding jumlah



modal yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah amat kecil.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan instrumen untuk terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah dengan mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran yang digunakan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 tahun terakhir (2011-2014) menunjukkan trend yang meningkat secara signifikan. Jika tahun 2011 total belanja sebesar 734,44 milyar, meningkat menjadi 1.324,98 milyar pada tahun 2014.



Jika dilihat penggunaan anggaran diatas dari segi proporsi penggunaan maka terlihat proporsi belanja langsung cenderung meningkat. Pada tahun 2011, belanja langsung mendapat proporsi sebesar 56,92% kemudian naik menjadi 62,04% pada tahun 2012. Naik lagi di tahun 2013 menjadi 70,48% dan sedikit turun proporsinya sehingga menjadi 67,86% pada tahun 2014.

Proporsi penggunaan belanja langsung oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan dimana yang diinginkan adalah proporsi belanja langsung diatas 60%. Untuk belanja tidak langsung, proporsinya juga telah menunjukkan proporsi yang ideal terutama setelah tahun 2012 dimana belanja tidak langsung mendapat proporsi dibawah 40%. Kecuali tahun 2011 masih diatas 40% proporsi belanja tidak langsung. Kemudian tahun 2012 sebesar 38,96% dan lalu tahun 2013 sebesar 29,52% serta tahun 2014 telah menjadi 32,14%.

Deskripsi proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung atas penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 dimuat pada tabel dibawah ini.

**Tabel T-III.C.5. Proporsi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014**

Uraian		Tahun			
		2011	2012	2013	2014
A	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai	37,23%	35,12%	26,62%	26,90%
	- Belanja Subsidi	0,29%	0,26%	0,23%	0,21%
	- Belanja Hibah	2,22%	0,12%	0,73%	-
	- Belanja Bantuan Sosial	1,44%	1,23%	0,17%	0,26%
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,04%	0,07%	0,05%	0,04%
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	1,84%	2,05%	1,69%	4,68%



	- Belanja Tidak Terduga	0,03%	0,10%	0,03%	0,04%
	Total Belanja Tidak Langsung	43,08%	38,96%	29,52%	32,14%
B	Belanja Langsung				
	- Belanja Pegawai	4,95%	4,84%	5,42%	6,16%
	- Belanja Barang dan Jasa	20,38%	24,67%	19,41%	16,58%
	- Belanja Modal	31,59%	31,54%	45,65%	45,12%
	Total Belanja Langsung	56,92%	61,04%	70,48%	67,86%
C	Total Belanja (A+B)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan penyertaan modal/investasi dan pembayaran pokok utang.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Berdasarkan konsep pembiayaan tersebut maka analisis pembiayaan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun terakhir (2009-2013) dapat dilakukan. Hasil perhitungan komponen pembiayaan tersebut dimuat pada tabel berikut ini.



Tabel T-III.C.6. Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2013 (Dalam Jutaan)

No	Deskripsi Pembiayaan	2009	2010	2011	2012	2013
I	Penerimaan					
1.1	SILPA tahun lalu	169.921,53	101.350,06	203.620,67	360.516,20	476.931,22
1.2	Penerimaan Penyertaan Modal BUMD	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Penerimaan Pembiayaan	170.421,53	101.350,06	203.620,67	360.516,20	476.931,22
II	Pengeluaran					
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah	0,00	1.000,00	7.000,00	125.000,00	22.500,00
2.2	Pembayaran Utang Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000,00	7.000,00	125.000,00	22.500,00
	Pembiayaan Netto	170.421,53	100.350,06	196.620,67	235.516,20	454.431,22
	Sisa Lebih Pembiayaan	118.580,20	203.620,67	360.516,20	476.931,22	439.574,96

Tabel diatas memperlihatkan bahwa selama 5 tahun tersebut pembiayaan netto pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah positif atau surplus. Hal ini terjadi karena SILPA tahun lalu terus meningkat tiap tahun. peningkatan SILPA tahun lalu dapat dinilai pula tidak optimalnya penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Seperti yang tergambar pada SILPA tahun 2009 sebesar Rp 169.921,53 juta, kemudian meningkat menjadi Rp 476.931,22 juta pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan sebesar 180,68% selama 5 tahun.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan hanya peningkatan penyertaan modal pada BUMD oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selama tahun 2010 hingga 2013 terjadi peningkatan setiap tahunnya penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada BUMD. Dari Rp 1 Milyar pada tahun 2010 dan tahun 2013 ditingkatkan lagi setoran penyertaan modal sebesar Rp 22,5 milyar pada



tahun 2010. Akan tetapi peningkatan penyertaan modal pada BUMD tidak diikuti oleh pemerintah deviden dari BUMD. Penerimaan atas penyertaan modal selama 5 tahun tersebut hanya pada tahun 2009 saja yang menghasilkan deviden sebesar Rp 500 juta. Sedangkan pada tahun 2010-2013 tidak ada penerimaan deviden dari BUMD yang masuk kedalam penerimaan pembiayaan.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Belanja

Total belanja yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, total belanja yang dimilikinya senilai Rp 734,44 milyar dan tahun 2012 menjadi Rp 862,88 milyar serta tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1,22 triliun. Kemudian tahun 2014 telah mencapai Rp 1,32 triliun nilai total belanja pemerintah Tanjung Jabung Barat.

Deskripsi perkembangan total belanja beserta deskripsinya dimuat pada tabel berikut ini.



Tabel T-III.C.7. Realisasi Penggunaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014

Uraian		Tahun			
		2011	2012	2013	2014
A	Belanja Tidak Langsung				
	- Belanja Pegawai	273.417.638.557	303.003.112.663	324.203.857.438	356.475.009.247
	- Belanja Subsidi	2.124.240.000	2.253.000.000	2.802.233.700	2.803.000.000
	- Belanja Hibah	16.303.369.500	1.060.000.000	8.923.500.000	-
	- Belanja Bantuan Sosial	10.605.428.100	10.615.340.000	2.128.750.000	3.464.750.000
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	270.750.600	571.584.600	571.584.600	571.584.600
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	13.499.998.800	17.727.389.375	20.543.776.100	62.032.908.093
	- Belanja Tidak Terduga	205.120.400	905.221.000	340.500.000	536.000.000
	Total Belanja Tidak Langsung	316.426.545.957	336.135.647.638	359.514.201.838	425.883.251.940
B	Belanja Langsung				
	- Belanja Pegawai	36.345.371.641	41.728.237.650	66.048.365.000	81.588.937.498
	- Belanja Barang dan Jasa	149.688.993.894	212.884.239.061	236.391.227.654	219.708.693.594
	- Belanja Modal	231.974.352.931	272.130.430.518	555.954.513.196	597.803.375.739
	Total Belanja Langsung	418.008.718.466	526.742.907.229	858.394.105.850	899.101.006.831
C	Total Belanja (A+B)	734.435.264.423	862.878.554.867	1.217.908.307.688	1.324.984.258.771



Dari paparan tabel diatas terlihat bahwa pada belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2011 mencapai 37,23% dari total belanja. Kemudian setiap tahunnya mengalami penurunan hingga mencapai 26,90% dari total belanja pada tahun 2014. Akan tetapi belanja pegawai pada belanja langsung mengalami peningkatan atau berlawanan arah dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang mengalami penurunan. Hal ini terlihat dimana belanja pegawai pada belanja langsung mencapai 4,95% dari total belanja pada tahun 2011. Lalu terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 6,16% dari total belanja pada tahun 2014.

Kondisi yang berbeda terjadi pada belanja barang dan jasa selama tahun 2011-2014 persentasenya terhadap total belanja mengalami penurunan. Padahal seharusnya mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dimana belanja barang dan jasa mendapat bagian sebesar 20,38% dari total belanja pada tahun 2011 dan menurun menjadi 16,58% pada tahun 2014. Namun, belanja modal nilai baik perkembangannya karena alokasi belanja modal mencapai 31,59% dari total belanja tahun 2011. Kemudian tahun 2014 meningkat drastis menjadi 45,12% dari total belanja pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Mengacu kepada data perkembangan pembiayaan khususnya penerimaan maka dilakukan perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah. Dalam melakukan perhitungan proyeksi digunakan asumsi bahwa kenaikan pendapatan daerah turut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Oleh karena itu, proyeksi pendapatan daerah setiap tahun kedepan akan tergantung pula oleh faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Khusus untuk dana cadangan diasumsi tidak ada pencairan dana cadangan karena tidak ada pula pembentukan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan SILPA di proyeksikan meningkat pula karena diperkirakan belum optimalnya penggunaan anggaran oleh SKPD dan meningkatnya unsur kehati-hatian dalam penggunaan anggaran oleh SKPD sehingga dan SILPA cenderung meningkat pula.

Belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama lebih dominan ditentukan oleh belanja pegawai. Belanja pegawai pada belanja tidak langsung yang membiayai gaji pegawai negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi prioritas utama untuk menentukan besaran proyeksi kedepan.

Deskripsi hasil perhitungan proyeksi kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2017-2021 dimuat pada tabel dibawah ini.



Tabel T-III.C.8. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.371.112,83	1.534.275,26	1.721.456,84	1.949.917,49	2.188.782,38
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	31.786,80	33.980,09	36.392,68	39.085,74	42.017,17
	Total Penerimaan	1.402.899,63	1.568.255,35	1.757.849,52	1.989.003,23	2.230.799,55
	Dikurangi :					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	524.186,02	560.354,86	600.140,06	644.550,42	692.891,70
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	878.713,61	1.007.900,49	1.157.709,46	1.344.452,81	1.537.907,85



Dari sajian pada tabel diatas dapat dilihat pula bahwa total kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus meningkat. Diproyeksikan pada tahun 2017, kapasitas riil kemampuan keuangan sebesar Rp 0,878 trilyum dan tahun 2021 diproyeksikan telah menjadi Rp 1,537 trilyun atau meningkat sebesar 75,06% atau juga peningkatannya setara dengan 18,76% pertahun, damn apabila dikomposisikan ke dalam proyeksi pendapatan dengan asumsi proporsi linear sebagaimana periode sebelumnya, maka proyeksi proporsi pendapatan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel III. C.9. Proyeksi Komposisi Linear Pendapatan Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 – 2021**

No	Uraian	Proyeksi (Rp. Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
	PENDAPATAN	1.371.112,83	1.534.275,26	1.721.456,84	1.949.917,49	2.188.782,38
A.	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</i>	86.078,79	92.227,28	98.375,76	98.375,76	98.375,76
1.	Pajak Daerah	22.263,36	23.853,60	25.443,84	25.443,84	25.443,84
2.	Retribusi Daerah	21.666,33	23.213,92	24.761,51	24.761,51	24.761,51
3.	Hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan	9.747,35	10.443,59	11.139,83	11.139,83	11.139,83
4.	Lain-lain pendapatan asli daerah	32.401,80	34.716,21	37.030,62	37.030,62	37.030,62
B.	<i>DANA PERIMBANGAN</i>	1.162.349,01	1.304.763,44	1.469.047,82	1.677.066,17	1.894.557,80
C.	<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</i>	122.685,03	137.284,55	154.033,26	174.475,56	195.848,82

KETERANGAN :

- J Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Dihitung Statis Berdasar Target PAD Tahun 2016 Sebesar Rp. 83.011.347.972,00 Dengan Total Pendapatan Rp.1.229.697.609.026,00
- J Proyeksi Pendapatan Bersumber Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Syah Dihitung Secara Linear dengan Mengabaikan Variable Perubahan Ekonomi Global.



BAB IV

Analisis Isu-Isu Strategis

4.1 Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan masih dihadapkan pada permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah :

A. Pendidikan

1. Masih didapati kondisi fisik sekolah yang tidak layak digunakan.
2. Proses belajar mengajar kualitasnya masih rendah karena mutu sumber daya manusia juga rendah.
3. Kualitas dan Kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan belum merata khususnya di pedesaan.
4. Wajib belajar 12 tahun belum terlaksana dengan berkualitas.

B. Kesehatan

1. Kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah masih rendah.
2. Kualitas layanan kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu masih rendah.



3. Kualitas tenaga para bidan desa dan perawat puskesmas masih rendah.
4. Ketersediaan obat dan peralatan medis yang berkualitas di puskesmas dan bidan desa masih rendah.

4.1.2 Permasalahan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dalam membangun kebudayaan dan pemuda dihadapkan pada permasalahan berikut ini :

A. Kebudayaan

1. Pengembangan nilai-nilai lokal yang menunjang pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih terbatas.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana budaya untuk pelestarian dan pengembangan budaya masih minimal.
3. Pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang terpadu dengan dunia bisnis masih terbatas.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi wira usaha muda dan mandiri.
2. Pengembangan olah raga berprestasi dan bisnis pada masyarakat masih terbatas.
3. Masih kecilnya peran swasta dalam mendukung prestasi olah raga daerah.
4. Pemuda yang terlibat dalam kasus Narkoba makin meningkat jumlahnya.



4.1.3 Permasalahan Infrastruktur Daerah

Dalam membangun infrastruktur daerah dihadapkan pada permasalahan seperti berikut :

1. Jalan tanah gambut dalam keadaan rusak masih didapati.
2. Kondisi fisik dermaga untuk transportasi sungai belum semuanya permanen dan baik.
3. Jalan aspal dan jembatan yang berkualitas belum merata untuk setiap daerah.
4. Rasio kelistrikan dan ketersediaan air bersih masih rendah.

4.1.4 Permasalahan Pertanian, Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Dalam membangun pertanian, pertambangan dan lingkungan hidup didapati permasalahan seperti berikut ini:

A. Pertanian

1. Infrastruktur pertanian berupa jalan usaha tani, bibit unggul, irigasi dan mesin pertanian masih belum berkualitas.
2. Produktivitas hasil pertanian masih rendah karena mutu input yang digunakan petani juga rendah.
3. Masih didapati semakin berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan karena tingginya intensitas alih fungsi lahan khususnya lahan perkebunan sawit.
4. Permodalan petani sangat tergantung pada bantuan modal dari pemerintah.

B. Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Mutu sumber daya dukung lingkungan menurun akibatnya ketersediaan sumberdaya alam juga menurun.



2. Pertambangan batubara masih mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
3. Kebakaran hutan dan lahan gambut meningkat akibatnya kabut asap juga meningkat.

4.1.5 Permasalahan Perekonomian Daerah

Pengembangan ekonomi daerah masih dihadapkan pada permasalahan seperti berikut ini:

A. Makro Ekonomi Daerah

1. Pengangguran terdidik meningkat akibat daya serap tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja juga rendah.
2. Kesejahteraan petani tanaman pangan masih rendah akibatnya kemiskinan petani tanaman pangan meningkat.
3. Investasi daerah belum optimal pengembangannya karena ketersediaan infrastruktur terbatas.
4. Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat akibat inflasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi menurun.
5. Kontribusi Koperasi dalam ekonomi daerah masih rendah karena kemampuan sumber daya manusia juga rendah.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) populasinya banyak tetapi kemampuannya rendah.
7. Semakin menjamurnya pasar modern (swalayan) yang berpotensi menekan pertumbuhan usaha kecil/mikro dan pedagang asongan.



B. Keuangan Daerah

1. Besaran kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih belum optimal digunakan.
2. Kemandirian keuangan daerah masih rendah akibatnya ketergantungan pada APBN jadi tinggi.
3. Pendayagunaan asset daerah untuk peningkatan PAD belum optimal dilakukan.

4.1.6 Permasalahan Pemerintah dan Politik

Dalam membangun politik dan pemerintahan, didapati pointer permasalahan seperti berikut ini:

A. Pemerintahan Umum

1. Pengawasan internal oleh inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih belum maksimal.
2. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah pada SKPD masih rendah.
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terutama dalam mentaati peraturan daerah.
4. Peran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sistem pelayanan perizinan dan meningkatkan daya tarik investor masih rendah.

B. Politik

1. Partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah.
2. Pengetahuan politik dan kemampuan berpolitik masyarakat masih rendah.



4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Kebutuhan Dasar

Isu strategis untuk kebutuhan dasar adalah:

A. Pendidikan

1. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas masih terbatas.
2. Mutu pendidikan masih rendah karena masih rendahnya kompetensi guru, dan kualitas infrastruktur pendidikan.
3. Minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi masih rendah karena terbatasnya pendapatan dan aksesibilitas.
4. Infrastruktur pendidikan yang berkualitas masih terbatas jumlahnya.

B. Kesehatan

1. Mutu tenaga kesehatan dan infrastruktur kesehatan masih rendah.
2. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat meningkat tetapi belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah akibatnya Indeks pembangunan Manusia (IPM) juga masih rendah.

4.2.2 Isu Strategis Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dalam mengembangkan kebudayaan, pemuda dan olahraga didapati isu strategis sebagai berikut:

A. Kebudayaan

1. Kearifan lokal masih terbatas digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



2. Pengembangan budaya daerah belum optimal dilakukan sehingga belum dapat dijadikan objek dunia usaha.
3. Pemanfaatan nilai-nilai budaya tradisional untuk membangun daerah masih terbatas dilakukan.

B. Pemuda dan Olahraga

1. Pemuda kurang tertarik pada usaha mandiri tetapi lebih tertarik pada pekerjaan sektor formal.
2. Dukungan dunia usaha terhadap kegiatan olahraga masih rendah.
3. Budaya berolahraga pada masyarakat masih minimal.
4. Pemuda yang terlibat narkoba dan kriminal cenderung meningkat karena menganggur.

4.2.3 Isu Strategis Infrastruktur Daerah

Untuk membangun infrastruktur daerah perlu diperhatikan isu strategis berikut ini:

1. Jalan aspal yang berkualitas masih terbatas dan belum merata di setiap daerah.
2. Jalan dan jembatan yang rusak masih didapati khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal.
3. Kanal dan pintu air pada daerah tanah gambut didapati banyak yang rusak.
4. Kebutuhan listrik dan air yang berkualitas untuk masyarakat belum terpenuhi.
5. Kota Kuala Tungkal terkesan kumuh dengan adanya pelanggaran sempadan sungai/parit sehingga mengurangi daya tampung dan fungsi sungai/parit sebagai saluran drainase primer maupun sekunder.



4.2.4 Isu Strategis Pertanian, Pertambangan Dan Lingkungan Hidup

Yang menjadi isu strategis pertanian, pertambangan dan lingkungan hidup adalah:

A. Pertanian

1. Pengembangan perkebunan kelapa sawit berlebihan akibatnya terjadi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan.
2. Pengembangan potensi daerah untuk perikanan sangat besar tetapi belum optimal dilakukan.
3. Nilai tukar petani (NTP) masih rendah disebabkan kualitas produk rendah dan biaya produksi tinggi.
4. Lemahnya jaminan hukum untuk status kepemilikan lahan sehingga masih banyak didapati sengketa lahan pertanian/perkebunan.

B. Pertambangan dan Lingkungan Hidup

1. Kegiatan pertambangan belum optimal mensejahterakan masyarakat sekitarnya.
2. Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan masih terabaikan akibatnya kerusakan lingkungan hidup meningkat.

4.2.5 Isu Strategis Perekonomian Daerah

Dalam menumbuh kembangkan perekonomian daerah didapati isu strategis berikut ini:

1. Ketersediaan infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan investor masih terbatas.
2. Kompetensi tenaga kerja daerah yang sesuai dengan kebutuhan pasar masih rendah.



3. Peningkatan investasi daerah masih didominasi oleh belanja pemerintah daerah.
4. Alih fungsi lahan tanaman pangan ke perkebunan sawit telah mengurangi produksi tanaman pangan.
5. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi daerah masih belum optimal dilakukan.
6. Kesejahteraan petani rendah akibatnya kemiskinan petani meningkat.
7. Usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang maksimal karena daya saing sumber daya manusia masih rendah.
8. Kualitas lembaga koperasi masih sangat rendah karena sumberdaya manusia kualitasnya juga rendah.

4.2.6 Isu Strategis Pemerintahan dan Politik

Membangun politik dan pemerintahan dihadapkan kepada isu strategis berikut ini:

A. Pemerintahan Umum

1. Mutu pelayanan perizinan yang cepat dan murah belum didapati untuk mendukung peningkatan investasi.
2. Mutu pelayanan publik masih rendah dan belum sesuai dengan permintaan masyarakat dan dunia usaha.
3. Kesadaran hukum masyarakat dan aparat pemerintah masih rendah sehingga masih didapati pelanggaran hukum.
4. Pengelolaan keuangan daerah dan pengawasannya masih belum baik sehingga masih didapati penyalahgunaan dan penyelewengan.
5. Kinerja SKPD belum optimal akibatnya kinerja pemerintah daerah juga masih rendah.



B. Politik

1. Partisipasi wanita dalam partai politik dan pemerintah daerah masih minimal padahal peluangnya masih besar.
2. Kontribusi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat masih rendah karena kemampuan manajerial partai politik juga rendah.

4.2.7 Isu Strategis Regional, Nasional dan Global

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terletak pada segitiga emas (*Gold Three Angel*) pada Kawasan Sijori (Singapura ; Johor Riau) secara ekonomi makro maupun budaya serta sejarah belum digali secara maksimal khususnya dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi sektor sekunder dan tersier.
2. Potensi kemaritiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum ditangani secara maksimal, hal ini perlu dipertimbangkan karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpotensi menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang, jasa dan orang serta industri hulu – hilir dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain sebagai bagian dari poros maritim regional, nasional maupun global seiring dengan pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Antisipasi Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif belum dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan karena akan berdampak terhadap komoditi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan Kelapa maupun komoditi lainnya.



4. Gejala Politik dan Kebijakan Keuangan Pemerintah Pusat yang relatif sulit untuk diprediksikan dan bersifat dinamis dapat mempengaruhi rencana penggunaan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah.



BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas’**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.



BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

5.2 Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :



1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

5.3.2 Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni :

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.



3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan perpustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.



18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.



34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.



Tabel T.V C-1

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas						
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah	Membuka akses Daerah terisolir dan Tertinggal	65%	85%
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik			Rumah Tangga Dialiri Listrik	50,96%	80%	
3. Pembangunan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh Kecamatan dalam Kab.Tanjab Barat			Kecamatan dengan pusat pengolahan air bersih	9 Kec	13 Kec	
4. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis TIK di Semua Kecamatan			Interkoneksi Pelayanan Publik Kecamatan	0	13 Kec	
5. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan			SKPD dengan Kewenangan Pengolahan	4%	80%	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			layanan informasi daerah	Web Site Mandiri Terintegrasi Pem Kab		
			6. Peningkatan Kepustakaan Daerah	Layanan Perpustakaan ke Kelurahan/ Desa	12 Ds/Kel	70 Ds/Kel
	2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi	1. Pembangunan kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri	Pembangunan Zona Industri	0	1 Lokasi	
		2. Pembangunan kawasan produksi sentra tanaman pangan dan perikanan	Pembentukan Sentra Produk Unggulan Holtikultura	2	13 Sentra	
		3. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.	Peningkatan Kewenangan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	
		4. Pembangunan/ Pengembangan sentra ekonomi pada Kecamatan	Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Industri & Wisata	0	5 Kawasan	



Tabel T.V C-2

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas						
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Akreditasi "B" Pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP	SD 11% SMP 15%	SD 60% SMP 70%
			2. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas	Pembangunan BLK Terakreditasi	0	1 BLK
			3. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan	Lulusan SMK sederajat yang bekerja di DU/DI	25%	58%

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			berkualitas			
	2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas	SPM Fasilitas Kesehatan Pemerintah	75%	90%	
		2. Peningkatan Jangkauan Pelayanan Rumah Sakit	Layanan Rumah Sakit Daerah	1 RSD	2 RSD	
		3. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular	Desa Siaga Aktif	10 Ds	114 ds	
	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Penanganan terhadap Pelanggaran Kawasan dan Sarana SDA	5%	85%	
		2. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan	Penerapan Sumber Energi Ramah Lingkungan	15%	70%	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			masyarakat			
			3. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem	Kawasan Perlindungan Ekosistem dan Habitat Endemik	0	13 Kec



Tabel T.V C-3

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas						
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
3	MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN.	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	1. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	33	37
			2. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,34%	1,32%
		2. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan	Nilai Tukar Petani	96,6	104
			2. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan	Persentase Koperasi agroindustri dan perikanan	18,08%	35,2%

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			perikanan			
			3. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan	Angka Kemiskinan	11.6%	7%
				Indeks Gini Rasio	0,332	0,30
			4. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa	Jaminan hak konsumen terhadap mutu barang dan jasa pelayanan	40%	80%
			5. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan	1 Komodit	5 Komoditi
			6. Peningkatan PDRB Perkapita ADHK	Rp.Juta	100,20	151,64



Tabel T.V C-4

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas						
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR
4	MISI IV: MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya	1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB Kemenag)	85%	85%
			2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Partisipasi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat dalam pengelolaan pembangunan	12%	85%
			3. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang	Pembinaan Kelompok Agama, Budaya dan Kepemudaan serta Olah Raga	30%	85%

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			berkualitas			
	2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan	Ketaatan Pelayanan Publik Terhadap SOP	40%	80%	
		2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	Kompetensi Penanggung Jawab Layanan Publik	15%	85%	
		3. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada <i>e-Government</i> dan <i>e-Budgeting</i>	Akreditasi Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Disclaimer		WTP
		4. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,5%	85%	
	3. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	1. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha	Pelayanan Perijinan sesuai Standard	75%	90%	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



			2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	Partisipasi Masyarakat dalam setiap Tahapan Pemilu	45%	85%
			3. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat dalam tahapan Pengelolaan Pembangunan Daerah	30%	70%



BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi tersebut diperlukan guna memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi tersebut adalah:

1. Melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang diarahkan untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis pada agroindustri dan perikanan.
2. Melaksanakan pembangunan daerah yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan dan



terjaminnya kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didasarkan prinsip *good government* dan *clean government* serta memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tumbuh kembangnya daerah.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah jabaran dari kebijakan pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas yang tergambar dari pengurangan penduduk miskin dan pengurangan



jumlah pengangguran melalui program yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik mempunyai peranan penting untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan pembangunan antar daerah, dan peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan daerah.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jambi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 juga menjadi acuan guna mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang. Adapun arah dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :



1. Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan pada usaha mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus cepat tumbuh dan meningkatkan aksesibilitas antar daerah serta meminimalisir keterisoliran daerah tertinggal.
2. Pembangunan ekonomi daerah diarahkan kepada pengembangan sektor ekonomi unggulan yang ditumbuh kembangkan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
3. Pemanfaatan tata ruang diarahkan untuk keseimbangan pengelolaan antara kebutuhan ruang dengan potensi sumberdaya alam guna menjamin pelestarian lingkungan hidup.
4. Pembangunan kawasan strategis yang cepat tumbuh diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah dan penataan tata ruang yang dinamis.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 berdasarkan Misi pembangunan daerah dimuat pada tabel berikut :



Tabel T.VI C-1

Misi Pertama: Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas.

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	2. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah	a. Membangun jalan dan jembatan yang berkualitas untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis	- Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pada kawasan ekonomi strategis
		b. Membangun jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pengembangan daerah	- Membangun jalan dan jembatan pada daerah tertinggal
		c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Fisik Bangunan Pemerintahan	- Membangun jalan dan jembatan lintas antar daerah yang cepat berkembang
		d. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Fisik Bangunan Pemerintahan
		e. Membangun Sarana Penyeberangan Orang dan Barang	- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
	3. Pembangunan pusat	a. Membangun pembangkit listrik baru	- Pembangunan dan Normalisasi Saluran Drainase
			- Membangun Dermaga apung pada kawasan strategis dan cepat tumbuh
			- Membangun jaringan listrik untuk daerah tertinggal



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.	dan perluasan jaringan listrik	- Mendorong Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan matahari berkapasitas besar - Mendorong Pembangunan Gardu Induk Kapasitas 30 MW atau Lebih
		b. Menjalin Kemitraan Ketenaga Listrik	- Mengupayakan Pemanfaatan Kelebihan Daya Listrik dari Swasta
		c. Membangun instalasi pengolahan air baru dan perluasan jaringan pipa air bersih	- Membangun instalasi pengolahan air untuk seluruh kecamatan - Membangun jaringan pipa air minum untuk seluruh kecamatan
	4. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil	a. Membangun jaringan telekomunikasi Nirkabel yang handal	- Mengupayakan Pembangunan Base Telecommunication Cellular setiap kecamatan dan daerah potensi
		b. Mengembangkan jaringan internet seluruh daerah	- Mengupayakan Pembangunan jaringan internet prabayar ke seluruh daerah
	5. Peningkatan Sistem Administrasi Kearsipan dan Layanan Informasi Daerah	Mengembangkan Sistem Kearsipan dan Layanan Informasi Berbasis TIK	- Membangun Jejaring Sistem Kearsipan dan Layanan Informasi Lintas SKPD Terkoneksi Berbasis TIK
	6. Peningkatan Kepustakaan Daerah	Meningkatkan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan Daerah	- Meningkatkan Partisipasi dan Minat serta Budaya Baca Masyarakat
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi	1. Pembangunan kawasan ekonomi untuk agroindustri	a. Membangun kawasan khusus untuk komoditas unggulan perkebunan	- Membangun kawasan agroindustri untuk komoditas unggulan perkebunan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		b. Menyiapkan sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk kawasan agroindustri	- Mendorong Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pembangunan SMK agroindustri
	2. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan.	a. Membangun kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan	- Membangun sentra produksi dan pemasaran tanaman pangan - Membangun sentra pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan
		b. Membangun kawasan sentra produksi produk perikanan	- Membangun sentra produksi dan pemasaran produk perikanan - Membangun sentra produksi produk perikanan sehat
	3. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.	Memfasilitasi Pembangunan Kawasan administrasi dan tata kelola pemerintahan	Membangun Sentra Wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan
	4. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada tingkat kecamatan	a. Memfasilitasi pembentukan pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial	- Menyiapkan kemudahan dalam perizinan dan insentif untuk daya tarik investor pariwisata dan kemaritimanserta wilayah tertinggal - Mempromosikan potensi ekonomi untuk pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial
		b. Menyiapkan infrastruktur untuk pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial	- Membangun infrastruktur untuk pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial - Mengembangkan komoditas unggulan untuk pusat pengembangan ekonomi pada kecamatan potensial



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	5. Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Penunjang Pembangunan Berbasis Assesment	- Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Penunjang Pembangunan Berbasis Assesment

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	1.Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	- Membangun dan merehabilitasi infrastruktur pendidikan agar bermutu
		b. Meningkatkan mutu pendidik	- Meningkatkan mutu proses belajar mengajar
		c. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan	- Meningkatkan mutu pendidik melalui pendidikan terstruktur dan bermutu
	2.Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki	a. Meningkatkan mutu tenaga kerja melalui sertifikasi profesi	- Meningkatkan mutu tenaga kependidikan melalui diklat teknis bermutu
			- Melaksanakan pendidikan dan pengujian sertifikasi profesi



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	keampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas	b. Mengembangkan pendidikan teknik pariwisata dan kemaritiman bersertifikasi	- Menumbuhkembangkan pendidikan kejuruan kepariwisataan dan kemaritiman yang menghasilkan tenaga bersertifikasi
	3.Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas	Menumbuhkembangkan pendidikan SMK berkualitas	- Mendorong Pembangunan SMK Negeri prodi kepariwisataan dan kemaritiman - Mengembangkan SMK Teknologi yang berorientasi pada agribisnis
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1.Peningkatan mutu infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu infrastruktur kesehatan sampai tingkat pedesaan	- Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan sampai tingkat kesehatan pedesaan
		b. Meningkatkan mutu paramedis dan dokter puskesmas	- Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan serta rujukan kesehatan
		c. Meningkatkan mutu obat-obatan	- Meningkatkan pendidikan profesi paramedis dan dokter puskesmas - Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu
	2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	- Mengembangkan layanan kesehatan bermutu - Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)
		b. Meningkatkan mutu jaminan kesehatan masyarakat	- Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas
		c. Meningkatkan Derajat Kesehatan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan	- Meningkatkan Derajat Kesehatan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		d. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	- Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan
		e. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	- Mengembangkan Jangkauan Pelayanan Dokter Spesialis - Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit - Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik
	3. Peningkatan mutu gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular.	a. Meningkatkan mutu gizi keluarga	- Menumbuhkembangkan kader gizi keluarga dan masyarakat - Membangun pusat gizi keluarga di kecamatan
		b. Meningkatkan mutu pemberantasan penyakit menular	- Meningkatkan mutu kader pemberantasan penyakit menular - Membangun dan Mengembangkan pusat pemberantasan penyakit menular tidak menular di pedesaan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga SDA dan kelestarian lingkungan hidup	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan SDA	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan
		b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup
	2.Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk	a. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	kesejahteraan masyarakat	b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hiidup untuk kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup kedalam kepariwisataan untuk kesjahteraan masyarakat
	3.Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem	a. Meningkatkan pemanfaatan norma sosial lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem	- Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem
		b. Meningkatkan pemanfaatan kearifan lokal dalam menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup	- Meningkatkan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup
		c. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan	- Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan - Meningkatkan Komitment Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	1. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	a. Menyiapkan kawasan khusus untuk investasi agroindustri dan perikanan	- Mendorong Pengembangan Daerah Potensial kawasan khusus investasi agroindustri dan perikanan
		b. Membangun infrastruktur yang berkualitas untuk kawasan investasi agroindustri dan perikanan	- Membangun dan mengembangkan infrastruktur dasar dan penunjang pada kawasan industri investasi agroindustri dan perikanan
	2. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	a. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan	- Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya - Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan
		b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar siap kerja	- Menumbuhkembangkan SMK Teknologi agroindustri - Mengembangkan BLK Perikanan
2. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan	a. Mengembangkan komoditas unggulan agroindustri dan perikanan	- Menumbuhkembangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan - Menumbuhkembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan
		b. Mengembangkan komoditas unggulan agroindustri berbasis nilai tambah produk tinggi dan ekonomi kerakyatan	- Mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan
	2. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	a. Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan	- Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan
			- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri dan perikanan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	perikanan	b. Meningkatkan kerjasama usaha koperasi dengan perusahaan besar untuk membangun pariwisata dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman - Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam keintegrasian pariwisata dan kemaritiman
	3. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan	<p>a. Meningkatkan produksi dan efisiensi usaha petani dalam agribisnis dan kemaritiman</p> <p>b. Meningkatkan kemitraan usaha antara pekerja dengan perusahaan dalam pengembangan agroindustri dan perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penggunaan teknologi dalam agroindustri dan perikanan - Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan - Meningkatkan produksi hasil peternakan - Menekan angka kematian dan kesakitan hewan - Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan - Meningkatkan kapasitas pekerja dalam bernegosiasi dengan pengusaha agroindustri dan perikanan - Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal
	4. Peningkatan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	Meningkatkan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerjasama dan investasi antara pelaku usaha serta memfasilitasi pengembangan usaha masyarakat
	5. Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan upaya dan kualitas promosi produk unggulan daerah



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Makro Dari Sektor Unggulan	a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Makro Sektor Unggulan	- Meningkatkan Produksi dan penanganan pasca produksi Sektor Unggulan
		b. Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah	- Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Misi Keempat: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya lokal asli	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional
	2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan	a. Meningkatkan mutu pengelola organisasi kemasyarakatan	- Meningkatkan kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	berbasis agama dan budaya lokal	budaya lokal
		b. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan	- Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan - Meningkatkan peran organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam pengelolaan pembangunan daerah
	3.Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan	- Meningkatkan mutu manajerial organisasi agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	1.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan	a. Mengembangkan sistem pelayanan publik online dan transparan	- Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan - Membangun sistem perencanaan dan pelaporan publik online dan transparan
		b. Meningkatkan kapasitas jangkauan layanan publik berbasis online	- Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas - Meningkatkan kapasitas layanan publik online yang berkualitas
	2.Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	a. Meningkatkan mutu aparatur pelayanan publik	- Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur layanan publik bersertifikas secara profesional - Mengembangkan sistem promosi dan karir aparatur layanan publik yang baik dan transparan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		b. Menata sistem remunerasi aparatur pelayanann publik yang bersertifikasi	- Menyiapkan dan mengembangkan sistem insentif bagi aparatur layanan publik bersertifikasi
	3.Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada <i>e-Government dan e-Budgetting</i>	a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (<i>e-budgetting</i>)	- Menyiapkan dan mengembangkan perencanaan dan pelaporan keuangan secara online dan transparan
		b. Meningkatkan mutu pengelola keuangan publik yang miliki sertifikasi	- Meningkatkan pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi
3.Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	1.Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha	a. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi seluruh masyarakat	- Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat
		b. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi pelaku dunia usaha	- Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh pelaku dunia usaha
	2.Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	a. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik	- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik
		b. Meningkatkan mutu partai politik daerah yan g akuntabel dan transparan	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
	3.Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	- Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel
		b. Meningkatkan partisipasi	- Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang transparan
			- Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan



VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah	masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	dan pengawasan pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan - Meningkatkan Informasi Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan - Meningkatkan Kapasitas Lemabaga Ketenaga Kerjaan Dalam Jaminan Ketenaga Kerjaan.



BAB VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.1 Program Prioritas Pembangunan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016-2021 tetap memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Guna meningkatkan capaian keberhasilan pembangunan daerah maka perlu diarahkan pula pelaksanaan pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Adapun yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2016-2021 adalah:

- 1. Meningkatkan pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan khusus yang berkualitas, dengan fokus:**
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
 - b. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



- c. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
- d. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
- e. Peningkatan perpustakaan daerah.
- f. Pembangunan kawasan untuk agroindustri.
- g. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan dan perikanan.
- h. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
- i. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
- j. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
- c. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
- d. Pembangunan pendidikan tinggi dan riset kemaritiman berbasis potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.



- g. Peningkatan kualitas gizi keluarga serta pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- i. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
- j. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan, dengan fokus:

- a. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- b. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
- c. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
- d. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
- f. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
- g. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
- h. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus:

- a. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.



- b. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- c. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi serta transparansi.
- e. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- f. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
- g. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- h. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
- i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- j. Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan program penataan daerah otonomi baru.

7.2 Program Berdasarkan Urusan Wajib dan Pilihan

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2016 – 2021 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini.

- I. Untuk mewujudkan Misi Pertama yaitu **Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

A. Urusan Wajib

- a) Urusan Wajib Pekerjaan Umum melalui program antara lain:



- (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
 - (4) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
 - (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum.
 - (6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - (7) Program Pengembangan Perumahan.
 - (8) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
 - (9) Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- b) Urusan Wajib Perhubungan dan Komunikasi, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
 - (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
 - (3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.
 - (4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
 - (5) Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
- c) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, melalui program antara lain :
- (1) Program Perencanaan Tata Ruang.
 - (2) Program Pemanfaatan Ruang.
 - (3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
 - (4) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



B. Urusan Pilihan

- a) Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya, melalui program:
 - (1) Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenaga listrikian.

- b) Urusan Pilihan Pertanian, melalui program:
 - (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

- c) Urusan Pilihan Perhubungan dan Telekomunikasi, melalui program:
 - (1) Program Pembangunan Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi

- II. Untuk mewujudkan Misi Kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:**

A. Urusan Wajib

- a) Urusan Wajib Pendidikan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
 - (2) Program Pendidikan Menengah.
 - (3) Program Wajib Belajar 9 Tahun.
 - (4) Program Pendidikan Non-Formal.
 - (5) Program Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik.
 - (6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

- b) Urusan Wajib Kesehatan, melalui program antara lain :
 - (1) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
 - (2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.



- (3) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana-Prasarana Rumah Sakit.
 - (4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - (5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - (6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - (7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - (8) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
 - (9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- c) Urusan Wajib Perempuan dan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
- (1) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - (2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- d) Urusan Wajib Lingkungan Hidup, melalui program antara lain:
- (1) Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup.
 - (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - (4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- e) Urusan Wajib Penanggulangan Bencana, melalui program antara lain:
- (1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.



- (2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

B. Urusan Pilihan

- a) Urusan Pilihan Sumberdaya Mineral dan Pertambangan, melalui program antara lain:

- (1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- b) Urusan Pilihan Kehutanan, melalui program antara lain:

- (1) Program Perencanaan dan Pengembangan hutan.
- (2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- (4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan.

- c) Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- III. Dalam mewujudkan Misi ke tiga yaitu **Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

A. Urusan Wajib

- a) Urusan Wajib Penanaman Modal dan Perizinan, melalui program antara lain :

- (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

- b) Urusan Wajib Ketenaga kerjaan, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.



- (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

- c) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, melalui program antara lain:
 - (1) Program perencanaan pembangunan ekonomi

- d) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui program antara lain:
 - (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- a) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah, melalui program antara lain:
 - (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Urusan Pilihan

- a) Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian, melalui program antara lain:
 - (1) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
 - (2) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
 - (3) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - (4) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
 - (5) Program pengembangan industri kecil dan menengah
 - (6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

- b) Urusan Pilihan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain:



- (1) Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Kondusif.
 - (2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
 - (3) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- c) Urusan Wajib Perikanan dan Kelautan, melalui program antara lain:
- (1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 - (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - (3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
 - (4) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d) Urusan Pilihan Pertanian dan Ketahanan Pangan, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - (2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
 - (3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - (4) Program pengembangan agribisnis perkebunan
 - (5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
 - (6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- e) Urusan Pilihan Peternakan, melalui program antara lain:
- (1) Program peningkatan produksi hasil peternakan



- (2) Program penanganan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- (3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

f). Urusan Pilihan Pariwisata, melalui program antara lain:

- (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

IV. Untuk mewujudkan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

A. Urusan Wajib

a). Program Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, melalui program antara lain:

- (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- (2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- (3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
- (4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- (6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

b). Urusan Wajib Pelayanan Publik, melalui program antara lain :

- (1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

c). Urusan Wajib Ketenagakerjaan, melalui program antara lain:



- (1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.
- d). Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
- (1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - (2) Program Pembangunan Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi
- e). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui program antara lain:
- (2) Program perencanaan pembangunan daerah.
 - (2) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - (3) Program Kerjasama Pembangunan.
 - (4) Program perencanaan sosial budaya.
- f). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Keuangan Daerah, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Kapasitas Unsur-unsur Pemerintahan Daerah
 - (2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Program Penataan Otonomi Daerah
 - (4) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - (5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- g). Urusan Wajib Kepegawaian dan Persandian, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.



- (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

- h). Urusan Wajib Ketenaga kerjaan, melalui program antara lain:
 - (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- i). Urusan Wajib Pengawasan Pemerintahan Daerah, melalui Program antara lain :
 - (1) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
 - (2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - (3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

- j). Urusan Wajib Perhubungan, Informasi dan Telekomunikasi, melalui program antara lain:
 - (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi dan Media Massa.
 - (2) Program Kerjasama Informasi dan Media Masa.

- h). Urusan Wajib Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui program antara lain:
 - (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utamaan Gender dan Anak.
 - (3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.



- i). Urusan Wajib Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, melalui program antara lain:
- (1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
 - (2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - (4) Program Pengembangan Nilai Budaya.
 - (5) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7.3 Program Lintas Bidang dan Lintas SKPD

Untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, maka diperlukan program lintas bidang SKPD untuk percepatannya. Disamping melaksanakan program urusan wajib dan pilihan, maka program lintas bidang SKPD diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang meliputi:

1. Program Pembangunan Pelabuhan Nelayan, Pelabuhan Roro dan Pelabuhan Batubara dan CPO.
2. Program Pembangunan Kawasan Pasar Rakyat dan Pasar Tradisional Modern.
3. Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara mulut Tambang dan Listrik Tenaga Gas.
4. Program Pembangunan Aksesibilitas Seberang Kota, Kuala Betara dan Daerah Lainnya.
5. Program Pembangunan Perkampungan untuk Nelayan.
6. Program Pembangunan Politeknik, BLK dan SMK Agroindustri dan Perikanan.
7. Program Percepatan Ketersediaan Air Bersih.



8. Program Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Penyandang Narkoba.
9. Program Pelayanan Ambulance Air dan Dokter Spesialis Keliling.
10. Program Bantuan Beasiswa ke Sarjanaan Utusan Daerah
11. Program Bantuan Kapal Bagi Nelayan.
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13. Program Rutin untuk mendukung kelancaran pencapaian program secara keseluruhan.

Adapun program dan kegiatan untuk mendukung kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan berkualitas dapat dilihat pada tabel T.VII.C-1. berikut :



Tabel T.VII.C-1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI I “Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas”									
1.Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah	a. Membangun jalan dan jembatan yang berkualitas untuk pengembangan kawasan ekonomi strategis	- Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan pada kawasan ekonomi strategis	Akses daerah terisolir dan tertinggal	70 %	85 %	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
				Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	52%	78%	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
				Penambahan alat berat	8 unit	9 unit	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
				Kualitas Fasilitas Umum dan Sarana Sanitasi dasar Lingkungan Perumahan	40%	70%	Program Pengembangan Perumahan	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI I “Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas”									
				Rasio Genangan terhadap Potensi Daerah Genangan	60%	10%	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Wajib	Dinas Pekerjaan Umum
		b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fasilitas Fisik Bangunan Pemerintahan	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Fisik Bangunan Pemerintahan	Standarisasi Gedung Kantor Sebagai Fasilitas Layanan Publik	30 %	100 %	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Wajib	Lintas SKPD
		c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Tatanan Kota Sehat di Ibukota Kecamatan	30%	100%	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Wajib	Lintas SKPD
		d. Membangun Sarana Penyeberangan Orang dan Barang	- Membangun Dermaga apung pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya Dermaga apung pada kawasan strategis dan cepat tumbuh	0	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan	Pilihan	Dinas Perhubungan
				Kelancaran Kapasitas Angkutan Orang dan Barang	70%	85%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pilihan	Dinas Perhubungan
				Rambu dan Marka Jalan dalam Kondisi Baik	50%	85%	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pilihan	Dinas Perhubungan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI I “Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas”									
				Lalu Lintas Orang dan Barang dalam dan antar daerah lancar	60%	90%	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pilihan	Dinas Perhubungan
				Jaminan Keselamatan Angkutan Orang dan Barang	55%	90%	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Pilihan	Dinas Perhubungan
	2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.	a. Membangun pembangkit listrik baru dan perluasan jaringan listrik	Membangun jaringan listrik untuk daerah tertinggal	Rasio elektrivitas	55,25%	80%	Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikian	Pilihan	ESDM ; Pem Prov Jambi
			Membangun pembangkit listrik tenaga gas dan matahari berkapasitas besar	Kapasitas Daya Tenaga Listrik	29 MW	50 MW		Pilihan	ESDM ; Pem Prov Jambi
			Membangun Gardu Induk Kapasitas 30 MW	Terbangunnya Gardu Induk Kapasitas 30 MW	0	1 Unit		Pilihan	ESDM ; Pem Prov Jambi
		b. Menjalin Kemitraan Ketenaga Listrikian	Pemanfaatan Kelebihan Daya Listrik dari Swasta	Pemanfaatan Kelebihan Daya Listrik Lebih Dari Swasta	0	10 MW	Program Pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenaga Listrikian	Pilihan	ESDM ; Pem Prov Jambi

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MISI I “Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas”										
		c. Membangun instalasi pengolahan air baru dan perluasan jaringan pipa air bersih	- Membangun instalasi pengolahan air untuk seluruh kecamatan	Cakupan Pelayanan air bersih untuk masyarakat	69,23%	81,77%	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Wajib	Dinas PU	
			- Membangun jaringan pipa air minum untuk seluruh kecamatan	Sarana Penyediaan Air Minum Perpipaan seluruh kecamatan	40%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Wajib	Dinas PU	
	3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil	a. Membangun jaringan telekomunikasi Nirkabel yang handal	- Membangun Base <i>Telecommunication Cellular</i> setiap kecamatan dan daerah potensi	Terbangunya Base <i>Telecommunication Cellular</i> setiap kecamatan dan daerah potensi	8%	100%	Program Pembangunan Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi	Wajib	PDE ; Dishub Kom	
		b. Mengembangkan jaringan internet seluruh daerah	- Membangun jaringan internet Prabayar ke seluruh daerah	Terbangunnya jaringan internet Prabayar ke seluruh daerah	72%	100%		Wajib	PDE ; Dishub Kom	
					Akses Informasi masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	65%	90%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Pilihan	BP4K
					Penyelarasan Perencanaan Pembangunan terhadap Tata Ruang	25%	90%	Program Perencanaan Tata Ruang	Wajib	Bappemdal

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI I “Meningkatkan Pelayanan Umum Melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Kawasan Khusus Yang Berkualitas”									
				Meningkatkan Jaminan Ketaatan Tata Ruang	65%	85%	Program Pemanfaatan Ruang	Wajib	Bappeddal
				Percepatan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	65%	90%	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Wajib	Bappeddal
				Jaminan Pengendalian dan Pengembangan Investasi	65%	85%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Wajib	Bappeddal

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”										
1.Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	1.Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	- Membangun dan merehabilitasi Ruang Kelas agar bermutu	Rasio Murid Per Kelas	2,5%	4 %	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	wajib	Dis Dik	
		b. Meningkatkan Jangkauan Pendidikan	- Membangun dan merehabilitasi Sekolah dan Sarana Penunjangnya agar bermutu	Rasio Guru SD Per Bidang Studi	45%	85%	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	Dis Dik	
				Rasio Guru SMP Per Bidang Studi	60%	80%				
				Bangunan Kelas Sesuai Standard	60%	90%				
				- Meningkatkan Intensitas Pendidikan Usia Dini	Kelurahan/ Desa dengan PAUD	44,71%	85%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Wajib	
				- Meningkatkan Akses dan Intensitas Pendidikan Lanjutan	Angka Melek Aksara	98,36%	98,70%	Program Pendidikan Non-Formal	Wajib	
			Rata-rata lama sekolah		8,5 Tahun	8,95 Tahun				
		- Meningkatkan Akses Pendidikan Lanjutan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Mendapatkan Beasiswa	0	1500 orang	Program Bantuan Beasiswa ke Sarjana Utusan Daerah	Wajib	DisDik, BKD, Setda Keu		
		c. Meningkatkan mutu Manajemen Pendidikan	- Meningkatkan mutu proses belajar mengajar	Rasio Guru Per Murid SD + SMP	7,12%	5,0%	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	Dis Dik	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
			- Meningkatkan Mutu Manajemen Pendidikan Wajar 9 Tahun	SD Terakreditasi B	11,02%	60%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib	Dis Dik
				SMP Terakreditasi B	15%	70%			
		d. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan	- Meningkatkan mutu tenaga kependidikan melalui diklat teknis bermutu	Rasio Guru dengan diklat teknis bermutu	70%	90%	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	Dis Dik
	2.Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu tenaga Pendidik melalui sertifikasi profesi	- Meningkatkan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik	Persentase Guru S1 Profesi	74,48%	100%	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik	Wajib	Dis Dik
		b. Mengembangkan pendidikan teknik pariwisata dan kemaritiman bersertifikasi	- Menumbuh kembangkan pendidikan kejuruan kepariwisataan dan kemaritiman yang menghasilkan tenaga bersertifikasi	Terselenggaranya pendidikan kejuruan kepariwisataan dan kemaritiman yang menghasilkan tenaga bersertifikasi	0	2 Unit	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	DikDik ; Pem Prov Jambi
	3.Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang	Menumbuhkembangkan pendidikan SMK berkualitas	- Membangun SMK Negeri prodi kepariwisataan dan kemaritiman	Terbangunnya SMK Negeri prodi kepariwisataan dan	0	2 Unit	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	DikDik ; Pem Prov Jambi

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
	berbasis pada teknologi dan berkualitas			kemaritiman					
			- Mengembangkan SMK Teknologi yang berorientasi pada agribisnis	Terselenggaranya pendidikan SMK Teknologi yang berorientasi pada agribisnis	0	2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Wajib	
			- Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Kelulusan	Lulusan SMU/MA sederajat yang diterima di PTN lulusan SMKsederajat yang bekerja di DU/DI	10% 25%	18% 58%	Program Pendidikan Menengah	Wajib	DisDik
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	1.Peningkatan mutu infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu infrastruktur kesehatan sampai tingkat pedesaan	- Meningkatkan kualitas gedung dan peralatan kesehatan sampai tingkat pedesaan	Gedung dan Peralatan Kesehatan sesuai dengan SPM	60 %	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Wajib	Dinkes
			- Meningkatkan Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Rujukan Kesehatan	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan	30%	100%	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah	Wajib	Dinkes ; RSUD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
				serta Rujukan Kesehatan			Sakit		
		b. Meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Paramedis	- Meningkatkan pendidikan profesi Medis dan paramedis	Rasio Profesi Medis dan Paramedis	30%	100%	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Wajib	Dinkes ; RSUD
		c. Meningkatkan mutu obat-obatan	Meningkatkan ketersediaan obat-obatan yang bermutu	Kecukupan penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standard WHO	60%	75%	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Wajib	Dinkes ; RSUD
	2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	- Mengembangkan layanan kesehatan bermutu	Rasio Puskesmas Perawatan	30%	100%	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Wajib	Dinkes
			- Meningkatkan mutu petugas kesehatan lini depan (Puskesmas)	Kualifikasi Tenaga Kesehatan Puskesmas	30%	100%	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Wajib	Dinkes
		a. Meningkatkan mutu jaminan kesehatan masyarakat	- Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat yang murah dan berkualitas	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	60%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Wajib	Dinkes
		b. Meningkatkan Derajat Kesehatan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan	- Meningkatnya Derajat Kesehatan Lingkungan Pedesaan dan Perkotaan	Rasio Pedesaan/ Perkotaan Kumuh	80 %	10%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Wajib	Dinkes
		c. Meningkatkan	- Meningkatnya	Deteksi Dini	0	70%	Program Pencegahan	Wajib	Dinkes

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
		Kapasitas Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	Kapasitas Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kasus Penyakit Potensial KLB Oleh Masyarakat			dan Penanggulangan Penyakit Menular		
		d. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	- Mengembangkan Jangkauan Pelayanan Dokter Spesialis	Jangkauan Layanan Dokter Spesialis	25%	90%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Wajib	RSUD
			- Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Mutu layanan rumah sakit sesuai standard	20%	90%	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Wajib	RSUD
			- Meningkatkan Jangkauan Rujukan Medik	Pelayanan Rumah Sakit Daerah	1 Unit	2 Unit	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Wajib	RSUD ; Dinkes
	3. Peningkatan mutu gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular.	a. Meningkatkan mutu gizi keluarga	- Menumbuhkembangkan kader gizi keluarga dan masyarakat	Rasio Kader Posyandu Terampil Gizi	0	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib	Dinkes
			- Membangun pusat gizi keluarga di wilayah kecamatan	Penyelenggaraan Pusat Konsultasi Gizi di wilayah Kecamatan	0	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Wajib	Dinkes
		a. Meningkatkan mutu pemberantasan penyakit menular dan	- Meningkatkan mutu kader pemberantasan penyakit menular	Pembentukan Pos Pemberantas	30%	90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Wajib	Dinkes

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
		Tidak Menular		an Penyakit Menular di Desa					
			- Membangun pusat pemberantasan penyakit menular dan Tidak Menular di Pedesaan	Rasio Desa Siaga Aktiv	8,7%	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Wajib	Dinkes
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga SDA dan kelestarian lingkungan hidup	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan SDA	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial lokal dalam menjaga keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam (SDA) khususnya yang tidak terbarukan	Penyelenggaraan Forum Pelestarian SDA di Desa/Kel	0	85%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Wajib	BLHD
		b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dan organisasi sosial-budaya dalam menjamin pelestarian lingkungan hidup	Pelanggaran Batas Peruntukan / Pengelolaan SDA di Desa/Kel	30%	5%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Wajib	BLHD
	2.Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan	a. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam yang optimal untuk kesejahteraan	Desa/ Kelurahan Binaan Pengelola Sumber Daya Alam	0	75%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Wajib	BLHD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
	masyarakat		masyarakat	Sistim Kewaspadaan Dini Gangguan Lingkungan Hidup	0	85%	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkung Hidup	Wajib	BLHD
				Mutu Pengelolaan Persampahan	30%	60%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Wajib	PPKTB
		b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya lingkungan hidup dan Potensi Lokal kedalam kepariwisataan untuk kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Potensi Lokal sebagai Destiny Wisata	0	85%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pilihan	Dispora Bud Par
	3.Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem	a. Meningkatkan pemanfaatan norma sosial lokal untuk menjaga kelestarian ekosistem	- Meningkatkan pendayagunaan norma sosial lokal untuk menjamin kelestarian ekosistem	Per Des Jaminan kelestarian ekosistem	0	114 ds	Program Perlindungan dan Koservasi Sumberdaya Hutan	Wajib	DisHut
		b. Meningkatkan pemanfaatan kearifan lokal dalam menjamin pelestarian sumberdaya lingkungan hidup	- Meningkatkan pendayagunaan kearifan sosial lokal untuk menjamin pelestarian	Kawasan/ Lokasi pelestarian sumberdaya lingkungan hidup	0	114 ds	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Wajib	DisHut

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
			sumberdaya lingkungan hidup	Kualitas Pengembangan Hutan	40%	85%	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Wajib	DisHut
				Pengendalian Industri Hasil Hutan	40%	85%	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Wajib	DisHut
				Kualitas Penanggulangan Bencana dan Krisis Akibat Bencana	75%	85%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Wajib	BPBK
				Kualitas Jejaring Kesiagaan	65%	90%	Program Peningkatan Kesegiaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Wajib	BPBK
				Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pengendalian Pertambangan	65%	85%	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pilihan	ESDM
		c. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan	- Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Non Hayati Berwawasan Lingkungan	Rehabilitasi Lahan Bekas Eksploitasi SDA Hayati dan Non Hayati	10%	65%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Wajib	BLHD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup”									
			- Meningkatnya Komitment Partisipasi Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah	Jaminan Komitment Pelaku Usaha Eksploitasi SDA Terhadap Pembangunan Daerah	30%	80%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Wajib	BLHD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
1.Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	1. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	a. Menyiapkan kawasan untuk investasi agroindustri dan perikanan	- Menetapkan kawasan investasi agroindustri dan perikanan	Ditetapkannya kawasan investasi agroindustri dan perikanan	3 Lokasi	13 Lokasi	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Kualitas dan Kuantitas Promosi Produk Unggulan Daerah	70%	90%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Wajib	Bappemdal ; Disperindagproda ; Perizinan
				Nilai Investasi PMA/PMDN	16.8 Triliun	19,2 Trillin	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Wajib	Bappemdal ; Disperindagproda ; Perizinan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
				Kualitas Pengelolaan Hasil Budidaya Perikanan	80%	90%	Program pengembangan budidaya perikanan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Peran Serta Swasta dan Masyarakat Untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap	70%	90%	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pilihan	Dinas Perikanan dan Kelautan
				Mutu dan Peran Kelompok Petani dan Nelayan	60%	85%	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Kelautan ;
		c. Membangun infrastruktur yang berkualitas untuk kawasan investasi agroindustri dan perikanan	- Menumbuhkembangkan infrastruktur dasar dan penunjang pada kawasan industri investasi agroindustri dan perikanan	Pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang pada kawasan industri investasi agroindustri dan perikanan	0	13 Lokasi	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Kelautan
	2. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi	a. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif untuk ekonomi kerakyatan	- Mengembangkan agribisnis berbasis padat karya	Berkembangnya agribisnis berbasis padat karya	0	85%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dishutbun, Ketahanan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
	kerakyatan								Pangan
			- Mengembangkan ekonomi kreatif untuk kepariwisataan	Berkembangnya ekonomi kreatif untuk kepariwisataan	0	75%	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pilihan	Disbudparpora
		b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar siap kerja	- Menumbuhkembangkan SMK Teknologi agroindustri	Pembentukan dan Pengembangan SMK berbasis Teknologi agroindustri	0	85%	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pilihan	Disbudparpora
			- Mengembangkan BLK dengan teknologi tepat guna dan bermutu	BLK dengan teknologi tepat guna dan bermutu	0	85%	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Wajib	Disosnakertrans
2. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan	a. Mengembangkan komoditas unggulan agroindustri dan perikanan	- Menumbuhkembangkan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan	Pengembangan sentra komoditas unggulan perkebunan dan perikanan	30%	85%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	BP4K
				Jaminan Pemasaran Hasil Perkebunan	55%	85%	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	Pilihan	DisBun
			- Menumbuhkembangkan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan	Penerapan teknologi unggulan komoditas perkebunan dan perikanan	30%	85%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	BP4K

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
		b. Mengembangkan komoditas unggulan agroindustri berbasis nilai tambah produk tinggi dan ekonomi kerakyatan	- Mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan	Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk peningkatan produksi agroindustri dan perikanan	30%	80%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	BP4K
				Pengembangan Produksi Pertanian/Perkebunan	70%	90%	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pilihan	DTPH ; Disbun
				Kualitas dan Intensitas Penyuluhan kepada petani/ nelayan	70%	85%	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pilihan	BP4K
	2. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	a. Meningkatkan produktifitas koperasi dan UMKM melalui kemitraan usaha dalam agroindustri dan perikanan	- Mengembangkan koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan	Berkembangnya koperasi dan UMKM dengan pendidikan kluster untuk agroindustri dan perikanan	40%	82%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pilihan	DisKop dan UMKM
			- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam agroindustri	Sumberdaya manusia koperasi dan UMKM dalam	40%	65%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Pilihan	DisKop dan UMKM

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
			dan perikanan	agroindustri dan perikanan			Kompetitif Usaha Kecil Menengah		
		b. Meningkatkan kerjasama usaha koperasi dengan perusahaan besar untuk membangun pariwisata dan kemaritiman	- Mengembangkan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman	Jalinan kemitraan usaha antara koperasi dan pengusaha besar dalam membangun pariwisata dan kemaritiman	0	65%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pilihan	DisKop dan UMKM
			- Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman	Kompetensi SDM koperasi dalam pariwisata dan kemaritiman	40%	75%	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pilihan	DisKop dan UMKM
				Jaminan Kelembagaan Koperasi Terhadap Jumlah Koperasi	45%	90%	Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi	Pilihan	DisKop dan UMKM

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
				Rasio Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi	20%	90%	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Kondusif	Pilihan	Diskop dan UMKM
	3. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan	a. Meningkatkan produksi dan efiseinsi usaha petani dalam agribisnis dan kemaritiman	- Meningkatkan penggunaan teknologi dalam agroindustri dan perikanan	penggunaan teknologi dalam agroindustri dan perikanan	30%	80%	Program peningkatan Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dishutbun, Dinas Perikanan dan Peternakan
Pengembangan Sistim Pengelolaan Pasca Produksi Pertanian/ Perkebunan				30%	70%	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pilihan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dishutbun,	
- Meningkatkan efisien usaha petani melalui subsidi input dan jaminan harga output untuk agroindustri dan perikanan			0%	85%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	BP4K		
- Meningkatkan Produksi Hasil Peterernakan			65%	70%	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan		

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan"									
			- Menekan angka kematian dan kesakitan hewan	Penanggulangan Insidens Penyakit Hewan	0	85%	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pilihan	Dinas Perikanan dan Peternakan
				Pengelolaan Pasca Produksi Peternakan	60%	85%	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Pilihan	Dinas Peternakan
		b. Meningkatkan kemitraan usaha antara pekerja dengan perusahaan dalam pengembangan agroindustri dan perikanan	- Menumbuhkembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan	Jaminan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pengusaha agroindustri dan perikanan	0	75%	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pilihan	BP4K
				Kualitas Pengelolaan Ekonomi Pedesaan	70%	90%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		
			- Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Berbasis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Lokal	6%	30%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Wajib	Dinsosnaker Trans
	4. Peningkatan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	Meningkatkan Jaminan dan Pemasaran Barang serta Jasa	- Meningkatnya Jaminan Pemasaran Barang serta Jasa	Pengawasan dan Kepastian Hukum atas Pemasaran Produk Barang dan Jasa	30%	85%	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Pilihan	Disperindag Proda

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI III “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Agroindustri Dan Perikanan”									
				Pengembangan Industri Potensial Daerah	30%	75%	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pilihan	Disperindagpro da
				Mutu Sarana Pasar sebagai pusat Transaksi Barang dan Jasa	75%	85%	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pilihan	Disperindagpro da
				Tertib Administrasi Sistim Transaksi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	45%	75%	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pilihan	Disperindagpro da
				Sistim Administrasi Pengembangan IKM	30%	75%	Program pengembangan industry kecil dan menengah	Pilihan	Disperindagpro da
	5. Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Meningkatkan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	- Meningkatnya Pemasaran Produk Unggulan Daerah	Ragam Komoditas Ekspor Produk unggulan	5 Kmoditi	12 Komoditi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pilihan	Disperindag Proda
	6. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Makro Dari Sektor Unggulan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Makro Sektor Unggulan	- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Makro Sektor Unggulan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	6%	8%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Wajib	Bappeddal
		Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah	- Meningkatnya Potensi Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Proporsi PAD	6%	8%	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Wajib	Dispenda

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal	Peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal	0	75%	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Wajib	Sekwan
		b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya lokal asli	- Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional	Pengembangan sosial budaya lokal dalam event regional dan nasional	0	85%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pilihan	Dispora Budpar
	2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	a. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Agama dan Budaya Dalam Penyerapan Ketenaga Kerjaan	- Meningkatkan Kompetensi Lembaga Agama dan Budaya Masyarakat dalam Kompetisi Tenaga Kerja Lokal yang Sehat dan Bermutu.	Partisipasi Jaminan Ketenaga Kerjaan	30	60%	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Wajib	Dinsosnaker Trans
		B . Meningkatkan mutu pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya lokal	- Meningkatkan kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan	Kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya lokal	0	85%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Wajib	KesBangPol

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			budaya lokal	Pengembangan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	20%	60%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	Wajib	KesBangPol
				Peran Serta Masyarakat melalui jejaring Kantrantibmas	30%	70%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Wajib	KesBangPol Pol PP
				Pengendalian Pnyakit Masyarakat	70%	85%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Wajib	KesBangPol Pol PP
		b. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan	- Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan	Partisipasi organisasi kemasyarakatan agama dan budaya dalam pengelolaan pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan	0	30%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Wajib	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			- Meningkatkan Peran Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan dalam Pengelolaan Pembangunan Daerah	Intensitas Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan dalam Perencanaan Pembangunan	20%	80%	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pilihan	Disbudparpora
	3.Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan	- Meningkatkan mutu manajerial organisasi agama dan budaya yang akuntabel dan transparan	Mutu manajerial organisasi agama dan budaya yang akuntabel dan transparan	20%	80%	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pilihan	Disbudparpora
2.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	1.Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan	a. Mengembangkan sistem pelayanan publik online dan transparan	- Membangun sistem informasi dan layanan publik online dan transparan	Jejaring informasi berbasis IT pada setiap SKPD	4%	80%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Wajib	PDEPKD
			- Membangun sistem perencanaan dan pelaporan publik online dan transparan	Penyediaan Infrastruktur dan Kapasitas Layanan Informasi	1 Kec	13 Kec	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Wajib	Setda
		b. Meningkatkan kapasitas jangkauan layanan publik berbasis online	- Memperluas jangkauan layanan publik online yang berkualitas	Kelurahan/ Desa Dengan layanan publik online yang berkualitas	40%	85%	Program Pembangunan Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi	Wajib	PDE PKAD
			Meningkatkan Sistem Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi dan	Akses administrasi kearsipan berbasis TIK	40%	75%	Program Penyelamatan dan Pelestarian	Wajib	PDE KPAD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			Komunikasi				Dokumen/Arsip Daerah		
			Meningkatkan akses administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	95%	98%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Wajib	Dinas DukCapil
			Meningkatkan Kualitas Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Pemerintah sesuai SOP	70%	85%	Program Penataan Otonomi Daerah	Wajib	Setda
	2.Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	a. Meningkatkan mutu aparatur pelayanan publik	- Meningkatkan pendidikan dan latihan aparatur layanan publik bersertifikasi secara profesional	Aparatur layanan publik bersertifikasisecara profesional	40%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Wajib	BKD
			- Mengembangkan sistem promosi dan karir aparatur layanan publik yang baik dan transparan	Promosi dan karir aparatur layanan publik yang baik dan transparan	30%	85%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Wajib	BKD
		b. Menata sistem renumerasi aparatur pelayanann publik yang bersertifikasi	- Menyiapkan dan mengembangkan sistem insentif bagi aparatur layanan publik bersertifikasi	Pengembangan sistem insentif bagi aparatur layanan publik bersertifikasi	50%	90%	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Wajib	BKD
	3.Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-Government	a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (<i>e-budgetting</i>)	- Menyiapkan dan mengembangkan sistim perencanaan dan pengelolaan keuangan dan secara online dan transparan	Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan secara online dan transparan	50%	85%	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Wajib	Dispenda, Setda Keu
			b. Meningkatkan mutu	- Meningkatkan	Pengelola	30%	85%	Program peningkatan	Wajib

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
	<i>dan e-Budgetting</i>	pengelola keuangan publik yang memiliki sertifikasi	pendidikan dan latihan pengelola keuangan publik bersertifikasi	keuangan publik bersertifikasi			dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Setda Keu
			- Meningkatkan Intensitas Tindak Lanjut Laporan APIP	Laporan yang ditindak lanjuti	78%	100%	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Wajib	Setda ; Inspektorat
			- Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Skor SAKIP	CC	B	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Wajib	Inspektorat
			- Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Aparatur Pengawasan	SPM Aparatur Pengawasan	65%	85%	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Wajib	Inspektorat
3.Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	1.Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha	a. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi seluruh masyarakat	- Menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat	Kualitas pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh masyarakat	30%	85%	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Wajib	Sekretariat Dewan
		b. Meningkatkan jaminan kepastian penerapan hukum bagi pelaku dunia usaha	- Menjamin penerapan perundang-undangan dan peraturan yang adil bagi seluruh	Pengendalian aktifitas dunia usaha dan industri potensial	30%	90%	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Wajib	KPPT ; Kop UMKM ; BLHD Bappemdal

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			pelaku dunia usaha						
	2.Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	a. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik	- Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik	Penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik	0	86%	Program pendidikan politik masyarakat	Wajib	Kesbangpol
			- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu	45%	85%	Program pendidikan politik masyarakat	Wajib	Kesbangpol
		b. Meningkatkan mutu partai politik daerah yang akuntabel dan transparan	- Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel	Tata kelola partai politik yang akuntabel	10%	85%	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Wajib	Kesbangpol
	3.Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	- Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang transparan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang transparan oleh masyarakat	50%	75%	Program Perencanaan Pembangunan	Wajib	Bappemdal
			b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Perencanaan dan pembangunan daerah	- Meningkatkan peran masyarakat dalam Perencanaan dan pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan	Peran Serta Masyarakat dalam Setiap Tahapan Perencanaan	50%	85%	Program Perencanaan Pembangunan	Wajib
		- Meningkatkan Informasi		Keterbukaan Informasi	30%	80%	Program Pengembangan	Wajib	Bappemdal

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan	Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan			data/informasi		
			Harmonisasi Kerjasama Pembangunan	Kualitas Perencanaan Skala Regional maupun Nasional	70%	85%	Program Kerjasama Pembangunan		Bappemdal
			Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengembangan Potensi Sosial dan Budaya Daerah	Pengembangan potensi sosial budaya daerah sebagai potensi ekonomi	60%	85%	Program Perencanaan Sosial Budaya		Bappemdal
			Meningkatkan Akses Layanan Informasi dan Komunikasi Pembangunan	Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pembangunan Daerah	30%	65%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi dan Media Massa		DisHub
			Harmonisasi Kerjasama Informasi dan Media Masa	Sensitifitas Masyarakat Progress Pembangunan Daerah	45%	65%	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa		Seluruh SKPD
			Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Tahapan Kebijakan Perencanaan	Indeks Pembangunan Gender	63,99%	64%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		BKBMP

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG / URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV “Meningkatkan Persatuan Dan Kesatuan Daerah Melalui Harmonisasi Kehidupan Beragama Dan Berbudaya, Supremasi Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”									
			Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak	Kapasitas Pengurus Organisasi Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	30%	60%	Program Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak		BKBMP



BAB VIII

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Pemetaan urusan pemerintahan konkuren pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal – pasal sebagai berikut :

1. Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.



2. Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;



- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

3. Pasal 209

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

4. Pasal 219

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. keuangan;
- c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan



- e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mengaplikasikan program pembangunan beserta perkiraan biaya yang dibutuhkan, maka RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 disusun sebagaimana tabel berikut :

***Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021***



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



**Tabel T.VIII C-1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
PROGRAM RUTIN																	
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar	100%	100%	42.035.377.76	100%	44.977.854.209	100%	48.126.304.04	100%	51.485.145.284	100%	55.099.805.454	100%	58.956.791.836	100%	SELURUH SKPD
1.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi	90%	90%	56.403.412.534	95%	50.351.651.411	100%	64.576.267.010	100%	69.096.605.700	100%	73.933.368.099	100%	79.108.703.866	100%	Seluruh SKPD
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	70%	75%	2.696.690.300	80%	2.885.458.621	85%	3.087.440.724	90%	3.303.561.575	95%	3.534.810.885	100%	3.782.247.647	100%	Seluruh SKPD
1.20.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Mitigasi Jaminan Perlindungan Kelancaran Tugas Aparatur	0	0	0	0	0	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	Seluruh SKPD
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS	85%	90%	3.023.321.600	95%	3.234.954.112	100%	3.461.400.899	100%	3.703.698.962	100%	3.962.957.890	100%	4.240.364.942	100%	Seluruh SKPD
1.20.30	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terselenggaranya Penyebaran Informasi	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	Seluruh SKPD
1.20.35	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Presentase Pelaksanaan Sistem Pengendalian intern Pemerintah	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	Seluruh SKPD
1.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem manajemen laporan kinerja dan keuangan	85%	90%	2.745.993.700	95%	2.938.231.259	100%	3.143.888.187	100%	3.363.960.360	100%	3.599.437.585	100%	3.851.398.216	100%	Seluruh SKPD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
1.01	Pendidikan																
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya PAUD di semua Desa/Kelurahan	44,71%	53%	5.031.000.000	60%	5.087.000.000	65%	5.144.000.000	72%	5.202.000.000	79%	5.262.000.000	85%	5.322.000.000	85%	DisDik
1.01.16	Program Wajib Belajar 9 tahun	APK SD/SDLB/Paket A	117.63%	117.64%	8.657.000.000	117.66%	17.821.000.000	117.67%	23.570.000.000	117.69%	29.022.000.000	117.70%	33.024.000.000	117.71%	32.052.000.000	117.71%	DisDik Kabupaten/Provinsi
		APM SD/SDLB	99.01%	99.02%		99.03%		99.04%		99.05%		99.06%		99.07%			
		APK SMP/SMPLB/Paket B	98.90%	98.92%		98.94%		98.96%		98.98%		99.00%		99.02%			
		APM SMP/SMPLB	72.94%	73.10%		73.25%		73.41%		73.56%		73.72%		73.88%			
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	Mendorong Peningkatan APK SMA/SMK/SMLB/Paket C	69.94%	71.44%	10.942.000.000	73.19%	11.190.000.000	75.19%	11.446.000.000	77.44%	11.710.000.000	79.94%	11.983.000.000	82.44%	12.266.000.000	82.44%	DisDik Kabupaten/Provinsi
		Mendorong Peningkatan APM SMA/SMK/SMLB	51.95%	53.45%		55.20%		57.20%		59.45%		61.95%		64.45%			
		Mendorong Peningkatan kualitas lulusan SMU/MA sederajat yang diterima di PTN	10%	11%	1.384.000.000	12%	1.411.000.000	13%	445.000.000	14%	454.000.000	16%	463.000.000	20%	472.000.000	20%	
		Mendorong Peningkatan kualitas lulusan SMKsederajat yang bekerja di DU/DI	25%	25%		30%		35%		40%		50%		58%			
1.01.18	Program Pendidikan Formal dan Informal	Meningkatnya Angka Meleak Aksara Penduduk usia dewasa (diatas 15th)	98,36%	98,41%	328.000.000	98,46%	334.000.000	98,50%	341.000.000	98,50%	348.000.000	98,60%	355.000.000	98,70%	362.000.000	98,70%	DisDik
		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,50%	8,58		8,65		8,73		8,80		8,87		8,95			
		Meningkatnya persentase Guru															

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	/Pendidik yang profesional (S1 Profesi)	74,48%	81,23%		87,98%		94,73%		95%		99,23%		100%		100%	DisDik Kabupaten/ Provinsi
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Profesional PAUD	14,86%	18,24%		21,62%		25%		37%		39,36%		41,23%		41,23%	
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM	90,40%	90,60%	1.627.000.000	90,70%	1.877.000.000	90,90%	1.855.000.000	91,78%	1.962.000.000	94,30%	2.070.000.000	96,87%	2.180.000.000	96,87%	
		Mendorong Peningkatan Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP	62,30%	66,80%		69,30%		71,40%		77,50%		78,20%		80,10%		80,10%	
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SD Berakreditasi minimal B	11,02%	19,18%	5.913.000.000	27,35%	5.673.000.000	35,31%	5.653.000.000	43,67%	5.797.000.000	51,84%	5.946.000.000	60%	6.098.000.000	60%	DisDik
		Persentase SMP Berakreditasi minimal B	15%	24,17%		33,33%		42,50%		51,67%		60,83%		70%		70%	
???	Program Bantuan Beasiswa ke Sarjanaan Utusan Daerah	Meningkatkan ratio tingkat graduate SDM Masyarakat Miskin	0	0		375 ORG	7.500.000.000	375 ORG	7.500.000.000	375 ORG	7.500.000.000	375 ORG	7.500.000.000	375 ORG	7.500.000.000	1.500 ORG	DisDIK; Setda Keu
1.02	Kesehatan																
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kecukupan penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standard WHO	50 %	60 %	3.700.000.000	60 %	4.070.000.000	60 %	4.477.000.000	70 %	4.824.000.000	70 %	5.248.000.000	75 %	5.469.000.000	75 %	DINKES
		Tersedianya obat pelayanan kesehatan lanjutan sesuai dengan kebutuhan (resep)	132.993	405.500	7.006.000.000	455.000	7.506.000.000	505.000	7.706.000.000	555.000	7.800.000.000	605.000	8.500.000.000	705.000	9.000.000.000	705.000	RSUD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12				
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUD BLUD	0		100%	20.000.000.000	100%	22.000.000.000	100%	24.200.000.000	100%	26.000.000.000	100%	28.000.000.000	100%	RSUD	
		Pelayanan Dokter Spesialis ke Puskesmas (kali)	384	384	384		480		480		480		480		480	RSUD	
		Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya	31 %	31 %	6.369.473.408	37 %	76.369.473.408	43 %	42.000.000.000	55 %	27.000.000.000	60 %	18.500.000.000	65 %	18.000.000.000	65 %	DINKES
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah tangga PHBS	10 %	10 %	117.000.000	20 %	117.000.000	30 %	117.000.000	40 %	117.000.000	50 %	117.000.000	55 %	117.000.000	55 %	Dinkes
		Jumlah Desa Siaga Aktif	80 %	80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %		80 %	
1.02.20	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita	19,6%	18,5%	125.000.000	17,5%	125.000.000	17%	125.000.000	16,5%	125.000.000	16,5%	125.000.000	16,5%	125.000.000	16,5%	Dinkes
		Prevalensi Stunting Pada Baduta	32,9%	31,8%		30,7%		29,6%		28,5%		27,5%		27,5%		27,5%	
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Rumah tangga dengan jamban sehat (Bersanitasi Baik)	30 %	0	0	40 %	150.000.000	60 %	250.000.000	70 %	350.000.000	80 %	400.000.000	85 %	450.000.000	85 %	Dinkes
1.02.22	Program pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Pelayanan Imunisasi dasar lengkap (desa UCI)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinkes	
		Penanggulangan penyakit potensial wabah	100 %	100 %	800.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.400.000.000	100 %	1.600.000.000	100 %	1.800.000.000		
		Mencegah akibat buruk dari penyakit menular dan tidak menular	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Membatasi penyebaran penyakit potensial wabah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12				
1.02.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase kunjungan Pelayanan kesehatan ke Puskesmas terhadap jumlah penduduk	5 %	5 %	1.600.000.000	10 %	3.400.000.000	15 %	4.100.000.000	20 %	4.700.000.000	30 %	5.500.000.000	40 %	2.100.000.000	40 %	Dinkes
		Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS Base)	2	2	0	10	1.000.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	150.000.000	10	RSUD
1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jumlah (Jiwa) Masyarakat Miskin mendapat Jaminan Kesehatan Dasar	11.000	13.000	2.999.999,100	14.500	3.345.150.000	16.000	3.612.000.000	18.000	4.152.600.000	20.000	4.614.000.000	20.000	4.614.000.000	20.000	Dinkes
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terpenuhi standar pelayanan Rumah Sakit tipe C	46%	46%	1.227.597.000	51%	1.306.000.000	58%	1.506.000.000	65%	1.605.000.000	70%	1.800.000.000	80%	2.000.000.000	80%	RSUD SETDA
		Peningkatan layanan dokter spesialis (orang)	5	6	0	7	2.000.000.000	8	2.400.000.000	9	2.800.000.000	10	3.200.000.000	10	3.200.000.000	10	
1.02.27	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Kesehatan RSUD	3 gedung dan 8 unit alkes	3 gedung dan 8 unit alkes	720.200.000	5 gedung dan 15 unit alkes	1.050.000.000	6 gedung dan 30 unit alkes	1.210.000.000	6 gedung dan 30 unit alkes	1.310.000.000	6 gedung dan 45 unit alkes	1.460.000.000	7 gedung dan 50 unit alkes	1.650.000.000	7 gedung dan 50 unit alkes	RSUD
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data/informasi kesehatan yang valid dan upto date	0	0	0	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	270.000.000	100%	300.000.000	100%	DINKES
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan sarana Penyedia Obat dan Makanan	30 %	30 %	-	90 %	200.000.000	95 %	220.000.000	95 %	240.000.000	95 %	260.000	95 %	260.000.000	95 %	DINKES
1.02.32	Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	45,9/100.000 KLH	90 /100.000 KLH	1.000.000.000	88/100.000 KLH	1.200.000.000	84/100.000 KLH	1.400.000.000	81/100.000 KLH	1.600.000.000	78/100.000 KLH	1.800.000.000	75/100.000 KLH	2.000.000.000	75/100.000 KLH	DINKES
		Angka kematian bayi	4,4 / 1000 KLH	6,5 / 1000 KLH		6,3/ 1000 KLH		6,0 / 1000 KLH		5,7 / 1000 KLH		5,4 / 1000 KLH		5,0 / 1000 KLH			
1.03	Pekerjaan Umum																

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan.	Pembangunan Jalan konektivitas (Km)	0	0	0	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	25	DPU
		Persentase Jembatan Beton di Ruas jalan strategis	60%	60%	0	70%	5.000.000.000	75%	7.000.000.000	90%	11.000.000.000	100%	11.000.000.000	100%	11.000.000.000	100%	
1.03.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.	Membatasi genangan dikawasan Kel	8 Kel	4	20.000.000.000	1	10.000.000.000									13 Kel	DPU
1.03.17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Peningkatan penataan daerah aliran sungai/parit dan fasilitas umum	13 Kec	13 Kec	0	13 Kec	10.000.000.000	13 Kec	20.000.000.000	13 Kec	30.000.000.000	13 Kec	30.000.000.000	13 Kec	30.000.000.000	13 Kec	DPU
1.03.18	Program Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	41%	45%	27.000.000.000	52%	27.000.000.000	55%	34.000.000.000	58%	34.000.000.000	59%	47.000.000.000	62%	64.000.000.000	62%	DPU
1.03.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Persentase jaminan keamanan daerah aliran sungai/parit dan fasilitas umum (%)	%	%	0		0	100%	1.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	DPU
1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah alat berat dalam kondisi baik	8 unit	8 unit	0	8 unit	400.000.000	8 unit	400.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	500.000.000	9 unit	DPU
		Penambahan Alat Berat	0	0	0	1	1.500.000.000	4	6.000.000.000	4	6.000.000.000	3	4.500.000.000	2	3.000.000.000	14 unit	
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.	Terjaminnya aliran air irigasi	13 Kec	13 Kec	14.178.798	13 Kec	14.350.000	13 Kec	14.960.000	13 Kec	14.450.000	13 Kec	14.480.000	13 Kec	15.070.000	13 Kec	DPU
1.03.25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku.	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	62%	62%	0	75%	2.450.000.000	80%	2.500.000.000	85%	3.000.000.000	90%	3.000.000.000	95%	3.000.000.000	95%	DPU
1.03.26	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum.	Peningkatan akses layanan air minum perpipaan	62%	62%		75%	42.450.000.000	80%	60.450.000.000	85%	60.000.000.000	90%	51.000.000.000	95%	51.000.000.000	95%	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12				
1.03.27	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman.	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan ibu kota kecamatan	115,42 Ha	115,42 Ha	15.000.000.000	92,34 Ha	10.000.000.000	69,26 Ha	15.000.000.000	46,18 Ha	15.000.000.000	23,1 Ha	15.000.000.000	0 Ha	15.000.000.000	0 Ha	DPU
1.03.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Industri dan Wisata	0	0		1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	0		0		3	DPU,
1.05	Penataan Ruang																
1.05.16	Program perencanaan tata ruang	Terbitnya dokumen Perencanaan detail RRTR	3 Dokumen	1	550.000.000	1	300.000.000	4	2.130.000.000	3	1.405.000.000	1	1.786.500.000	2	1.228.150.000	12	BAPPEMDAL
		Tersedianya Foto citra satelit kabupaten skala detail	0	0	-	1	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	BAPPEMDAL
1.05.17	Program Pemanfaatan Ruang	Terbitnya Rekomendasi pemanfaatan ruang	60	15	105.000.000	45	315.000.000	45	315.000.000	45	315.000.000	45	315.000.000	45	315.000.000	300	BAPPEMDAL
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengendalian potensi pelanggaran Pemanfaatan tata ruang	60 %	60 %	300.000.000	80 %	320.000.000	90 %	350.000.000	90 %	350.000.000	90 %	350.000.000	90 %	350.000.000	90 %	BAPPEMDAL
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman																
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Kawasan Perumahan Tertata dengan fasilitas umum yang memadai	10%	105	0	50%	2.000.000.000	80%	2.000.000.000	90%	2.000.000.000	95%	2.000.000.000	95%	2.000.000.000	95%	DPU
		Persentase rumah layak dan memiliki akses sanitasi dasar	30%	30#		50%		80%		90%		95%		95%			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
		Terciptanya tertib administrasi Tata Bangunan	10%	15%	300.000.000	20%	400.000.000	30%	400.000.000	40%	400.000.000	50%	500.000.000	60%	500.000.000	60%	PPKTB
	Program pengembangan data dan informasi	Data SPM Radines	10%	0	0	80%	400.000.000	80%	400.000.000	90%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	DPU
1.04.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatnya layanan dasar sesuai SPM	20%	20%	8.760.000.000	40%	10.074.000.000	60%	11.585.100.000	80%	13.322.865.000	100%	15.321.294.000	100%	17.619.500.000	100%	BPBK
1.19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
1.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Menekan potensi kerawanan sosial penghuni sementara	0%	0%	0	80%	125.000.000	80%	125.000.000	80%	125.000.000	80%	125.000.000	80%	125.000.000	80%	Pol-PP
		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	86%	86%	124.780.000	86%	978.345.000	86%	831.655.000	86%	831.655.000	86%	831.655.000	86%	1.031.655.000	86%	Badan Kesbangpo
1.19.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Menekan Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan	60%	60%	1.800.000.000	80%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	Pol -PP
		Peningkatan reaksi cepat penanganan gangguan keamanan lingkungan dalam waktu : kurang 15 menit (perkotaan) dan kurang 60 menit (luar kota)	0%	0%	0	80%	3.200.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.400.000.000	100%	Pol-PP
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Deteksi dini dan penanganan konflik kurang dari 24 Jam	80%	80%	103.300.000	100%	617.000.000	100%	475.000.000	100%	618.000.000	100%	1.200.000.000	100%	700.000.000	100%	Badan Kesbangpol
1.19.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB Kemenag)	85%	85%	39.290.000	85%	110.000.000	85%	115.000.000	85%	205.655.500	85%	206.715.000	85%	206.715.000	85%	Badan Kesbangpol
1.19.20	Program Peningkatan	Mengendalikan	100%	100%	45.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	125.000.000	100%	75.000.000	100%	Pol-PP

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	potensi Penyakit Masyarakat					0		00								
		Terpeliharanya kemitraan dan Pencegahan Tindak Kriminal	85%	85%	195.020.000	85%	772.582.000	85%	825.000.000	85%	825.000.000	85%	825.000.000	85%	825.000.000	85%	Badan Kesbangpol
1.19.21	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan Indeks Demokrasi masyarakat	86%	86%	315.485.000	86%	961.872.800	86%	670.000.000	86%	1.396.825.000	86%	1.047.560.400	86%	1.107.600.000	86%	Badan Kesbangpol
1.19.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Meningkatnya upaya pencegahan pengurangan resiko dan layanan penanggulangan bencana (irbi bnpb 2013)	80%	80%	1.465.000.000	80%	1.685.000.000	80%	1.937.000.000	80%	2.906.000.000	80%	3.342.000.000	80%	3.843.000.000	80%	BPBK
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarkan Bela Negara	Tersedianya Kader PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang Berwawasan Kebangsaan	90%	90%		90%	98.000.000	90%	99.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	Badan Kesbangpo
	Program Pembauran Kebangsaan	Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah	90%	90%	69.300.000	90%	239.625.000	90%	250.000.000	90%	278.600.000	90%	300.000.000	90%	300.000.000	90%	Badan Kesbangpo
	Program Ketahanan Ekonomi	Terciptanya ketahanan ekonomi di daerah Kab. Tanjab Barat	96%	96%	27.335.000	96%	256.100.000	96%	125.000.000	96%	125.000.000	96%	125.000.000	96%	125.000.000	96%	Badan Kesbangpo
1.13	Sosial																
1.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- Data PMKS, - Jumlah PMKS yang dilayani	0 %	0 %	0	2 Kecamatan, 50 org, 180 KK, 4000 RTSM, 20 anak	1.200.000.000	5 Kec, 120 PMKS, 50 org, 180 KK, 4000 RTMS 20 anak	1.179.500.000	6 Kec, 75 PMKS, 50 org, 180 KK, 4000 RTMS, 20 anak	1.298.825.000	75 PMKS, 50 org, 180 KK, 4000 RTMS, 20 anak	1.218.595.000	75 PMKS, 50 org, 180 KK, 20 anak	840.070.000	13 Kec Data PMKS, 345 PMKS, 250 org, 4000 KK, 4000 RTMS, 100 anak	Dinas Sosnakertrans
1.13.21	Program Pemberdayaan	Jumlah lembaga kesejahteraan	1 Lembaga	1 Lembaga	94.000.0000	3 Lembaga	595.780.000	6 Lembaga	964.490.000	9 Lembaga	964.490.000	12 Lembaga	622.900.000	14 Lembaga	663.060.000	14 Lembaga	Dinas Sosnakertrans

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	sosial															12
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																
1.14	Ketenagakerjaan																
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	0 %	0 %	-	46 orang	565.994.000	50 orang	580.077.000	62 orang	498.598.000	40 orang	521.296.000	50 orang	630.534.000	248 orang	Dinas Sosnakertrans
		Akreditasi BLK	0 %	0 %	0	15 %	400.000.000	20 %	300.000.000	50 %	10.000.000.000	75%	5.000.000.000	100 %	5.000.000.000	100 %	Dinas Sosnakertrans
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	150 orang	200 orang	269.700.000	200 orang	269.700.000	200 orang	269.700.000	200 orang	269.700.000	200 orang	269.700.000	200 orang	269.700.000	1200 orang	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah penyerapan tenaga kerja	0	0	-	176 orang	500.000.000	352 orang	1.000.000.000	440 orang	1.500.000.000	528 orang	1.750.000.000	616 orang	2.000.000.000	2112 orang	Dinas Sosnakertrans
		Jumlah kelompok usaha yang dikembangkan	0	0	-	2 Kelompok	297.275.000	4 Kelompok	594.550.000	6 Kelompok	891.825.000	8 Kelompok	1.189.100.000	10 Kelompok	1.486.374.000	10 Kelompok	Dinas Sosnakertrans
1.14.17	Program perlindungan dan pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	70 % UMK	75 % UMK	95.000.000	80 % UMK	120.000.000	90 % UMK	130.000.000	100 % UMK	150.000.000	100 % UMK	150.000.000	100 % UMK	150.000.000	100 % UMK	Dinas Sosnakertrans
1.11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
1.11.16	Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak.	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	100 %	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	BKBPMP
1.11.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indek Penyetaraan Gender (IPG)	63,99 %	63,99 %	1.250.000.000	63,99 %	1.250.000.000	64 %	1.250.000.000	64 %	1.250.000.000	64 %	1.250.000.000	64 %	1.250.000.000	64 %	BKBPMP
1.21	Pangan																
1.21.16	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terjadinya diversifikasi pola pangan harapan (Skor PPH)	72	75	1.300.000.000	77	2.500.000.000	79	2.700.000.000	82	3.000.000.000	84	3.000.000.000	85	3.000.000.000	85	Ketahan Pangan
	Program Peningkatan	Meningkat dan	4	4	123.500.000	9	132.500.000	9	149.825.000	9	149.825.000	9	149.825.000	9	149.825.000	9	Ketahan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	ketahanan pangan pertanian/perkebunan	berkembangnya kualitas desa mandiri pangan															Pangan
		Terdeteksinya kerawanan pangan dan gizi melalui Sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	13 Kec	13 Kec		13 Kec		13 Kec		13 Kec		13 Kec		13 Kec		13 Kec	Ketahan Pangan
		Terjaminnya stabilitas distribusi dan harga pangan ditingkat petani dilembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	7 LDPM, 1 PUPM	7 LDPM, 1 PUPM		9 LDPM, 3 PUPM		11 LDPM, 5 PUPM		13LDPM, 7 PUPM		15LDPM, 9 PUPM		17 LDPM, 10 PUPM		17 LDPM, 10 PUPM	Ketahan Pangan
Pertanahan																	
1.08 Lingkungan Hidup																	
1.08.15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Meningkatnya kualitas kelompok pengelola sampah	0	2 kelompok	195.000.000	4 kelompok	205.000.000	6 kelompok	210.000.000	8 kelompok	235.000.000	10 kelompok	255.000.000	12 kelompok	270.000.000	12 kelompok	BLHD
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Presantase usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran lingkungan	80%	85%	1.218.000.000	90%	1.260.000.000	95%	2.545.000.000	100%	1.430.000.000	100%	1.510.000.000	100%	1.510.000.000	100%	BLHD
		Peningkatan pengelolaan sampah domestik (kubik)	18.000	18.000	2.265.960.000	20.000	4.550.000.000	22.000	5.085.000.000	24.000	5.620.000.000	26.000	6.155.000.000	28.000	6.790.000.000	28.000	PPKTB
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Deteksi dini potensi pencemaran lingkungan (spot/titik)	46	46	425.000.000	78	685.000.000	86	755.000.000	92	755.000.000	96	770.000.000	100	790.000.000	100	BLHD
1.08.19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.	Meningkatnya akses dan jejaring lingkungan hidup	10%	10%	0	30%	380.000.000	60%	380.000.000	70%	390.000.000	80%	400.000.000	80%	420.000.000	80%	BLHD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan kenyamanan Ruang Terbuka Hijau	2 Kec	0	0	4 Kec	5.200.000.000	6 Kec	3.400.000.000	8 Kec	3.800.000.000	11 Kec	5.500.000.000	13 Kec	2.300.000.000	13 Kec	PPKTB
2.03.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam	Meningkankan Koordinasi Pelestarian SDA dan Flora Fauna Endemik	25 %	100 %	543.300.450	100 %	1.796.007.750	100 %	2.245.009.688	100 %	2.745.009.688	100 %	2.945.009.688	100 %	3.000.000.000	100 %	Setda SDA
1.20.32	Program pelayanan Kebersihan Lingkungan Kelurahan	Presentase cakupan pelayanan kebersihan lingkungan kelurahan	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	BLHD, PPKTB, SETDA, Kelurahan
1.10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP terhadap penduduk wajib KTP	75%	80%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	Dukcapil
1.22.15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
1.22.16	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Kawasan pusat pertumbuhan di kecamatan	13 Kec			13 Kec	225.000.000	13 Kec	225.000.000	13 Kec	225.000.000	13 Kec	225.000.000	13 Kec	225.000.000	13 Kec	BKBPMP, SETDA, Kecamatan, Kelurahan
		Partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan	40 %	40 %	4.000.000.000	40 %	4.000.000.000	40 %	4.000.000.000	40 %	4.000.000.000	40 %	4.000.000.000	40 %	4.000.000.000	40 %	BKBPMP
1.22.17	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Penguatan lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	114 Desa dan 20 Kel	114 Desa dan 20 Kel	116.000.000	114 Desa dan 20 Kel	245.000.000	114 Desa dan 20 Kel	345.000.000	114 Desa dan 20 Kel	445.000.000	114 Desa dan 20 Kel	545.000.000	114 Desa dan 20 Kel	645.000.000	114 Desa dan 20 Kel	BKBPMP kecamatan, Kelurahan
1.22.18	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan desa	16%	16%		30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	BKBPMP kecamatan, Kelurahan
1.22.19	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kualitas SDM Desa dalam pengelolaan pembangunan pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes)	114 Desa	114 Desa	550.000.000	114 Desa	1.810.000.000	114 Desa	3.346.000.000	114 Desa	1.900.000.000	114 Desa	3.400.000.000	114 Desa	2.000.000.000	114 Desa	SETDA PEMDES
	Program peningkatan peran perempuan di	Meningkatnya keaktifan	12%	12%		30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	200.000.000	30%	BKBPMP

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	perdesaan	perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dalam upaya mencapai kesetaraan di tingkat kecamatan																Kecamatan, Kelurahan
1.12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
1.12.15	Program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase laju pertumbuhan Penduduk	1,09 %	1,09 %	425.000.000	1,08 %	425.000.000	1,07%	425.000.000	1,06%	425.000.000	1,05 %	425.000.000	1,04 %	425.000.000	1,04 %	425.000.000	BKBPMP
		Penurunan persentase angka pra Keluarga Sejahtera (KS)	12.840	12.840	570.000.000	120	570.000.000	140	570.000.000	140	570.000.000	140	570.000.000	140	570.000.000	12.556	570.000.000	BKBPMP
1.07	Perhubungan																	
1.07.15	Program Pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pelayanan halte dan dermaga sungai untuk kelancaran transportasi orang dan barang (unit)	2	3	995.000.000	2	800.000.000	2	1.300.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	950.000.000	15	950.000.000	Dishub
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai standar	16%	16%	0	20%	300.000.000	35%	350.000.000	45%	400.000.000	55%	450.000.000	70%	500.000.000	70%	500.000.000	Dishub
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan.	Meningkatnya jaminan pelayanan dan kenyamanan sarana angkutan (unit)	9	12	1.078.800.000	14	1.078.800.000	16	1.177.000.000	18	1.198.000.000	20	1.348.000.000	22	1.326.000.000	22	1.326.000.000	Dishub
1.07.18	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Terminal Type C	0							1 unit	9.000.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	Dishub
1.07.19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Peningkatan frekwensi pengendalian ketertiban lalu lintas	244 kali	244 kali	0	244 kali	911.000.000	244 kali	1.101.000.000	244 kali	878.000.000	244 kali	866.000.000	244 kali	778.000.000	244 kali	778.000.000	Dishub
1.07.20	Program Peningkatan	Peningkatan jumlah	1.000	1.000	228.907.000	2.000	945.000.000	2.100	910.000.000	2.200	915.000.000	2.300	970.000.000	2.400	1.640.000.000	2.400	1.640.000.000	Dishub

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Kelayakan Pengoperasian Kendaraan bermotor	kendaraan yang lulus uji (unit)															
1.25.15	Komunikasi dan Informatika																
1.25.18	Program Pembangunan Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi	Terselenggaranya jejaring Informasi (Website SKPD Tersentral)	5 SKPD	37 SKPD	276.200.000	39 SKPD	296.200.000	41 SKPD	316.200.000	43 SKPD	336.200.000	45 SKPD	356.200.000	48 SKPD	376.200.000	48 SKPD	PDEPKD
1.26		Tersedianya jaringan Telekomunikasi Nirkabel yang handal		1 Menara	1.500.000.000	2 Menara	3.000.000.000	1 Manara	1.500.000.000	1 Manara	1.500.000.000	1 Menara	1.500.000.000	1 Menara	1.500.000.000	6 Menara	PDEPKD
1.25.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengembangan jangkauan pelayanan Internet sampai ke tingkat Desa/Kelurahan	69 Desa	69 Desa	0	82 Desa	710.000.000	95 Desa	960.000.000	108 Desa	785.000.000	121 Desa	675.000.000	134 Desa	515.000.000	134 Desa	DISHUB
1.25.17	Program Fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terbentuknya KIM berprestasi sampai tingkat Provinsi	1 KIM	2 KIM	0	3 KIM	120.000.000	4 KIM	170.000.000	5 KIM	270.000.000	6 KIM	275.000.000	8 KIM	280.000.000	8 KIM	DISHUB
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah																
1.15.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.	Terwujudnya koordinasi lintas pelaku pemberdayaan usaha mikro	0	0	-	2 kali	284.450.000	2 kali	289.000.000	2 kali	302.000.000	2 kali	315.000.000	2 kali	330.000.000	10 Kali	Dinas Koperasi dan UMKM
1.15.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Koperasi dan usaha mikro yang berkualitas	500 usaha mikro / 16 kop	40 KOP	84.583.000	70 usaha Mikro / 25 KOP	585.000.000	70 usaha Mikro / 25 KOP	565.000.000	70 usaha Mikro / 25 KOP	550.000.000	80 usaha Mikro / 21 KOP	485.000.000	90 usaha Mikro / 20 KOP	445.000.000	380 usaha Mikro / 116 KOP	Dinas Koperasi dan UMKM
1.15.17	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pengelola koperasi	50 KOP / RAT	90 KOP / RAT	845.830.000	120 KOP / RAT	255.000.000	140 KOP / RAT	280.000.000	160 KOP / RAT	280.000.000	180 KOP / RAT	280.000.000	200 KOP / RAT	295.000.000	270 KOP / RAT	Dinas Koperasi dan UMKM
		Usaha Mikro yang berkelanjutan dan akuntabel	9 Usaha Mikro	24 Usaha Mikro	70.100.000	25 Usaha Mikro		25 Usaha Mikro		25 Usaha Mikro		25 Usaha Mikro		20 Usaha Mikro		120 Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UMKM
1.15.18	Program peningkatan	Peningkatan	33 %	41 %	290.125.000	55 %	1.155.000.000	69 %	1.032.500.	77 %	1.101.000.000	80 %	962.000.000	82 %	1.090.000	82 %	Dinas

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
	kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif							000		0		00				Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	33 %	41 %		55 %		69 %		77 %		80 %		82 %		82 %	Dinas Koperasi dan UMKM
1.16	Penanaman Modal																
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	Terciptanya Jalinan kerja sama Investasi dan Perdagangan (Pelaku Usaha Komoditi Lokal)	5	5	537.000.000	8	1.261.000.000	10	1.430.000.000	12	1.570.000.000	14	1.660.000.000	16	1.730.000.000	16	Dinas Perindagprod a
		Meningkatnya Pemantauan Investasi Daerah dan Promosi Daerah	51%	53%	247.920.000	60%	515.000.000	70%	535.000.000	80%	555.000.000	90%	565.000.000	100%	585.000.000	100%	Bappemdal
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnta Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	16,8 Triliun	16,8 Triliun	-	17,4 Triliun	125.000.000	18 Triliun	605.000.000	18,6 Triliun	135.000.000	19,2 Triliun	140.000.000	19,8 Triliun	145.000.000	19,8 Triliun	Bappemdal
		Terlaksananya jaminan dan jangkauan pelayanan perizinan akuntabel dan transparan	47%	47%	0	65%	780.000.000	70%	780.000.000	75%	780.000.000	80%	850.000.000	85%	850.000.000	85%	KKPT
		Meningkatkan pengelolaan BUMD dan Peningkatan Investasi lainnya	13 Kec	13 Kec	513.354.000	13 Kec	593.313.750	13 Kec	640.000.000	13 Kec	690.000.000	13 Kec	740.000.000	13 Kec	790.000.000	13 Kec	SETDA EKONOMI
	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Meningkatnya Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP	30 Perusahaan	35 Perusahaan	348.965.000	40 Perusahaan	450.000.000	45 Perusahaan	465.000.000	50 Perusahaan	480.000.000	55 Perusahaan	495.000.000	60 Perusahaan	520.000.000		Bappemdal
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga																
1.18.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran serta Kelompok Pemuda dalam	0	0	0	50%	200.000.000	60%	200.000.000	70%	200.000.000	90%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	Disbudparpora

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021					
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		kewirausahaan																	
		Menumbuhkan kembangkan Nilai Kebangsaan	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	Disbudparpora
1.18.19	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Penjaringan dan Pembinaan Atlit Berprestasi sejak usia dini	0	0	0	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	6.000.000.000	13 Kec	Disbudparpora
1.18.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga sesuai standar nasional	80%	100%	10.000.000.000	100%	22.000.000.000	100%	62.000.000.000	100%	62.000.000.000	100%	52.000.000.000	100%	22.000.000.000	100%	22.000.000.000	100%	Disbudparpora, DPU
1.23	Statistik																		
1.23.15	Program pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Akses dan Kualitas Sistem data/informasi/statistik Daerah	65%	65%		85%	800.000.000	90%	800.000.000	95%	800.000.000	96%	800.000.000	95%	800.000.000	95%	800.000.000	95%	Bappeddal
	PERSANDIAN																		
1.17	Kebudayaan																		
1.17.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Penetapan Legalitas Budaya Lokal sebagai Kekayaan Daerah	0	0	0	10%	200.000.000	70%	200.000.000	90%	200.000.000	100%	200.000.000					100%	Disbudparpora
1.17.17	Program pengelolaan keragaman budaya.	Partisipasi Kelompok seni dalam menjaga keragaman budaya	0	0	0	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	Disbudparpora
1.26.15.	Perpustakaan																		
1.26.17	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan	12 desa/kelurahan	42 desa/kelurahan	180.300.000	50 desa/kelurahan	190.300.000	55 desa/kelurahan	200.300.000	60 desa/kelurahan	210.300.000	65 desa/kelurahan	220.300.000	70 desa/kelurahan	230.400.000	70 desa/kelurahan	230.400.000	70 desa/kelurahan	PDEPKD
2		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Per tahun		105.000 pengunjung		125.000 pengunjung	72.000.000	137.500 pengunjung	90.000.000	150.000 pengunjung	100.000.000	162.500 pengunjung	115.000.000	175.000 pengunjung	125.000.000				PDEPKD
1.24																			

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.24.16	Kearsipan																
1.25	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip/ dokumen daerah yang dilestarikan dan diselamatkan (Unit)	2.741 arsip	5000 arsip	282.450.000	5000 arsip	346.700.000	5000 arsip	395.600.000	5000 arsip	428.900.000	5000 arsip	447.200.000	5000 arsip	498.500.000	5000 arsip	
II FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN																	
2.05.20	Kelautan dan Perikanan																
2.05.21	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya (TON)	1828	0		2102	2.190.000.000	2417	2.780.000.000	2779	3.060.000.000	3195	3.465.000.000	3674	3.965.000.000	3674	Dinas Perikanan
2.05.23	Program pengembangan perikanan tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	20,718 Ton	0		22,790 Ton	92.470.000	25,069 Ton	92.470.000	27,576 Ton	92.470.000	30,333 Ton	92.470.000	33,366 Ton	92.470.000	33,366 Ton	Dinas Perikanan
2.05.24	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Teknologi Pengolahan Produksi Perikanan	50	0		10	1.225.000.000	10	1.255.000.000	10	1.385.000.000	10	1.420.000.000	10	1.500.000.000	100	Disnas Perikanan
2.06	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Masyarakat Pesesisir dan pembudidaya ikan dalam pelestarian sumber daya perikanan	30 %			70 %	225.000.000	70 %	225.000.000	70 %	225.000.000	70 %	225.000.000	70 %	225.000.000	70 %	Disnas Perikanan
2.04.15	Pariwisata																
2.04.16	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	Pengembangan potensi lokal sebagai destinasi wisata	0 %	0 %	0	4 %	1.200.000.000	5 %	1.500.000.000	8 %	3.000.000.000	10 %	3.000.000.000	10 %	1.200.000.000	10 %	Disbudparpora
2.05	Program pengembangan kemitraan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan wisata mandiri	0 %	0 %	0	10%	125.000.000	10%	125.000.000	20%	135.000.000	40%	200.000.000	60%	200.000.000	60%	Disbudparpora

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2.01.15	Pertanian																
2.01.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan Insentif dan disinsentif bagi Kelompok Tani	1.422 Kelpk Tani	1.422 Kelpk Tani	845.750.000	1.472 Kelpk Tani	1.610.000.000	1.500 Kelpk Tani	1.765.000.000	1.525 Kelpk Tani	1.920.000.000	1.550 Kelpk Tani	2.075.000.000	1.575 Kelpk Tani	2.230.000.000	1.575 Kelpk Tani	BP4K
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan	Tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan hortikultura	0	0		2 sentra	180.000.000	5 sentra	450.000.000	8 sentra	720.000.000	11 sentra	990.000.000	13 sentra	117.000.000	13 sentra	DTPH
????		Tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan perkebunan	0	1 sentra	130.000.000	1 sentra	450.000.000	1 sentra	580.000.000	1 sentra	650.000.000	1 sentra	700.000.000	1 sentra	800.000.000	1 sentra	DISBUN
2.01.18	Program pengembangan agribisnis perkebunan	Meningkatnya kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan	1 komoditi	1 komoditi	0	2 komoditi	190.000.000	3 komoditi	300.000.000	4 komoditi	150.000.000	5 komoditi	160.000.000	5 komoditi	310.000.000	5 komoditi	DISBUN
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	30 kelompok	50 kelompok	278.200.000	70 kelompok	900.000.000	90 kelompok	900.000.000	110 kelompok	900.000.000	130 kelompok	950.000.000	150 kelompok	950.000.000	150 kelompok	DTPH
2.01.19		Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan	21 Kelompok	6 Kelompok	180.000.000	10 Kelompok	500.000.000	10 kelompok	600.000.000	10 kelompok	650.000.000	10 kelompok	700.000.000	10 kelompok	750.000.000	77 kelompok	DISBUN
????	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Padi (ton)	50.056	63.791	3.654.104.450	70.170	6.807.781.945	77.187	7.284.326.681	84.906	7.794.229.549	93.396	8.339.825.617	102.736	8.923.613.410	428.395	DTPH
		Jagung (ton)	4.046	5.964		6.262		6.575		6.904		7.249		7.612		7.612	
		Petai (ton)	10	59		62		65		68		72		75		75	
		Kacang tanah (ton)	9	40		42		44		46		49		51		51	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	PERIODE 2016-2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		Kacang hijau (ton)	8	40	44	48	53	59	64	69	74	79	84	89	94	99	104	109
		Ubi kayu (ton)	2.411	4.706	4.941	5.188	5.448	5.720	6.006	6.306	6.612	6.924	7.242	7.566	7.896	8.232	8.574	8.922
		Ubi jalar (ton)	217	497	522	548	575	604	634	664	694	724	754	784	814	844	874	904
		Cabai merah (ton)	103	113	119	125	131	137	144	150	157	164	171	178	185	192	199	206
		Cabai rawit (ton)	88	112	123	136	149	164	181	199	218	238	258	279	300	322	344	366
		Jeruk siam (ton)	205	257	270	283	298	312	328	344	361	378	395	412	430	448	466	484
		Nanas Paon (ton)	202	246	258	271	285	299	314	329	344	359	374	389	404	419	434	449
		Pisang Berangan (ton)	167	238	250	262	276	289	304	318	333	348	363	378	393	408	423	438
		Terung (ton)	37	582	611	642	674	707	743	780	817	854	891	928	965	1.002	1.039	1.076
		Ketimun (ton)	226	257	283	311	343	377	415	455	495	535	575	615	655	695	735	775
		Kangkung (ton)	224	246	271	298	328	361	397	434	471	508	545	582	619	656	693	730
		Bayam (ton)	78	68	261	287	316	348	383	418	453	488	523	558	593	628	663	698
		Nangka/Cempedak (ton)	3.808	602	632	664	697	732	768	804	840	876	912	948	984	1.020	1.056	1.092
		Pepaya (ton)	222	244	269	295	325	358	393	428	463	498	533	568	603	638	673	708
		Semangka (ton)	37	41	45	49	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
????	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Sawit (ton)	131234	133858	12.888.000.000	136535	14.210.000.000	139267	15.445.000.000	142051	16.825.000.000	144893	17.715.000.000	147790	17.715.000.000	147790	DISBUN	
		Karet (ton)	14806	14367		14655		14948		15247		15552		15863		15863		
		Kelapa (ton)	54730	55824		56941		58080		59241		60426		61635		61635		
		Kopi (ton)	1214	1238		1263		1288		1314		1340		1367		1367		
		Pinang (ton)	10989	11208		11432		11662		11895		12133		12375		12375		
????	Program pengembangan Data/informasi pertanian	Tersedianya data yang valid dan up to date			610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	610.000.000	100%	DTPH	
2.01.20	Program pengembangan Data/informasi perkebunan	Tersedianya data yang valid dan up to date	5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	DISBUN	
????	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap (PKS) Penyuluh	185 PPL	185 PPL	889.208.000	185 PPL	3.830.000.000	185 PPL	3.830.000.000	185 PPL	3.830.000.000	185 PPL	3.830.000.000	185 PPL	3.830.000.000	185 PPL	BP4K	
2.01.21	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Terpenuhi sarana dan prasarana penyuluhan	13 Kec	13 Kec	1.775.450.000	13 Kec	3.960.000.000	13 Kec	4.145.000.000	13 Kec	4.330.000.000	13 Kec	4.330.000.000	13 Kec	4.330.000.000	13 Kec		
2.01.22	Program Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan	Menurunkan angka kematian ternak	2%	2%	555.749.995	1,9%	973.283.000	1,8%	990.283.500	1,7%	1.040.400.000	1,6%	1.061.000.000	1,5%	1.095.400.000	1,5%	Disnak	

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	penyakit ternak																
2.01.23	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi (ekor)	7.193	7.336	1.151.345.000	7.482	4.116.358.700	7.631	4.482.827.450	7.783	4.861.913.388	7.938	6.251.770.809	8.096	5.681.342.587	8.096	Disnak
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	607	613		619		625		632		639		646		646	
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	40.195	40.235		40.275		40.315		40.355		40.395		40.435		40.435	
		Jumlah Populasi Ternak Domba (ekor)	634	640		646		652		658		664		670		670	
		Jumlah Populasi Ternak Unggas (ekor)	996.912	1.046.758		1.099.095		1.154.050		1.211.753		1.272.340		1.335.957		1.335.957	
2.01.24	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Prouksi Peternakan	Peningkatan pendapatan peternak (1.500.000/ekor)	20 ekor	20 ekor	183.540.000	50 ekor	890.565.000	60 ekor	1.089.165.000	70 ekor	1.308.165.000	80 ekor	1.547.565.000	90 ekor	1.807.365.000	90 ekor	Disnak
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakann	Jumlah kelompok peternak yang menerapkan teknologi peternakan	32 Kelompok	0	120.264.600	5 Kelompok	560.000.000	6 K elompok	585.000.000	7 Kelompok	610.000.000	8 Kelompok	635.000.000	9 Kelompok	660.000.000	67 Kelompok	Disnak
	Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan	Tersedianya data peternakan yang valid dan upto date	100%	100%	118.139.000	100%	505.000.000	100%	520.000.000	100%	535.000.000	100%	550.000.000	100%	565.000.000	100%	Disnak
2.02.15 Kehutanan																	
2.02.16	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan berwawasan lingkungan	11 Kec	11 Kec	68.100.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	150.000.000	11 Kec	Dinas Kehutanan
2.02.17	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah bibit tanaman kehutanan /MPTS yang ditanam (Batang)	0	0	0	50.000	378.200.000	50.000	500.000.000	50.000	1.000.000.000	50.000	1.000.000.000	50.000	1.000.000.000	50.000	Dinas Kehutanan

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
2.02.19	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kawasan hutan terjaga dan terlindungi	13 Kec	13 Kec	566.522.000	13 Kec	1.500.000.000	13 Kec	1.500.000.000	13 Kec	1.500.000.000	13 Kec	1.500.000.000	13 Kec	1.500.000.000	13 Kec	Dinas Kehutanan
2.02.20	Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Jumlah industri hasil hutan yang dibina (unit)	15	15	156.450.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	Dinas Kehutanan
	Program perencanaan dan pengembangan Hutan	Ketersediaan informasi Kawasan hutan yang sudah ditetapkan	13 Kec	13 Kec	110.900.000	13 Kec	200.000.000	13 Kec	200.000.000	13 Kec	200.000.000	13 Kec	200.000.000	13 Kec	200.000.000	13 Kec	Dinas Kehutanan
2.03.15 Energi dan Sumberdaya Mineral																	
2.03.18	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (% RE)	50,96	55,25%	0	60%	18.000.000.000	65%	19.000.000.000	70%	20.000.000.000	75%	21.000.000.000	80%	100.000.000.000	80%	Dinas ESDM, ; Pem. Provinsi
2.06.15 Perdagangan																	
2.06.18	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan jaminan hak konsumen terhadap mutu barang dan jasa pelayanan	40 %	40 %	1.467.520.000	60 %	523.380.000	65 %	565.525.000	80 %	565.000.000	80 %	605.000.000	80 %	640.000.000	80 %	Dinas Perindagproda
????	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan jaminan pengawasan distribusi dan harga sembako, dan Barang bersubsidi	85 %	85 %	391.000.000	85 %	658.000.000	85 %	700.000.000	85 %	700.000.000	85 %	755.000.000	85 %	765.000.000	85 %	Dinas Perindagproda
2.06.19	Program peningkatan dan pengembangan Ekspor	Tersedianya Data arus Ekspor dan Impor	75 %	75 %	197.590.000	80 %	339.000.000	90 %	400.000.000	90 %	420.000.000	90 %	450.000.000	90 %	470.000.000	90 %	Dinas Perindagproda
2.07	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terlaksananya kenyamanan transaksi barang dan jasa (lokasi)	1	0	0	2	2.100.000.000	2	2.100.000.000	2	2.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	9	PPKTB
2.07.16 Perindustrian																	
2.07.17	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Peningkatan Peluang dan Permintaan Pasar terhadap produk	50 %	50 %	349.450.000	60 %	1.610.000.000	75 %	1.861.000.000	80 %	1.912.000.000	80 %	1.948.000.000	80 %	2.095.000.000	80 %	Dinas Perindagproda

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12				
		IKM															
2.07.19	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Peningkatan Mutu Pelaku Usaha (IKM)	376	376	150.650.000	100	970.000.000	100	1.040.000.000	100	1.040.000.000	100	1.040.000.000	100	1.040.000.000	500	Dinas Perindagproda
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Peningkatan Pembinaan pelaku IKM produk unggulan disentra industri	8	8	332.500.000	9	940.000.000	9	945.000.000	9	965.000.000	9	970.000.000	9	1.000.000.000	9	Dinas Perindagproda
Transmigrasi																	
	Program pemberdayaan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat Eks Transmigrasi	Jumlah masyarakat yang diberdayakan	0%	0%	-	10%	200.000.000	20%	250.000.000	25%	300.000.000	30%	350.000.000	40%	400.000.000	40%	Dinas Sosnakertrans
FOKUS FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1.06 Perencanaan																	
1.06.15	Program pengembangan data dan Informasi	Peningkatan Kualitas Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan	80 %	80 %	1.200.000.000	90 %	1.500.000.000	90 %	1.200.000.000	90 %	1.500.000.000	90 %	1.200.000.000	90 %	1.200.000.000	90 %	Bappeddal
1.06.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	-	-	-	3 Daerah	475.000.000	3 Daerah	525.000.000	3 Daerah	570.000.000	3 Daerah	570.000.000	3 Daerah	510.000.000	3 Daerah	Bappeddal
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7	7	2.256.750.000	5	2.200.000.000	6	2.200.000.000	6	2.200.000.000	5	2.200.000.000	7	2.600.000.000	36	Bappeddal
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Kerjasama Investasi	51%	53%	385.840.000	60%	1.800.000.000	70%	2.600.000.000	80%	1.850.000.000	90%	1.625.000.000	100%	1.575.000.000	100%	Bappeddal
1.06.23	Program perencanaan	Tersedianya	3	3	656.000.000	3	880.000.000	3	880.000.000	3	880.000.000	3	880.000.000	3	880.000.000	18	Bappeddal

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	sosial dan budaya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang sosial budaya															
1.04.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan LH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Prasarana wilayah, SDA dan LH	8	1	105.350.000	9	1.200.000.000	4	862.000.000	4	1.048.200.000	4	1.169.020.000	3	900.000.000	33	Bappedal
Keuangan																	
1.20.31	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah	6%	6%	4.293.000.000	6%	5.614.000.000	7%	5.895.000.000	7,5%	6.254.000.000	8%	6.637.000.000	8%	7.035.000.000	8%	Dispenda
		Terciptanya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan	90%	100%	6.055.850.000	100%	8.320.000.000	100%	8.560.000.000	100%	8.950.000.000	100%	9.300.000.000	100%	9.600.000.000	100%	Setda Keu
		Menurunkan selisih neraca barang milik daerah pada penatausahaan asset (Milyar)	243	243	1.798.547.150	120	2.680.000.000	25	2.920.000.000	< 9	3.200.000.000	< 9	3.500.000.000	< 9	3.800.000.000	< 9	SETDA ASSET
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																	
1.20.28	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi Pegawai	30,87%	30,87%	111.175.000	30,87%	1.517.491.000	45%	1.192.491.000	55%	1.562.491.000	75%	1.032.491.000	85%	2.642.491.000	85%	BKD
1.20.29	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin aparatur	90%	90%	677.594.500	90%	2.040.000.000	90%	2.915.000.000	90%	2.545.000.000	100%	2.105.000.000	100%	2.197.000.000	100%	BKD
Penelitian Dan Pengembangan																	
	Pengembangan kapasitas dan kinerja jaringan penelitian dan pengembangan	Terlaksananya diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan di Kab. Tanjung Barat	50%	50%	210.330.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	Litbangda

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
	Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	Terlaksananya difusi dan pemanfaatan hasil Litbang untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kemasyarakatan	50%	50%	227.850.000	100%	590.000.000	100%	900.000.000	100%	650.000.000	100%	850.000.000	100%	675.000.000	100%	Litbangda
	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Terlaksananya difusi dan Pemanfaatan hasil Litbang untuk efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan kebijakan pogram pembangunan bidang ekonomi dan keuangan	50%	50%	183.205.000	100%	865.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.205.000.000	100%	1.100.000.000	100%	Litbangda
	Penelitian dan Pengembangan daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya	Terlaksananya difusi dan Pemanfaatan hasil Litbang untuk efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan kebijakan pogram pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi	50%	50%	340.230.000	100%	1.005.000.000	100%	1.155.000.000	100%	1.445.000.000	100%	1.238.500.000	100%	1.095.000.000	100%	Litbangda
Pengawasan																	
1.20.20	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan hasil	100%	100%	2.652.125.400	100%	3.388.000.000	100%	3.388.000.000	100%	3.388.000.000	100%	3.388.000.000	100%	3.388.000.000	100%	Inspektorat

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.20.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Peningkatan profesionalisme Kode Etik dan Standar Audit	4 orang	4 orang	200.000.000	4 orang	240.000.000	4 orang	240.000.000	4 orang	240.000.000	4 orang	240.000.000	4 orang	240.000.000	20 orang	Inspektorat
Pemerintahan Daerah																	
1.06.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kabupaten (ruas batas)	5	5	367.710.000	5	470.000.000	6	515.000.000	6	565.000.000	6	615.000.000	6	665.000.000	6	Setda Pem Umum
		Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kecamatan (batas)	2	2		2		2		2		2		1		13	Setda Pem Umum
		Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Desa/Kelurahan (batas)	12	12		10		10		10		10		10		62	Setda Pem Umum
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	13.320.985.714	100%	13.320.985.714	100%	14.120.000.000	100%	14.560.000.000	100%	15.200.000.000	100%	15.800.000.000	100%	SETDA Umum
1.20.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset Desa/Kelurahan	134	134	0	134	170.000.000	134	170.000.000	134	180.000.000	134	180.000.000	134	190.000.000	134	SETDA, PEMDES
1.20.01	Program keagamaan dan kemasyarakatan	Peningkatan sistem pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang transparan	90 %	90 %	14.193.306.750	100 %	14.625.819.900	100 %	14.625.819.900	100 %	14.625.819.900	100 %	14.625.819.900	100 %	14.625.819.900	100 %	SETDA AKRK
1.20.22	Program Penataan dan Penyempurnaan	Terciptanya percepatan realisasi	93,5%	100%	1.687.900.000	100%	6.000.000.000	100%	6.500.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.500.000.000	100%	8.000.000.000	100%	SETDA ADP

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



KODE	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	TAHUN 2016 - 2021												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	SKPD PENANGGUNG JAWAB
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	kegiatan pembangunan (LPPK)															
		Peningkatan pelayanan PATEN di Kecamatan (jenis layanan)	34	34	994.850.000	54	1.170.000.000	54	1.277.000.000	54	1.370.000.000	54	1.470.000.000	54	1.480.000.000	54	SETDA PEM UMUM
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	74,5	74,5	608.568.700	74,5	1.650.000.000	74,5	1.750.000.000	75	1.850.000.000	75	1.900.000.000	80	1.900.000.000	85	SETDA ORGANISASI
1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terbit dan terlaksananya sistem penyebar luasan informasi secara transparan	70%	70%	2.329.560.000	90%	8.320.000.000	90%	9.330.000.000	100%	10.340.000.000	100%	11.350.000.000	100%	12.360.000.000	100%	SETDA HUMAS
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas dan penyebar luasan produk hukum serta pendampingan hukum (Perda, PerBup, SK)	839 Dok	839 Dok	611.050.000	839 Dok	1.120.000.000	850 Dok	1.130.000.000	850 Dok	1.150.000.000	850 Dok	1.200.000.000	850 Dok	1.200.000.000	850 Dokumen	SETDA HUKUM
		Terbitnya penyalarsan Perda terhadap peraturan/perundang-undangan di atasnya	70%	70%	1.600.000.000	80%	1.600.000.000	90%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	SEKERTARIAT DPRD
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pembahasan Peraturan Daerah	80%	80%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	8.821.000.000	100%	9.784.000.000	100%	Sekretariat DPRD
???	Program Peningkatan Motivasi anggota KORPRI	Terselenggaranya kegiatan motivasi anggota KORPRI		4 Kegiatan	420.000.000	4 Kegiatan	449.400.000	4 Kegiatan	460.000.000	4 Kegiatan	470.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	480.000.000	4 Kegiatan	Sekretariat KORPRI
????	Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI	Tersedianya Modal Usaha Anggota KORPRI				4500 anggota	2.000.0000	4500 anggota	2.100.000.000	4500 anggota	2.205.000.000	4500 anggota	2.315.350.000	4500 anggota	2.431.117.500	4500 anggota	Sekretariat KORPRI
		Terlaksananya pertumbuhan Modal Usaha Anggota KORPRI				15%	150.000.000	15%	150.000.000	15%	150.000.000	15%	150.000.000	15%	150.000.000	15%	Sekretariat KORPRI



Tabel VIII. C-2 Perbandingan Prakiraan Kebutuhan Anggaran Belanja terhadap Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017-2021 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	Juta Rupiah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.371.112,83	1.534.275,26	1.721.456,84	1.949.917,49	2.188.782,38
2	Belanja Tak Langsung	635.832,00	792.848,00	879.098,00	779.618,00	869.623,00
3	Belanja Langsung	942.472,70	1.175.212,32	1.303.057,83	1.155.601,93	1.289.013,36
	Total Belanja	1.578.304,70	1.968.060,32	2.182.155,83	1.935.219,93	2.158.636,36
	Dikurangi :	-207.191,87	-433.785,06	-460.698,99	14.697,56	30.146,02



Dari tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal antara lain :

1. Kebutuhan Belanja Tak Langsung dihitung berdasar pagu indikatif pada 116 program pembangunan.
2. Kekurangan anggaran diproyeksikan akan berlangsung sampai dengan tahun 2019.
3. Belanja langsung dihitung berdasarkan rata – rata proporsi belanja langsung terhadap belanja tak langsung tahun 2011 sampai dengan 2016 dengan perhitungan linear tetap (*flat*) yaitu 1,482.



BAB IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja pembangunan dipakai untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat bila terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah merupakan syarat utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Penetapan indikator kinerja pembangunan daerah akan menjadi acuan penting dalam lima tahun mendatang.

Indikator kinerja pembangunan daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator kinerja program adalah gambaran berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama memperlihatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi deskripsi tentang prestasi organisasi di masa mendatang.



Indikator kinerja pembangunan daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi syarat, antara lain : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk memenuhi visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Indikator kinerja pembangunan daerah tersebut di kategorikan atas 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penetapan indikator kinerja utama yang terkandung dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dimuat pada tabel berikut ini:

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



Tabel T-IX C-1
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan Proyeksi Capaian
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi										
1. Seluruh Urusan Pemerintah Daerah										
1.1	Pertumbuhan PDRB dengan Migas	%	6,51	6,75	6,90	7,10	7,25	7,40	7,50	7,50
1.2	Laju Inflasi	%	3,50	4,50	4,75	5,00	5,10	5,00	4,75	4,75
1.3	PDRB Perkapita ADHK dengan Migas	Rp.Juta	100,20	106,96	114,34	122,46	131,34	141,06	151,64	151,64
1.4	Indeks Gini	%	0,332	0,325	0,320	0,315	0,310	0,305	0,30	0,30
1.5	Angka kemiskinan	%	11,61	11,10	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	7,00
Fokus Kesejahteraan Sosial										
1. Pendidikan										
1.1	Angka Melek Huruf	%	98,3	98,41	98,46	98,50	98,60	98,70	98,70	98,70
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,58	8,65	8,73	8,80	8,87	8,95	8,95	8,95
1.3	APK SD/MI/SDLB	%	117.63%	117.64%	117.66%	117.67%	117.69%	117.70%	117.71%	117.71%
1.4	APK SMP/MTs	%	98.90%	98.92%	98.94%	98.96%	98.98%	99.00%	99.02%	99.02%
1.5	APK SMA/SMK/ MA	%	69.94%	71.44%	73.19%	75.19%	77.44%	79.94%	82.44%	82.44%
1.6	APM SD/SDLB/ MI	%	99.01%	99.02%	99.03%	99.04%	99.05%	99,06	99.07%	99.07%
1.7	APM SMP	%	72.94%	73.10%	73.25%	73.41%	73.56%	73.72%	73.88%	73.88%
1.8	APM SMA	%	51.95%	53.45%	55.20%	57.20%	59.45%	61.95%	64.45%	64.45%
2. Kesehatan										
2.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,25	72,35	72,50	72,65	72,80	72,90	73,00	73,00
2.2	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	Per 1000 kelahiran	4,4	6,5	6,3	6,0	5,7	5,4	5,0	5,0

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		hidup								
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	Per 1000 kelahiran hidup	4,4	7,0	6,5	6,2	6,0	5,8	5,5	5,5
2.4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 1000 kelahiran hidup	45,9	90	88	84	81	78	75	75
2.5	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	Per 1000 Kelahiran Hidup	4,3	6,0	5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,8
2.6	Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita	%	19,6	18,5	17,5	17	16,5	16,5	16,5	16,5
2.7	Prevalensi Stunting Pada Baduta	%	32,9	31,8	30,7	29,6	28,5	27,5	27,5	27,5
2.8	Prevalensi Obesitas Pada Balita	%	4,8	4,6	4,4	4,3	4,0	3,8	3,8	3,8
2.9	Prevalensi Merokok Pada Usia 15 – 19 Tahun	%	NA	42	40	36	33	28	25	25
2.10	Desa dengan Imunisasi Dasar Lengkap (UCI)	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.11	Rasio Desa Siaga Aktif	%	8,7 %	25 %	60 %	70 %	80 %	80 %	100 %	100 %
2.12	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	%	10 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	55 %	55 %
2.14	Persentase kunjungan Pelayanan kesehatan ke Puskesmas terhadap jumlah penduduk	%	30 %	35 %	40 %	45 %	45 %	50 %	50 %	50 %
2.15	Angka Bebas Jentik di Kecamatan Endemik Demam Berdarah	%	54,8	56	60	90	90	90	90	90
2.16	Penemuan Penderita Baru TB Paru Positif Secimen	%	36	65	70	80	80	80	80	80
2.17	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru	%	42	70	85	85	85	85	85	85
2.18	Keteraturan Berobat Penderita HIV (+)/AIDS	%	35	50	100	100	100	100	100	100
2.19	Penanggulangan KLB Potensial Penyakit Wabah dan Keracunan Makanan/Minuman < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.20	Kecukupan penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standard WHO	%	50	60	60	60	70	70	75	75

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
*) Berdasarkan target MDG's dan menunggu hasil riset kesehatan dasar 2014										
3. Ketenagakerjaan										
3.1	Rasio Penduduk yang bekerja	%	99,00	99,10	99,30	99,40	99,55	99,70	99,90	99,90
Fokus Seni dan Budaya dan Olah Raga										
1. Seni Budaya										
1.1	Jumlah Grup Kesenian dan budaya daerah	Grup	27	27	28	29	30	31	32	32
1.2	Gedung Kesenian dan budaya	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
1.3	Event seni dan budaya	Event	5	5	6	7	8	9	10	10
2 Pemuda dan Olahraga										
2.1	Persentase Kelompok Pemuda Terlibat Gerakan Penanggulangan Masalah Sosial	%	25	30	40	45	50	55	60	60
2.2	Persentase Kelompok Pemuda Terlibat Gerakan Penanggulangan Masalah Kesehatan	%	20	30	40	45	50	55	60	60
2.3	Persentase OSIS Aktiv Gerakan Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan di Sekolah	%	30	40	45	50	55	60	70	70
2.4	Persentase Kelompok Pemuda Terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	%	20	25	25	30	35	35	40	40
2.5	Persentase Pemanduan Minat dan Bakat Olah Raga per Cabang Olah Raga	%	40	40	45	60	70	85	85	85
ASPEK PELAYANAN UMUM										
Fokus Pelayanan Urusan Wajib										
1 Pendidikan										
1.1	APK SD	%	117,85	118,00	118,50	118,75	119,00	119,50	120,00	120,00
1.2	SD/MI	%	15,52	15,45	15,35	15,30	15,20	15,10	15,00	15,00
1.3	SMP/MTs	%	12,20	12,50	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,00
1.4	Angka Partisipasi Sekolah									
	a. SD/MI	%	99,15	99,25	99,30	99,35	99,40	99,45	99,50	99,50

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	b. SMP/MTs	%	86,90	87,00	87,50	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00
	c. SMA/SMK/MA	%	51,50	52,50	54,00	56,50	57,50	58,50	60,00	60,00
1.5	Persentase SD Berakreditasi minimal B	%	19,18%	27,35%	35,31%	43,67%	51,84%	60%	60%	60%
1.6	Persentase SMP Berakreditasi minimal B	%	24,17%	33,33%	42,50%	51,67%	60,83%	70%	70%	70%
2	Kesehatan									
2.1	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	/100.000	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1	121,1
2.2	Rasio Perawat per 1.000 penduduk	/100.000	131,5	131,5	145	150	150	158	158	158
2.3	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	/100.000	17,5	22,00	23	23,50	26	27	28	28
2.4	Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk	/100.000	5,5	5,5	6,00	6,50	7,00	9	9	9
2.5	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	/30.000	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
2.6	Rasio Apoteker per 100.000 penduduk	/100.000	3,4	5	5	6	8	9	9	9
2.7	Rasio Puskesmas Perawatan/ 30. 000 Penduduk	/30.000	0,49	0,49	0,49	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
2.8	Rasio Dokter Spesialist Per 100.000 Penduduk	/100.000	1,6	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,3	3,3
2.9	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk	/100.000	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
2.10	Fasyankes Memenuhi SPM Pelayanan Kesehatan	%	55	58	59	60	63	70	85	85
2.11	Penduduk Miskin mendapat Jaminan Kesehatan Dasar	Jiwa	11.000	13.000	14.500	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000
2.6	Persentase Persalinan Fasyankes	%	50,4	55	60	65	75	80	87	87
3.	Sosial									
3.1	Persentase PMKS dan Orang Terlantar yang ditangani	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
3.2	Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Trantibum dan Perlindungan Masyarakat									
4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB Kemenag)	%	85	85	85	85	85	85	85	85
4.2	Deteksi dini dan penanganan konflik kurang dari 24 Jam	%	80	80	100	100	100	100	100	100

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4.3	Reaksi cepat penanganan gangguan keamanan lingkungan dalam waktu : kurang 15 menit (perkotaan) dan kurang 60 menit (luar kota)	%	0	0	80	100	100	100	100	100
5 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang										
5.1	Rasio Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	41%	45%	52%	55%	58%	59%	62%	62%
5.2	Persentase Jembatan Beton di Ruas jalan strategis	%	60%	60%	70%	75%	90%	100%	100%	100%
5.3	Pembangunan Jalan Baru konektifitas (Km)	Km	0	0	5	5	5	5	5	25
5.4	Tersedianya Dokumen Revisi RTRW yang ditetapkan dengan Perda	Ada/tidak				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
6.1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	62%	62%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
6.2	Jumlah Kawasan Perumahan Tertata dengan fasilitas umum yang memadai	%	10%	105	50%	80%	90%	95%	95%	95%
6.3	Persentase Lingkungan Layak Huni	%		62%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
6.4	Ketersediaan Kawasan Hunian Layak Huni	%		62%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
11 Ketenagakerjaan										
11.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	66,83	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	70,00	70,00
11.2	Angka kesempatan kerja	orang	202.189	205.000	205.500	206.000	206.500	207.000	207.500	207.500
11.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,34	1,34	1,34	1,33	1,33	1,32	1,32	1,32
12 Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan anak										
12.1	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	63,40	63,00	62,50	62,00	61,50	61,00	60,00	60,00
12.2	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga DPRD	%	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	20,00	20,00	20,00
12.3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan	%	86,00	86,00	87,00	89,00	92,00	96,00	100,00	100,00

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	dan anak dari tindakan kekerasan									
12.4	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Non Pemerintahan	%	6,97	12,3	18,5	24,6	27,5	30	30	30
12.5	Indeks Pembangunan Gender	%	63,99	63,99	63,99	64	64	64	64	64
12	Ketahanan Pangan									
12.1	Regulasi Ketahanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan									
	a. Lumbung Pangan	Kelompok	6	6	7	7	8	8	9	9
	b. Desa Mandiri Pangan	Desa	2	2	2	3	4	4	5	5
12.3	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan									
	a. Konsumsi beras	kg/kap/bln	83	82,2	81,4	80,6	79,8	79	78,2	78,2
	b. Konsumsi energi	Kkal/kap/hn	1.828	1.850	1.875	1.900	1.915	1.925	1.935	1.935
	c. Konsumsi protein	Gr/kap/hr	72,55	72,75	72,85	73,00	73,15	73,25	73,30	73,30
	d. Skor Diversifikasi (PPH)	Sekor PPH	72	75	77	79	82	84	85	85
12.4	Aspek Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan									
	a. Distribusi Pangan Oleh Masyarakat (LDPM)	LDPM	7	7	9	11	13	15	17	17
	b. Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	PUMP	1	1	3	5	7	9	10	10
13	Lingkungan Hidup									
13.1	Penurunan titik api (hotspot)	Titik api	55	53	50	45	40	37	35	35
13.2	Persentase Kegiatan Usaha Taat Administrasi Pengelolaan Lingkungan	%	80	85	90	95	100	100	100	100
13.4	Pengelolaan sampah domestik	Kubik	18.000	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	28.000
14	Kependudukan dan Catatan Sipil									
14.1	Rasio Penduduk ber-KTP terhadap Wajib KTP	%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.2	Pasangan berakate nikah	Pasangan	1.507	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
14.3	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	%	24,51	25,00	25,50	26,00	26,50	27,00	27,50	27,50
14.4	Ketersediaan database kependudukan	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
14.5	Pertumbuhan penduduk	%	1,09 %	1,09 %	1,08 %	1,07%	1,06%	1,05 %	1,04 %	1,04 %
15	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
15.1	Persentase Aparatur Desa Mendapatkan Bintek Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	%	60	60	100	100	100	100	100	100
15.2	Persentase Desa Terisolir dan Tertinggal	%	23	23	23	18	16	10	8	5
15.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	1	1	15	29	43	57	57	57
15.4	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
	a. Akseptor KB	Orang	39.479	39.479	41.179	42.879	44.579	46.279	47.979	47.979
	b. Persentase Akseptor KB Aktif	%	75,95	75,91	76,8	77,69	78,58	79,97	80,36	80,36
16	Perhubungan									
16.1	Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	2	2	3	3	3	3	3	3
16.2	Jumlah Kendaraan lulus uji kelayakan	Unit	1.000	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.400
16.3	Pemasangan rambu-rambu									
	a. Rambu Darat	Unit	256			17	18	18	24	343
	b. Rambu Laut/Sungai	Unit	70			10	10	20	10	120
16.4	Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Mantap	Unit	2	3	2	2	2	2	2	15
17	Komunikasi dan Informatika									
17.1	Jumlah surat kabar nasional	Koran Harian	0	0	0	0	0	1	1	1
17.2	Jumlah surat kabar lokal	Koran Harian	2	2	2	2	2	2	2	2
18.3	Jumlah penyiaran radio lokal	Stasiun Radio	2	2	2	2	2	3	3	3
18.4	Jumlah penyiaran tv lokal	Stasiun Tv	1	1	1	1	1	1	1	1
18.5	Web site milik pemerintah daerah	Web	1	1	1	1	1	1	1	1
18.6	Persentase SKPD dengan Kewenangan Pengolahan Web Site Mandiri Terintegrasi	%	4	4	20	30	50	80	80	80
19	Koperasi dan UMKM									
19.1	Persentase Koperasi Aktif	%	33	41	55	69	77	80	82	82

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
19.2	Jumlah UKM Berkelanjutan	Usaha Mikro	9	24	25	25	25	25	20	120
19.3	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja UMKM	UMKM/ Tenaga Kerja	0,85	0,85	0,85	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5
20	Penanaman Modal									
20.1	Jumlah Investor PMA/PMDN	Perusahaan	33	33	33	35	36	36	37	37
20.2	Nilai Investasi	Triliun	16,8	17,05	17,48	17,92	18,36	18,82	19,29	19,29
20.1	PMA/PMDN Peran Serta TJLS	Perusahaan	33	33	33	35	36	36	37	37
21	Kepemudaan dan Olah Raga									
21.1	Jumlah Klub Olahraga	Group	88	90	91	92	93	94	95	95
21.2	Jumlah Sarana Olahraga (GOR)	Unit	44	44	45	46	47	48	49	49
21.3	Jumlah Karang Taruna	Kelompok	13	13	13	13	13	13	13	13
21.4	Persentase Kelompok Pemuda Yang dibina	%	70	75	80	80	85	90	90	90
22	Statistik									
22.1	Buku "Tanjung Jabung Barat dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.2	Buku " PDRB Kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.3	Buku " IPM Kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.4	Buku Susenas	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.5	Buku Suseda	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.6	Buku IKHK	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.7	Buku Indeks Gini Rasio	Ada/Tidak	Ada			Ada		Ada		Ada
23	Kebudayaan									
23.1	Jumlah Tempat Pagelaran Seni Budaya	Lokasi	1	1	2	3	3	3	3	3
23.2	Penggalan Nilai Benda/Situs/Sejarah/Seni dan Sosial Budaya Daerah	%	10	10	20	30	60	60	60	60
24	Perpustakaan									
24.1	Jumlah perpustakaan	Unit	70	70	70	71	71	72	72	72
24.2	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Pengunjung	105.000	125.000	125.000	137.500	150.000	162.500	175.000	175.000

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
24.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	13.262	13.300	13.500	15.000	15.500	17.000	17.500	17.500
25	Kearsipan									
25.1	Jumlah Arsip Daerah yang dilestarikan	Dokumen	2.741	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Fokus Layanan Urusan Pilihan										
1	Energi dan Sumber Daya Mineral									
1.1	Jumlah PLTS	Unit	12	12	14	16	18	20	20	20
1.2	Rasio elektrifikasi (RE)	%	50,96	55,25	60	65	70	75	80	80
2	Perikanan dan Kelautan									
2.1	Produksi Perikanan budidaya (TON)	Ton	1828	0	2102	2417	2779	3195	3674	3674
2.2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20,718	0	22,790	25,069	27,576	30,333	33,366	33,366
2.3	Meningkatnya Teknologi Pengolahan Produksi Perikanan	Unit	50	0	10	10	10	10	10	100
2.4	Produksi Benih Ikan	Ekor	476.000	476.000	550.000	630.000	680.000	710.000	750.000	4.272.000
2.5	Pelestarian sumber daya perikanan	%	30		70	70	70	70	70	70
3	Pariwisata									
3.1	Pengembangan Destiny Wisata	%	30	30	30	60	70	70	75	76
3.2	Pengembangan Potensi Wisata Religi/Edukasi/ Sosial dan Budaya	%	30	30	30	60	70	70	75	76
4	Pertanian									
4.1	Produksi Padi	Ton	Ton	50.056	63.791	70.170	77.187	84.906	93.396	102.736
4.2	Produksi Jagung	Ton	4.046	5.964	6.560	7.216	7.938	8.732	9.605	9.605
4.3	Produksi Petai	Ton	529	582	5.011	704	775	852	937	937
4.4	Produksi Kacang tanah	Ton	12	59	65	71	79	86	95	95
4.5	Produksi Kacang hijau	Ton	8	40	44	48	53	59	64	64
4.6	Produksi Ubi kayu	Ton	2.384	4.706	5.177	5.694	6.264	6.890	7.579	7.579

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4.7	Produksi Ubi jalar	Ton	225	497	547	601	662	728	800	800
4.8	Produksi Cabai merah	Ton	103	113	125	137	151	166	182	182
4.9	Produksi Cabai rawit	Ton	102	112	123	136	194	164	181	181
4.10	Produksi Jeruk siam	Ton	1.940	2.134	2.347	2.582	2.840	3.124	3.437	3.437
4.11	Produksi Bayam	Ton	216	238	261	287	316	348	383	383
4.12	Produksi Nangka/Cempedak	Ton	4.141	4.555	5.011	5.512	6.063	6.669	7.336	7.336
4.13	Produksi Pepaya	Ton	222	244	269	295	325	358	393	393
4.14	Produksi Semangka	Ton	37	41	45	49	54	60	66	66
4.15	Produksi Kelapa Sawit	Ton	131234	133858	136535	139267	142051	144893	147790	147790
4.16	Produksi Karet	Ton	14806	14367	14655	14948	15247	15552	15863	15863
4.17	Produksi Kelapa Dalam	Ton	54730	55824	56941	58080	59241	60426	61635	61635
4.18	Produksi Kopi	Ton	1214	1238	1263	1288	1314	1340	1367	1367
4.19	Produksi Pinang	Ton	10989	11208	11432	11662	11895	12133	12375	12375
4.20	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	7.193	7.336	7.482	7.631	7.783	7.938	8.096	8.096
4.21	Jumlah Populasi Ternak Kerbau	Ekor	607	613	619	625	632	639	646	646
4.22	Jumlah Populasi Ternak Kambing	Ekor	40.195	40.235	40.275	40.315	40.355	40.395	40.435	40.435
4.23	Jumlah Populasi Ternak Domba	Ekor	634	640	646	652	658	664	670	670
4.24	Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	996.912	1.046.758	1.099.095	1.154.050	1.211.753	1.272.340	1.335.957	1.335.957
4.25	Luas Lahan Tanaman Padi	Ha	11.169	17.287	18.151	19.059	20.012	21.012	22.063	117.585
4.26	Luas Lahan Tanaman Jagung	Ha	1.254	2.069	2.172	2.281	2.395	2.515	2.641	14.073
4.27	Luas Lahan Tanaman Petai	Ha	12	14	14	15	16	17	18	94
4.28	Luas Lahan Tanaman Kacang tanah	Ha	9	47	49	52	54	57	60	320
4.29	Luas Lahan Tanaman Kacang hijau	Ha	35	35	37	39	41	43	45	238
4.30	Luas Lahan Tanaman Ubi kayu	Ha	147	334	351	368	387	406	426	2.272
4.31	Luas Lahan Tanaman Ubi jalar	Ha	27	64	67	71	74	78	82	435
4.32	Luas Lahan Tanaman Cabai merah	Ha	65	81	85	90	94	99	104	553
4.33	Luas Lahan Tanaman Cabai rawit	Ha	58	73	76	80	84	88	93	493
4.34	Luas Lahan Tanaman Jeruk siam	Ha	56	70	80	85	87	89	91	502
4.35	Luas Lahan Tanaman Bayam	Ha	36	43	45	48	50	53	55	294
4.36	Luas Lahan Tanaman Nangka/Cempedak	Ha	76	77	78	79	80	81	82	477
4.37	Luas Lahan Tanaman Pepaya	Ha	5	6	7	8	9	10	11	51

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
4.38	Luas Lahan Tanaman Semangka	Ha	25	29	35	45	57	62	82	310
4.39	Luas Lahan Tanaman Produksi Kelapa Sawit	Ha	61.960	62.889	55.183	55.458	55.736	56.014	56.294	56.294
4.40	Luas Lahan Tanaman Produksi Karet	Ha	14.806	14.806	15.006	15.206	15.406	15.606	15.806	15.806
4.41	Luas Lahan Tanaman Produksi Kelapa Dalam	Ha	54.908	54.908	55.183	55.458	55.736	56.014	56.294	56.294
4.42	Luas Lahan Tanaman Produksi Kopi	Ha	3.028	3.073	3.119	3.166	3.213	3.262	3.310	3.310
4.43	Luas Lahan Tanaman Produksi Pinang	Ha	9.882	10.030	10.484	10.798	11.122	11.456	11.800	11.800
4.44	Produksi Daging Sapi	Kg	336.156	342.879	349.737	356.732	363.867	371.144	378.567	378.567
4.45	Produksi Daging Kerbau	Kg	12.345	12.952	12.844	13.101	13.363	13.630	13.903	13.903
4.46	Produksi Daging Kambing	Kg	53.695	54.769	55.864	56.981	58.121	59.283	60.469	60.469
4.47	Produksi Daging Domba	Kg	540	551	562	573	584	596	608	608
4.48	Produksi Daging Unggas	Kg	2.219.127	2.286.241	2.331.966	2.378.606	2.426.179	2.475.444	2.524.952	2.524.952
4.49	Kelahiran sapi IB	Ekor	1.041	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
5	Kehutanan									
6.	ESDM									
6.1	Rumah tangga yang menggunakan listrik	RT	32.965	33.000	33.200	33.400	33.650	33.900	34.000	34.000
7.	Industri dan Perdagangan									
7.1	Jaminan hak konsumen terhadap mutu barang dan jasa pelayanan	%	40	40	60	65	80	80	80	80
7.2	Jaminan pengawasan distribusi dan harga sembako, dan Barang bersubsidi	%	85	85	85	85	85	85	85	85
7.3	Pengelolaan Data arus Ekspor dan Impor	%	75	75	80	90	90	90	90	90
7.4	Permintaan Pasar terhadap produk IKM	%	50	50	60	75	80	80	80	80
8.	Transmigrasi									
8.1	Aksesibilitas Lokasi Eks Transmigrasi	%	40	45	60	70	85	85	85	85
Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Perencanaan									
1.1	Kelengkapan Dokumen Laporan dan Perencanaan sesuai Peraturan perundang-undangan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Evaluasi/Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Perundang-Undangan	Dokumen	0	0	0	2	1	0	0	3
1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu	%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Keuangan									
2.1	Akreditasi Opini BPK	LHP	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.1	Peningkatan Persentase Pendapatan Asli Daerah	%	6	6	6	7	7,5	8	8	8
3.	Kepegawaian dan Diklat									
3.1	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	30,87	30,87	45	55	75	85	85	85
3.2	Rasio lulusan S1 dan S2	%	45,1	45,1	45,1	45,5	46,8	46,8	47	47
3.3	Rasio lulusan Diploma/DIII	%	28,3	28,3	28,3	28,4	28,5	28,5	28,4	28,4
3.4	Rasio lulusan SLTA	%	25,4	25,4	25,4	24,9	23,5	23,5	23,4	23,4
4.	Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Persentase Hasil Penelitian Ditindak Lanjuti	%	40	45	60	70	85	85	85	85
5.	Pengawasan									
5.1	Persentase ketaatan SKPD dalam penyelesaian tindak lanjut temuan Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan ekstern pemerintah (BPK-RI)	%	78	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Auditor Profesionalisme sesuai Kode Etik dan Standar Audit	orang	4			4	4	4	4	20

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah										
1.	Persentase Penduduk Golongan Pengeluaran Perkapita > 1.000.000	%	12,64	12,66	12,68	12,7	12,73	12,75	12,85	12,85
2.	Rata-rata pengeluaran perkapita se bulan kelompok pengeluaran 100.000 – 149.999	Rp	141.508	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000	300.000
3.	Nilai Tukar Petani	NTP	98,6	98,6	99	100	101	102	104	104
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur										
1 Perhubungan										
1.1	Persentase pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan		10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,00
1.2	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi sungai dan laut		40,00	42,50	44,00	45,50	56,00	47,00	47,50	47,50
2. Penataan Ruang										
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Ya/ tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.2	Luas Kawasan Konservasi	Ha	611	611	611	611	615	620	620	620
2.3	Luas Kawasan Lindung	Ha	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
2.4	Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap	Ha	34.355	34.350	34.350	34.400	34.450	34.450	34.500	34.500
2.5	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Ha	179.726	179.720	179.730	179.740	179.750	179.765	179.775	179.775
2.6	Luas Kawasan Lahan Basah	Ha	18788	18788	18788	18788	18788	18788	18788	18788
2.7	Luas Kawasan Lahan Kering	Ha	291.510	291.510	291.520	291.525	291.535	291.550	291.565	291.565
2.8	Luas Kawasan Perkebunan	Ha	171.683	171.683	171.683	171.683	171.683	171.683	171.683	171.683
2.9	Luas Kawasan Pemukiman	Ha	2.951,77	2.951,77	2.951,77	2.951,77	2.951,77	2.951,77	2.951,77	2.951,77
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
3.1	Jenis dan jumlah bank/cabang									
	- Bank Perkreditan Rakyat	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
	- Bank Pemerintah	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5
	- Bank Swasta	Unit	4	4	4	4	4	4	5	5

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
3.2	Jumlah rumah makan dan restoran	unit	29	29	30	32	33	35	35	35
3.3	Jumlah penginapan/hotel	unit	13	13	13	13	14	14	15	15
4	Lingkungan Hidup									
4.1	Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	RT	2.538	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800	2.800
4.2	Persentase Rumah tangga dengan jamban sehat	RT	30	0	40	60	70	80	85	85
5	Komunikasi dan informatika									
5.1	Telepon tetap rumah tangga (RT)	RT	2,10	2,10	2,05	2,00	2,00	1,95	1,85	1,85
5.2	Internet (Usia 5 th keatas)	%	10,80	11,00	13,50	16,50	20,00	25,00	30,00	30,00
Fokus Iklim Berinvestasi										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,5	74,5	74,5	74,5	75	75	80	85
2	Jumlah Demo	kasus	14	7	6	5	3	2	2	2
3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah									
	a. Pajak Daerah	Objek Pajak	10	10	10	10	10	11	11	11
	b. Retribusi Daerah	Objek Retribusi	3	3	3	3	3	3	3	3
Fokus Sumber Daya Manusia										
1	Ketenagakerjaan									
1.1	Lulusan SMK/ sederajat yang bekerja di DU/DI	%	25	25	30	35	40	50	58	58
1.2	Indeks Demokrasi masyarakat		86	86	86	86	86	86	86	86
1.3	Lulusan SMU/MA sederajat yang diterima di PTN	%	10%	11%	12%	13%	14%	16%	20%	20%



BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana pembangunan daerah yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun 2016 - 2021. Untuk pelaksanaan RPJMD ini diperlukan pemahaman bersama oleh seluruh pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah. RPJMD juga akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi RPJMD beserta implementasi tahunannya, agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta juga wajib serius melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD ini.



10.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022, maka diperlukan adanya pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022. Mengingat keterbatasan waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 maka, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Kondisi ini diselaraskan dengan waktu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah yang belum terselesaikan sampai dengan tahun 2021 dan masalah pembangunan daerah yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis setiap SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :



1. Seluruh pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menyusun Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021.
3. Untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, maka dilakukan pentahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan penjabaran RPJMD, diawali dengan menyusun dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana kerja (renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD.
 - b. Tahapan partisipatif dilakukan untuk mendapatkan masukan untuk Penyempurnaan Rencana Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - c. Tahapan Penyusunan Akhir RKPD dilakukan setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan berpedoman pada hasil forum SKPD.
4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJMD pada tahun ke 3 (tiga) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan guna menganalisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

10.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sub urusan manajemen pendidikan dan sub urusan kurikulum, pengelolaan dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan daerah provinsi. Demikian pula urusan pemerintahan bidang kehutanan sub urusan pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta urusan pemerintahan bidang ESDM juga merupakan kewenangan daerah provinsi, kecuali pengelolaan Tahura Kabupaten. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pasal 4 ayat (6) huruf a dan b yang menyebutkan bahwa Perda Kabupaten/Kota memuat materi untuk mengatur kewenangan Kabupaten/ Kota dan kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota ;

Dalam upaya efisiensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan terhadap program prioritas, namun pemerintah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan maupun kewenangannya, seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar



masyarakat maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Sinergisitas Program Pembangunan Nasional bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jambi bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi, serta kerjasama kemitraan Regional Perbatasan serta dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional yang berpotensi menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah serta menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.



BAB XI

Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta bagian integral dari pembangunan Provinsi Jambi selama lima tahun mendatang dan sekaligus merupakan pendorong bagi upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diwujudkan melalui dukungan seluruh SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kerjasama yang baik dengan mengedepankan sinergi dan harmonisasi antar SKPD disertai dukungan DPRD dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, kerjasama antar perbatasan, kerjasama dengan perguruan tinggi, pelaku dunia usaha, dan masyarakat Tanjung Jabung Barat secara umum melalui kemitraan yang positif.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

SAFRIAL